WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 - 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,


b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi 3 (tiga) tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2012 terdapat beberapa indikator kinerja daerah yang tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu disesuaikan termasuk menyiapkan rancangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat
   DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
   dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada
   pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau
   tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
   perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara
   lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI POLRI,
   Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat
   provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor,
   pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
   pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan
   kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang
   dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
   nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
   lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
   berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
   manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
   penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
   berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
   pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
   dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
   suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
   tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang
    selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana
    Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
    selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
    perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.


14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.


18. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**BAB II**

**KEDUDUKAN RPJMK**

**Pasal 2**

RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan:

a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK; dan


**BAB III**

**TUJUAN**

**Pasal 3**

Tujuan penetapan RPJMK adalah untuk:

a. pedoman penyusunan Renstra-SKPD, RKPK, Renja-SKPD dan perencanaan penganggaran;

b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
c. pencapaian visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, memuat kerangka makro dan pilihan program prioritas Kota; dan
e. menjadi pedoman sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD;

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMK sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saining Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
3.4.

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP
BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMK
Pasal 5

Isi dan uraian RPJMK beserta matriknya sebagaima tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tic terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evalu pelaksanaan RPJMK.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaima dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peratur perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dari Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

S.WALIKOTA BANDA ACEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR....... NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/154/2016)
PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

I. UMUM


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasidan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :
1. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2013
2. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2014
5. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2017


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR ........
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDA ACEH
2012-2017
<table>
<thead>
<tr>
<th>SINGKATAN DAN AKRONIM</th>
<th>arti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADG</td>
<td>Alokasi Dana Gampong</td>
</tr>
<tr>
<td>AHH</td>
<td>Angka Harapan Hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>AHH</td>
<td>Angka Harapan Hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>AKAP</td>
<td>Antar Kota dan Antar Provinsi</td>
</tr>
<tr>
<td>AKB</td>
<td>Angka Kematian Bayi</td>
</tr>
<tr>
<td>AKDP</td>
<td>Angkutan Kota Dalam Propinsi</td>
</tr>
<tr>
<td>Akseptor KB</td>
<td>Partisipasi KB</td>
</tr>
<tr>
<td>AMH</td>
<td>Anti-Mullerian Hormon</td>
</tr>
<tr>
<td>APBD</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>APBK</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota</td>
</tr>
<tr>
<td>APBK-P</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota-perubahan</td>
</tr>
<tr>
<td>APK</td>
<td>Angka Partisipasi Kasar</td>
</tr>
<tr>
<td>APM</td>
<td>Angka Partisipasi Murni</td>
</tr>
<tr>
<td>APS</td>
<td>Angka Partisipasi Sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td>APT</td>
<td>Angka Pendidikan yang ditamatkan</td>
</tr>
<tr>
<td>BAPERJAKAT</td>
<td>Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan</td>
</tr>
<tr>
<td>BASAJAN</td>
<td>Banda Aceh, Sabang dan Jantho</td>
</tr>
<tr>
<td>BBM</td>
<td>Bahan Bakar Minyak</td>
</tr>
<tr>
<td>BGR</td>
<td>Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe</td>
</tr>
<tr>
<td>BLK</td>
<td>Balai Latihan Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>BLUD</td>
<td>Badan Layanan Umum Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>BMEC</td>
<td>Banda Aceh Madani Education Center</td>
</tr>
<tr>
<td>BOD</td>
<td>Biochemical oxygen Demand</td>
</tr>
<tr>
<td>BPBD</td>
<td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>BPJS</td>
<td>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</td>
</tr>
<tr>
<td>BPK</td>
<td>Badan Pemeriksa Keuangan</td>
</tr>
<tr>
<td>BPKP</td>
<td>Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>BPR</td>
<td>Bank Perkreditan Rakyat</td>
</tr>
<tr>
<td>BPR</td>
<td>Bank Perkreditan Rakyat</td>
</tr>
<tr>
<td>BRR</td>
<td>Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</td>
</tr>
<tr>
<td>BTS</td>
<td>Base Transceiver Station</td>
</tr>
<tr>
<td>CBR</td>
<td>Angka Kelahiran Kasar</td>
</tr>
<tr>
<td>CDR</td>
<td>Angka Kematian Kasar</td>
</tr>
<tr>
<td>DAK</td>
<td>Dana Alokasi Khusus</td>
</tr>
<tr>
<td>DAS</td>
<td>Daerah Aliran Sungai</td>
</tr>
<tr>
<td>DAU</td>
<td>Dana Alokasi Umum</td>
</tr>
<tr>
<td>DBD</td>
<td>Demam Berdarah Dengue</td>
</tr>
<tr>
<td>DBK</td>
<td>Daerah Bermasalah Kesehatan</td>
</tr>
<tr>
<td>DGTL</td>
<td>Direktorat Geologi Tata Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>DO</td>
<td>Dissolved oxygen</td>
</tr>
<tr>
<td>DPR</td>
<td>Dewan Perwakilan Rakyat</td>
</tr>
<tr>
<td>DPRK</td>
<td>Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh</td>
</tr>
<tr>
<td>EC</td>
<td>Electrical Conductivity</td>
</tr>
<tr>
<td>SINGKATAN DAN AKRONIM</td>
<td>arti</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstensifikasi</td>
<td>: Mengupayakan Sumber Pendapatan Baru</td>
</tr>
<tr>
<td>Fertilitas</td>
<td>: Angka Kelahiran</td>
</tr>
<tr>
<td>GK</td>
<td>: Garis Kemiskinan</td>
</tr>
<tr>
<td>GKM</td>
<td>: Garis Kemiskinan Makanan</td>
</tr>
<tr>
<td>GKNM</td>
<td>: Garis Kemiskinan Non Makanan</td>
</tr>
<tr>
<td>HGB</td>
<td>: Hak Guna Bangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>HLP</td>
<td>: High Level Panel</td>
</tr>
<tr>
<td>HPL</td>
<td>: Hak Pengelolaan Lahan</td>
</tr>
<tr>
<td>IKM</td>
<td>: Industri Kecil Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>IMB</td>
<td>: Izin Mendirikan Bangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>IMR</td>
<td>: Angka Kematian Bayi</td>
</tr>
<tr>
<td>Intensifikasi</td>
<td>: Penerimaannya ditingkatkan</td>
</tr>
<tr>
<td>IPG</td>
<td>: Indek Pembangunan Gender</td>
</tr>
<tr>
<td>IPLT</td>
<td>: Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja</td>
</tr>
<tr>
<td>IPM</td>
<td>: Indeks Pembangunan Manusia</td>
</tr>
<tr>
<td>ISO</td>
<td>: International Organization for Standardization</td>
</tr>
<tr>
<td>IT</td>
<td>: Information Technology</td>
</tr>
<tr>
<td>ITF</td>
<td>: Intermediate Treatment Facility</td>
</tr>
<tr>
<td>JCI</td>
<td>: Joint Community Internacional</td>
</tr>
<tr>
<td>JFP2UPD</td>
<td>: Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>JICA</td>
<td>: Japan International Cooperation Agency</td>
</tr>
<tr>
<td>K3</td>
<td>: Ketertiban,ketentraman dan keindahan</td>
</tr>
<tr>
<td>KAPET</td>
<td>: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu</td>
</tr>
<tr>
<td>KB</td>
<td>: Keluarga Berencana</td>
</tr>
<tr>
<td>KDRT</td>
<td>: Kekerasan Dalam Rumah Tangga</td>
</tr>
<tr>
<td>KIE</td>
<td>: Komunikasi, Informasi dan Edukasi</td>
</tr>
<tr>
<td>KK</td>
<td>: Katu Keluarga</td>
</tr>
<tr>
<td>KPPTSP</td>
<td>: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</td>
</tr>
<tr>
<td>KS</td>
<td>: Keluarga Sejahtera</td>
</tr>
<tr>
<td>KSP</td>
<td>: Koperasi Simpan pinjam</td>
</tr>
<tr>
<td>KTG</td>
<td>: Kelompok Informasi Gampong</td>
</tr>
<tr>
<td>KTP</td>
<td>: Kartu Tanda Penduduk</td>
</tr>
<tr>
<td>KTP-el</td>
<td>: Kartu Tanda Penduduk Elektronik</td>
</tr>
<tr>
<td>KTR</td>
<td>: Kawasan Tanpa Rokok</td>
</tr>
<tr>
<td>KUKM</td>
<td>: Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>Labor Force</td>
<td>: Angkatan Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>Lakalantas</td>
<td>: Kecelakaan Lalu Lintas</td>
</tr>
<tr>
<td>LAKIP</td>
<td>: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td>
</tr>
<tr>
<td>LINMAS</td>
<td>: Perlindungan Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>LKM</td>
<td>: Lembaga Keuangan Mikro</td>
</tr>
<tr>
<td>LKM</td>
<td>: Lembaga Keuangan Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>LPM</td>
<td>: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>LSM</td>
<td>: Lembaga Swadaya Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>MDG’s</td>
<td>: Millenium Development Goals</td>
</tr>
<tr>
<td>Mortalitas</td>
<td>: Angka Kematian</td>
</tr>
<tr>
<td>SINGKATAN DAN AKRONIM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OKP                    : Organisasi Kemasyarakatan Pemuda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ORMAS                  : Organisasi Masyarakat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OTSUS                  : Otonomi Khusus</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAD                    : Pendapatan Asli Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAG                    : Pendapatan Asli Gampong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PBB                    : Perserikatan Bangsa-Bangsa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PDRB                   : Produk Domestik Regional Bruto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilchikung             : Pemilihan Keuchik Langsung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PJU                    : Penerangan Jalan Umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PKL                    : Pedangan Kaki Lima</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PKN                    : Pusat Kegiatan Nasional</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PKN                    : Pusat Kegiatan Nasional</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PKPT                   : Program Kerja Pengawasan Tahunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PKW                    : Pusat Kegiatan Wilayah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PMA                    : Penanaman Modal Asing</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PMDN                   : Penanaman Modal Dalam Negeri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PMKS                   : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PMKS                   : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Polindes               : Pondok Bersalin Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poskesdes              : Pos Kesehatan Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Posyandu               : Pos Pelayanan Terpadu (kesehatan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Povider                : Jasa Telekomunikasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRB                    : Pengurangan Risiko Bencana</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PUG                    : Pengurus Utamaan Gender</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PUS                    : Pasangan Usia Subur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Puskesmas              : Pusat Kesehatan Masyarakat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pustu                  : Puskesmas Pembantu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RAD-PPK                : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantas Korupsi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RAPBK                  : Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renja                  : Rencana Kerja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RENSTRA                : Rencana Strategis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riskesdas              : Riset Kesehatan Dasar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RKPD                   : Rencana Kerja Pembangunan Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RKPK                   : Rencana Kerja Pembangunan Kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJM                   : Rencana Pembangunan Jangka Menengah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJMD                  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJMKG                 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJMNN                 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJP                   : Rencana Pembangunan Jangka Panjang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPJPK                  : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RPPJ                   : Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RTH                    : Ruang Terbuka Hijau</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RTRW                   : Rencana Tata Ruang Wilayah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RTRWNN                 : Rencana Tata Ruang Wilayah Negara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RUPM                   : Rencana Umum Penanaman Modal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SDM                    : Sumber Daya Manusia</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## SINGKATAN DAN AKRONIM

<table>
<thead>
<tr>
<th>Singkatan</th>
<th>Pengertian</th>
<th>Singkatan</th>
<th>Pengertian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SIAK</td>
<td>: Sistem Informatika Administrasi Kependudukan</td>
<td>SIKIB</td>
<td>: Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu</td>
</tr>
<tr>
<td>SILPA</td>
<td>: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</td>
<td>SKPD</td>
<td>: Satuan Kerja Perangkat Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>SKPK</td>
<td>: Satuan Kerja Perangkat Kota</td>
<td>SNP</td>
<td>: Standar Nasional Pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td>SOP</td>
<td>: Standar Operasional Prosedur</td>
<td>SPIP</td>
<td>: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</td>
</tr>
<tr>
<td>SPPS</td>
<td>: Sistem Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik</td>
<td>SPM</td>
<td>: Standar Pelayanan Minimal</td>
</tr>
<tr>
<td>TDMRC</td>
<td>: Tsunami Disaster Mitigation Research Center</td>
<td>TDS</td>
<td>: Total Dissolved Solids</td>
</tr>
<tr>
<td>TIK</td>
<td>: Teknologi Informasi dan Komunikasi</td>
<td>TIK</td>
<td>: Teknologi Informatika dan Komunikasi</td>
</tr>
<tr>
<td>TLHP</td>
<td>: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</td>
<td>TPA</td>
<td>: Tempat Penampungan Akhir</td>
</tr>
<tr>
<td>TPAK</td>
<td>: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</td>
<td>TPAK</td>
<td>: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>TPPKK</td>
<td>: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan</td>
<td>Translasi</td>
<td>: Koleksi Buku Perpustakaan</td>
</tr>
<tr>
<td>TPS</td>
<td>: Tempat Pembuangan Sampah</td>
<td>Transliterasi</td>
<td>: Ahli Aksara</td>
</tr>
<tr>
<td>TPT</td>
<td>: Tempat Pelayanan Terpadu</td>
<td>UKM</td>
<td>: Usaha Kecil dan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>UMKM</td>
<td>: Usaha Mikro Kecil Menengah</td>
<td>UPM</td>
<td>: Upah Minimum Propinsi</td>
</tr>
<tr>
<td>USP</td>
<td>: Unit Simpan Pinjam</td>
<td>UUAP</td>
<td>: Undang Undang Pokok Agraria</td>
</tr>
<tr>
<td>UUAPA</td>
<td>: Undang Undang Pemerintahan Aceh</td>
<td>WBK</td>
<td>: Wilayah Bebas Korupsi</td>
</tr>
<tr>
<td>WMK</td>
<td>: Wilayah Manajemen Kebakaran</td>
<td>WP</td>
<td>: Wilayah Pengembangan</td>
</tr>
<tr>
<td>WTP</td>
<td>: Wajar Tanpa Pengacualian</td>
<td>ZIS</td>
<td>: Zakat Infaq dan Sedekah</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................ I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................. I - 1
1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................. I - 3
   1.3.1 RPJMN .......................................................... I - 7
   1.3.2 RPJM Provinsi ..................................................... I - 8
   1.3.3 RTRW Kota Banda Aceh .................................... I - 9
   1.3.4 RPJPD Kota Banda Aceh .................................... I - 10
1.4 Sistematika Penulisan .................................................. I - 11
1.5 Maksud dan Tujuan ..................................................... I - 14
   1.5.1 Maksud ............................................................. I - 14
   1.5.2 Tujuan .............................................................. I - 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..................................... II - 1
   2.1.1 Karakteristik dan Lokasi Wilayah ............................ II - 1
      2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah ........ II - 1
      2.1.1.2 Kondisi Topografi ........................................ II - 2
      2.1.1.3 Kondisi Geomorfologi ................................. II - 5
      2.1.1.4 Kondisi Geologi .......................................... II - 6
      2.1.1.5 Kondisi Hidrologi ..................................... II - 7
      2.1.1.6 Kondisi Klimatologi ................................. II - 12
      2.1.1.7 Penggunaan Lahan ..................................... II - 13
   2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah ............................... II - 16
      2.1.2.1 RTRW Kota Banda Aceh ............................ II - 16
   2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..................................... II - 19
   2.1.4 Demografi ......................................................... II - 29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................... II - 32
   2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....... II - 32
      2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ........................ II - 32
      2.2.1.2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh ..................... II - 34
      2.2.1.3 PDRB Pekapita ......................................... II - 36
      2.2.1.4 Kemiskinan ............................................. II - 38
      2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .......... II - 39
      2.2.1.6 Pengeluaran Perkapita Rupiah .................... II - 41
      2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka ..................... II - 42
   2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ............................. II - 44
      2.2.2.1 Pendidikan ............................................. II - 44
         2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf ......................... II - 44
2.2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah .......... II - 46
2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni ................ II - 47
2.2.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar ................ II - 50
2.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan .... II - 53

2.2.2 Kesehatan ........................................ II - 55
   2.2.2.1 Angka Kematian Bayi ................... II - 55
   2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk .......... II - 58

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ................... II - 58
   2.2.3.1 Kebudayaan dan Olahraga ............. II - 58

2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................ II - 63
   2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ................ II - 63
      2.3.1.1 Pendidikan .................................... II - 63
         2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah .......... II - 63
         2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah .......... II - 64
         2.3.1.1.3 Rasio Guru per Murid ............... II - 65
         2.3.1.1.4 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai .......... II - 66
         2.3.1.1.5 Peringkat Kelulusan Tingkat Nasional . II - 67
      2.3.1.2 Kesehatan ................................... II - 67
         2.3.1.2.1 Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita .......... II - 68
         2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu .......... II - 70
         2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk ................................ II - 71
         2.3.1.2.4 Rasio Dokter per satuan Penduduk .... II - 72
         2.3.1.2.5 Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi ........................................ II - 73
      2.3.1.2.6 Model Gampong Sehat .................. II - 74
   2.3.1.3 Pekerjaan Umum ............................ II - 74
      2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%) .................... II - 74
      2.3.1.3.2 Rasio Jaringan Drainase ............... II - 77
      2.3.1.3.3 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ............................ II - 80
      2.3.1.3.4 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ............ II - 82
   2.3.1.4 Perumahan ...................................... II - 83
      2.3.1.4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ... II - 83
      2.3.1.4.2 Rasio Rumah Tinggal berakses Sanitasi II - 83
   2.3.1.5 Penataan Ruang ................................ II -
      2.3.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ................ II - 85
      2.3.1.5.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Umum ............... II - 86
      2.3.1.5.3 Persentase Luas Permukiman yang tertata ................................ II - 88
   2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan .................... II - 90
      2.3.1.6.1 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, dan RKPK Kota Banda Aceh ........................................ II - 90
| 2.3.1.6.2 | Persentase Program RPJM yang tertuang dalam RKPK | II - 91 |
| 2.3.1.7 | Perhubungan | II - 91 |
| 2.3.1.7.1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PJU) | II - 91 |
| 2.3.1.7.2 | Rasio Izin Trayek | II - 93 |
| 2.3.1.7.3 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | II - 96 |
| 2.3.1.7.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus | II - 98 |
| 2.3.1.7.5 | Tersedianya pelabuhan penyebrangan yang memiliki Pelayanan Angkutan Penyebrangan yang Beroperasi pada Lintas Penyebrangan dalam Kota pada Wilayah yang memiliki Alur Pelayaran | II - 99 |
| 2.3.1.7.6 | Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek | II - 99 |
| 2.3.1.7.7 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota | II - 100 |
| 2.3.1.8 | Lingkungan Hidup | II - 101 |
| 2.3.1.8.1 | Persentase Penanganan Sampah | II - 101 |
| 2.3.1.8.2 | Pencemaran Status Mutu Air | II - 110 |
| 2.3.1.8.3 | Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | II - 114 |
| 2.3.1.8.4 | Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk | II - 116 |
| 2.3.1.8.5 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | II - 119 |
| 2.3.1.8.6 | Pencemaran Tingkat Kebisingan | II - 120 |
| 2.3.1.8.7 | Meraih Adipura | II - 120 |
| 2.3.1.8.8 | Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk | II - 121 |
| 2.3.1.8.9 | Persentase Penerangan Jalan Umum | II - 122 |
| 2.3.1.9 | Pertanahan | II - 123 |
| 2.3.1.9.1 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | II - 123 |
| 2.3.1.10 | Kependudukan dan Catatan Sipil | II - 124 |
| 2.3.1.10.1 | Rasio Cakupan Kepegawaian KTP (%) | II - 124 |
| 2.3.1.10.2 | Rasio Cakupan Kepegawaian Akta Kelahiran (%) | II - 126 |
| 2.3.1.11 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II - 135 |
| 2.3.1.11.1 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%) | II - 135 |
| 2.3.1.11.2 | Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta | II - 137 |
| 2.3.1.11.3 | Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | II - 138 |
| 2.3.1.11.4 | Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur | II - 138 |
| 2.3.1.11.5 | Kota Layak Anak | II - 139 |
| 2.3.1.12 | Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) | II - 139 |
2.3.1.12.1 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga ........................................ II - 139
2.3.1.12.2 Rasio Akseptor KB ........................................................... II - 140

2.3.1.13 Sosial ..................................................................................... II - 142

2.3.1.13.1 Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) ........ II - 142
2.3.1.13.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran ........................................ II - 143
2.3.1.13.3 Waktu Tanggap Darurat (Response Time) layanan ................................ II - 144

2.3.1.14 Ketenagakerjaan ................................................................. II - 145

2.3.1.14.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ............................................. II - 145

2.3.1.15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ........................................... II - 149

2.3.1.15.1 Persentase Koperasi Aktif ....................................................... II - 149
2.3.1.15.2 Jumlah BPR/LKM ................................................................. II - 151

2.3.1.16 Penanaman Modal .................................................................. II - 152

2.3.1.16.1 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) ......................... II - 152
2.3.1.16.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja .................................................. II - 153

2.3.1.17 Kepemudaan dan Olahraga ..................................................... II -

2.3.1.17.1 Jumlah Organisasi pemuda ...................................................... II - 154
2.3.1.17.2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan ................................................... II - 154
2.3.1.17.3 Jumlah Kegiatan Olahraga ......................................................... II - 155
2.3.1.17.4 Peningkatan potensi Pemuda melalui Pembinaan dan Pelatihan Pembangunan Kota Banda Aceh ................................................ II - 156
2.3.1.17.5 Pembinaan Kepemudaan sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan ............................. II - 157

2.3.1.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .................................. II - 158

2.3.1.18.1 LSM, Ormas, dan OKP Terdaftar ............................................... II - 159
2.3.1.18.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk ............................. II - 159
2.3.1.18.3 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Gampong ................................ II - 160

2.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ........................................ II - 162

2.3.1.19.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ............. II - 162
2.3.1.19.2 Ketahanan Pangan .................................................................... II - 163

2.3.1.20 Pemberdayaan Masyrakat dan Desa ............................................. II - 164

2.3.1.20.1 Pemerintahan Gampong ............................................................ II - 164
2.3.1.20.2 Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota ........................ II - 165
2.3.1.20.3 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga ............................. II - 165
2.3.1.20.4 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK .................................... II - 168
2.3.1.20.5 Jumlah PKK Aktif ..................................................................... II - 170
2.3.1.20.6 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong ................ II - 171

2.3.1.21 Komunikasi dan Informasi ....................................................... II - 173

2.3.1.21.1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional .... II - 176
2.3.1.21.2 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan ............................................. II - 177
2.3.1.22 Perpustakaan .......................................................... II - 177
  2.3.1.22.1 Jumlah Perpustakaan ........................................ II - 177
  2.3.1.22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun .............................................. II - 178
  2.3.1.22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah .................................... II - 179
2.3.1.23 Pertanian ................................................................. II - 179
  2.3.1.23.1 Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak .................................... II - 179
2.3.1.24 Pariwisata ................................................................. II - 180
  2.3.1.24.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara .................. II - 180
2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan ........................................... II - 182
  2.3.1.25.1 Produksi Perikanan ............................................ II - 182
  2.3.1.25.2 Cakupan Bina Kelompok Perikanan ................................ II - 183
2.3.1.26 Perdagangan ........................................................... II - 186
  2.3.1.26.1 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal ..................... II - 186
2.3.1.27 Perindustrian .......................................................... II - 189
  2.3.1.27.1 Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan Perbankan ................. II - 189
  2.3.1.27.2 Jumlah IKM yang mampu Melakukan Pemasaran Komoditi ........ II - 191
  2.3.1.27.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product ........ II - 192
2.3.1.28 Syari'at Islam ........................................................... II - 194
  2.3.1.28.1 Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan .................. II - 194
  2.3.1.28.2 Jumlah Pelanggaran Qanun Syari'at Islam ........................................ II - 196
  2.3.1.28.3 Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah ........ II - 197
  2.3.1.28.4 Kemampuan baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah ..................... II - 198
  2.3.1.28.5 Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat .................. II - 199
  2.3.1.28.6 Jumlah Mesjid yang memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban .... II - 200
  2.3.1.28.7 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) ........ II - 201
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .................................................. II - 204
  2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ........................................II - 204
  2.4.1.1 Perhubungan ............................................................. II - 204
    2.4.1.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ........................................ II - 204
    2.4.1.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum ................. II - 205
  2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................ II - 205
    2.4.2.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..................................... II - 205
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................. III - 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ............................................. III - 4
3.1.2 Neraca Daerah ................................................................. III - 5

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .................................. III - 10
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ........................................ III - 12
3.2.2 Analisis Pembiayaan .......................................................... III - 14

3.3 Kerangka Pendanaan .................................................................. III - 19
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama III - 19
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ....................................... III - 23

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ........................................ IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................ IV - 1
4.2 Isu-isu Strategis ........................................................................ IV - 8
4.2.1 Penelaahan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Internasional IV - 9
4.2.2 Penetapan Isu Strategis ........................................................ IV - 18

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... V - 1
5.1 Visi .......................................................................................... V - 1
5.2 Misi .......................................................................................... V - 1

BAB VI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ................................ VI - 1
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</td>
<td>VII 1</td>
</tr>
<tr>
<td>7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh</td>
<td>VII 1</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2 Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh 2012-2017</td>
<td>VII 5</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN</td>
<td>VIII 1</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH</td>
<td>IX 1</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN</td>
<td>X 1</td>
</tr>
<tr>
<td>10.1 Pedoman Transisi</td>
<td>X 1</td>
</tr>
<tr>
<td>10.2 Kaidah Pelaksanaan</td>
<td>X 2</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB XI PENUTUP</td>
<td>XI 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh .... II-2
Tabel 2.2 Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh .......... II-8
Tabel 2.3 Acuan Penentuan Kisaran kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS .......................................................... II-10
Tabel 2.4 Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 .......................................................... II-12
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh ... II-14
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh .. II-14
Tabel 2.7 Potensi Ancaman Bencana di Kota Banda Aceh ..................... II-26
Tabel 2.8 Armada Pemadam Kebakaran ............................................. II-28
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Banda Aceh Tahun 2013 .......................................................... II-29
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2010 – 2013 .......................................................... II-30
Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 .......................................................... II-32
Tabel 2.13 Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) Tahun 2008 – 2013 ........................................... II-36
Tabel 2.14 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh, 2010 – 2013 .................................................................. II-37
Tabel 2.15 Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013 .......................................................... II-38
Tabel 2.16 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013 ........................................ II-42
Tabel 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2013 Kota Banda Aceh .......................................................... II-46
Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013 ....................................... II-48
Tabel 2.19 Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014 .................................. II-49
Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013 ........................................ II-50
Tabel 2.21 Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014 .................................. II-52
Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014 .......................................................... II-54
Tabel 2.24 Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013 ...................................... II-56
Tabel 2.26 Status Gizi Buruk Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ... II-58
Tabel 2.27 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 .......................................................... II-59
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.28</td>
<td>Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013</td>
<td>II-60</td>
</tr>
<tr>
<td>2.29</td>
<td>Jumlah Penghargaan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-60</td>
</tr>
<tr>
<td>2.31</td>
<td>Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-61</td>
</tr>
<tr>
<td>2.34</td>
<td>Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-63</td>
</tr>
<tr>
<td>2.35</td>
<td>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2013/2014</td>
<td>II-64</td>
</tr>
<tr>
<td>2.36</td>
<td>Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-64</td>
</tr>
<tr>
<td>2.37</td>
<td>Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013</td>
<td>II-65</td>
</tr>
<tr>
<td>2.40</td>
<td>Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013</td>
<td>II-69</td>
</tr>
<tr>
<td>2.41</td>
<td>Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-70</td>
</tr>
<tr>
<td>2.42</td>
<td>Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013</td>
<td>II-70</td>
</tr>
<tr>
<td>2.43</td>
<td>Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-71</td>
</tr>
<tr>
<td>2.44</td>
<td>Jumlah Dokter di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-72</td>
</tr>
<tr>
<td>2.45</td>
<td>Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011</td>
<td>II-72</td>
</tr>
<tr>
<td>2.46</td>
<td>Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Banda Aceh Tahun 2007 2014</td>
<td>II-75</td>
</tr>
<tr>
<td>2.47</td>
<td>Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh</td>
<td>II-79</td>
</tr>
<tr>
<td>2.48</td>
<td>Kondisi Rumah Pompa Kota Banda Aceh</td>
<td>II-80</td>
</tr>
<tr>
<td>2.49</td>
<td>Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014</td>
<td>II-81</td>
</tr>
<tr>
<td>2.50</td>
<td>Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2014</td>
<td>II-81</td>
</tr>
<tr>
<td>2.51</td>
<td>Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.52</td>
<td>Persentase Rumah Tinggal ( RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-83</td>
</tr>
<tr>
<td>2.53</td>
<td>Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014</td>
<td>II-84</td>
</tr>
<tr>
<td>2.54</td>
<td>Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014</td>
<td>II-86</td>
</tr>
<tr>
<td>2.55</td>
<td>Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014</td>
<td>II-86</td>
</tr>
<tr>
<td>2.56</td>
<td>Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-87</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Tabel</td>
<td>Deskripsi</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.57</td>
<td>Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2014</td>
<td>II-87</td>
</tr>
<tr>
<td>2.58</td>
<td>Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014</td>
<td>II-88</td>
</tr>
<tr>
<td>2.60</td>
<td>Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014</td>
<td>II-93</td>
</tr>
<tr>
<td>2.62</td>
<td>Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-95</td>
</tr>
<tr>
<td>2.63</td>
<td>Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-97</td>
</tr>
<tr>
<td>2.64</td>
<td>Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-99</td>
</tr>
<tr>
<td>2.65</td>
<td>Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013</td>
<td>II-105</td>
</tr>
<tr>
<td>2.66</td>
<td>Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014</td>
<td>II-105</td>
</tr>
<tr>
<td>2.67</td>
<td>Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh</td>
<td>II-107</td>
</tr>
<tr>
<td>2.68</td>
<td>Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah</td>
<td>II-108</td>
</tr>
<tr>
<td>2.69</td>
<td>Pencemaran Status Mutu Air</td>
<td>II-112</td>
</tr>
<tr>
<td>2.70</td>
<td>Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL</td>
<td>II-114</td>
</tr>
<tr>
<td>2.71</td>
<td>Kasus Lingkungan</td>
<td>II-114</td>
</tr>
<tr>
<td>2.72</td>
<td>Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2014</td>
<td>II-118</td>
</tr>
<tr>
<td>2.73</td>
<td>Tingkat Kebisingan</td>
<td>II-120</td>
</tr>
<tr>
<td>2.74</td>
<td>Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012</td>
<td>II-121</td>
</tr>
<tr>
<td>2.75</td>
<td>Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012</td>
<td>II-121</td>
</tr>
<tr>
<td>2.76</td>
<td>Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh</td>
<td>II-121</td>
</tr>
<tr>
<td>2.77</td>
<td>Luas Lahan Bersertifikat di Kota Banda Aceh tahun 2009-2014</td>
<td>II-123</td>
</tr>
<tr>
<td>2.78</td>
<td>Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013</td>
<td>II-124</td>
</tr>
<tr>
<td>2.79</td>
<td>Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah Tahun 2013</td>
<td>II-125</td>
</tr>
<tr>
<td>2.81</td>
<td>LaJu Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-128</td>
</tr>
<tr>
<td>2.82</td>
<td>LaJu Pertumbuhan Penduduk Menurut Angka Kelahiran Kasar (CBR), dan Angka Kematian Bayi (IMR) di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013</td>
<td>II-129</td>
</tr>
<tr>
<td>2.83</td>
<td>Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013</td>
<td>II-130</td>
</tr>
<tr>
<td>2.84</td>
<td>Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013</td>
<td>II-130</td>
</tr>
<tr>
<td>2.86</td>
<td>Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013</td>
<td>II-132</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel</td>
<td>Judul</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.87</td>
<td>Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018</td>
<td>II-133</td>
</tr>
<tr>
<td>2.88</td>
<td>Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan KepadaTahun 2013</td>
<td>II-134</td>
</tr>
<tr>
<td>2.89</td>
<td>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-135</td>
</tr>
<tr>
<td>2.90</td>
<td>Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Kesehatan dan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-136</td>
</tr>
<tr>
<td>2.91</td>
<td>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tahun 2007-2013</td>
<td>II-137</td>
</tr>
<tr>
<td>2.92</td>
<td>Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-137</td>
</tr>
<tr>
<td>2.93</td>
<td>Rasio KDRT yang Didampingi Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013</td>
<td>II-138</td>
</tr>
<tr>
<td>2.94</td>
<td>Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013</td>
<td>II-138</td>
</tr>
<tr>
<td>2.95</td>
<td>Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-140</td>
</tr>
<tr>
<td>2.96</td>
<td>Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-140</td>
</tr>
<tr>
<td>2.97</td>
<td>Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-141</td>
</tr>
<tr>
<td>2.98</td>
<td>Jumlah Penduduk Peserta KB di Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2013</td>
<td>II-141</td>
</tr>
<tr>
<td>2.99</td>
<td>Cakupan Pelayanan Bencana KebakaranKota Banda Aceh</td>
<td>II-144</td>
</tr>
<tr>
<td>2.100</td>
<td>Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan</td>
<td>II-144</td>
</tr>
<tr>
<td>2.101</td>
<td>Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007 – 2014</td>
<td>II-144</td>
</tr>
<tr>
<td>2.102</td>
<td>Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-145</td>
</tr>
<tr>
<td>2.103</td>
<td>Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-147</td>
</tr>
<tr>
<td>2.104</td>
<td>Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh Tahun 2008-2012</td>
<td>II-148</td>
</tr>
<tr>
<td>2.105</td>
<td>Persentase Koperasi Aktif Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-150</td>
</tr>
<tr>
<td>2.106</td>
<td>Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-150</td>
</tr>
<tr>
<td>2.107</td>
<td>Jumlah BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-151</td>
</tr>
<tr>
<td>2.108</td>
<td>Perkembangan Industri dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-152</td>
</tr>
<tr>
<td>2.109</td>
<td>Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-152</td>
</tr>
<tr>
<td>2.110</td>
<td>Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-152</td>
</tr>
<tr>
<td>2.111</td>
<td>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-153</td>
</tr>
<tr>
<td>2.112</td>
<td>Jumlah Organisasi Pemuda Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-153</td>
</tr>
<tr>
<td>2.113</td>
<td>Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-154</td>
</tr>
<tr>
<td>2.114</td>
<td>Jumlah Organisasi Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-155</td>
</tr>
<tr>
<td>2.115</td>
<td>Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-156</td>
</tr>
<tr>
<td>2.116</td>
<td>Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-159</td>
</tr>
<tr>
<td>2.117</td>
<td>Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013</td>
<td>II-159</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh ........................................ III-16
Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh (persen) ................................................................. III-17
Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh .... III-18
Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Banda Aceh 2009-2014 ................................................... III-21
Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh ................................ III-24
Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh ...................................................... III-25
Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh ............................................................ III-28
Tabel 4.1 Identifikasi Isu Strategis Kabupaten/Kota lainnya .................... IV-15
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Banda Aceh ..... V-1
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Banda Aceh ......................... VI-1
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Banda Aceh .. VII-6
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh ....................................................... VIII-2
DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh 2013 ........................................ II-31
Grafik 2.2 Kepadatan Penduduk di Kota Banda Aceh, 2013 ............................... II-32
Grafik 2.3 Perbandingan PDRB Regional (trilyun rupiah), 2013 ........................ II-34
Grafik 2.4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh 2005-2013 ........................................ II-35
Grafik 2.5 Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banda Aceh, 2013 .............................. II-35
Grafik 2.6 Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, Tahun 2013 .................. II-36
Grafik 2.7 Perbandingan PDRB Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2012 ........................ II-37
Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh tahun 2006 – 2013 ................................................................. II-38
Grafik 2.9 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013 .......................... II-39
Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2009-2013 ................................................................. II-41
Grafik 2.11 Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan kab/kota di Indonesia Tahun 2013 ................................................................. II-41
Grafik 2.12 Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011 – 2014 ................................................................. II-42
Grafik 2.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012 ................................................................. II-44
Grafik 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh 2011-2013 ................................................................. II-45
Grafik 2.15 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2011 – 2013 ................................................................. II-47
Grafik 2.16 Persentase Jumlah SNP yang tercapai di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................. II-67
Grafik 2.17 Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi Tahun 2012-2014 ........................................ II-74
Grafik 2.18 Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPK ........................ II-91
Grafik 2.19 Persentase Pemanfaatan RTH terhadap lahan yang tersedia ................................................................. II-119
Grafik 2.20 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh ................................................................. II-122
Grafik 2.21 Persentase Capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh ................................................................. II-139
Grafik 2.22 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................. II-142
Grafik 2.23 Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan Kota Banda Aceh ................................................................. II-157
Grafik 2.24 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan ................................................................. II-158
Grafik 2.25 Ketersediaan Pangan Utama (kg) di Kota Banda Aceh tahun 2012-2014 ................................................................. II-163
Grafik 2.26 Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan keliling Per tahun (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................. II-179
Grafik 2.27 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................. II-179
Grafik 2.28 Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak ................................................................. II-180
Grafik 2.29 Kunjungan Wisatawan berdasarkan hunian hotel Tahun 2007 – 2013 ................................................................. II-181
Grafik 2.30 Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%) ................................................................. II-183
Grafik 2.31 Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%) ................................................................. II-184
Grafik 2.32 Persentase Pasar yang sudah berfungsi secara optimal di Kota Banda Aceh (%) ................................................................. II-188
Grafik 2.33 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013 .......................................................... II-190
Grafik 2.34 Jumlah UKM Yang Mendapatkan Bantuan Perbankan 2012-2015 .................................................................................. II-190
Grafik 2.35 Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi ....................................................................................... II-192
Grafik 2.38 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 .............................................................. II-196
Grafik 2.39 Kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2012-2014 .............................................................. II-198
Grafik 2.40 Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ..................................................... II-199
Grafik 2.41 Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 .................................................... II-200
Grafik 2.42 Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ..................... II-201
Grafik 2.43 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................................................. II-202
Grafik 2.44 Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (*The Right Man on The Right Place*) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ................................................................................................. II-208
Grafik 2.45 Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org) ........................................................................ II-209
Grafik 2.46 Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan external di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ..... II-210
Grafik 2.47 Jumlah PNS yang indisipliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org) ........................................................................ II-213
Grafik 2.49 PAD di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 .......................................................................................................................... II-217
Grafik 2.50 Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014 ........................................................................................................ II-218
Grafik 2.51 Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ............................................................................... II-220
Grafik 2.52 Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 ........................................................................................................ II-223
### DAFTAR GAMBAR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
<th>Gambar</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gambar 1.1</td>
<td>Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya</td>
<td>..........................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.1</td>
<td>Peta Wlayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh</td>
<td>..........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.2</td>
<td>Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.3</td>
<td>Peta Kontur dan Patahan Geologi Provinsi Aceh</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.4</td>
<td>Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh</td>
<td>...........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.5</td>
<td>Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.6</td>
<td>Peta Hidrologi Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.7</td>
<td>Peta RTRW Kota Banda Aceh 2009 – 2029</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.8</td>
<td>Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh Tahun 2029</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.9</td>
<td>Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.10</td>
<td>Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.11</td>
<td>Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.12</td>
<td>Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.13</td>
<td>Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.14</td>
<td>Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 2.15</td>
<td>Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 3.1</td>
<td>Kerangka Hubungan Antar Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 3.2</td>
<td>Kerangka Hubungan Antar Strategi dan Komponen APBD</td>
<td>..................................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>

xx
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.


RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan mengacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.Perencanaan pembangunan
daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LD RI Tahun 1956 Nomor 59 (TLN RI No. 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

16. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi; 
28. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 
29. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033;
30. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032;
32. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2013 tentang pengalokasian TDBH Migas dan Otsus
33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam RPJMD Kota Banda Aceh dijabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam RKPK.

1.3.1 RPJMN


Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.


4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintahan Aceh dalam RPJMD 2012 – 2017 menetapkan VISI “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MOU HELSINKI”.

Visi yang ditetapkan tersebut bermakna:

*Bermaartabat,* adalah terciptanya kondisi masyarakat Aceh yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta terwukudnya Pemerintahan Aceh yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.

*Sejahtera,* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak baik materi maupun spirituial yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.
**Berkeadilan,** adalah terwujudnya pembangunan yang adil, merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat. **Mandiri,** adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan Aceh, yaitu:

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UUPAdalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat.
2. Memperkuat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi perdamaian.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju dengan meningkatkan nilai tambah produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

**1.3.3 RTRW Kota Banda Aceh**

RTRW Kota Banda Aceh memiliki tujuan penataan ruang kota untuk mewujudkan ruang kota sebagai kota jasa yang Islami, tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota, dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota
Dalam RTRW Kota Banda Aceh sampai pada tahun 2029 pengembangan wilayah fungsional kota diarahkan menjadi empat Wilayah Pengembangan, meliputi:

1. Wilayah Pengembangan PK Lama yang meliputi wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan;
2. Wilayah Pengembangan PK Baru meliputi wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), perdagangan dan jasa serta pergudangan;
3. Wilayah Pengembangan Keutapang meliputi wilayah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan sebagian Banda Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata;

Dalam RPJPD ditetapkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh “TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODERN DAN ISLAMI”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Di dalam bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang terkait, hubungan antar dokumen, sistematika, serta maksud dan tujuan dari pentingnya penyusunan dukumen RPJM ini.

Di dalam Bab II yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang berbagai aspek-aspek daerah yang terkait dengan geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab III dijelaskan tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dengan menjelaskan bagaimana kinerja keuangan di masa lalu serta kebijakan-kebijakan pengelolaannya, serta kerangka pendanaan.
Di dalam Bab IV dijelaskan Analisis Isu-isu Strategis, yaitu isu-isu yang menjadi trend serta berkembang dengan pesat di dalam waktu-waktu terakhir, serta isu-isu yang berkembang secara nasional dan internasional, atau juga merupakan isu menjadi perhatian Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Di sini dijelaskan juga apa permasalah yang dihadapi dengan isu-isu tersebut.

Di dalam Bab V diuraikan dan disajikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Di dalam Bab VI diuraikan strategi-strategi yang ditempuh untuk pencapaian tujuan program dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap program yang telah disusun.

Di dalam Bab VII, diuraikan tentang kebijakan-kebijakan umum yang ditempuh untuk setiap program yang telah disusun, serta program-program pembangunan Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab VIII dijelaskan tentang indikasi anggaran menurut SKPD penanggung jawab setiap tahunnya.

Di dalam Bab IX dijelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah dari setiap program pembangunan yang telah disusun.

Didalam Bab X dijelaskan tentang pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa RPJM Kota ini penting untuk menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD dan APBD, serta pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di tahun pertama. Di samping itu juga ditegaskan tentang pentingnya manjadikan RPJM ini sebagai pedoman dasar di dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten.
1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sejalan dengan visi dan misi Walikota Banda Aceh untuk menyelenggarakan setiap tahap pembangunan secara periodik tahunan selama lima tahun baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD adalah menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program pembangunan guna menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta mencapai tujuan akhir pembangunan menciptakan masyarakat kota yang sejahtera.
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar, ditinjau dari sudut ekonomi dan geografis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi.

Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi peluang bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30′ – 05°35′ LU dan 95°30′ – 99°16′ BT, yang terdiri dari sembilan kecamatan, 70 desa dan 20 Gampong dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km² (lihat Tabel 2.1. dan Gambar 2.1.).
Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>KECAMATAN</th>
<th>LUAS (Km²)</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td>7,26</td>
<td>11,83</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kec. Baiturrahman</td>
<td>4,54</td>
<td>7,40</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Kec. KutaAlam</td>
<td>10,05</td>
<td>16,38</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td>14,24</td>
<td>23,21</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Kec. UleeKareng</td>
<td>6,15</td>
<td>10,02</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Kec. Kuta Raja</td>
<td>5,21</td>
<td>8,49</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Kec. Lueng Bata</td>
<td>5,34</td>
<td>8,70</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Kec. Jaya Baru</td>
<td>3,78</td>
<td>6,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td><strong>61,36</strong></td>
<td><strong>100,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Statistik Banda Aceh 2014, BPS Kota Banda Aceh

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 – 8 persen. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangankhususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara atau pesisir pantai.

aDalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah
barat dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.


Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

**Gambar 2.2.  
Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh**

*Gambar: http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis*
2.1.1.3 Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (di bagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedatara yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pedatara di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistem marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya.
Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.

Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :Alluvium; Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik); Batuan Tersier (sedimen dan volkanik); serta Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier.

Penentuan salinity range (kisaran kadar garam air) didasarkan pada Specific Electrical Conductivity (EC) dan Total Dissolved Solids (TDS) yang diturunkan dari analisis kation dan anion pada sampel air. Secara umum, kadar garam kisaran EC and TDS yang digunakan pada laporan BGR itu dapat dilihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**
Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KADAR GARAM KISARAN</th>
<th>EC [µS/CM]</th>
<th>TDS [MG/L]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Air Tawar</td>
<td>Up to 1500</td>
<td>Up to 1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Air Payau</td>
<td>&gt; 1500 – 15,000</td>
<td>&gt;1000 – 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Air Asin</td>
<td>&gt; 15,000</td>
<td>&gt; 10,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: (BGR/Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,2006)
Kondisi tatanan air tanah Kota Banda Aceh pasca bencana yang memperlihatkan penyebaran air asin, air payau dan air tawar dapat dilihat pada Gambar 2.7.

**Gambar 2.6**
**Peta Hidrologi Kota Banda Aceh**

![Peta Hidrologi Kota Banda Aceh](image)

*Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006*

Air asin dan air payau termasuk kategori air yang tidak layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana salah satu parameternya yakni Klorida maksimum yang diperbolehkan 250 mg/l dan Total Zat Padat Terlarut (Total Dissolved Solids) maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg/l.
Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang tahun 2013, menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,5ºC hingga 27ºC, dengan tekanan antara 1009,7 milibar.

Curah hujan Kota Banda Aceh berkisar 135,3 mm, kelembaban udara 80,7 persen, dan jumlah hari hujan 12,6 hh. Data tekanan udara, suhu, kelembaban nisbi, curah hujan dan jumlah hari hujan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**

Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan Dan Jumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Tekanan Udara Rata-Rata (mb)</th>
<th>Suhu Udara Rata-Rata (ºC)</th>
<th>Kelembaban Nisbi Rata-Rata</th>
<th>Curah Hujan</th>
<th>Jumlah Hari Hujan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2013</td>
<td>1009,7</td>
<td>27,0</td>
<td>80,7</td>
<td>135,3</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>1009,5</td>
<td>27,2</td>
<td>78,0</td>
<td>91,5</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>1009,4</td>
<td>26,9</td>
<td>79,2</td>
<td>105,6</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1009,5</td>
<td>27,3</td>
<td>81,4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1009,6</td>
<td>26,9</td>
<td>78,7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1010,9</td>
<td>26,8</td>
<td>84</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1010,9</td>
<td>26,8</td>
<td>84</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Statistik Banda Aceh 2014
Data dan informasi penggunaan lahan dalam suatu wilayah akan memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan lahan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, mengatur, menertibkan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan. Pengaruh bencana Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan parah pada wilayah Kota Banda Aceh khususnya pada kawasan pesisir. Kondisi tersebut telah mempengaruhi pola penggunaan lahan di Kota Banda Aceh di masa yang akan datang, yang cenderung berkembang ke arah bagian Timur dan Selatan wilayah kota.

Berdasarkan kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami tersebut hingga saat ini secara umum dapat dilihat pola penggunaan lahannya yang terdiri dari kawasan terbangun seluas ± 2.600 Ha atau 42,37 persen dan kawasan non terbangun atau berupa ruang terbuka seluas ± 3.221 Ha atau 52,49 persen. Kawasan terbangun meliputi permukiman, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelabuhan, rekreasi dan wisata, sedangkan ruang terbuka
meliputi taman, hutan kota, kawasan lindung, pemakaman, rawa-rawa, dan tambak atau areal genangan. Adapun lebih jelasnya pola penggunaan lahan ini secara rinci dapat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.7.

Kawasan terbungh ini merupakan faktor yang menimbulkan bangkitan lalu lintas, baik dari permukiman menuju perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kegiatannya lainnya, begitu juga sebaliknya dari kawasan aktivitas kegiatan menuju ke kawasan permukiman.

### Tabel 2.5
**Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Total luas kawasan lindung</th>
<th>Sempadan pantai</th>
<th>Hutan bakau</th>
<th>Ruang terbuka</th>
<th>Hutan kota</th>
<th>Taman kota</th>
<th>Cagar budaya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2014</td>
<td>2086.46</td>
<td>49,27</td>
<td>2,28</td>
<td>1994.77</td>
<td>8,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>2098.46</td>
<td>49,27</td>
<td>2,28</td>
<td>2006.77</td>
<td>8,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>2110.46</td>
<td>49,27</td>
<td>2,28</td>
<td>2018.77</td>
<td>8,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>2122.46</td>
<td>49,27</td>
<td>2,28</td>
<td>2032.77</td>
<td>6,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>2134.46</td>
<td>49,27</td>
<td>8,28</td>
<td>2044.77</td>
<td>0,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>2146.46</td>
<td>49,27</td>
<td>8,28</td>
<td>2056.77</td>
<td>0,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>2158.46</td>
<td>49,27</td>
<td>8,28</td>
<td>2068.77</td>
<td>0,18</td>
<td>16,29</td>
<td>15,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas PU 2014*

### Tabel 2.6
**Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>TAHUN</th>
<th>PEMANFAATAN</th>
<th>KAWASAN BUDIDAYA</th>
<th>TOTAL KAWASAN BUDIDAYA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Permukiman</td>
<td>Perdagangan &amp; Jasa</td>
<td>Pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>2360.58</td>
<td>140.2</td>
<td>20.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>58%</td>
<td>4%</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>2357.08</td>
<td>138.7</td>
<td>20.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>58%</td>
<td>3%</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>2351.58</td>
<td>137.2</td>
<td>20.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>58%</td>
<td>3%</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>2346.08</td>
<td>135.7</td>
<td>20.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dari hasil pengamatan di lapangan, pembangunan perumahan baru kondisi sesudah bencana gempa dan tsunami di kawasan prioritas umumnya adalah rumah kavling sedang (antara 200-500 m²), kavling besar (di atas 500 m²) dan bahkan ada pembangunan rumah dengan ukuran kavling sangat besar (di atas 1.000 m²) yakni di Gampong Batoh (sekitar Jl. Fajar Harapan).

Pembangunan rumah umumnya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di antara kelompok rumah-rumah yang ada atau pada kawasan baru dengan cara mengurug lahan pertanian (lahan basah atau sawah) karena sebagian lahan di kawasan prioritas
(Kecamatan Baiturrahman) masuk dalam klasifikasi "Inland Depression Zone", yakni ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah dari kawasan sekitarnya dan sebagian tergenang air. Cara pembangunan kavling per kavling tersebut menyebabkan tidak terintegrasinya pola aliran drainase yang dapat mengakibatkan terjadinya genangan/banjir.

Selain itu, pembangunan rumah-rumah baru tersebut juga berdampak pada terbentuknya ketidakberaturan jaringan jalan lingkungan permukiman setempat karena masing-masing rumah/kelompok rumah membuat jalan akses masing-masing (jalan ke rumah/kelompok rumah ini dinamai "Lorong"). Pembangunan jalan/lorong tersebut sebagian besar tidak dilengkapi dengan saluran drainase. Dengan demikian langkah-langkah penting dalam upaya penataan perlu ditetapkan ruas-ruas jalan kolektor dan jalan lingkungan sehingga terbentuk pola hirarki jaringan jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase.

2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah

2.1.2.1 RTRW Kota Banda Aceh


Pengaruh gelombang tsunami telah menyebabkan sebagian besar (60 persen) wilayah kota mengalami kehancuran terutama pada kawasankawasan yang berada pada radius 5 km dari garis pantai. Pasca tsunami, aktivitas pembangunan berjalan dengan pesat, baik yang dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR-Aceh Nias), Pemerintah Daerah, lembaga donor, pihak swasta maupun perorangan. Dalam hal ini kegiatan pembangunan tersebut cenderung berjalan tanpa mengikuti ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan, atau telah terjadinya
pergeseran fungsi ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh, Pemerintah telah menyiapkan Blue Print Tata Ruang yang disahkan melalui Perpres Nomor 30 Tahun 2005. Mengingat muatan teknis yang terkandung dalam Blue Print tersebut lebih bersifat makro lingkup wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan agar produk rencana tata ruang tersebut lebih dapat menjadi pedoman operasional kegiatan pembangunan di lapangan, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dukungan dan kerjasama dengan BRR, JICA, GTZ dan Departemen PU telah menyelesaikan draft RTRW Kota Banda Aceh pasca tsunami.


Pengembangan Banda Aceh menurut RTRWN Tahun 2008-2027, meliputi:
- Berdasarkan rencana struktur ruang pada RTRWN Tahun 2008-2027, bahwa Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah).


Muatan materi yang terkandung dalam RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, terdiri dari:

1. **Isu Strategis yang Berkaitan dengan Penataan Ruang Kota Banda Aceh**


Secara geografis Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan & jasa, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan wisata islami, serta keagamaan.
Pertumbuhan ekonomi kota selama ini telah merangsang tumbuhnya aktivitas pembangunan pada kawasan baru yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan non komersial dan jasa. Untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedepan perlu dilakukan konsep penataan Kota Banda Aceh berbasis pada program “Water Front City” terutama pada kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Banda Aceh merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam, untuk mengatasi resiko dari dampak tersebut perlu dilakukan mitigasi bencana, dengan pengembangan ruang ke depan agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dengan menyediakan ruang sebagai jalur, kawasan maupun bangunan penyelamatan penduduk ke tempat yang lebih aman.

2. **Rencana Struktur Ruang**

Struktur ruang Kota Banda Aceh sebelumnya menunjukkan “pola radial simetris”, hal ini terlihat dari pemusatan kegiatan dengan konsentrasi kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linier mengikuti pola jaringan jalan utama dan relatif radial dengan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya sebagai pusat utama yang diperkuat oleh keberadaan Pasar Aceh dan Pasar Peunayong.

Pusat utama ini didukung oleh beberapa sub pusat pelayanan seperti Ulee Kareng, Kawasan Kampus Darussalam, Lampulo, Beurawe, Lueng Bata, Peuniti, Neusu, Seutui, dan Keutapang, serta Ulee Lheu dengan kegiatan pelabuhan dan wisatanya.

Pusat utama dan sub pusat pelayanan ini menjadi daya tarik bagi sistem pergerakan dan pengangkutan di Kota Banda Aceh. Interaksi pusat dan sub pusat memberikan dampak yang cukup besar terhadap bangkitan lalu-lintas kota, karena pada pusat dan sub pusat tersebut didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, restoran dan aktivitas lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Keberadaan sub pusat pelayanan menjadi perangsang tumbuh dan berkembangnya
kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga hal ini menjadi faktor tumbuhnya bangkitan lalu lintas.

Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

a. **Wilayah Pengembangan Pusat Kota Lama**

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, dengan pusat di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan.

b. **Wilayah Pengembangan Pusat Kota Baru**

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, dengan pusat di Batoh dan Lamdom, berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan.

c. **Wilayah Pengembangan Keutapang**

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, dengan pusat di Keutapang, berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata.

d. **Wilayah Pengembangan Ulee Kareng**

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, dengan pusat di Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut.
3. Rencana Pola Ruang
   a. Kawasan Lindung

Gambar 2.9.
Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029

Sumber: Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

b. **Kawasan Budidaya**


4. **Rencana Kawasan Strategis**, meliputi:

- Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya).
- Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya.
- Kawasan Pusat Kota Baru dan sekitarnya.
- Kawasan *Water Front City*
- Kawasan Perikanan Samudera
- Kawasan Heritage Gampong Pande, Peunayong dan Neusu
- Kawasan Wisata Tsunami (Museum Tsunami, PLTD Apung, kuburan massal korban tsunami dan Mesjid Baitul Rahim di Ulee Lheue).
- Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng

Gambar 2.10.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh

Sumber: Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografis Kota Banda Aceh yang bersifat dataran rendah memiliki bentang yang sangat luas berpotensi rawan bencana gempa dan tsunami, banjir genangan, gelombang pasang, angin puting beliung, kekeringan dan abrasi.

Kota Banda Aceh sesuai dengan data indeks rawan bencana Indonesia termasuk rangking 15 (lima belas) dengan klas rawan bencana tinggi. Bencana alam gempa bumi yang berkekuatan 8,5 SR terakhir terjadi pada tanggal 11 April 2012 dengan korban 1 orang meninggal dunia.
serta menimbulkan kepanikan dengan adanya isu tsunami. Untuk lebih jelasnya wilayah rawan bencana dapat dilihat pada Peta di bawah ini:

Gambar 2.11
Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh
Gambar 2.12.
Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh

Gambar 2.13.
Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh
Potensi ancaman bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Tsunami</th>
<th>Gunung berapi</th>
<th>Gempa</th>
<th>Tanah longsor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Syiah kuala</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>1. Meuraxa</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Meuraxa</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2. Syiah kuala</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Syiah kuala</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Baiturrahman</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Baiturrahman</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8. Ulee Kareng</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8. Ulee Kareng</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bencana Hidrometeorologi

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Bajir genangan</th>
<th>Angin putingbeliung</th>
<th>Abrasi erosi</th>
<th>Gelombangpasang</th>
<th>Kekeringan</th>
<th>Kecamatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>Meraxa</td>
<td>Jaya baru</td>
<td>Semua kecamatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Bandar Raya</td>
<td>Baiturahman</td>
<td>Kuta raja</td>
<td>Meraxa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>Kuta raja</td>
<td>Kuta raja</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jay Baru</td>
<td>Syiah kuala</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Banda Raya</td>
<td></td>
<td>Syiah kuala</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meuraxa</td>
<td></td>
<td>Bandar Raya</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh

### Bencana Sosial

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebakaran</th>
<th>Konflik</th>
<th>Kejadian Luar Biasa</th>
<th>Kegagalan Tehnologi</th>
<th>Kecamatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Syiah kuala</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturahman</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Kegunaan Escape Building tersebut telah di sosialisasikan kepada masyarakatnya di atas saat bencana dipergunakan sebagai gedung penyelamatan, dan pada saat tidak terjadi bencana boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan pendidikan lainnya seizin BPBD.

Selain pembangunan Escape Building dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB) dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah penyelenggara penanggulangan bencana serta peningkatan kapasitas,
partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pencegahan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dan bahaya kebakaran serta penanganan pada saat bencana dan pasca bencana melalui kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.


**Tabel 2.8**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama/Jenis Barang</th>
<th>Merk / Type</th>
<th>Asal/Cara Perolehan Barang</th>
<th>Tahun Perolehan</th>
<th>Kondisi</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 01</td>
<td>Isuzu</td>
<td>APBD</td>
<td>1984</td>
<td>Rusak Berat</td>
<td>Pos Sp. Mesra</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 02</td>
<td>Isuzu</td>
<td>Bantuan Pemko (APBD)</td>
<td>1986</td>
<td>Rusak Berat</td>
<td>Pos Sp. Mesra</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 04</td>
<td>Mercedes Benz</td>
<td>APBD</td>
<td>1996</td>
<td>Rusak Ringan</td>
<td>Posko Induk</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 05</td>
<td>Isuzu Borneo</td>
<td>APBD</td>
<td>2001</td>
<td>Baik (Isapan Air tidak berfungsi)</td>
<td>Pos Sp. Mesra</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 06</td>
<td>Isuzu Borneo</td>
<td>APBD</td>
<td>2001</td>
<td>Baik (Isapan Air tidak berfungsi)</td>
<td>Posko Induk</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 07</td>
<td>Isuzu ELF</td>
<td>APBD</td>
<td>2001</td>
<td>Baik</td>
<td>Pos Pelangi</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 08</td>
<td>Isuzu Borneo</td>
<td>Bantuan Jepang</td>
<td>2006</td>
<td>Baik</td>
<td>Posko Induk</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 09</td>
<td>Isuzu Borneo</td>
<td>Bantuan Jepang</td>
<td>2006</td>
<td>Baik (Isapan Air tidak berfungsi)</td>
<td>Pos Pelangi</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 10</td>
<td>Mercedes Benz</td>
<td>Bantuan Belanda</td>
<td>2006</td>
<td>Baik</td>
<td>Posko Induk</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Mobil Pemadam Kebakaran 11</td>
<td>Mitsubis hi</td>
<td>Bantuan NAD</td>
<td>2004</td>
<td>Baik</td>
<td>Pos Pango</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Mobil</td>
<td>Isuzu</td>
<td>Bantuan</td>
<td>2004</td>
<td>Baik</td>
<td>Posko Induk</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pertambahan alat transportasi dalam wilayah Kota Banda Aceh meningkat tajam, sehingga terjadi kemacetan di mana-mana lebih-lebih di jalan umum apalagi pada jam-jam sibuk dapat dibayangkan berapa waktu dibutuhkan untuk mencapai titik sasaran kebakaran. Sehingga pada tahun 2015 akan di fungsikan 2 pos pembantu lagi untuk tercapainya waktu tanggap darurat (Response Time) layanan kebakaran.

### 2.1.4 Demografi

Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 61,36 Km² didiami penduduk sebanyak 249.282 jiwa yang terdiri dari 128.333 jiwa penduduk laki-laki dan 120.949 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2013.

#### Tabel 2.9
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Banda Aceh Tahun 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Sex Ratio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Laki-laki</td>
<td>Perempuan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>10.044</td>
<td>8.918</td>
<td>18.962</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>12.618</td>
<td>11.842</td>
<td>24.460</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>11.490</td>
<td>11.451</td>
<td>22.941</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>18.003</td>
<td>17.215</td>
<td>35.218</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>12.582</td>
<td>11.978</td>
<td>24.560</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>25.756</td>
<td>23.747</td>
<td>49.503</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>6.862</td>
<td>5.957</td>
<td>12.819</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>18.201</td>
<td>17.470</td>
<td>35.671</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>12.777</td>
<td>12.371</td>
<td>25.147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>128.333</strong></td>
<td><strong>120.949</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: BPS Kota Banda Aceh*

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kuta Alam dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kuta Raja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.13.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Rata-rata Kepadatan Penduduk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Per-Desa</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.962</td>
<td>1.185</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.460</td>
<td>2.718</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.941</td>
<td>2.294</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>35.218</td>
<td>3.522</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>24.560</td>
<td>2.729</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.503</td>
<td>4.500</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>12.819</td>
<td>2.137</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.671</td>
<td>3.567</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.147</td>
<td>2.794</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>2013</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>2012</strong></td>
<td><strong>238.784</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>2011</strong></td>
<td><strong>228.562</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>2010</strong></td>
<td><strong>223.446</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2014*

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2013 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

Grafik. 2.1.
Piramida Penduduk Kota Banda Aceh 2013

![Grafik Piramida Penduduk Kota Banda Aceh 2013](image)

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014

Kepadatan penduduk kota Banda Aceh mencapai 4.063 jiwa per km\(^2\). Penduduk terpadat berada pada kecamatan Baiturrahman yang mencapai 7.757 jiwa per km\(^2\), sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kuta Raja dengan kepadatan penduduk sebesar 2.460 jiwa per km\(^2\)(lihat Grafik 2.2).
Grafik 2.2.  
Kepadatan Penduduk di Kota Banda Aceh, 2013

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Tabel 2.11  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh  
Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tahun</th>
<th>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)</th>
<th>Pertumbuhan (%)</th>
<th>PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)</th>
<th>Pertumbuhan (%)</th>
</tr>
</thead>
</table>

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sektor</th>
<th>Atas Dasar Harga Berlaku (%)</th>
<th>Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pertanian</td>
<td>2,92</td>
<td>2,55</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pertambangan dan Pengolahan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Industri Pengolahan</td>
<td>2,32</td>
<td>2,17</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Listrik, Gas dan Air Bersih</td>
<td>0,55</td>
<td>0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bangunan/ Konstruksi</td>
<td>6,81</td>
<td>8,08</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Perdagangan, Hotel dan Restoran</td>
<td>26,31</td>
<td>26,33</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pengangkutan dan Komunikasi</td>
<td>21,90</td>
<td>24,25</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Keuangan, Perserauan dan Jasa perusahaan</td>
<td>3,35</td>
<td>3,66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2014

Tabel 2.15 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh didominasi oleh sector jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sector perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Banda Aceh.


_Grafik 2.3_  
**Perbandingan PDRB Regional (trilyun rupiah), 2013**

mendekati terjadinya deflasi. Kenaikan harga BBM pada pertengahan Junitahun 2013 menyebabkan laju inflasi tahun 2013 naik menjadi 6,39 persen, untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada grafik 2.5 dan grafik 2.6.

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Banda Aceh 2005-2013

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014


Grafik 2.5
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banda Aceh, 2013

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014

pasokan barang ke pasar-pasar di Kota Banda Aceh, sehingga permintaan barang dapat terpenuhi dan inflasi berada pada posisi lebih rendah (lihat Tabel 2.16).

### Tabel 2.13
**Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) tahun 2008-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Banda Aceh</td>
<td>10,27</td>
<td>3,50</td>
<td>4,64</td>
<td>3,32</td>
<td>0,06</td>
<td>6,39</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lhokseumawe</td>
<td>13,78</td>
<td>3,96</td>
<td>7,19</td>
<td>3,55</td>
<td>0,39</td>
<td>8,27</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Provinsi Aceh</td>
<td>11,92</td>
<td>3,72</td>
<td>5,86</td>
<td>3,43</td>
<td>0,22</td>
<td>7,31</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nasional</td>
<td>11,06</td>
<td>2,78</td>
<td>6,96</td>
<td>3,79</td>
<td>4,3</td>
<td>8,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Aceh Dalam Angka 2014*

Walapun laju inflasi Kota Banda Aceh tahun 2013 mencapai 6,39 persen, angka ini masih merupakan laju inflasi terkecil di seluruh kota penghitungan inflasi di Pulau Sumatera pada tahun tersebut (Grafik 2.7).

### Grafik 2.6
**Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, Tahun 2013**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2014*

### 2.2.1.3 PDRB Perkapita

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat oleh karena mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai
kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau yang lebih tinggi kualitasnya.

**Tabel 2.14**

**PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh, 2010-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>ADHB</th>
<th>Pertumbuhan (%)</th>
<th>ADHK</th>
<th>Pertumbuhan (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td>34.496.195</td>
<td>15,47</td>
<td>13.580.960</td>
<td>0,85</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>39.175.573</td>
<td>13,56</td>
<td>14.120.792</td>
<td>3,97</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>44.173.265</td>
<td>12,76</td>
<td>14.673.367</td>
<td>3,91</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>49.212.652</td>
<td>11,41</td>
<td>15.253.440</td>
<td>3,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2014*

PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan Kota Banda Aceh selama dua tahun terakhir tetap mengalami peningkatan, namun mengalami laju pertumbuhan yang menurun.

**Grafik 2.7**

**Perbandingan PDRB Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsilainnya di Indonesia Tahun 2012**

*Sumber: www.kemitraan.or.id. 2014*

2.2.1.4 Kemiskinan


Tabel 2.15
Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Pengeluaran Per kapita sebulan (Rp)</th>
<th>Garis Kemiskinan ( Rp)</th>
<th>Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Makanan</td>
<td>Bukan Makanan</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>327.729</td>
<td>387.342</td>
<td>715.071</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>399.959</td>
<td>649.802</td>
<td>1.049.761</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>578.097</td>
<td>621.911</td>
<td>1.199.998</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>537.460</td>
<td>600.744</td>
<td>1.138.204</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>552.121</td>
<td>768.987</td>
<td>1.321.108</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>599.349</td>
<td>698.069</td>
<td>1.297.428</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>650.180</td>
<td>793.527</td>
<td>1.443.707</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: BPS Kota Banda Aceh*

Persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d tahun 2013 dapat terlihat dengan jelas pada grafik 2.13.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh tahun 2006 – 2013
Berdasarkan Tabel 2.28 dan Grafik 2.13 dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d 2013 secara fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan penurunan dan peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian daerah serta sumber daya alam yang ada.


Grafik 2.9
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2014

Solusi dari permasalahan di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu terus meningkatkan pendidikan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja, mempermudah investasi dan penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, dan memotivasi pencari kerja agar berani mengikuti lowongan-lowongan kerja di luar daerah maupun di luar negeri.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Sumber Wikipedia). Untuk Kota Banda Aceh, IPM terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 79 pada tahun 2013, melampaui IPM Nasional (Tahun 2012 : 73,81) dan Provinsi Aceh (73,05) (lihat Grafik 2.10)
**Grafik 2.10**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2009-2013


*Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2013 & 2014*

Berdasarkan website BPS Indonesia, angka IPM Kota Banda Aceh termasuk rata-rata tinggi di Indonesia, di atas kota-kota lain seperti Kota Surabaya (78,97), Kota Medan (78,62), dan Batam (78,62).

**Grafik 2.11**

Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan kab/kota di Indonesia Tahun 2013

![Comparison graph of IPM index among various cities in Indonesia, showing Banda Aceh at 79.47, Surabaya at 78.97, Medan at 78.62, and others.]

*Sumber: BPS Indonesia. 2014 (www.bps.go.id)*

---

**2.2.1.6 Pengeluaran Perkapita Rupiah**

Grafik 2.12
Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011-2014

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2015

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi selain inflasi dan ketimpangan neraca pembayaran. Pengangguran menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi momok yang menakutkan bagi setiap negara. Tingginya angka pengangguran disebabkan besarnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Iklim investasi yang sehat dan kemudahan-kemudahan birokrasi bagi pengusaha yang ingin menanamkan modalnya serta terciptanya keamanan yang kondusif sangat mendukung terciptanya investasi dalam mengurangi angka pengangguran yang terus bertambah.


Tabel 2.16
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Pengangguran (Orang)</th>
<th>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.675</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>12.090</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>10.071</td>
<td>9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>10.505</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>8.916</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>7.029</td>
<td>7,17</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>Tdk ada data</td>
<td>Tdk ada data</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>11.475</td>
<td>10,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : BPS Aceh Tahun 2015

Pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 9,8% dengan jumlah pengangguran berjumlah 10.071 orang menurun sebesar 16,7% jika dibandingkan tahun 2008. Seiring dengan berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BBR) di Provinsi Aceh pada tanggal 16 April 2009, terjadi lonjakan jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebesar 4,3% dengan TPT sebesar 11,6 %. Dan pada akhir tahun 2012 tingkat pengangguran di Banda Aceh menurun menjadi 7.029 orang dengan TPT sebesar 7,17% ini berarti terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 18,5% jika dibandingkan dengan tahun 2011, sedangkan tahun 2013 tidak ada data angka TPT yang dikeluarkan oleh BPS disebabkan jumlah quisioner tidak mencukupi kuota. tetapi tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh naik kembali menjadi 10,24%. Hal ini disebabkan antara lain tingginya arus urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, dan masih rendahnya keahlian dan keterampilan pencari kerja sehingga sangat menyulitkan dalam mendapatkan kesempatan kerja.
Komponen penting dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang handal, berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, daya saing murid di tingkat nasional, dan meningkatkan peran generasi muda.

Literasi atau melek huruf merupakan modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya. Penduduk yang memiliki literasi berada pada usia 15 tahun keatas. Kota Banda Aceh memiliki tingkat melek huruf yang tinggi mencapai 99,39 persen, sedangkan sisanya 0,61 persen masih dalam kategori buta huruf. Penduduk dalam kategori buta huruf diperkirakan...
merupakan usia tua yang kemungkinan sulit mendapatkan pelayanan pendidikan dimasa lampau.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh
Tahun 2011-2013


<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis</td>
<td>179.898</td>
<td>182.321</td>
<td>149.346</td>
<td>166.819</td>
<td>170.673</td>
<td>178.438</td>
<td>187.161</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</td>
<td>180.676</td>
<td>182.963</td>
<td>150.702</td>
<td>168.232</td>
<td>172.084</td>
<td>179.786</td>
<td>188.310</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Angka melek huruf</td>
<td>99,60</td>
<td>99,60</td>
<td>99,10</td>
<td>99,16</td>
<td>99,18</td>
<td>99,25</td>
<td>99,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDG’s dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI tahun 2013 sebesar 95,13 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai sekolah menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Sedangkan untuk SMA/SMK juga tersebar di Kota Banda Aceh dan mudah dijangkau dan berada di setiap kecamatan.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTSN sejalan kebijakan Pemerintah tentang Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Pendidikan yang terbebas dari hambatan biaya untuk 12 tahun dengan pendidikan universal dengan program subsidi BOSDA dan beasiswa bagi keluarga miskin. Tabel 2.17 berikut memberikan gambaran APM Kota Banda Aceh dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA/SMK.
## Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>APM SD/MI</td>
<td>93,54</td>
<td>102,78</td>
<td>103,15</td>
<td>116,81</td>
<td>114,99</td>
<td>91,32</td>
<td>95,13</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP/MTs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>APM SMP/MTs</td>
<td>62,53</td>
<td>80,73</td>
<td>79,86</td>
<td>94,74</td>
<td>84,29</td>
<td>73,75</td>
<td>86,09</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>APM SMA/MA/SMK</td>
<td>61,83</td>
<td>66,66</td>
<td>75,72</td>
<td>79,67</td>
<td>72,17</td>
<td>60,95</td>
<td>55,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh
### Tabel 2.19
Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>SD/MI</th>
<th>SMP/MTs</th>
<th>SMA/SMK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>5.014</td>
<td>4.107</td>
<td>122,08</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1.313</td>
<td>891</td>
<td>147,36</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>3.260</td>
<td>2.737</td>
<td>119,11</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2.168</td>
<td>2.270</td>
<td>95,51</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>4.418</td>
<td>3.305</td>
<td>133,68</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>1.347</td>
<td>2.227</td>
<td>60,48</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>1.237</td>
<td>1.224</td>
<td>101,06</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>1.753</td>
<td>2.135</td>
<td>82,11</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>2.794</td>
<td>1.941</td>
<td>143,95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>23,304</strong></td>
<td><strong>20,837</strong></td>
<td><strong>111,84</strong></td>
<td><strong>9,233</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*
2.2.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memerhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.


<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI</td>
<td>23.593</td>
<td>24.349</td>
<td>24,824</td>
<td>23,342</td>
<td>25,899</td>
<td>26,840</td>
<td>28,743</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>APK SD/MI</td>
<td>110,10</td>
<td>122,90</td>
<td>125,15</td>
<td>129,81</td>
<td>118,69</td>
<td>138,64</td>
<td>137,94</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP/MTs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>APK SMP/MTs</td>
<td>77,40</td>
<td>109,20</td>
<td>110,39</td>
<td>125,00</td>
<td>139,72</td>
<td>118,21</td>
<td>114,37</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Jenjang Pendidikan</td>
<td>2007</td>
<td>2008</td>
<td>2009</td>
<td>2010</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>APK SMA/MA/SMK</td>
<td>79,73</td>
<td>95,74</td>
<td>108,70</td>
<td>106,98</td>
<td>106,97</td>
<td>105,01</td>
<td>100,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>SD/MI</th>
<th>SMP/MTs</th>
<th>SMA/MA/SMK</th>
<th>SD/MI</th>
<th>SMP/MTs</th>
<th>SMA/MA/SMK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>6.283</td>
<td>4.107</td>
<td>152,98</td>
<td>4.464</td>
<td>2.192</td>
<td>203,65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1.605</td>
<td>891</td>
<td>180,13</td>
<td>451</td>
<td>422</td>
<td>106,87</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>3.952</td>
<td>2.737</td>
<td>144,39</td>
<td>1.097</td>
<td>1.716</td>
<td>63,93</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2.576</td>
<td>2.270</td>
<td>113,48</td>
<td>868</td>
<td>1.274</td>
<td>68,13</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>5.390</td>
<td>3.305</td>
<td>163,09</td>
<td>2.131</td>
<td>1.784</td>
<td>119,45</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>1.665</td>
<td>2.227</td>
<td>74,76</td>
<td>1.832</td>
<td>1.326</td>
<td>138,16</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>1.515</td>
<td>1.224</td>
<td>123,77</td>
<td>1.069</td>
<td>660</td>
<td>161,97</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>2.198</td>
<td>2.135</td>
<td>102,95</td>
<td>1.021</td>
<td>1.172</td>
<td>87,12</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>3.559</td>
<td>1.941</td>
<td>183,36</td>
<td>364</td>
<td>1.080</td>
<td>33,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*


**Tabel 2.22**

**Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI</td>
<td>3559</td>
<td>3795</td>
<td>3,517</td>
<td>3,591</td>
<td>3,759</td>
<td>4,003</td>
<td>4,188</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Jumlah Siswa Tkt. VI</td>
<td>3563</td>
<td>3796</td>
<td>3,522</td>
<td>3,661</td>
<td>3,811</td>
<td>4,073</td>
<td>4,188</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>APT SD/MI</td>
<td>99,89</td>
<td>99,97</td>
<td>99,86</td>
<td>98,09</td>
<td>98,64</td>
<td>98,28</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP/MTs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs</td>
<td>3650</td>
<td>3573</td>
<td>4,179</td>
<td>3,951</td>
<td>3,711</td>
<td>4,102</td>
<td>4,095</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>Jumlah siswa Tkt. III</td>
<td>1339</td>
<td>3874</td>
<td>4,255</td>
<td>4,038</td>
<td>3,715</td>
<td>4,116</td>
<td>4,111</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>APT SMP/MTs</td>
<td>93,28</td>
<td>92,23</td>
<td>98,21</td>
<td>97,85</td>
<td>99,89</td>
<td>99,66</td>
<td>99,61</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Jumlah siswa Lulusan di jenjang SMA/MA/SMK</td>
<td>4,181</td>
<td>4,002</td>
<td>4,267</td>
<td>4,287</td>
<td>4,079</td>
<td>4,453</td>
<td>4,800</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>Jumlah Tkt Siswa III</td>
<td>4516</td>
<td>4391</td>
<td>4,506</td>
<td>4,606</td>
<td>4,205</td>
<td>4,475</td>
<td>4,803</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>APT SMA/MA/SMK</td>
<td>92,58</td>
<td>91,14</td>
<td>94,70</td>
<td>93,07</td>
<td>97,00</td>
<td>99,51</td>
<td>99,94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*
Berdasarkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) menurut kecamatan, angka yang mencapai 100 persen terdapat di jenjang SD/MI pada tahun 2013, SMP/MTsN maupun SMA/SMK yaitu Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Meuraxa, sedangkan yang mencapai 100 persen di semua jenjang yaitu kecamatan Syiah Kuala. Berikut tabel penjelasan perkembangan APT menurut kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2013.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah siswa SD/MI</th>
<th>Jumlah siswa SMP/MTs</th>
<th>Jumlah siswa SMA/MA/SMK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kelulusan di SD/MI</td>
<td>Kelulusan di SMP/MTs</td>
<td>Kelulusan di SMA/MA/SMK</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>VI</td>
<td>IV</td>
<td>III</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>943</td>
<td>1.304</td>
<td>1.811</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>218</td>
<td>141</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>489</td>
<td>344</td>
<td>532</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>375</td>
<td>256</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>866</td>
<td>717</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>257</td>
<td>515</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>173</td>
<td>373</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>360</td>
<td>355</td>
<td>1.053</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>507</td>
<td>90</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>4,188</td>
<td>4,095</td>
<td>4,800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh
Kualitas pendidikan bila dilihat dari Angka Pendidikan yang ditamatkan, secara rata-rata menunjukkan angka cukup menggembirakan, APT Tingkat SD/MI telah mencapai 100 persen, APT Tingkat SMP/MTs mencapai 99,61 persen, dan APT Tingkat SMA/MA/SMK mencapai 99,94 persen. Belum tercapainya 100 persen APT menunjukkan masih rendahnya kualitas sebagian anak didik, sehingga harus menamatkan pendidikannya lebih dari masa yang seharusnya.

Untuk menunjang suksesnya program Penerapan Pendidikan Terpadu antara pendidikan umum dengan pendidikan agama (diniyah), maka Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan membangun Banda Aceh Madani Education Center (BMEC), dengan Lokasi perencanaan berada di eks STM Lampineung persimpangan jl. Tgk. Daud Bereueh dan jl. P. Nyak Makam seluas ± 9.0 ha (lihat Gambar 2.16 Lokasi BMEC) melalui konsep “greening the city” yang terpadu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan serta sarana prasarana di Kota Banda Aceh.

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 30 dari 5060 kelahiran hidup atau setelah dikonversikan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup, bila dibandingkan target pencapaian MDGs adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015, maka dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kota Banda Aceh masih tergolong
rendah. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.

**Tabel 2.24**

Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2013</th>
<th>Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2013</th>
<th>AKHB</th>
<th>AKB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kuta Alam</td>
<td>3</td>
<td>961</td>
<td>997</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1</td>
<td>228</td>
<td>996</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>2</td>
<td>788</td>
<td>998</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>1</td>
<td>490</td>
<td>998</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Baiturrahman</td>
<td>5</td>
<td>725</td>
<td>994</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Lueng Bata</td>
<td>1</td>
<td>561</td>
<td>999</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Meuraxa</td>
<td>7</td>
<td>358</td>
<td>981</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Banda Raya</td>
<td>9</td>
<td>472</td>
<td>981</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaya Baru</td>
<td>1</td>
<td>477</td>
<td>998</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*

Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih terjadi di semua kecamatan menunjukkan pelayanan di bidang kesehatan masih belum baik. Ini mengindikasikan kualitas pelayanan minimal belum berjalan optimal dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan yang baik dan optimal ini juga ditentukan oleh tersedianya berbagai fasilitas penunjang baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
Tabel 2.25
Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah Kematian Bayi</td>
<td>20</td>
<td>33</td>
<td>16</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>14</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jumlah kelahiran</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Ratio ( AKB )</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh


Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan severely underweight (gizi buruk). Target MDG’s di tahun 2015, angka kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang) adalah 0,18 persen. Untuk Kota Banda Aceh persentase gizi buruk di akhir tahun 2013 sebesar 0,11 persen. Selama kurun waktu tujuh tahun persentase gizi buruk hanya dibawah 1 persen yaitu tahun 2007 sebesar 0,43 persen dan tahun 2013 hanya 0,11 persen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Balita Gizi Buruk</td>
<td>90</td>
<td>99</td>
<td>70</td>
<td>85</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio</td>
<td>0,43</td>
<td>0,37</td>
<td>3,8</td>
<td>0,47</td>
<td>0,01</td>
<td>0,02</td>
<td>0,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh. Dapat dikatakan bahwa industri pariwisata Kota Banda Aceh saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif.

Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Kota Banda Aceh telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman budaya didukung oleh kreatifitas seni dankeramahtamahan masyarakat, membuat Kota Banda...
Aceh mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara geografis, Kota Banda Aceh juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.


<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Capaian Pembangunan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.</td>
<td>63</td>
<td>67</td>
<td>75</td>
<td>73</td>
<td>75</td>
<td>89</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.</td>
<td>42</td>
<td>44</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Disbudpar Kota Banda Aceh dan Disdikpora Kota Banda Aceh

**Tabel 2.28**

**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah gru kesenian per 10.000 penduduk</th>
<th>Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk</th>
<th>Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk</th>
<th>Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>17</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>49</strong></td>
<td><strong>6</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*

**Tabel 2.29**

**Jumlah Penghargaan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Seni</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>8</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pemberdayaan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Generasi Muda</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*
### Tabel 2.30
Jumlah Karya Budaya Yang Diaktualisasikan Kembali Pada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Seni Tari</td>
<td>40</td>
<td>42</td>
<td>45</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>104</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sanggar Tari</td>
<td>95</td>
<td>82</td>
<td>94</td>
<td>100</td>
<td>75</td>
<td>31</td>
<td>49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*

### Tabel 2.31
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Gedung Kesenian</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sanggar Seni</td>
<td>82</td>
<td>87</td>
<td>94</td>
<td>97</td>
<td>100</td>
<td>91</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Gelanggang Renang</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Arena Permainan</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Panti Pijat</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Taman Rekreasi</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Jasa Impresariat &amp; Promotor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi &amp; Pameran</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*

### Tabel 2.32
Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Situs Cagar Budaya</td>
<td>35</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*
### Tabel 2.33
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Bidang Jasa Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Usaha Jasa Perjalanan Wisata</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>27</td>
<td>62</td>
<td>65</td>
<td>65</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tenaga Kerja Usaha jasa Perjalanan Wisata</td>
<td>190</td>
<td>191</td>
<td>147</td>
<td>247</td>
<td>246</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Usaha Jasa makanan dan minuman</td>
<td>180</td>
<td>201</td>
<td>223</td>
<td>246</td>
<td>174</td>
<td>241</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Restauran</td>
<td>38</td>
<td>48</td>
<td>51</td>
<td>62</td>
<td>25</td>
<td>0</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rumah Makan</td>
<td>115</td>
<td>120</td>
<td>130</td>
<td>139</td>
<td>113</td>
<td>139</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cafe</td>
<td>27</td>
<td>33</td>
<td>42</td>
<td>45</td>
<td>36</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tenaga Kerja Usaha Jasa Makanan dan Minuman</td>
<td>1080</td>
<td>1206</td>
<td>1338</td>
<td>1476</td>
<td>1044</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi</td>
<td>36</td>
<td>40</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hotel Bintang</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hotel Non Bintang</td>
<td>19</td>
<td>23</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tenaga Kerja Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi</td>
<td>962</td>
<td>896</td>
<td>946</td>
<td>946</td>
<td>760</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Usaha Jasa Daya Tarik Wisata</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Peninggalan Sejarah dan Purbakala</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Objek Ziarah</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Museum</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh*
## Aspek Pelayanan Umum

### Fokus Layanan Urusan Wajib

#### Pendidikan

##### Angka Partisipasi Sekolah

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td>20.04</td>
<td>20.36</td>
<td>20.45</td>
<td>21.00</td>
<td>21.82</td>
<td>21.70</td>
<td>23.30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah murid usia</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7-12 thn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.1.</td>
<td>21.42</td>
<td>19.81</td>
<td>19.83</td>
<td>17.98</td>
<td>18.97</td>
<td>19.35</td>
<td>20.83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah penduduk</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kelompok usia 7-12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tahun</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.2.</td>
<td>100,0</td>
<td>100,9</td>
<td>103,1</td>
<td>116,8</td>
<td>114,9</td>
<td>112,1</td>
<td>111,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APS SD/MI</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah murid usia</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13-15 thn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.1.</td>
<td>15.70</td>
<td>11.47</td>
<td>11.62</td>
<td>10.22</td>
<td>10.79</td>
<td>11.01</td>
<td>11.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah penduduk</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kelompok usia 13-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tahun</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.2.</td>
<td>100,6</td>
<td>100,2</td>
<td>79,86</td>
<td>94,74</td>
<td>84,29</td>
<td>81,53</td>
<td>79,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APS SMP/MTs</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td>11.02</td>
<td>9.703</td>
<td>10.68</td>
<td>10.54</td>
<td>10.07</td>
<td>10.07</td>
<td>10.02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah murid usia</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16-18 thn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>jumlah penduduk</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>usia 16-18 thn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.2.</td>
<td>61,82</td>
<td>66,66</td>
<td>75,71</td>
<td>79,66</td>
<td>72,17</td>
<td>70,72</td>
<td>68,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>APS SMA/MA/SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*
### Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh menurut kecamatan Tahun 2013/2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah murid Usia 7-12 th</th>
<th>Jumlah Penduduk Usia 7-12 th</th>
<th>APS</th>
<th>Jumlah murid Usia 13-15 th</th>
<th>Jumlah Penduduk Usia 13-15 th</th>
<th>APS</th>
<th>Jumlah murid Usia 16-18 th</th>
<th>Jumlah Penduduk Usia 16-18 th</th>
<th>APS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>5,014</td>
<td>4,107</td>
<td>122.0</td>
<td>4,464</td>
<td>2,192</td>
<td>203.6</td>
<td>3,830</td>
<td>2,672</td>
<td>143.34</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1,313</td>
<td>891</td>
<td>147.3</td>
<td>451</td>
<td>422</td>
<td>106.8</td>
<td>306</td>
<td>559</td>
<td>54.74</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>3,260</td>
<td>2,737</td>
<td>119.1</td>
<td>1,097</td>
<td>1,716</td>
<td>63.93</td>
<td>1,020</td>
<td>2,634</td>
<td>38.72</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2,168</td>
<td>2,270</td>
<td>95.51</td>
<td>868</td>
<td>1,274</td>
<td>68.13</td>
<td>240</td>
<td>1,520</td>
<td>15.79</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>4,418</td>
<td>3,305</td>
<td>133.6</td>
<td>2,131</td>
<td>1,784</td>
<td>119.46</td>
<td>724</td>
<td>2,196</td>
<td>32.97</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>1,347</td>
<td>2,227</td>
<td>60.48</td>
<td>1,832</td>
<td>1,326</td>
<td>138.1</td>
<td>445</td>
<td>1,611</td>
<td>27.62</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>1,237</td>
<td>1,224</td>
<td>101.0</td>
<td>1,069</td>
<td>660</td>
<td>161.9</td>
<td>627</td>
<td>847</td>
<td>74.03</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>1,753</td>
<td>2,132</td>
<td>82.22</td>
<td>1,021</td>
<td>1,172</td>
<td>87.12</td>
<td>2,493</td>
<td>1,318</td>
<td>189.15</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>2,794</td>
<td>1,941</td>
<td>143.9</td>
<td>364</td>
<td>1,080</td>
<td>33.70</td>
<td>343</td>
<td>1,369</td>
<td>25.05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah Total</strong></td>
<td><strong>23,304</strong></td>
<td><strong>20,834</strong></td>
<td><strong>111.8</strong></td>
<td><strong>13,297</strong></td>
<td><strong>11,626</strong></td>
<td><strong>114.3</strong></td>
<td><strong>10,028</strong></td>
<td><strong>14,726</strong></td>
<td><strong>68.10</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh*

### Tabel 2.36
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td>111</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Jumlah gedung sekolah</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>193</td>
<td>215</td>
<td>216</td>
<td>195</td>
<td>237</td>
<td>210</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Jumlah gedung sekolah</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>436</td>
<td>319</td>
<td>314</td>
<td>276</td>
<td>239</td>
<td>258</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>42</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Jumlah gedung sekolah</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>42</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Jenjang Pendidikan</td>
<td>2007</td>
<td>2008</td>
<td>2009</td>
<td>2010</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>penduduk kelompok usia 16-18 tahun</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>2.548</td>
<td>2.911</td>
<td>2.351</td>
<td>1.890</td>
<td>1.995</td>
<td>339</td>
<td>327</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>SD/MI</th>
<th>SMP/MTs</th>
<th>SMA/MA/SMK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jml Gdg Skh</td>
<td>Jml Pddk Usia 7-12 th</td>
<td>Rasio</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>17</td>
<td>4,107</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>6</td>
<td>891</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>15</td>
<td>2,737</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>8</td>
<td>2,270</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>16</td>
<td>3,305</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>6</td>
<td>2,227</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>10</td>
<td>1,224</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>8</td>
<td>2,132</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>11</td>
<td>1,941</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>97</td>
<td>20,834</td>
<td>215</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.3.1.1.3 Rasio Guru per Murid

Tabel 2.38
Jumlah Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang Pendidikan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD/MI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Jumlah Guru</td>
<td>1.247</td>
<td>1.340</td>
<td>1.386</td>
<td>1.380</td>
<td>1.342</td>
<td>1.320</td>
<td>1.806</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP/MTs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Jumlah Guru</td>
<td>1.046</td>
<td>1.116</td>
<td>1.146</td>
<td>1.096</td>
<td>1.059</td>
<td>1.027</td>
<td>1.194</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA/MA/SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Jumlah Guru</td>
<td>1.287</td>
<td>1.369</td>
<td>1.356</td>
<td>1.340</td>
<td>1.330</td>
<td>1.640</td>
<td>1.693</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Rasio</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh
Apabila diperhatikan dari rasio penduduk terhadap murid dan rasio murid terhadap guru, telah menunjukkan kondisi yang ideal untuk Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah relatif baik.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses Pendidikan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Sarana dan Prasarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan Pendidikan, dan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ujian Nasional diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.


Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan.

Arah pembangunan kesehatan di Kota Banda Aceh secara umum adalah terselelenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

2.3.1.2.1 Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita


Meskipun jumlah posyandu masih relatif rendah, masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai berbagai pilihan akses pelayanan kesehatan karena terdapat banyak fasilitas kesehatan di daerah ini. Hal ini disebabkan oleh posisi Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersedia. Dengan tingkat pendapatan yang relatif baik, masyarakat mampu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.
### Tabel 2.39
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Posyandu</td>
<td>110</td>
<td>112</td>
<td>112</td>
<td>112</td>
<td>113</td>
<td>113</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio</td>
<td>1:191</td>
<td>1:238</td>
<td>1:160</td>
<td>1:160</td>
<td>1:210</td>
<td>1:221</td>
<td>1:171</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*

### Tabel 2.40
Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Posyandu</th>
<th>Jumlah Balita</th>
<th>Rasio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Ulee Kareng</td>
<td>9</td>
<td>1.887</td>
<td>1/210</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kecamatan Syiah Kuala</td>
<td>11</td>
<td>3.263</td>
<td>1/297</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kecamatan Kuta Raja</td>
<td>6</td>
<td>721</td>
<td>1/120</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kecamatan Kuta Alam</td>
<td>15</td>
<td>1.720</td>
<td>1/115</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>10</td>
<td>1.430</td>
<td>1/143</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kecamatan Baiturrahman</td>
<td>18</td>
<td>1.938</td>
<td>1/108</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kecamatan Banda Raya</td>
<td>10</td>
<td>1.037</td>
<td>1/104</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>16</td>
<td>967</td>
<td>1/60</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kecamatan Meuraxa</td>
<td>18</td>
<td>1.656</td>
<td>1/92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>113</strong></td>
<td><strong>14.619</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*

Dari Tabel 2.44 dan 2.45 dapat disimpulkan bahwa dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, hampir semua wilayah kecamatan sudah memiliki jumlah posyandu yang cukup dengan rata-rata satu posyandu melayani kurang dari 200 balita, kecuali wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Syiah Kuala yang setiap posyandu melayani 210 dan 297 balita.

### 2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

**Tabel 2.42**
Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Puskesmas</th>
<th>Pustu</th>
<th>Polindes/poskesdes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>Rasio</td>
<td>Jumlah</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.148</td>
<td>1</td>
<td>1:25.148</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.671</td>
<td>2</td>
<td>1:17.836</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>12.819</td>
<td>1</td>
<td>1:12.819</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.503</td>
<td>2</td>
<td>1:24.752</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>24.560</td>
<td>1</td>
<td>1:24.560</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>35.218</td>
<td>1</td>
<td>1:35.218</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.941</td>
<td>1</td>
<td>1:22.941</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.460</td>
<td>1</td>
<td>1:24.460</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.962</td>
<td>1</td>
<td>1:18.962</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
<td><strong>11</strong></td>
<td><strong>1:22.662</strong></td>
<td><strong>25</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*

Sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan, di tiap satu desa selayaknya memiliki satu sarana pelayanan kesehatan (dapat pustu, polindes atau poskesdes). Kota Banda Aceh memiliki 90 desa dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dan Rumah sakit sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 60 unit (66,6 persen). Berarti kekurangannya sekitar 30 unit lagi (33,4 persen).

### 2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk


#### Tabel 2.43
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah Provinsi)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah Kota)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II-72

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

4. Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
</tr>
</thead>
</table>

5. Jumlah seluruh Rumah Sakit

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>5</th>
<th>5</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>6</th>
<th>6</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
</table>

6. Jumlah Penduduk

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>219.659</th>
<th>217.918</th>
<th>212.241</th>
<th>223.446</th>
<th>228.562</th>
<th>238.784</th>
<th>249.282</th>
</tr>
</thead>
</table>

7. Rasio

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
</table>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk


Tabel 2.44

Jumlah Dokter di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>N o</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Dokter</td>
<td>70</td>
<td>76</td>
<td>63</td>
<td>51</td>
<td>74</td>
<td>40</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Penduduk</td>
<td>219.659</td>
<td>217.918</td>
<td>212.241</td>
<td>223.446</td>
<td>228.562</td>
<td>238.784</td>
<td>249.282</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 2.45

Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Jumlah Dokter</th>
<th>Rasio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.148</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,574</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.671</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,918</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>12.819</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,410</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.503</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,251</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>24.560</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,912</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kecamatan</td>
<td>Jumlah Penduduk</td>
<td>Jumlah Dokter</td>
<td>Rasio</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>35.218</td>
<td>2</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.941</td>
<td>3</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.460</td>
<td>3</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.962</td>
<td>3</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
<td><strong>30</strong></td>
<td>1.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh


Model Gampong Sehat


Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)

Saat ini total panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh adalah 707.343 km. Panjang jalan dengan kondisi baik sampai tahun 2014 sepanjang 680.110 km, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 27.230 Km.
Tabel 2.46
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kondisi Jalan</th>
<th>Panjang Jalan (km)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kondisi Baik</td>
<td>192.510</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kondisi Rusak Sedang</td>
<td>114.110</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kondisi Rusak</td>
<td>181.323</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kondisi Rusak Berat</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)</td>
<td>487.943</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Meningkatnya pertumbuhan lalu lintas yang meliputi jumlah kendaraan dan kepemilikan kendaraan (demand) yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan prasarana transportasi (supply). Dengan kondisi tersebut menimbulkan permasalahan transportasi yaitu kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Banda Aceh. Salah satu titik dengan tingkat kemacetan yang cukup tinggi adalah Simpang Surabaya. Kondisi saat ini kapasitas Simpang Surabaya mulai tidak mampu melayani arus kendaraan yang melaluinya, hal ini terindikasi dari kemacetan yang sering terjadi terutama pada saat jam sibuk (peak hours). Selain itu simpang ini merupakan salah satu titik simpul penghubung jalur evakuasi Kota Banda Aceh.

Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan tipe simpang dari tipe sebidang menjadi tipe tidak sebidang dengan membangun fly over pada Simpang Surabaya.

Tabel Data Teknis Pembangunan Fly Over Sp. Surabaya

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang Jalan</th>
<th>850,954 m (Termasuk Fly Over)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Panjang Fly Over</td>
<td>275 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Bentang</td>
<td>8 (Delapan) Bentang</td>
</tr>
<tr>
<td>Lebar Fly Over</td>
<td>17,5 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Pondasi Flyover</td>
<td>Bore Pile dia. 100 cm (144 titik)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pier / Kolom</th>
<th>7 buah</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Panjang Oprit | Sisi Timur = 281.00 m  
                Sisi Barat = 294.954 m |

Salah satu permasalahan krusial dalam program pembangunan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan Kota Banda Aceh adalah harga tanah yang tinggi untuk dibebaskan. Sebagai gambaran pembebasan lahan untuk pekerjaan Pembangunan Fly Over simpang Surabaya dan Underpass simpang Beurawe menelan biaya sebesar 26 Milyar. Demikian juga dengan pembangunan jalan Sultan Malikusaleh yang menghabiskan biaya sebesar 23 milyar untuk keperluan pembebasan lahan, belum lagi program pembangunan prioritas, peningkatan kapasitaas jaringan jalan strategis lainnya yang secepatnya membutuhkan lahan untuk dibebaskan. Kondisi ini jelas sangat membebani keuangan daerah yang hanya bersumber dari APBPK Kota Banda Aceh.


Sistem perparkiran di kota Banda Aceh terutama di kawasan jalan protokol dan perdagangan perlu dilakukan traffic demand management untuk menghindari kemacetan akibat penyempitan ruas jalan yang

Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh perparkiran di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Memaksimalkan penggunaan ruang parkir di dalam bangunan (basement).
2. Menyediakan moda transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.

2.3.1.3.2 Rasio Jaringan Drainase

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidroliis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relatif datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.
Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti: pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan *pumping station* karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.


**Gambar 2.15**

*Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh*

Kondisi drainase pada saat itu adalah terjadinya sedimentasi, sampah, dinding saluran yang runtuh dan menutup saluran, penyempitan dimensi saluran dan gorong-gorong, hambatan akibat bangunan lain seperti pipa PDAM, tiang listrik, tiang telepon, sisa-sisa bekesting dan sebagainya serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang

Pemeliharaan saluran drainase sangat diperlukan agar fungsi sistem drainase menjadi lebih efektif. Dengan pemeliharaan yang baik maka dapat mengurangi dampak banjir atau genangan. Pemeliharaan drainase yang dilakukan pada saat itu belum menunjukkan hasil yang maksimal dikarenakan belum tersedianya data base saluran yang baik dan terorganisir sehingga akan berakibat dengan kebutuhan besaran dana yang diperlukan untuk setiap tahunnya. Pemeliharaan sistem drainase sampai dengan saat ini sekitar 71 persent yang telah tertangani.

**Tabel 2.47**

Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tahun</th>
<th>Panjang Saluran (Km)</th>
<th>Panjang Penanganan (Km)</th>
<th>Kondisi Baik (Km)</th>
<th>Kondisi Rusak (Km)</th>
<th>Kondisi Rusak Berat (Km)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2007</td>
<td>138,79</td>
<td>15,00</td>
<td>35,99</td>
<td>102,80</td>
<td>12,40</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2008</td>
<td>141,39</td>
<td>-</td>
<td>50,99</td>
<td>90,40</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2009</td>
<td>165,3</td>
<td>62,50</td>
<td>113,49</td>
<td>51,81</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2010</td>
<td>172,3</td>
<td>7,00</td>
<td>120,49</td>
<td>51,81</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2011</td>
<td>186,6</td>
<td>91,00</td>
<td>175,50</td>
<td>11,10</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2012</td>
<td>3.246,55</td>
<td>1.6907</td>
<td>177,19</td>
<td>11,10</td>
<td>10,76</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>2013</td>
<td>2.248,43</td>
<td>1.8093</td>
<td>179,00</td>
<td>550,40</td>
<td>9,06</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>2014</td>
<td>2.248,24</td>
<td>8.5504</td>
<td>187,56</td>
<td>552,21</td>
<td>7,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh*

Kota Banda Aceh dengan topografi pada elevasi 0,8 meter diatas permukaan air laut, sehingga secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan, dan banjir pasang laut yang tidak dapat dibuang dengan gravitasi. Untuk hal tersebut, saat ini Kota Banda Aceh memiliki sembilan rumah pompa yang sangat diperlukan khususnya apabila munculnya musim penghujan bersamaan dengan pasang purnama, karena kondisi aliran pada tempat tersebut saat pasang purnama sudah merupakan aliran balik (*back water*). Tanpa
stasiun pompa aliran air sudah stagnan dan khususnya pada lokasi genangan permanen dalam drainase, sehingga kelebihan air tidak dapat dikuurangi dan dikhawatirkan di musim kemarau akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

**Tabel 2.48**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Kondisi</th>
<th>Zona</th>
<th>Jumlah Mesin</th>
<th>Kapasitas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lampaseh P2.1</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>Baik</td>
<td>II</td>
<td>4</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kp. Pande P2.2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>Baik</td>
<td>II</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Punge Jurong P2.3</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>Baik</td>
<td>II</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Peunayong P3.1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>Baik</td>
<td>III</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Tgk. Diblang P3.2</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>Baik</td>
<td>III</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lampulo P3.3</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>Baik</td>
<td>III</td>
<td>4</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Peuniti P4.1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>Baik</td>
<td>IV</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Panteriek</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>Baik</td>
<td>VI</td>
<td>2</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jeulingke P5.2</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>Baik</td>
<td>V</td>
<td>3</td>
<td>0,5 m³/dt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Wilayah yang mengalami banjir genangan disebabkan oleh tidak tersedianya drainase mikro. Untuk pengadaan drainase mikro diwilayah banjir genangan terkendala oleh ketersediaan lahan dan biaya pembebasan yang kurang

### 2.3.1.3.3 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2.49

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses air Bersih</td>
<td>78.530</td>
<td>108.785</td>
<td>140.850</td>
<td>166.095</td>
<td>190.070</td>
<td>199.728</td>
<td>207.824</td>
<td>208.070</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penduduk</td>
<td>219.659</td>
<td>217.918</td>
<td>212.241</td>
<td>223.446</td>
<td>228.562</td>
<td>238.784</td>
<td>249.282</td>
<td>249.499</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persentase penduduk berakses air bersih (%)</td>
<td>35,75</td>
<td>49,9</td>
<td>66,4</td>
<td>74,3</td>
<td>83,16</td>
<td>83,64</td>
<td>83,37</td>
<td>83,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: PDAM Kota Banda Aceh

Tabel 2.50
Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Jumlah Pelanggan (SL)</th>
<th>Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum</th>
<th>Persen tase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.979</td>
<td>3.700</td>
<td>18.500</td>
<td>97,47</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.481</td>
<td>3.004</td>
<td>15.020</td>
<td>61,35</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.961</td>
<td>2.942</td>
<td>14.710</td>
<td>64,01</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Baithurrahman</td>
<td>35.249</td>
<td>4.850</td>
<td>24.250</td>
<td>68,79</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Leung Bata</td>
<td>24.581</td>
<td>4.536</td>
<td>22.680</td>
<td>92,26</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.545</td>
<td>9.358</td>
<td>46.790</td>
<td>94,44</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>12.831</td>
<td>2.420</td>
<td>12.100</td>
<td>94,30</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.702</td>
<td>6.755</td>
<td>33.775</td>
<td>94,60</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.170</td>
<td>4.049</td>
<td>20.245</td>
<td>80,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total</td>
<td>249.499</td>
<td>41.614</td>
<td>208.070</td>
<td>83.39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: PDAM Kota Banda Aceh

Sistem pelayanan air minum di Kota Banda Aceh dengan cakupan pelayanan pada akhir tahun 2014 sebesar 83,39%. Dari angka tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melampaui target MDGs 2015 untuk menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu sebesar 75%.

Meskipun begitu, upaya pengembangan sistem air minum di Kota Banda Aceh juga memiliki beberapa kendala, antara lain:

1. Belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat.
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar 3K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) akibat
3. Rusaknya sistem jaringan perpipaan akibat pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti pelebaran jalan, pembangunan drainase, penanaman kabel listrik dan kabel telekomunikasi.
4. Tingkat kehilangan air masih tinggi yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat terhadap sistem jaringan air minum.
5. Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi tingginya aktivitas perkotaan dan jumlah penduduk.

Jumlah sambungan rumah pada tahun ini telah mencapai 43.008 sambungan melalui jaringan perpipaan. Pelayanan air bersih di wilayah pelayanan PDAM Tirta Daroy mempunyai angka kebocoran ±46%. Permasalahan yang dihadapi PDAM Tirta Daroy saat ini masih tingginya tingkat kehilangan air, efisiensi penagihan, management demand dan supply belum memadai dan kondisi kuantitas dan kualitas air baku tidak stabil.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Realisasi RTRW</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rencana Peruntukan RTRW</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio (1/2)</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh

Tercapai nilai ketaatan peruntukan dan realisasi RTRW menunjukkan bahwa ketaatan hukum warga kota Banda Aceh telah meningkat. Artinya, kesadaran hukum masyarakat telah semakin baik.
2.3.1.4 Perumahan

2.3.1.4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)

Tabel 2.52
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Leding (Perpipaan)</td>
<td>15.706</td>
<td>21.757</td>
<td>28.170</td>
<td>33.219</td>
<td>38.014</td>
<td>39.836</td>
<td>40.695</td>
<td>42.062</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sumur Lindung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sumur tidak Terlindung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Mata Air Terlindung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mata Air Tidak Terlindung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Sungai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Danau/Waduk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Air Hujan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Air Kemasan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Lainnya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Total jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih</td>
<td>15.706</td>
<td>21.757</td>
<td>28.170</td>
<td>33.219</td>
<td>38.014</td>
<td>39.836</td>
<td>40.695</td>
<td>42.062</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Jumlah Rumah Tangga</td>
<td>46.570</td>
<td>48.572</td>
<td>50.752</td>
<td>52.752</td>
<td>54.572</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12)</td>
<td>33,73</td>
<td>44,79</td>
<td>55,51</td>
<td>62,97</td>
<td>69,66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: PDAM Kota Banda Aceh

2.3.1.4.2 Rasio Rumah Tinggal berakses Sanitasi (%)

Dalam upaya mengurangi efek limbah baik dari perumahan/permukiman maupun perdagangan/jasa telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan dalam upaya memenuhi mengurangi efek pengolahan limbah yang tidak benar. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Banda Aceh terus meningkat dengan persentasenya seperti tercantum dalam Tabel berikut ini:

Arahan pengembangan dibagi dalam 4 program tahapan, yaitu :

a) Program Jangka Mendesak ( tahun 2012-2017 )  
b) Program Jangka Menengah ( tahun 2017-2022)  
c) Program Jangka Panjang Pertama ( tahun 2022-2027)  
d) Program Jangka Panjang Kedua ( tahun 2027-2032)
Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum mempunyai beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Ketersediaan sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang memadai.
- Meningkatkan kualitas prasarana fisik bangunan umum baik secara struktural maupun arsitektural
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang ramah terhadap penyandang cacat (aksesibilitas penyandang cacat)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan agar sesuai RTRW dilakukan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang meliputi

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Tata Ruang/Tata Bangunan
- Penataan Bangunan
- Pemutihan IMB Dalam Kawasan Kota Banda Aceh
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Bangunan Umum
- Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tabel 2.54
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Luas Ruang Terbuka Hijau</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
<td>1.809,30</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Luas wilayah ber HPL/HGB</td>
<td>552,24</td>
<td>588,26</td>
<td>644,28</td>
<td>690,3</td>
<td>736,32</td>
<td>726,1</td>
<td>726,1</td>
<td>729,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)</td>
<td>3,28</td>
<td>3,07</td>
<td>2,80</td>
<td>2,62</td>
<td>2,45</td>
<td>2,49</td>
<td>2,49</td>
<td>2,48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.55
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Luas Wilayah</th>
<th>Luas wilayah ber HPL/HGB</th>
<th>Luas Ruang Terbuka Hijau</th>
<th>Rasio Ruang Terbuka Hijau</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>1005</td>
<td>193,6</td>
<td>193,6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>521</td>
<td>241</td>
<td>241</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>378</td>
<td>9,9</td>
<td>9,9</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>454</td>
<td>4,6</td>
<td>4,6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>534</td>
<td>4,3</td>
<td>4,3</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>615</td>
<td>5,7</td>
<td>5,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>1424</td>
<td>312,6</td>
<td>312,6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>726</td>
<td>425,5</td>
<td>425,5</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>479</td>
<td>35,5</td>
<td>35,5</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>RTH Tibang, Lambung dan Rusunawa</td>
<td>-</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>6136</td>
<td>1250,6</td>
<td>1250,6</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.5.2 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Umum

Pengawasan pemanfaatan ruang selama ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun bentuk bangunan yang ditegur terdiri dari:

- Bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB.
- Bangunan yang didirikan tanpa IMB dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh.
- Bangunan yang didirikan diatas tanah negara dan diatas saluran atau sarana umum yang merupakan milik pemerintah.
Tahapan teguran meliputi:

Surat teguran I dan teguran II, yaitu berupa perintah penghentian pekerjaan dan pengurusan IMB, serta dapat berupa peringatan pembongkaran bangunan yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang dan bangunan. Surat teguran III, yaitu berupa surat perintah pembongkaran.

Kegiatan pengawasan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pemilik bangunan yang mengurus IMB serta meningkatkan PAD Kota Banda Aceh.

**Tabel 2.56**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah Bangunan ber-IMB</td>
<td>34.684</td>
<td>35.356</td>
<td>35.887</td>
<td>36.801</td>
<td>37.563</td>
<td>45.937</td>
<td>46.746</td>
<td>47.445</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jumlah Bangunan</td>
<td>57.247</td>
<td>58.448</td>
<td>59.641</td>
<td>61.112</td>
<td>62.449</td>
<td>63.802</td>
<td>64.926</td>
<td>65.865</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Rasio bangunan ber-IMB</td>
<td>60,6</td>
<td>60,5</td>
<td>60,2</td>
<td>60,2</td>
<td>60,1</td>
<td>72,00</td>
<td>72,00</td>
<td>72,03</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh*

**Tabel 2.57**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Bangunan</th>
<th>Jumlah Bangunan ber-IMB</th>
<th>Rasio bangunan ber-IMB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>11.692</td>
<td>9.158</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>3.854</td>
<td>2.312</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>4.782</td>
<td>3.347</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>6.157</td>
<td>5.048</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Ulee Karend</td>
<td>6.707</td>
<td>4.896</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>9.871</td>
<td>7.403</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>7.254</td>
<td>4.571</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>8.616</td>
<td>6.204</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>65.865</strong></td>
<td><strong>47.445</strong></td>
<td><strong>72</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh*
Untuk mendukung terbangunnya permukiman yang layak huni dan dapat mendorong tumbuh kembang wilayah itu sendiri, diperlukan beberapa sarana dan prasarana pendukung yang dapat diwujudkan melalui:

- Pembangunan jalan utama dalam kawasan permukiman terbangun
- Pembangunan saluran air hujan/drainase
- Pembangunan jaringan distribusi air minum
- Pembangunan sistem pengolahan air limbah
- Kelayakan huni suatu rumah akan mempengaruhi kondisi perumahan di kawasan tersebut.

Pada suatu lingkungan permukiman keberadaan sarana dan prasarana merupakan ukuran standar kelayakan, artinya lingkungan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana (utilitas) yang memadai cenderung akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan. Hal ini cukup beralasan seperti keberadaan jalan-jalan penghubung ke daerah sekitar maupun ke pusat kota akan terjadi kemudahan akses interaksi dengan lingkungan permukiman sekitarnya maupun ke kawasan-kawasan utama pada daerah perkotaan. Disisi lain keberadaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan permukiman akan memacu pula peningkatan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

**Tabel 2.58**

Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Luas area permukiman tertata (Ha)</td>
<td>2324,08</td>
<td>2329,58</td>
<td>2335,08</td>
<td>2340,58</td>
<td>2346,08</td>
<td>2351,58</td>
<td>2357,08</td>
<td>2362,58</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Luas area permukiman keseluruhan (Ha)</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
<td>2506,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase</td>
<td>92,72</td>
<td>92,94</td>
<td>93,16</td>
<td>93,38</td>
<td>93,59</td>
<td>93,81</td>
<td>94,03</td>
<td>94,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas PU Kota Banda Aceh*
Meskipun Luas Permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh telah menunjukkan angka hampir 100 persen, akan tetapi Kota Banda Aceh masih memiliki Kawasan Kumuh. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi.


Untuk mengantisipasi kebutuhan akan perumahan yang berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan tingkat daya beli masyarakat yang cenderung fluktuatif serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya harga rumah (nilai lahan), maka diperkirakan kemampuan masyarakat menengah kebawah untuk
membeli rumah akan menurun. Untuk itu telah dilakukan upaya dengan pengembangan rumah susun sewa (Rusunawa).

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dimulai sejak tahun 2009 dan saat ini sudah ada yang beroperasi. Rumah susun tersebut keseluruhan sebanyak 4 x 98= 392 unit dengan asumsi 3 blok untuk hunian keluarga dan 1 blok untuk hunian lajang bekerja.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian murah dan layak huni yang belum dapat diterima dan terpaksa harus masuk daftar tunggu/antrian disebabkan terbatasnya jumlah unit hunian yang ada sedangkan jumlah peminat jauh lebih banyak dari daya tampung Rusunawa.

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010, Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu indikator untuk mengukur keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah jumlah program RPJM yang tertuang dalam RKPK. Untuk Kota Banda Aceh, jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPK sampai tahun 2014 sebesar 96%. Belum seluruhnya program RPJMD tertuang dalam RKPK lebih disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyusunan APBK setiap tahunnya membuat prioritas program dan anggaran yang melibatkan program-program yang langsung menyentuh urusan dasar masyarakat.

**Grafik 2.18**
Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPK

![Graph showing percentage of RPJMD programs included in RKPK]

*Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh*

**2.3.1.7 Perhubungan**

**2.3.1.7.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PJU)**

**Tabel 2.59**
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah penumpang Bis</td>
<td>133.756</td>
<td>146.000</td>
<td>394.200</td>
<td>662.721</td>
<td>526.623</td>
<td>941.921</td>
<td>1.007.855</td>
<td>799.785</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Total Jumlah Penumpang</td>
<td>244,246</td>
<td>314,753</td>
<td>580,685</td>
<td>870,307</td>
<td>724,857</td>
<td>1.165.387</td>
<td>1.436.508</td>
<td>1.335.350</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat Rencana Penerapan Dan Pengembangan Angkutan Massal Kota Banda Aceh

Maksud dan Tujuan Pembangunan Angkutan Massal Kota Banda Aceh, adalah :

- Mengatasi permasalahan transportasi perkotaan: kemacetan, kesemrawutan parkir, kecelakaan lalu lintas dan polusi
- Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk secara massal dan nyaman
- Menunjang pergerakan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi
- Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani

Terdapat 6 (enam) koridor yang direncanakan, yaitu:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Koridor</th>
<th>Panjang Traye (Km)</th>
<th>Jumlah Halte (Unit)</th>
<th>Perkiraan Jumlah Bus (Unit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pusat Kota - Darussalam</td>
<td>23,75</td>
<td>34</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Bandara Sim – Pusat Kota – Pelabuhan Ulee Lheu</td>
<td>52,02</td>
<td>56</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pusat Kota – Mata le</td>
<td>17,18</td>
<td>22</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pusat Kota – Ajun – Lhoknga</td>
<td>34,71</td>
<td>43</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ulee Kareng – Terminal Tipe A</td>
<td>16,31</td>
<td>21</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Terminal Tipe A – Syiah Kuala</td>
<td>14,03</td>
<td>18</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.3.1.7.2 Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek dihitung berdasarkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini untuk tahun 2007 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.78.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Izin Trayek perkotaan</td>
<td>588</td>
<td>496</td>
<td>360</td>
<td>339</td>
<td>322</td>
<td>358</td>
<td>358</td>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Izin Trayek perdesaan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah Izin Trayek</td>
<td>588</td>
<td>702</td>
<td>662</td>
<td>798</td>
<td>632</td>
<td>654</td>
<td>114</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rasio Izin Trayek</td>
<td>0.0027</td>
<td>0.0023</td>
<td>0.0017</td>
<td>0.0015</td>
<td>0.0014</td>
<td>0.0014</td>
<td>0.0014</td>
<td>0.0013</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.78 tampak pada tahun 2011 terjadi penurunan pemberian izin trayek. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi untuk beraktivitas, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kota menurun drastis maka dengan sendirinya angkutan kota tersebut berangsur-angsur berkurang karena angkutan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam melayani trayek tersebut.
Dari Tabel 2.79 tampak bahwa jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek dari tahun 2007 – 2014 berjumlah 41 unit dengan lokasi halte yang telah ada berada pada jalur – jalur utama trayek angkutan umum yaitu pada Jl. Tgk. Daud Beureueh 12 Unit, Jl. T. Nyak Arief 8 Unit, Jl. Chik Ditiro 2 Unit, Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata 3, Jl. T. Umar 11 Unit, Jl. ST. Iskandar Muda 1 Unit, Jl. T.P. Polem 1 unit, Jl. Soekarno Hatta 2 unit dan Jl. T. Hamzah Bendahara 1 Unit.

Tujuan perekayasaan halte kendaraan penumpang umum adalah :
- menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas;
- menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum
- menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus.

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan Kota Banda Aceh seperti marka jalan, rambu dan traffic light dari tahun 2007-2014 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.62
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Rambu</td>
<td>917 Unit</td>
<td>967 Unit</td>
<td>1017 Unit</td>
<td>1067 Unit</td>
<td>1368 Unit</td>
<td>1468 Unit</td>
<td>1848 Unit</td>
<td>150 Unit</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Marka</td>
<td>1340 M¹</td>
<td>1552 M¹</td>
<td>1750 M¹</td>
<td>2235 M¹</td>
<td>19396 M¹</td>
<td>10164 M’</td>
<td>38363 M’</td>
<td>14316 M’</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah Traffic Light</td>
<td>16 Titik</td>
<td>16 Titik</td>
<td>16 Titik</td>
<td>16 Titik</td>
<td>16 Titik</td>
<td>17 Titik</td>
<td>24 Titik</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.60 memperlihatkan bahwa jumlah fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2007 – 2011 bertambah. Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah (termasuk yang direhab) yang terdiri rambu tiang tunggal, rambu RPPJ dan Rambu Type F. Jumlah marka setiap tahun terus bertambah (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah traffic light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab. Selanjutnya perlu dilakukan perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh.

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh memiliki program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran bagi pengguna jalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan. Masih rendahnya kesadaran ini menjadi salah satu penyebab tingginya kecelakaan di Kota Banda Aceh. Beberapa kegiatan tersebut adalah:
1. Melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh akan pentingnya kesadaran dalam mematuhi perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.
2. Melaksanakan himbauan secara langsung bagi masyarakat melalui informasi mobil keliling.
3. Menerapkan sistem gembok roda bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan memarkirkan kendaraannya pada tempat yang dilarang.
4. Menambah jumlah petugas lapangan guna menertibkan lalu lintas angkutan jalan.

### 2.3.1.7.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- **Uji tipe** yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- **Uji berkala** yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Uji berkala untuk angkutan umum dilakukan secara periodik 6 bulan sekali.

Data jumlah kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.81. Dari Tabel 2.81 terlihat bahwa jumlah kir kendaraan di Kota Banda Aceh terjadi penurunan terutama pada tahun 2014, hal ini memungkinkan karena kendaraan dapat melakukan uji kir pada daerah lain.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Angkutan Umum</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
<td>Jmlh</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mobil penumpang umum</td>
<td>617</td>
<td>1,141</td>
<td>712</td>
<td>1,362</td>
<td>436</td>
<td>791</td>
<td>90.71</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Mobil bus</td>
<td>896</td>
<td>1,601</td>
<td>820</td>
<td>1,437</td>
<td>968</td>
<td>1,613</td>
<td>98.87</td>
<td>1,660</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Mobil barang</td>
<td>4,032</td>
<td>7,010</td>
<td>3,185</td>
<td>6,298</td>
<td>4,025</td>
<td>7,240</td>
<td>89.94</td>
<td>4,012</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kereta gandengan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kereta tempelan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>5,545</td>
<td>9,752</td>
<td>4,717</td>
<td>9,097</td>
<td>9,644</td>
<td>5,429</td>
<td>9,424</td>
<td>88.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

Kota Banda Aceh juga memiliki satu unit Pelabuhan Penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue Jalan Iskandar muda Gampung Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa untuk melayani transportasi pengebarangan dengan aktivitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda Aceh ke Pulo Aceh atau sebaliknya yang merupakan bantuan UNDP Pasca Tsunami, telah berfungsi secara maksimal dan telah berjalan lancar dalam melayani masyarakat.

Pengguna jasa transportasi terus meningkat baik dari masyarakat domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu kita terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang memadai melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (tahun 2002 sampai tahun 2017), kondisi fasilitas transportasi dalam Kota Banda Aceh diperlihatkan pada Tabel 2.82.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah pelabuhan ASDP</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jumlah pelabuhan udara</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jumlah terminal bis</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

2.3.1.7.5 **Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran**

Kota Banda Aceh saat ini memiliki 1 pelabuhan penyebrangan laut yaitu pelabuhan ulee lheue yang melayani rute lintasan Banda Aceh – Sabang dan Banda Aceh Lamteng Kabupaten Aceh Besar. Pelabuhan Ulee Lheue memiliki luas yaitu sekitar 8 Ha dengan pembagian lahan untuk terminal penumpang sebagai bangunan utama, lahan parkir, dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat (ferry), kolam pelabuhan, dan lain-lain.

2.3.1.7.6 **Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek**

Seluruh terminal angkutan di Kota Banda Aceh telah terlayani rute angkutan umum perkotaan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses keberadaan terminal. Hal ini dipengaruhi keberadaan terminal angkutan penumpang/barang yang berada didekat kawasan pusat kota.
Jumlah terminal di Kota Banda Aceh saat ini sebanyak 4 terminal, yaitu:
1. Terminal pelayanan tipe A (terminal batoh) yang melayani angkutan antar provinsi.
2. Terminal Pelayanan Tipe B (terminal L-300 Lueng Bata) yang melayani angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
3. Terminal pelayanan tipe C (terminal APK Keudah) yang melayani angkutan dalam kota.
4. Terminal mobil barang (terminal santan).


Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum diwilayah Kota Banda Aceh sepanjang 66 Km dari total Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh yaitu sepanjang 765,67 KM artinya panjang Jaringan Jalan Kota Banda Aceh yang Terlayani Angkutan Umum mencapai 8,60% dari total jaringan jalan di Kota Banda Aceh.

Perkembangan sistem jaringan jalan lokal lebih banyak dipengaruhi oleh kerangka utama kota, sehingga pola jalan cenderung membentuk grid mengikuti sistem jaringan jalan utama yang membentang cukup panjang. Sistem jaringan jalan internal Kota Banda Aceh untuk jalur pergerakan utama sudah cukup memadai, namun saat ini tidak ditunjang oleh jaringan sekunder yang berfungsi sebagai pembagi arus lalu lintas atau pengumpul (kolektor) pergerakan kendaraan, sehingga pada ruas-ruas jalan tertentu yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan kota menghubungkan antara jalan primer sering timbul kemacetan lalu lintas cukup parah pada saat jam sibuk (peak hour).


Berikut daftar rute trayek mobil angkutan umum dalam Kota Banda Aceh:

a. Terminal APK Keudah – Darussalam, PP (02B)
b. Terminal APK Keudah – Lampineung, PP (02A)
c. Terminal APK Keudah – Krueng Cut, PP (02C)
d. Terminal APK Keudah – Ulee Kareng, PP (06B)
e. Terminal APK Keudah – Keutapang Dua, PP (03A)
f. Terminal APK Keudah – Lamteumen, PP (04A)
g. Terminal APK Keudah – Ulee Lheue, PP (05A)
h. Terminal APK Keudah – lampeuneurut, PP (07A)
i. Terminal APK Keudah – Mibo, PP (07B)
j. Terminal APK Keudah – Tanjung, PP (08B)
k. Terminal APK Keudah – Lueng Bata, PP (08A)

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh pada tahun 2010 memiliki total penduduk sebanyak 223.446 jiwa, tersebar di sembilan kecamatan dan 90 gampong. Jika rata-rata timbulan sampah adalah 0,75 kg/kapita, maka

Keberhasilan dalam pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah ketersediaan berbagai sumber daya dalam hal kualitas dan kuantitas, sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta kondisi fisik kota yang semakin berkembang dengan segala dinamikanya.

Dalam hal sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manajemen, secara umum Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kota Banda Aceh telah memilikinya. Dengan sumber daya yang dimiliki sekarang DK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan, sebagai berikut :

- Pelayanan Sampah Terangkut : 78 persen
- Luas Wilayah Pelayanan : 86 persen
- Jumlah Penduduk Terlayani : 80 persen
- Jumlah Desa yang terlayani : 100persen (90gampong)
- Frekwensi pelayanan : 1-7 hari sekali
- Jumlah Gampong yang diberikan pelayanan secara "door to door" dan membayar retribusi sampah : 65 gampong

Disisi lain DK3 masih menghadapi banyak tantangan dan persoalan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, ekonomi, budaya, dan pembangunan fisik kota, yaitu :
- Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Volume sampah rata-rata yang dihasilkan sekarang, sebesar 780 m³/hari.
- Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi dengan pola pelayanan DK3.
- Perilaku warga masyarakat membuang sampah secara sembarangan sehingga munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat, sedangkan pewadahannya masih sangat terbatas.
- Keberadaan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadikan Kota Banda Aceh sebagai objek kunjungan masyarakat dari kabupaten/kota lain di Aceh, yang pada umumnya masih berperilaku buruk dalam pengelolaan sampah.
- Biaya pengelolaan sampah masih didominasi oleh subsidi APBK sebesar 87 persen, sedangkan pembayaran retribusi dari warga masyarakat masih sangat rendah, yaitu 13 persen, akan tetapi kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain Aceh dan di Indonesia pada umumnya.
- Armada pengangkutan sampah yang sebagian besar sudah mencapai usia pakai 10 tahun, sehingga diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk peremajaan armada pengangkutan sampah.
- Kondisi perkembangan kota menuntut ketersediaan sarana persampahan yang lebih modern, representatif dan efisien.
- Dalam hal-hal tertentu/khusus, masih dirasakan keterbatasan jumlah personil.

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh perlu terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan cakupan pelayanan hingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini ditempuh dengan penambahan armada dan perluasan kawasan yang dilayani secara “door to door”. Hal ini tentunya terkait juga dengan
upaya peningkatan penerimaan retribusi di sektor rumah tangga, namun demikian pelayanan sampah dengan kontainer masih akan terus dilakukan. Untuk pelayanan dengan kontainer akan diupayakan untuk pengalihan titik kontainer dari pusat kota dan jalan-jalan protokol ke wilayah pinggiran. Disamping itu untuk TPS yang selama ini ditempatkan kontainer 4 m² lebih dari satu, secara bertahap akan digantikan dengan kontainer ukuran 8 m³, di beberapa TPS, wadah kontainer diganti dengan wadah sampah komunal ukuran 660 liter.

Disamping itu juga akan dilakukan upaya pengurangan jumlah TPS liar di jalan-jalan utama baik di kota maupun di gampong baik dengan sosialisasi dan gotong royong serta berkoordinasi dengan pihak gampong dan kecamatan. Sampah-sampah yang selama ini dibuang ke TPS liar dapat dialihkan ke kontainer terdekat.

Pengumpulan sampah secara door-to-door merupakan sistem pengumpulan sampah yang dilakukan secara regular, terjadwal dan terjamin. Sistem ini hanya bisa diterapkan di kawasan pemukiman dimana infrastruktur jalan baik jalan utama maupun lorong memungkin dilalui oleh armada sampah.

Tingkat pelayanan dengan sistem ini sangat tergantung pada jadwal pengangkutan, yaitu saat kapan sampah tersebut diangkut (misalnya : dipagi hari atau di sore hari), frekwensi pengumpulan (misalnya : sekali, dua kali atau tiga kali per minggu). Mungkin ada yang beranggapan bahwa semakin sering frekwensi pengangkutannya akan semakin baik, akan tetapi frekwensi yang tinggi juga akan berdampak pada biaya. Semakin sering truk sampah lewat maka akan semakin menimbulkan gangguan (kebisingan, emisi) dan dapat mengganggu orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Disamping itu tiap kali sampah diangkut pasti ada sampah yang tertinggal dipinggir trotar jalan.

Kebersihan dari sistem operasional pengumpulan sampah juga sangat tergantung pada bagaimana sampah ditempatkan di titik pengumpulan, dan karena tidak ada ketentuan tentang hal ini, maka sudah bisa dipastikan akan ditemui beragam cara orang mengemas sampah,
misalnya: dimasukkan dalam kantong plastik, dimasukkan dalam tong plastik/logam, dimasukkan dalam kotak, dan sebagainya. Sebenarnya dengan menetapkan standar pengemasan sampah akan mempermudah proses pengumpulan sehingga secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan.

Sistem pengumpulan ini akan lebih baik lagi bila sampah ditempatkan di tempat tepat di depan rumah sehingga pemilik rumah secara tidak langsung merasa dilibatkan dan bertanggung jawab dalam proses tersebut dan diharapkan mau membersihkan sisa sampah yang tidak disengaja tertinggal sedikit.

### Tabel 2.65
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah sampah yang terangkut ke TPA</td>
<td>525</td>
<td>465</td>
<td>467</td>
<td>502</td>
<td>520</td>
<td>558</td>
<td>583</td>
<td>608</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah volume produksi sampah (m³)</td>
<td>600</td>
<td>610</td>
<td>640</td>
<td>670</td>
<td>685</td>
<td>716</td>
<td>748</td>
<td>780</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persentase</td>
<td>87</td>
<td>76</td>
<td>73</td>
<td>75</td>
<td>76</td>
<td>78</td>
<td>78</td>
<td>78</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*

### Tabel 2.66
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Sampah yang diangkut (m³/hari)</th>
<th>Jumlah Volume Produksi Sampah (m³/hari)</th>
<th>Persen Tase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>108</td>
<td>110</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>160</td>
<td>162</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>70</td>
<td>77</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>31</td>
<td>76</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>59</td>
<td>75</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>23</td>
<td>41</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>27</td>
<td>60</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>51</td>
<td>76</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>79</td>
<td>103</td>
<td>77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*

Bila aliran sampah ke TPS terlalu besar, penggunaan kontainer perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan. Hal
penting yang perlu disadari bahwa penempatan kontainer perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar keberadaan kontainer dapat diterima:

- Tersedianya areal yang memungkinkan truk bermanuver saat meletakkan dan mengangkat container
- Kondisi tanah yang memadai, akan lebih baik dilengkapi dengan landasan yang dibeton
- Tidak merusak/mengganggu pandangan
- Bila penuh dapat ditukar dengan cepat (tidak meluber)
- Tidak disalah gunakan
- Dilakukan pembersihan secara berkala pada lokasi titik kontainer dan memasukkan sampah yang tercecer di luar ke dalam kontainer

Titik kontainer harus dipilih di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, baik untuk membuang langsung atau menggunakan jasa pengumpul swasta. Keberadaan kontainer diharapkan bisa menjadi penunjang dari sistem pengumpulan rumah tangga, ataupun sebaliknya, sehingga dalam hal ini sistem pengumpulan menjadi perpaduan antara door-to-door dan sistem kontainer.

Pengangkutan dengan sistem door-to-door umumnya truk masuk ke TPA sekali setiap shift (4 jam) sehingga dalam sehari 2 trip. Sedangkan dengan sistem kontainer rata-rata setiap armroll truck mengangkat kontainer ke TPA sebanyak 7-10 trip per hari.

Sistem kontainer umunya hanya menggunakan 2 tenaga kerja (1 orang supir dan 1 orang kernek), sedangkan sistem door-to-door dengan menggunakan truk membutuhkan 4 orang tenaga kerja (1 supir dan 3 kernek). Apabila digunakan pick up/becak cukup hanya menggunakan 2 orang tenaga kerja.
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota saat ini memberikan pelayanan pengangkutan sampah di semua jalan protokol dan semua gampong dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun pengumpulan sampah di gampong sudah termasuk juga penanganan sampah di jalan-jalan protokol atau jalan utama yang secara administratif juga masuk dalam wilayah gampong. Namun demikian ada 2 gampong yaitu Deah Raya dan Alue Naga, meskipun sudah dilayani, namun sampah yang ada di sana relatif sedikit karena jumlah penduduk yang sedikit. Di samping itu masyarakat di kedua gampong tersebut cenderung untuk menimbun sendiri sampah di lahan mereka dan ada juga yang membawa sampah ke kontainer terdekat.

Untuk memudah pelaksanaan pekerjaan di lapangan, DK3 membagi wilayah berdasarkan Zona, sehingga lebih memudahkan pengawasan. Adapun zona dibagi dalam 3 zona yang terdiri atas Zona I (Meuraksa, Banda Raya, Jaya Baru), Zona II (Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Kuta Alam, Zona III (Baiturrahman, Kutaraja dan Lueng Bata). Setiap zona tersebut dipimpin oleh satu orang Manager Zona yang membawahi 3 manager kecamatan.

Komposisi sampah di kota Banda Aceh berdasarkan hasil audit sampah yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

**Tabel 2.67**

**Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Komposisi</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Makanan (organik)</td>
<td>39,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kertas/kerdus</td>
<td>15,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Plastik</td>
<td>12,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Botol plastik</td>
<td>1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kebun</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayu</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Logam (besi)</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Logam (non-besi)</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaca</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekstil</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulit dan karet</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Komposisi</td>
<td>Persentase</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Keramik</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ban bekas</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Konstruksi/Material bongkaran</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*

## Tabel 2.68
Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Peralatan</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Tujuan Operasional</th>
<th>Kondisi Saat Ini</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dump Truk</td>
<td>34 unit</td>
<td>Pengangkutan sampah/1 unit untuk operasional landfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Compactor</td>
<td>4 unit</td>
<td>Pengangkutan sampah</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pick Up</td>
<td>17 unit</td>
<td>Pengangkutan sampah</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Becak</td>
<td>30 unit</td>
<td>Pengangkutan sampah</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Armroll</td>
<td>6 unit</td>
<td>Pengangkutan Kontainer</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bulldozer</td>
<td>3 unit</td>
<td>Operasional landfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Excavator</td>
<td>3 unit</td>
<td>Operasional landfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Mobil siram</td>
<td>1 unit</td>
<td>Operasional landfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Wheel Loader</td>
<td>2 unit</td>
<td>Composting di landfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Mobile Waste Shredding Machine</td>
<td>1 unit</td>
<td>Composting dilandfill</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Kontainer</td>
<td>60 unit</td>
<td>Pengumpulan sampah</td>
<td>Baik/rusak ringan</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Mesin Potong Rumput</td>
<td>19 unit</td>
<td>Pengumpulan sampah</td>
<td>Baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*

Pelayanan retribusi persampahan sudah berjalan sejak tahun 2007 yang dulunya difasilitasi oleh UNDP-TRWMP. Pada awal program ini berjalan, hanya beberapa desa yang menjadi lokasi pilot project retribusi gampong. Seiring dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DK3 maka dalam beberapa tahun terakhir ini pengutipan retribusi sampah sudah dilakukan di 65 gampong dari 90 gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu desa-desa yang sudah mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah “door-to-
door" secara baik. Dari 65 desa tersebut, rata-rata *collection ratio* baru 30 persen.

Pada saat ini, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terus berbenah untuk meningkat pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan adanya penambahan armada kendaraan seperti, mobil pick-up, dump truck dan compactor, sehingga dapat mengoptimalkan pengangkutan sampah sekaligus peremajaan terhadap armada lama yang sudah mulai using.


Ada beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini:
- Masyarakat membuang sampah yang tidak siap kemas ke dalam kontainer bahkan keluar kontainer.
- Peran serta Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali, terutama yang menghasilkan sampah dalam volume besar, seperti pedagang minuman air kelapa dan air tebu.
- Masyarakat masih menganggap sampah itu harus diambil setiap hari, padahal yang lebih penting adalah diambil tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang dijanjikan (bisa saja setiap 2 hari sekali atau seminggu 3 kali)
- Masih ada petugas yang tidak konsisten untuk memberikan pelayanan sesuai jadwal yang disepakati (petugas lalai, truk/pick up rusak, dsb)
- Masih banyak sampah yang tidak dikemas dengan baik dan tidak dibawa ke tempat yang mudah diambil oleh petugas
- Masih ada masyarakat yang merasa tidak perlu membayar retribusi sampah karena sampah tidak diambil langsung ke rumah, padahal rumah yang bersangkutan tidak dapat dilalui oleh kendaraan DK3 dan sampah bisa dibuang ke lokasi kontainer terdekat dan akhirnya juga diangkut oleh truk DK3.
- Masih terbatasnya tenaga lapangan yang melakukan pengutipan sehingga tidak mampu menjangkau semua desa yang ada di Kota Banda Aceh.


2.3.1.8.2 Pencemaran Status Mutu Air

Laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan semakin meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Rantai kerusakan tersebut menjalar dan meluas ke sungai, danau, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara khususnya di wilayah padat penduduk telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.
Salah satu faktor strategis yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah karena portofolio kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu atau tidak terintegrasi.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada Pemerintah Kota Banda Aceh, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kota Banda Aceh yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di Kota Banda Aceh, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

Adapun jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota (Permen LH No. 20/2008) diprioritaskan pada:
- Pencegahan pencemaran air
- Pencegahan pencemaran udara
- Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berikut disajikan data kualitas air untuk beberapa lokasi khususnya parameter yang melebihi baku mutu kualitas air.
## Tabel 2.69
Pencemaran Status Mutu Air

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DO</td>
<td>BOD</td>
<td>DO</td>
<td>BOD</td>
<td>DO</td>
<td>BOD</td>
<td>DO</td>
<td>BOD</td>
<td>DO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Krueng Aceh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Belakang PLTD</td>
<td>8,02</td>
<td>8,1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6,12</td>
<td>-</td>
<td>6,35</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jembatan Sp. Surabaya</td>
<td>10,67</td>
<td>7,8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,9</td>
<td>6,2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jbtn Peunayong</td>
<td>7,59</td>
<td>-</td>
<td>6,8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6,4</td>
<td>14,7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Baku Mutu (PP 82/2001)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krueng Daroy</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Depan SMA 7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5,1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Blkng Mesjid At-Taqwa Setui</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,10</td>
<td>6,5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jbtn Neusu</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,9</td>
<td>6,3</td>
<td>4,25</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Jbtn Peuniti</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>7,1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,80*</td>
<td>8,4*</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Jbtn POM</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Jbtn Geuceu Komplek</td>
<td>-</td>
<td>3,12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Jbtn Setui</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>5,47</td>
<td>11,8</td>
<td>3,30</td>
<td>7,12</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Krueng Doy</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jbtn Blower</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5,41</td>
<td>11,9</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jbtn Samping RRI</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6,10</td>
<td>13,4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jbtn Lampaseh</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6,37</td>
<td>13,6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Krueng Lueng Paga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Stadion Harapan Bangsa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>7,1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jbtn Ateuk Jawo</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5,3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jbtn Sp Sby Kecil</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,10*</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Krueng Lamnyong</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Sp. Mesra, Jeulingke</td>
<td>5,54</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jbtn Lamnyong</td>
<td>6,65</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6,2</td>
<td>11,0</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
Parameter kualitas air yang terpenting adalah BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan DO (Dissolved Oxygen). BOD merupakan salah satu variabel kunci yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas air sungai, sedangkan DO adalah salah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas suatu perairan yang menunjukkan tingkat kesegaran air sebagai akibat dari pencemaran air oleh parameter organik. Parameter organik (sebagai BOD) adalah parameter umum yang sering dipakai untuk menunjukkan tingkat pencemaran organik dari sumber pencemar seperti industri, domestik, pertanian dan perikanan. Beban BOD yang berlebihan mengganggu kualitas air sungai karena menyebabkan konsentrasi DO rendah sehingga sungai tidak layak untuk kehidupan flora dan fauna.

Data dari tabel pencemaran status air berdasarkan data hasil analisa laboratorium terhadap beberapa titik lokasi pengambilan sampel air sungai dari tahun 2007 s/d 2014 terlihat kualitas air sungai di Kota Banda Aceh telah mengalami pencemaran air sungai yang didominasi oleh buangan air limbah domestik. Untuk mengurangi beban pencemaran dan semakin meningkatnya pencemaran maka diperlukan tindak lanjut berupa pengawasan dan pengendalian terhadap buangan limbah baik yang berasal dari buangan limbah rumah tangga maupun usaha kegiatan agar tidak membuang langsung limbah cairnya ke sungai, melainkan diperlukan pengolahan terlebih dahulu sehingga limbah cair yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berikut disajikan data tentang pengawasan lingkungan yang pernah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.70
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Usaha/Kegiatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rumah Sakit</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Bengkel</td>
<td>194</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tahu/Tempe</td>
<td>-</td>
<td>19</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PLTD Lueng Bata</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rumah Potong Hewan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tanggul Air Asin Lampaseh</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Hotel/Penginapan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Laundry</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Restoran/Cafe</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>SPBU</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Berikut disajikan data tentang kasus-kasus lingkungan yang pernah ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.71
Kasus Lingkungan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Kasus</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pencemaran air</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pencemaran udara</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kebisingan</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pencemaran tanah</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pengelolaan Lingkungan hidup</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
Masalah yang diadukan tahun 2011, yaitu:
1. Tergenangnya air akibat bocornya pipa PDAM di kawasan Neusu dekat pabrik es dan diperparah lagi karena adanya doorsmeer dan pabrik es yang diduga memperparah genangan air di wilayah tersebut. (statusnya telah diselesaikan).
2. Rusaknya tambak warga di daerah Peulanggahan yang diakibatkan derasnya air yang masuk ketambak tersebut dari pintu air, dimana pintu air tersebut merupakan tempat penampungan air drainase kota. Warga meminta tempat penampungan tersebut dibuat saluran yang dialirkan langsung kelaut. (statusnya telah diselesaikan).

Masalah yang diadukan tahun 2012, yaitu:
1. Pembuangan dan pembakaran sejumlah limbah medis berupa obat-obatan kadaluarsa dll yang pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur (SOP) di TPA Gampong Jawa yang diadukan oleh masyarakat Gampong Jawa. (statusnya telah diselesaikan).

Masalah yang diadukan tahun 2013, yaitu:

Masalah yang diadukan tahun 2014, yaitu:
1. Pengaduan dari masyarakat karena banyak ikan mati secara tiba-tiba di Krueng Doy Lampaseh. (statusnya telah diselesaikan).
2. Suara mesin penggiling bakso dan asap yang dikeluarkan dari mesin di tempat penggilingan bakso Peunayong yang mengganggu masyarakat sekitar kawasan tersebut. (statusnya telah diselesaikan).

Kasus-kasus Pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali tidak dapat tertangani langsung dikarenakan Kantor LingkunganHidup Kota tidak memiliki personil/tenaga laboran dan laboratorium yang dapat
mengambil sampel dan menguji langsung hasil sampling tersebut. Selama ini Kantor Lingkungan Hidup selalu melakukan kerjasama dengan pihak laboratorium lain untuk pengujian dan analisa data.

Dalam kasus darurat seperti ini seringkali Kantor LH terbentur dengan administrasi yang harus disiapkan dan untuk laboratorium yang dihubungi personilnya belum tentu dapat bergerak segera untuk melakukan sampling di lapangan. Kondisi ini kerap membuat kesulitan bagi Kantor LH untuk dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan.

2.3.1.8.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk


Saat ini setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan keluar TPA, harus masuk ke jembatan timbang untuk dihitung berat sampah yang diangkut. Sampah sampah organik yang berupa daun, ranting pohon, pohon diturunkan di unit pengomposan di mana sampah-

Setelah semua recyclable material, baik organik maupun non organik dipisahkan, baru sampah sisanya dibuang ke sel sampah. Dengan demikian sebagian sampah sudah masuk ke landfill sudah dapat dikurangi, sehingga akan sangat membantu dalam memperpanjang umur TPA.


Tujuan pengolahan limba tinja sendiri adalah untuk mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja, mengingat limbah tinja sangat berbahaya bagi lingkungan khususnya kualitas air.

Manfaat dari pengolahan limbah tinja ini dapat diperoleh dari hasil olahan yang dihasilkan. Lumpur hasil pengolahan, dapat digunakan untuk pembuatan kompos (budidaya pertanian). Selain itu, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya kualitas air (perairan).

Khusus untuk IPLT sistem tertutup, proses pengolahan lumpur tinja sudah dapat menghasilkan gas metan yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas dan pembangkit listrik (penggerak genset).


**Tabel 2.72**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk (Jiwa)</th>
<th>TPS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah Kontainer</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.941</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.460</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.962</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.503</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.671</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.148</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>24.560</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2014
Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.


Dalam beberapa tahun terakhir ini, DK3 berkerjasama dengan pihak desa untuk mendata semua lahan pemakaman umum untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang akan ditanami dengan pohon penghijauan.

**Grafik 2.19**  
**Persentase Pemanfaatan RTH terhadap lahan yang tersedia**

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*
Untuk mencapai target 20% (atau kurang ±7,0% lagi), Pemerintah Kota berupaya keras mempriorotaskan dana pembebasan lahan setiap tahunnya agar mencapai target hingga tahun 2029. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain penyusunan rencana-rencana penataan Taman-taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hujau Jalan, Penataan Jalur Hijau Sungai yang dikolaborasi dengan konsep Water Frint City, menata jalur sepeda dan pendestrian Kota.

### 2.3.1.8.6 Pencemaran Tingkat Kebisingan

Berikut disajikan data tentang tingkat kebisingan dari hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Baku Mutu</th>
<th>Hasil Uji</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembangunan Pasar Aceh (Jl. Diponegoro)</td>
<td>60 dBA</td>
<td>65,9 dBA</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>RS Meutia (Jl. Cut Meutia)</td>
<td>60 dBA</td>
<td>61,8 dBA</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>RS Ibu dan Anak (Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim)</td>
<td>60 dBA</td>
<td>62,4 dBA</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>RS Q-Medical Center (Jl. Tgk. Daud Beureuh)</td>
<td>60 dBA</td>
<td>59,3 dBA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh*

### 2.3.1.8.7 Meraih Adipura

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.74
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk
Kota Banda Aceh Tahun 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Tempat pemakaman umum (TPU)</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penduduk (jiwa)</td>
<td>238.784</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio TPU persatuan penduduk</td>
<td>1.571</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1/6)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.75
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Tempat Pemakaman Umum (TPU)</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>45.115</td>
<td>25</td>
<td>Termasuk kuburan umum dan keluarga</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>32.463</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>37.243</td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>24.121</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>25.211</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.325</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>23.543</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>11.149</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>17.614</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>238.784</td>
<td>152</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.76
Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Ukuran</th>
<th>Luas</th>
<th>Status Tanah</th>
<th>Ket.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuburan Kota Baro</td>
<td>95 x 70</td>
<td>6.650 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuburan Keudah</td>
<td>103 x 97</td>
<td>9.991 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuburan Beurawe</td>
<td>124 x 20</td>
<td>2.480 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuburan Peulanggahan</td>
<td>41 x 32</td>
<td>1.312 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kuburan Mulia</td>
<td>115 x 93</td>
<td>10.995 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuburan Setuy</td>
<td>138 x 41</td>
<td>5.658 M²</td>
<td>Wakaf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kuburan Massal Kampung Pande</td>
<td>57 x 35</td>
<td>1.995 M²</td>
<td>Tsunami</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kuburan Massal Ulhee lheu</td>
<td>60 x 26</td>
<td>1.560 M²</td>
<td>Tsunami</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kuburan</td>
<td>-</td>
<td>3.200 M$^2$</td>
<td>10</td>
<td>Kuburan Kherkoft</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh*

### 2.3.1.8.9 Persentase Penerangan Jalan Umum

Selain penataan taman dan ruang terbuka hijau, DK3 juga melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) terutama untuk jalan-jalan umum baik di gampong maupun di perkotaan.

Sampai saat ini jumlah lampu yang telah terpasang di Kota Banda Aceh sudah mencapai 8.000 unit yang tersebar diseluruh Banda Aceh. Perencanaan ke depan dilakukan program meterisasi yaitu pemasangan meteran pada semua lampu jalan terutama yang ada di jalan protokol guna mencegah pemborosan pembayaran listrik.

**Grafik 2.20**  
Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*
### 2.3.1.9 Pertanahan

#### 2.3.1.9.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

**Tabel 2.77**
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Luas wilayah daratan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Luas tanah bersertifikat HGB (m²)</td>
<td>19.849.0</td>
<td>19.938.6</td>
<td>20.175.7</td>
<td>20.184.4</td>
<td>20.198.1</td>
<td>20.212.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Luas tanah bersertifikat HGU (m²)</td>
<td>2.562</td>
<td>2.562</td>
<td>2.562</td>
<td>2.562</td>
<td>2.562</td>
<td>2.562</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Luas tanah bersertifikat HM (m²)</td>
<td>23.824.1</td>
<td>26.026.4</td>
<td>27.948.0</td>
<td>28.427.8</td>
<td>28.938.3</td>
<td>29.461.0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Luas tanah bersertifikat HP (m²)</td>
<td>6.005.66</td>
<td>6.175.07</td>
<td>6.246.28</td>
<td>6.349.79</td>
<td>6.949.10</td>
<td>6.979.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Luas tanah bersertifikat HPL (m²)</td>
<td></td>
<td>3.933</td>
<td>3.933</td>
<td>3.933</td>
<td>3.933</td>
<td>3.933</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Badan Pertanahan Nasional*
## 2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

### 2.3.1.10.1 Rasio Cakupan Kepemilikan KTP (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kuta Alam</td>
<td>42.664</td>
<td>34.135</td>
<td>33.872</td>
<td>42.217</td>
<td>34.836</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>212.241</strong></td>
<td><strong>159.720</strong></td>
<td><strong>158.454</strong></td>
<td><strong>223.446</strong></td>
<td><strong>159.372</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Rasio Penerbitan KTP: 99,21%*

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh*
Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun satu unit pelayanan publik terpadu pada KPPTSP yang bertempat di Gedung Balai Kota. Selain untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, juga masyarakat diberikan kenyamanan dan keamanan di dalam mendapatkan dan menunggu pelayanan yang diberikan.

Dalam gedung pelayanan publik tersebut selain pelayanan perizinan dan non perizinan, juga diberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pelayanan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 16 jenis pelayanan yang antara lain adalah pelayanan kartu keluarga (KK), Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan Akta Kelahiran. Dalam Tabel 2.103 disajikan data penduduk berdasarkan kepemilikan KTP, KK dan Akta Kelahiran pada tahun 2013.

### Tabel 2.79
**Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah Tahun 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KTP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Sdh</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>25.811</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>18.017</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>9.144</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>17.375</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>182.353</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*
Dari Tabel 2.103 dapat dilihat beberapa poin penting, yaitu kepemilikan KTP bagi penduduk yang wajib KTP sudah sangat baik, dimana dari jumlah wajib KTP sebesar 183.810 jiwa, hanya 79.871 jiwa yang belum memiliki atau mengurus KTP. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) juga sudah sangat baik, Hal ini menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya KK dan mau mengurus KK nasional sebagai pengganti dari KK merah yang keluaran lama.

Pada bidang pencatatan sipil, penduduk yang sudah mengurus akta kelahiran sebesar 168.265 jiwa dan yang belum mengurus akta kelahiran diperkirakan berjumlah 140.712 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan adanya sebagian besar penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana di tempat kelahirannya dan ada pula penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum tercatat pada Sistem Informatika Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (Akseptor KB) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.104 dan tabel 2.105 menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan penduduk peserta KB di Kota Banda Aceh.

### Tabel 2.80
**Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis-jenis Akta</th>
<th>Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Penduduk</td>
<td>219.659</td>
</tr>
<tr>
<td>Rasio</td>
<td>5.94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*
Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan dan pengurangan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik migrasi dari luar maupun ke luar Kota Banda Aceh. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan dan penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar.

Beberapa komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah :

a. Faktor Penambah
   1) Kelahiran (fertilitas);
   2) Migrasi Masuk (migrasi)

b. Faktor Pengurang
   1) Kematian (Mortalitas)
   2) Migrasi keluar (emigrasi)

Dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 219.659 jiwa pada tahun 2007 dan 249.282 jiwa pada tahun 2013 maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,17 persen rata-rata per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut masih tergolong normal selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Namun laju pertumbuhan penduduk tersebut harus dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari padatnya penduduk kota, yaitu munculnya berbagai masalah sosial ekonomi
seperti kemiskinan, kriminalitas, permukiman kumuh dan lain-lain sebagainya.


<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>40.989</td>
<td>36.124</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>43.746</td>
<td>43.792</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>15.317</td>
<td>20.658</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>UleeKareng</td>
<td>27.936</td>
<td>20.409</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>23.083</td>
<td>22.025</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>4.639</td>
<td>8.076</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>29.363</td>
<td>20.907</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>3.719</td>
<td>12.494</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>30.867</td>
<td>33.433</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td><strong>219.659</strong></td>
<td><strong>217.918</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk yang mengecil terdapat di Kecamatan Baiturrahman sebesar 1,27 persen, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 40.989 jiwa, dan pada tahun 2013 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk menjadi 35.218 jiwa. Hal ini terjadi karena adanya mobilitas penduduk yang tersebar ke beberapa kecamatan yang berada di dekat pusat kota dan menjadi sentral bisnis baru seperti Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, Ulee Kareng dan Lueng Bata, sehingga terjadi penurunan penduduk yang signifikan.

Laju pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi dengan angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas). Berikut ini hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang dituangkan dalam angka kelahiran kasar (CBR), angka kematian kasar (CDR) dan angka kematian bayi (IMR).

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Fertilitas/ Mortalitas</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Angka Kelahiran Hidup</td>
<td>3.508</td>
<td>4.048</td>
<td>4.163</td>
<td>4.412</td>
<td>4.828</td>
<td>4.849</td>
<td>5.060</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Angka Kematian Bayi (IMR)</td>
<td>20</td>
<td>33</td>
<td>16</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>14</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio Angka Kematian Bayi (IMR)</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis data yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, antara lain pengelompokan data penduduk berdasarkan sex rasio (data terpilih) yang sangat bermanfaat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis gender, pengelompokkan data penduduk berdasarkan umur yang dapat bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan.
Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan dan 90 Gampong, pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 128.333 jiwa dan perempuan sebesar 120.949 jiwa, yang dapat dirinci berdasarkan kecamatan sesuai Tabel 2.96.

Tabel 2.83
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kecamatan</th>
<th>Laki-laki</th>
<th>Perempuan</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Rasio Jenis Kelamin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Baiturrahman</td>
<td>18.003</td>
<td>17.215</td>
<td>35.218</td>
<td>104,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuta Alam</td>
<td>25.756</td>
<td>23.747</td>
<td>49.503</td>
<td>108,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Meuraxa</td>
<td>10.044</td>
<td>8.918</td>
<td>18.962</td>
<td>112,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>18.201</td>
<td>17.470</td>
<td>35.671</td>
<td>104,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Lueng Bata</td>
<td>12.582</td>
<td>11.978</td>
<td>24.560</td>
<td>105,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuta Raja</td>
<td>6.862</td>
<td>5.957</td>
<td>12.819</td>
<td>115,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Banda Raya</td>
<td>11.490</td>
<td>11.451</td>
<td>22.941</td>
<td>100,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaya Baru</td>
<td>12.618</td>
<td>11.842</td>
<td>24.460</td>
<td>106,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>12.777</td>
<td>12.371</td>
<td>25.147</td>
<td>103,28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah Total</strong></td>
<td><strong>128.333</strong></td>
<td><strong>120.949</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
<td><strong>106,11</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014*


Berikut ini disajikan data penduduk laki-laki tahun 2009 - 2013 berdasarkan pengelompokkan umur.

Tabel 2.84
Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kelompok Umur</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0-4</td>
<td>9.111</td>
<td>11.842</td>
<td>12.113</td>
<td>12.642</td>
<td>13.089</td>
</tr>
<tr>
<td>5-9</td>
<td>10.491</td>
<td>8.365</td>
<td>8.557</td>
<td>8.931</td>
<td>9.193</td>
</tr>
<tr>
<td>10-14</td>
<td>13.296</td>
<td>7.990</td>
<td>8.173</td>
<td>8.530</td>
<td>8.775</td>
</tr>
</tbody>
</table>

II-130


**Tabel 2.85**

**Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2014–2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kelompok Umur</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30-34</td>
<td>11.854</td>
<td>12.115</td>
<td>12.381</td>
<td>12.654</td>
<td>12.932</td>
</tr>
<tr>
<td>40-44</td>
<td>7.876</td>
<td>8.049</td>
<td>8.226</td>
<td>8.407</td>
<td>8.592</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelompok Umur</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>50-54</td>
<td>5.144</td>
<td>5.257</td>
<td>5.373</td>
<td>5.491</td>
<td>5.612</td>
</tr>
<tr>
<td>55-59</td>
<td>3.544</td>
<td>3.622</td>
<td>3.702</td>
<td>3.783</td>
<td>3.867</td>
</tr>
<tr>
<td>60-64</td>
<td>2.181</td>
<td>2.229</td>
<td>2.278</td>
<td>2.328</td>
<td>2.379</td>
</tr>
<tr>
<td>65-69</td>
<td>1.794</td>
<td>1.511</td>
<td>1.545</td>
<td>1.579</td>
<td>1.613</td>
</tr>
<tr>
<td>70-74</td>
<td>765</td>
<td>782</td>
<td>800</td>
<td>817</td>
<td>835</td>
</tr>
<tr>
<td>75+</td>
<td>637</td>
<td>651</td>
<td>665</td>
<td>680</td>
<td>695</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>131.156</strong></td>
<td><strong>134.042</strong></td>
<td><strong>136.991</strong></td>
<td><strong>140.004</strong></td>
<td><strong>143.085</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kelompok Umur</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0-4</td>
<td>7.393</td>
<td>11.440</td>
<td>11.702</td>
<td>12.236</td>
<td>12.686</td>
</tr>
<tr>
<td>5-9</td>
<td>10.974</td>
<td>8.100</td>
<td>8.285</td>
<td>8.664</td>
<td>8.957</td>
</tr>
<tr>
<td>10-14</td>
<td>10.274</td>
<td>7.477</td>
<td>7.648</td>
<td>7.999</td>
<td>8.272</td>
</tr>
<tr>
<td>30-34</td>
<td>7.783</td>
<td>8.720</td>
<td>8.920</td>
<td>9.329</td>
<td>9.835</td>
</tr>
<tr>
<td>40-44</td>
<td>5.992</td>
<td>6.352</td>
<td>6.498</td>
<td>6.797</td>
<td>7.191</td>
</tr>
<tr>
<td>45-49</td>
<td>6.273</td>
<td>5.076</td>
<td>5.192</td>
<td>5.431</td>
<td>5.716</td>
</tr>
<tr>
<td>50-54</td>
<td>3.972</td>
<td>3.497</td>
<td>3.577</td>
<td>3.743</td>
<td>3.954</td>
</tr>
<tr>
<td>55-59</td>
<td>2.611</td>
<td>2.567</td>
<td>2.626</td>
<td>2.748</td>
<td>2.930</td>
</tr>
<tr>
<td>60-64</td>
<td>3.632</td>
<td>1.814</td>
<td>1.856</td>
<td>1.939</td>
<td>2.010</td>
</tr>
<tr>
<td>65-69</td>
<td>3.041</td>
<td>1.172</td>
<td>1.199</td>
<td>1.252</td>
<td>1.293</td>
</tr>
<tr>
<td>70-74</td>
<td>2.111</td>
<td>806</td>
<td>824</td>
<td>862</td>
<td>894</td>
</tr>
<tr>
<td>75+</td>
<td>1.641</td>
<td>933</td>
<td>955</td>
<td>998</td>
<td>1.042</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>100.042</strong></td>
<td><strong>108.349</strong></td>
<td><strong>110.830</strong></td>
<td><strong>115.910</strong></td>
<td><strong>120.949</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Banda Aceh Dalam Angka*


**Tabel 2.87**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kelompok Umur</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10-14</td>
<td>8.454</td>
<td>8.640</td>
<td>8.830</td>
<td>9.024</td>
<td>9.223</td>
</tr>
<tr>
<td>30-34</td>
<td>10.051</td>
<td>10.273</td>
<td>10.498</td>
<td>10.729</td>
<td>10.966</td>
</tr>
<tr>
<td>40-44</td>
<td>7.349</td>
<td>7.511</td>
<td>7.676</td>
<td>7.845</td>
<td>8.018</td>
</tr>
<tr>
<td>45-49</td>
<td>5.842</td>
<td>5.970</td>
<td>6.102</td>
<td>6.236</td>
<td>6.373</td>
</tr>
<tr>
<td>50-54</td>
<td>4.041</td>
<td>4.130</td>
<td>4.221</td>
<td>4.314</td>
<td>4.409</td>
</tr>
<tr>
<td>55-59</td>
<td>2.994</td>
<td>3.060</td>
<td>3.128</td>
<td>3.196</td>
<td>3.267</td>
</tr>
<tr>
<td>60-64</td>
<td>2.054</td>
<td>2.099</td>
<td>2.146</td>
<td>2.193</td>
<td>2.241</td>
</tr>
<tr>
<td>65-69</td>
<td>1.321</td>
<td>1.351</td>
<td>1.380</td>
<td>1.411</td>
<td>1.442</td>
</tr>
<tr>
<td>70-74</td>
<td>914</td>
<td>934</td>
<td>954</td>
<td>975</td>
<td>997</td>
</tr>
<tr>
<td>75+</td>
<td>1.065</td>
<td>1.088</td>
<td>1.112</td>
<td>1.137</td>
<td>1.162</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>123.610</td>
<td>126.329</td>
<td>129.109</td>
<td>131.949</td>
<td>134.852</td>
</tr>
</tbody>
</table>


### Tabel 2.101

#### Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Penduduk</th>
<th>Luas Wilayah (km²)</th>
<th>Kepadatan (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>35.218</td>
<td>4,54</td>
<td>3,11</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>49.503</td>
<td>10,05</td>
<td>1,98</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>18.962</td>
<td>7,26</td>
<td>1,05</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>35.671</td>
<td>14,24</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>24.560</td>
<td>5,34</td>
<td>1,84</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>12.819</td>
<td>5,21</td>
<td>0,99</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>22.941</td>
<td>4,79</td>
<td>1,92</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>24.460</td>
<td>3,78</td>
<td>2,60</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>25.148</td>
<td>6,15</td>
<td>1,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah se-Kota Banda Aceh</strong></td>
<td><strong>249.282</strong></td>
<td><strong>61,36</strong></td>
<td><strong>1,63</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

_Sumber : Banda Aceh Dalam Angka_

Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Baiturrahman dengan tingkat kepadatan sebesar 3,11 persen kemudian diikuti dengan Kecamatan Jaya Baru 2,60 persen dan Kecamatan Kuta Alam 1,98 persen. Sedangkan penduduk terjarang berada di Kecamatan Kuta Raja yaitu sebesar 0,99 persen.
Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada tahun 2011 sebanyak 2 orang, eselon III 29 orang, dan eselon IV 158 orang, jumlah pekerja perempuan di pemerintah sebanyak 4079 orang sedangkan total pekerja perempuan 16.638 orang jika kita lihat secara persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 24,52 persen, hal ini dapat diambil kesimpulan jumlah pekerja perempuan di pemerintah masih memiliki persentase yang kecil, hal ini karena minat perempuan dan peluang perempuan masih di sektor non pemerintah. Jika dibandingkan dengan total pekerja di pemerintah baik laki-laki dan perempuan, perempuan memiliki persentase sebesar 65,39 persen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dokter</td>
<td>23</td>
<td>22</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Drg</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>S1 Keperawatan</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Akper</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Akbid</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>67</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bidan</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>59</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>SPK</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>SKM</td>
<td>43</td>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>22</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>GIZI</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Apoteker</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Akfar</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>SMF</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>AAK</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>SMAK</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>AKG</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>AKZI</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>APIKES</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>AKL</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ATEM</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>SPPH</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>SPRG</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>SPAG</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Perkarya Kes</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>KPA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>S2</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>S1</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>1832</td>
<td>1831</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>D3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>360</td>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>SMA</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>347</td>
<td>345</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>SMP</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>SD</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

2.3.1.11.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta


Tabel 2.91
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
Tahun 2007 - 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah perempuan di lembaga Legislatif</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Anggota Legislatif</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio perempuan di lembaga Legislatif</td>
<td>6,7</td>
<td>6,7</td>
<td>3,3</td>
<td>3,3</td>
<td>3,3</td>
<td>3,3</td>
<td>3,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

Tabel 2.92
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta</td>
<td>1.289</td>
<td>1.360</td>
<td>1.365</td>
<td>1.375</td>
<td>1.444</td>
<td>4.972</td>
<td>2.860</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah pekerja perempuan</td>
<td>5.234</td>
<td>5.835</td>
<td>5.894</td>
<td>6.124</td>
<td>6.258</td>
<td>14.403</td>
<td>8.520</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta</td>
<td>24,63</td>
<td>23,31</td>
<td>23,16</td>
<td>22,45</td>
<td>23,07</td>
<td>34,52</td>
<td>33,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


Tabel 2.93
Rasio KDRT yang Didampingi Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah KDRT</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>31</td>
<td>11</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Rumah Tangga</td>
<td>37.099</td>
<td>42.072</td>
<td>43.509</td>
<td>45.711</td>
<td>47.687</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah Penanganan Kasus KDRT</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>31</td>
<td>11</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rasio KDRT</td>
<td>0,024</td>
<td>0,045</td>
<td>0,071</td>
<td>0,057</td>
<td>0,813</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rasio Penanganan Kasus KDRT</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor PP&KB Kota Banda Aceh

Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur


Tabel 2.94
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pekerja anak usia 5-14 tahun</td>
<td>374</td>
<td>310</td>
<td>198</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Pekerja</td>
<td>36.333</td>
<td>40.849</td>
<td>41.595</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur</td>
<td>1,03</td>
<td>0,76</td>
<td>0,48</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

Grafik 2.21
Persentase Capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

![Grafik persentase capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh]

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Banda Aceh

2.3.1.12 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.1.12.1 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga, pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak satu anak per keluarga tetapi pada tahun 2011 meningkat menjadi dua anak per keluarga. Salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana adalah menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga. Dari data tersebut rata-rata jumlah anak per keluarga terjadi peningkatan, maka program keluarga berencana perlu
melakukan strategi yang lebih tepat dengan cara menekan laju kelahiran.

### Tabel 2.95
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah anak</td>
<td>141.282</td>
<td>152.232</td>
<td>152.232</td>
<td>157.489</td>
<td>144.844</td>
<td>37.366</td>
<td>39.652</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah keluarga</td>
<td>39.245</td>
<td>41.144</td>
<td>41.144</td>
<td>44.997</td>
<td>45.264</td>
<td>45.771</td>
<td>47.687</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rata-rata jumlah anak per keluarga</td>
<td>3.6</td>
<td>3.7</td>
<td>3.7</td>
<td>3.5</td>
<td>3.2</td>
<td>3.2</td>
<td>3.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh*

### 2.3.1.12.2 Rasio Akseptor KB


### Tabel 2.96
Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah pasangan usia subur</td>
<td>22.415</td>
<td>25.061</td>
<td>27.867</td>
<td>28.555</td>
<td>28.799</td>
<td>29.904</td>
<td>30.925</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio akseptor KB</td>
<td>46,82</td>
<td>58,25</td>
<td>60,72</td>
<td>64,17</td>
<td>62,99</td>
<td>65,57</td>
<td>64,48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh*
Tabel 2.97
Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 – 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>KutaAlam</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rasio PL KB Per Wil. Kerja: 1:6

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Namun secara keseluruhan pertahunnya terdapat peningkatan persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Peningkatan tersebut diharapkan akan lebih besar lagi apabila jumlah penyuluh KB dapat direkrut kembali untuk dilatih. Rasio yang diharapkan agar jumlah penyuluh KB pada satu wilayah kerja, rasionya adalah 1 : 3 yaitu dalam tiga desa harus memiliki satu orang tenaga fungsional penyuluh KB.

Tabel 2.98
Jumlah Penduduk Peserta KB di Kota Banda Aceh
Menurut Kecamatan Tahun 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>PUS</th>
<th>Peserta KB</th>
<th>AnmedNeet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>2.625</td>
<td>1.582</td>
<td>390</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>2.785</td>
<td>1.941</td>
<td>391</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>3.145</td>
<td>2.278</td>
<td>441</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>3.710</td>
<td>2.570</td>
<td>783</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>3.276</td>
<td>1.925</td>
<td>865</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>KutaAlam</td>
<td>6.442</td>
<td>3.674</td>
<td>1522</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>1.769</td>
<td>1.137</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Syah Kuala</td>
<td>4.144</td>
<td>2.901</td>
<td>647</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>3.029</td>
<td>1.934</td>
<td>390</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>30.925</td>
<td>19.942</td>
<td>5.650</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh


Grafik 2.22
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

24.00% 27.00% 30.00%
2012 2013 2014
Sosial

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

Penanganan terhadap PMKS di Banda Aceh terus dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
PMKS setiap tahun terus diberikan pembinaan dan pemberdayaan, terutama dari kalangan fakir miskin. Bantuan dan pemberdayaan yang terus menerus dilakukan antara lain adalah melalui Proram Keluarga Harapan, kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan berusaha bagi keluarga miskin, pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin, dan lain-lain bantuan yang bersumber dari APBA dan APBN.

Penggunaan database kemiskinan yang telah disiapkan aplikasinya oleh Bappeda Kota Banda Aceh, terkendala karena tidak ada orang/staf khusus yang menangani aplikasi dan mengupdate data, serta keterbatasan perangkat komputer yang mendukung menjalankan aplikasi tersebut di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

2.3.1.13.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran


Kondisi pelayanan dan kasus kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.9 s.d Tabel 2.10.
Tabel 2.99
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)</th>
<th>Luas Kota Banda Aceh (km²)</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>7.5 1 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>12.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>7.5 1 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>12.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>7.5 1 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>12.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>7.5 2 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>24.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>7.5 2 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>24.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>7.5 3 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>36.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>7.5 4 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>48.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>7.5 4 Pos</td>
<td>61.36</td>
<td>48.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh

2.3.1.13.3 Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tabel 2.100
Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Kasus di WMK Yg Tanggap 15 Menit</th>
<th>Kasus Kebakaran Dalam WMK (Tahun 2007-2014)</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>116</td>
<td>128</td>
<td>90.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>70</td>
<td>77</td>
<td>90.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>86</td>
<td>95</td>
<td>90.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>89</td>
<td>99</td>
<td>89.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>95</td>
<td>80</td>
<td>118.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>95</td>
<td>85</td>
<td>111.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>80</td>
<td>86</td>
<td>93.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>70</td>
<td>89</td>
<td>78.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh

Tabel 2.101
Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007 - 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Kebakaran</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>33</td>
<td>7</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Perumahan/pemukiman penduduk.</td>
<td>30</td>
<td>28</td>
<td>36</td>
<td>31</td>
<td>39</td>
<td>16</td>
<td>46</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Hutan/ ilalang/ semak belukar</td>
<td>89</td>
<td>46</td>
<td>57</td>
<td>35</td>
<td>51</td>
<td>55</td>
<td>24</td>
<td>51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 128 77 95 99 97 84 86 89

Sumber: BPBD Kota Banda Aceh
Ketenagakerjaan

2.3.1.14.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran yang cenderung semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh lima tahun terakhir sejak 2007 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.106

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Tahun</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANGKATAN KERJA (jiwa)</td>
<td>33.811</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bekerja</td>
<td>31.136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengangguran</td>
<td>2.675</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>BUKAN ANGKATAN KERJA (jiwa)</td>
<td>19.648</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sekolah</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mengurus Rumah Tangga</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lainnya</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) %</td>
<td>63,3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) &amp; rep</td>
<td>7,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPS Aceh Tahun 2015

Dari Tabel 2.106 dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terjadi fluktuasi sejak tahun 2007-2014. Demikian pula halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terjadi.
fluktuasi. Namun secara persentase pada tahun 2012, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja setelah terjadi penurunan pada tahun 2012 (57,06 persen), mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 (59,58 persen), sedangkan tahun 2013 tidak ada data angka TPAK yang dikeluarkan oleh BPS disebabkan jumlah quisioner tidak mencukupi kuota.

Perkembangan ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh bukan merupakan kota industri, melainkan sebagai kota pendidikan dan jasa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia agar dapat menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian hidup serta dapat menyediakan lapangan kerja baru yang dapat menampung angkatan kerja yang ada.

Produktifitas kerja adalah kemampuan karyawan/pekerja dalam berproduksi dibandingkankan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan produksi pelaku usaha sangat diperlukan peningkatan produktifitas tenaga kerja di suatu daerah. Dengan produktivitas pekerja yang tinggi maka dapat dipastikan pendapatan perkapita penduduk akan tinggi juga. Hal ini sangat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ketrampilan, sikap dan etika kerja, motivasi, tingkat penghasilan, teknologi, gizi dan kesehatan. Dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan wirausaha bagi pemuda putus sekolah, remaja putri dan ibu rumah tangga. Adapun pelatihan dan bimbingan teknis dan non teknis yang diberikan bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang nantinya
diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.


**Tabel 2.107**

**Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Pelatihan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>Sumber Dana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelatihan Tata Rias</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBN</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Operator Komputer</td>
<td>41</td>
<td>30</td>
<td>25</td>
<td>53</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBN/APBK/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Processing /Pengolahan</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBN</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelatihan Menjahit</td>
<td>45</td>
<td>25</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>APBK/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Teknisi Las Listrik</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBK</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Teknisi Sepeda Motor</td>
<td>-</td>
<td>63</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Teknisi Kapal Boat</td>
<td>-</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Teknisi Instalasi Pipa</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pertukangan Bangunan Kontrukusi</td>
<td>-</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Teknisi Meubel</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pengolahan ikan menjadi Abon</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBN</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengolahan rumput laut menjadi minuman segar, pembuatan nugget</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PMI/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Teknisi Instalasi Listrik</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBK/PMI</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Teknisi Komputer</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>31</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBN</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Teknisi Handphone</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>17</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBK</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Teknisi Cooling System</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>APBK/Donatur</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Desain Grafis/Sablon</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBK</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Mengolah ikan menjadi Abon</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>APBK</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Menjahit Bordir</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
<td>APBK</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Kewirausahaan Membuat Kue</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>180</td>
<td>APBK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Jumlah** 138 199 45 181 20 30 235

*Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam pelatihan dengan jumlah orang yang telah dilatih sejak tahun 2007-2013 sebanyak 848 orang. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut anggaran bersumber dari anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan, APBK Kota Banda Aceh, APBD Provinsi Aceh dan donatur-donatur yang peduli terhadap produktifitas Tenaga

Kesempatan kerja adalah peluang pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan guna mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri beserta keluarganya. Hal yang mempengaruhi secara langsung terhadap kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sehingga untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja dari semua tingkat pendidikan. Dengan bertambahnya kesempatan kerja dari tahun ke tahun dapat diproyeksikan dengan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dari tahun 2008 s/d tahun 2013 di Kota Banda Aceh yang terdapat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.104**
**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha**
**Kota Banda Aceh Tahun 2008-2012**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Pertanian</th>
<th>Industri Pengolahan</th>
<th>Bangunan</th>
<th>Perdagangan Restoran &amp; Hotel</th>
<th>Angkutan</th>
<th>Pengudangan Komunikasi</th>
<th>Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan</th>
<th>Jasa Kemasyarakatan</th>
<th>Dll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2008</td>
<td>2232</td>
<td>3596</td>
<td>7955</td>
<td>22055</td>
<td>7932</td>
<td>2994</td>
<td>46998</td>
<td>440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>250</td>
<td>144</td>
<td>2364</td>
<td>13023</td>
<td>-</td>
<td>108</td>
<td>77058</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>485</td>
<td>216</td>
<td>2542</td>
<td>13569</td>
<td>-</td>
<td>213</td>
<td>62501</td>
<td>809</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>2926</td>
<td>4563</td>
<td>7539</td>
<td>28490</td>
<td>3824</td>
<td>6598</td>
<td>41370</td>
<td>376</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>4042</td>
<td>4925</td>
<td>4965</td>
<td>23153</td>
<td>3739</td>
<td>7372</td>
<td>41939</td>
<td>854</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: BPS Kota Banda Aceh Tahun 2015*

Berdasarkan Tabel 2.108 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Banda Aceh bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan, restoran dan hotel. Hal ini diakibatkan minimnya lapangan usaha industri yang tersedia di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Seiring berkembangnya kota Banda Aceh menuju kota Madani membuat beberapa sektor lapangan usaha berkembang dengan pesat seperti sektor jasa bidang perdagangan, restoran dan perhotelan. Ini ditandai dengan semakin besarnya tenaga kerja yang tertampung pada sektor ini. Disamping itu sektor jasa...

Il-148

### 2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### 2.3.1.15.1 Persentase Koperasi Aktif

## Tabel 2.105
### Persentase Koperasi Aktif Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Koperasi Aktif</td>
<td>334</td>
<td>353</td>
<td>378</td>
<td>396</td>
<td>413</td>
<td>452</td>
<td>458</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Koperasi</td>
<td>727</td>
<td>746</td>
<td>774</td>
<td>789</td>
<td>799</td>
<td>814</td>
<td>814</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persentase Koperasi Aktif</td>
<td>46%</td>
<td>48%</td>
<td>49%</td>
<td>50%</td>
<td>52%</td>
<td>55%</td>
<td>56%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014*

## Tabel 2.106
### Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>97</td>
<td>103</td>
<td>114</td>
<td>118</td>
<td>122</td>
<td>93</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>186</td>
<td>192</td>
<td>203</td>
<td>205</td>
<td>206</td>
<td>197</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>52,15</td>
<td>53,65</td>
<td>56,16</td>
<td>57,56</td>
<td>59,22</td>
<td>47,21</td>
<td>47,21</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>96</td>
<td>100</td>
<td>101</td>
<td>106</td>
<td>109</td>
<td>140</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>230</td>
<td>234</td>
<td>235</td>
<td>240</td>
<td>240</td>
<td>234</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>41,74</td>
<td>42,74</td>
<td>42,98</td>
<td>44,17</td>
<td>45,42</td>
<td>59,83</td>
<td>59,83</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>26</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>42,31</td>
<td>46,43</td>
<td>46,43</td>
<td>46,43</td>
<td>48,27</td>
<td>52,54</td>
<td>52,54</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>57</td>
<td>60</td>
<td>62</td>
<td>66</td>
<td>68</td>
<td>74</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>140</td>
<td>143</td>
<td>146</td>
<td>151</td>
<td>153</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>40,71</td>
<td>41,96</td>
<td>42,47</td>
<td>43,71</td>
<td>44,44</td>
<td>48,05</td>
<td>51,95</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>20</td>
<td>23</td>
<td>26</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>45</td>
<td>47</td>
<td>50</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>40,48</td>
<td>41,86</td>
<td>44,44</td>
<td>48,94</td>
<td>52</td>
<td>73,81</td>
<td>73,81</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>15</td>
<td>17</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>26</td>
<td>30</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>53,57</td>
<td>56,67</td>
<td>60,61</td>
<td>60,61</td>
<td>61,76</td>
<td>67,65</td>
<td>67,65</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>53,85</td>
<td>53,85</td>
<td>58,62</td>
<td>60</td>
<td>63,33</td>
<td>64,71</td>
<td>64,71</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>25</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>73,08</td>
<td>74,07</td>
<td>76,67</td>
<td>76,67</td>
<td>78,12</td>
<td>75</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah koperasi aktif</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase koperasi aktif</td>
<td>34,78</td>
<td>34,78</td>
<td>32</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Total Persentase Koperasi aktif: 48,07, 49,56, 51,15, 51,90, 54,28, 55,51, 56,27*

*Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014*

2.3.1.15.2 Jumlah BPR/LKM

Peran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Banda Aceh sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, tetapi permasalahan yang timbul sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sedangkan para UMKM yang membutuhkan modal di LKM tidak dapat ditangani baik.

Tabel 2.107

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah BPR</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah LKM</td>
<td>15</td>
<td>19</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah BPR dan LKM</td>
<td>17</td>
<td>21</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014*

Sehubungan dengan perkembangan industri kecil di Kota Banda Aceh, yang dilakoni berbagai ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri maka perkembangan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan...

### Tabel 2.108
Perkembangan Industri dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2007–2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah perusahaan industri</td>
<td>1707</td>
<td>1883</td>
<td>2016</td>
<td>2294</td>
<td>2390</td>
<td>2438</td>
<td>2573</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah sentra industri</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tenaga kerja industri</td>
<td>3651</td>
<td>7164</td>
<td>7378</td>
<td>7780</td>
<td>7992</td>
<td>8088</td>
<td>8190</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jumlah industri informal</td>
<td>1707</td>
<td>1883</td>
<td>2016</td>
<td>2294</td>
<td>2390</td>
<td>2438</td>
<td>2573</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014*

### Tabel 2.109
Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah seluruh UKM</td>
<td>5083</td>
<td>5236</td>
<td>5324</td>
<td>5481</td>
<td>5801</td>
<td>5861</td>
<td>5937</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah BPR/LKM</td>
<td>17</td>
<td>21</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah UKM Non BPR/LKM</td>
<td>5083</td>
<td>5236</td>
<td>5324</td>
<td>5481</td>
<td>5801</td>
<td>5861</td>
<td>5937</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012*

#### 2.3.1.16 Penanaman Modal

#### 2.3.1.16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.


### Tabel 2.110
**Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Uraian</th>
<th>PMDN</th>
<th>PMA</th>
<th>Total</th>
<th>Nilai Investasi (Juta)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>130</td>
<td>-</td>
<td>130</td>
<td>130.260</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>103</td>
<td>-</td>
<td>103</td>
<td>103.020</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>77</td>
<td>-</td>
<td>77</td>
<td>77.023</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>36</td>
<td>-</td>
<td>36</td>
<td>36.023</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>40</td>
<td>-</td>
<td>40</td>
<td>20.469</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>310</td>
<td>4</td>
<td>305</td>
<td>489,211,11</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>Jumlah Investor</td>
<td>4</td>
<td>20</td>
<td>24</td>
<td>77.928.847</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: KPPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2014*

### 2.3.1.16.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

### Tabel 2.111
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah seluruh PMA/PMDN</td>
<td>147</td>
<td>184</td>
<td>218</td>
<td>1.665</td>
<td>3.324</td>
<td>-</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio daya serap tenaga kerja</td>
<td>47</td>
<td>58</td>
<td>51</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinsosnaker Kota Banda Aceh Tahun 2012*
### 2.3.1.17 Jumlah Organisasi Pemuda

#### Tabel 2.112

**Jumlah Organisasi Pemuda Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Jumlah**

- 2007: 53
- 2008: 56
- 2009: 62
- 2010: 64
- 2011: 67
- 2012: 70
- 2013: 71

*Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh*

### 2.3.1.17.2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

#### Tabel 2.113

**Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
<td>Tdk ada data rinci per-kec.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh*
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

### 2.3.1.17.3 Jumlah Kegiatan Olahraga

#### Tabel 2.114

Jumlah Organisasi Olahraga Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

|               | 31   | 31   | 32   | 34   | 38   | 39   | 40   |

Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh
### Tabel 2.115
**Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Banda Aceh**
**Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kuta Raja</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh*


### 2.3.1.17.4 Peningkatan Potensi Pemuda melalui Pembinaan dan Pelatihan Pembangunan Kota Banda Aceh


**Grafik 2.23**
**Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan Kota Banda Aceh**

![Grafik Peningkatan Potensi Pemuda di Kota Banda Aceh](image)

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh*


**2.3.1.17.5 Pembinaan Kepemudaan sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan**

![Grafik Pembinaan Kepemudaan](image)

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk, LSM, Yayasan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya. Adapun LSM yang terdaftar dan aktif di Kota Banda Aceh sesuai dengan Tabel 2.130.
Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi memiliki masyarakat dengan kultur budaya berbeda yang dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah. Umumnya hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana ibukota propinsi dianggap lebih memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih besar. Selain faktor mencari kerja, terdapat sebagian orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil kesempatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkat kesenjangan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mengantisipasi dan menjaga lingkungan dari gangguan ketertiban dan keamanan, merekrut Satuan Perlindungan Masyarakat dari setiap gampong yang bertugas membantu kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Selain itu di setiap gampong dibangun pos Siskamling yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling melibatkan unsur masyarakat, untuk melakukan pengawasan, terhadap keamanan dilingkungannya dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Pemerataan anggota satuan linmas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan ketenrtraman masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun Rasio Jumlah Linmas sesuai Tabel 2.135.

**Tabel 2.118**
**Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2007-2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Linmas</td>
<td>1,420</td>
<td>1,420</td>
<td>1,240</td>
<td>1,240</td>
<td>1,240</td>
<td>1,300</td>
<td>1,320</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penduduk</td>
<td>219.659</td>
<td>202.774</td>
<td>220.073</td>
<td>223.516</td>
<td>244.724</td>
<td>238.784</td>
<td>249.282</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk</td>
<td>64</td>
<td>70</td>
<td>56</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
<td>54</td>
<td>57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh*

**2.3.1.18.3 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong**

Dalam menjaga situasi dan kondisi suatu daerah perlu adanya Satuan Linmas dan perangkatnya maka setiap daerah perlu adanya pos siskamling Gampong untuk pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu ketenranaman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
### Tabel 2.119
#### Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh
#### Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
<td>Jml Siskamling</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kuta Alam</td>
<td>40</td>
<td>11</td>
<td>3,6</td>
<td>40</td>
<td>11</td>
<td>3,6</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>26</td>
<td>16</td>
<td>1,6</td>
<td>26</td>
<td>16</td>
<td>1,6</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>32</td>
<td>10</td>
<td>3,2</td>
<td>32</td>
<td>10</td>
<td>3,2</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>18</td>
<td>10</td>
<td>1,8</td>
<td>18</td>
<td>10</td>
<td>1,8</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kutaraja</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>2,1</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>2,1</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>1,1</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>1,1</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>14</td>
<td>9</td>
<td>1,5</td>
<td>14</td>
<td>9</td>
<td>1,5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>30</td>
<td>10</td>
<td>3,0</td>
<td>30</td>
<td>10</td>
<td>3,0</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>23</td>
<td>9</td>
<td>2,5</td>
<td>23</td>
<td>9</td>
<td>2,5</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>206</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>2,28</strong></td>
<td><strong>206</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>2,28</strong></td>
<td><strong>217</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh*
2.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.3.1.19.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah polisi pamong praja</td>
<td>83</td>
<td>93</td>
<td>139</td>
<td>170</td>
<td>133</td>
<td>134</td>
<td>147</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penduduk</td>
<td>219.659</td>
<td>217.918</td>
<td>212.241</td>
<td>223.446</td>
<td>228.562</td>
<td>256.147</td>
<td>262.224</td>
<td>267.340</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk</td>
<td>3,7</td>
<td>4,3</td>
<td>6,6</td>
<td>7,6</td>
<td>6,06</td>
<td>5,2</td>
<td>5,6</td>
<td>8,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh

Pada tahun 2012 jumlah Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berjumlah 134 orang, dengan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 256.147 jiwa maka rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk adalah 5,2 dengan kata lain 5 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah personil Satpol PP dan WH berjumlah 147 orang, dengan jumlah penduduk 262.224 jiwa dan rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 5,6. Pada tahun 2014 personil Satpol PP dan WH meningkat sehubungan dengan adanya penerimaan tenaga kontrak baru yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan jumlah penduduk saat itu adalah 267.340 jiwa maka rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,0 dengan kata lain 8 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 Penduduk.
Kebutuhan pangan di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tanaman khususnya pertanian yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, jadi bisa dikatakan kebutuhan beras tidak mencukupi jika hanya mengandalkan produksi dari lahan pertanian di Kota Banda Aceh.


**Grafik 2.25**

*Ketersediaan Pangan Utama (kg) di Kota Banda Aceh tahun 2012-2014*

*Sumber: DKPP Kota Banda Aceh*
Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pemberdayaan dan pembinaan pemerintahan sejak dari tingkat yang terendah yaitu dimulai dari pemerintahan gampong. Dalam rangka menciptakan pemerintahan gampong yang baik, tertib administrasi dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan gampong dari berbagai aspek kepemerintahan.

**Tabel 2.121**
Rekapitulasi Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong
Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Regulasi</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Qanun tentang Pemerintahan Mukim</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Qanun tentang Pemerintahan Gampong</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Qanun tentang TPG (Qanun Kota Banda Aceh 6/2005)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Qanun tentang Reusam Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 7/2005)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Qanun tentang Keuangan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 8/2005)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Qanun tentang Tata Cara Pencalonan Geuchik</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Qanun tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 10/2005)</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Qanun tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Bagian Hukum Setdako Banda Aceh*
Pemerintah kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun didalam menjalankan kegiatan rutinnya sehari-hari. Disamping harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa atau Gampong (PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat 1 point F).


Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pada tingkat kota maupun kecamatan dan gampong maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Baiturrahman</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1,00</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>1,40</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>KutaAlam</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>1,00</td>
<td>11</td>
<td>14</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Meuraxa</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>1,00</td>
<td>16</td>
<td>20</td>
<td>1,25</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1,00</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lueng Bata</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>1,00</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
<td>1,33</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kutaraja</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>1,00</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>1,33</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Banda Raya</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1,00</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jaya Baru</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>1,00</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>1,22</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>UleeKareng</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>1,00</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
<td>1,33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah se-Kota Banda Aceh</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>1,00</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>115</strong></td>
<td><strong>1,28</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh
Dari Tabel 2.126 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan LPM di Kota Banda Aceh, yang pada tahun 2008 sebesar 1 kelompok per gampong, meningkat menjadi 1,72 kelompok per gampong pada tahun 2013.


|----|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------| |
| 1  | Baiturrahman   | 11 408       | 7,09            | 11 408           | 37,09        | 11 414          | 37,64            | 11 414        | 37,64           | 11 417          | 37,91        | 11 417          | 37,91            | 11 418        | 38,00           | 11 418          | 38,00        |
| 2  | KutaAlam       | 12 246       | 0,50            | 12 262           | 21,83        | 12 284          | 23,67            | 12 304        | 25,33           | 12 308          | 25,67        | 12 308          | 25,67            | 12 308        | 25,67           | 12 308          | 25,67        |
| 3  | Meuraxa        | 17 160       | 9,41            | 17 160           | 9,41         | 17 160          | 9,41             | 17 160        | 9,41            | 17 160          | 9,41         | 17 160          | 9,41             | 17 160        | 9,41            | 17 160          | 9,41         |
| 5  | Lueng Bata     | 10 139       | 3,90            | 10 139           | 13,90        | 10 145          | 14,50            | 10 145        | 14,50           | 10 145          | 14,50        | 10 145          | 14,50             | 10 145        | 14,50           | 10 145          | 14,50        |
| 6  | Kutaraja       | 7 108        | 5,43            | 7 108            | 15,43        | 7 108           | 15,43            | 7 108         | 15,43           | 7 108           | 15,43        | 7 108           | 15,43             | 7 108         | 15,43           | 7 108           | 15,43        |
| 7  | Banda Raya     | 11 161       | 4,64            | 11 221           | 20,09        | 11 229          | 20,82            | 11 229        | 20,82           | 11 229          | 20,82        | 11 229          | 20,82             | 11 230        | 20,91           | 11 230          | 20,91        |
| 8  | Jaya Baru      | 10 196       | 9,60            | 10 206           | 20,60        | 10 206          | 20,60            | 10 210        | 21,00           | 10 210          | 21,00        | 10 210          | 21,00             | 10 210        | 21,00           | 10 210          | 21,00        |
| Jumlah se-Kota Banda Aceh | 99 1.948 | 9,68 | 99 2.111 | 21,32 | 99 2.153 | 21,75 | 99 2.177 | 21,99 | 99 2.186 | 22,08 | 99 2.186 | 22,08 | 99 2.188 | 22,10 |

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh*
Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.128.

**Tabel 2.128**

PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007–2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah TP. PKK</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah TP. PKK tidak aktif</td>
<td>76</td>
<td>67</td>
<td>56</td>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah TP. PKK aktif (1-2)</td>
<td>23</td>
<td>32</td>
<td>43</td>
<td>53</td>
<td>62</td>
<td>79</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Persentase</td>
<td>23,23</td>
<td>32,32</td>
<td>43,43</td>
<td>53,54</td>
<td>62,63</td>
<td>79,80</td>
<td>89,90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh*

## Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Gampong

### Tabel 2.125
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Gampong
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>KECAMATAN</th>
<th>SD</th>
<th>SMP</th>
<th>SMA</th>
<th>Diploma/Bachelor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Kec. Baiturrahman</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Baiturrahman</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kadus</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah I</strong></td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Kec. Kuta</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Kuta</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kadus</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah II</strong></td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Kec. Muraesa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Muraesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kadus</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah III</strong></td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kadus</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah IV</strong></td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td>Kec. Loeng Betina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Loeng Betina</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kadus</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah V</strong></td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
<td>1 1 1 1 1</td>
</tr>
<tr>
<td>VI</td>
<td>Kec. Kutaraja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kec. Kutaraja</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SekretarisDesa</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kaur</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
<td>0 0 0 0 0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

II-171
## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

### SD

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>3024</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3025</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3026</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SMP

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>3024</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3025</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3026</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SMA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>3024</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3025</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3026</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Diploma/Sarjana

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>3024</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3025</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3026</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sumber:** Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh
Tingkat Pendidikan aparatur gampong dalam Kota Banda Aceh didominasi oleh tingkatan SMA. Pada tahun 2013 tingkat pendidikan aparatur gampong secara persentase adalah SD 2,09 persen, SMP 5,32 persen, SMA 65,66 persen dan Diploma/S1 sebesar 29,93 persen.

2.3.1.21 Komunikasi dan Informasi

Dari Tabel 2.119 terlihat bahwa pada tahun 2007 jaringan telepon seluler terdapat 32 BTS, namun seiring meningkatnya pemakaian telepon seluler maka para pengusaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi (provider) menambah BTS nya sehingga pada tahun 2014 telah berjumlah 119 BTS.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2011</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah jaringan telepon genggam</td>
<td>32</td>
<td>70</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah jaringan telepon stasioner</td>
<td>Tidak terdaftar</td>
<td></td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Total jaringan Komunikasi (1+2)</td>
<td>32</td>
<td>70</td>
<td>119</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh


Dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi Bidang Kominfo Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, memperluas jaringan informasi sebagai upaya publikasi informasi publik yaitu dengan melakukan kerjasama penyebarluasan informasi publik yang dituangkan dalam MoU dengan 3 (tiga) SKPD (Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Untuk penyampaian informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik Pemerintah Kota Banda Aceh telah mejalih hubungan kerja sama dengan media massa lokal dan membina warnetyang beroperasi dalam Kota Banda Aceh. Rasio wartel/warnet disajikan dalam Tabel 2.120.

**Tabel 2.127**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2007-2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Penduduk</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Wartel</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah warnet</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rasio wartel</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rasio warnet</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>219.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>0.021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*


Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita
rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Semakin banyak jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.


<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Total jenis surat kabar (1+2)</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Target SPM yang ditetapkan sebesar 100% dalam bidang penyiaran Radio/TV local telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.


**Tabel 2.129**
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah penyiaran radio lokal</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>18</td>
<td>20</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penyiaran radio nasional</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah penyiaran TV lokal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jumlah penyiaran TV nasional</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

**2.3.1.21.1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional**

**Tabel 2.130**
Pelaksanaan Diseminasi Inf. & Pendistribusian Inf Nasional

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>Target</th>
<th>Ket</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Media massa</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>39</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12/thn</td>
<td>sesuai</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Media online (Website)</td>
<td>-</td>
<td>48</td>
<td>55</td>
<td>60</td>
<td>76</td>
<td>80</td>
<td>240</td>
<td>140</td>
<td>365/thn Belum tercapai</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Media tradisional pertunjukan rakyat</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>12/thn</td>
<td>Belum tercapai</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Media interpersonal</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>12/thn</td>
<td>Belum tercapai</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Media luar ruang</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12/thn</td>
<td>sesuai</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*


### Tabel 2.131

**Pengembangan & Pemberdayaan KIG (Kelompok Informasi Gampong) Rasio Jumlah KIG di Tingkat Kecamatan**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah KIG</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rasio KIG</td>
<td>100</td>
<td>67</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>55</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh*

### 2.3.1.22 Perpustakaan

#### Jumlah Perpustakaan


### Tabel 2.132

**Jumlah Perpustakaan Tahun 2007-2013 Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah Perpustaka milik Pemerintah Daerah (pemda)</td>
<td>11</td>
<td>17</td>
<td>25</td>
<td>31</td>
<td>34</td>
<td>37</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Perpustaka milik non pemda</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Total Perpustaka (1+2)</td>
<td>13</td>
<td>23</td>
<td>34</td>
<td>43</td>
<td>49</td>
<td>37</td>
<td>41</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kantor Perpustakaan dan arsip Kota Banda Aceh*

- = tahun 2012-2013 tak ada data
Saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh memiliki satu buah gedung yang khusus melayani bidang perpustakaan, yaitu perpustakaan yang berlokasi di Taman Sari Banda Aceh. Adapun kendala saat ini, yaitu gedung pustaka yang sudah tersedia perlu dibenahi dan diperhatikan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dan koleksi perpustakaan yang masih kurang memadai seperti koleksi buku perpustakaan (translasi) alih aksara (tranliterasi) dan tidak tersedianya SDM yang profesional.

Hingga saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh belum memiliki gedung yang khusus untuk penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip yang kian bertambah dari hari ke hari. Pelaksanaan, penyimpanan dan pemeliharaan Kearsipan saat ini masih berbaur dengan pelaksanaan perpustakaan.


### Tabel 2.133
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)</td>
<td>850</td>
<td>900</td>
<td>1100</td>
<td>1200</td>
<td>1350</td>
<td>1665</td>
<td>1767</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda</td>
<td>475</td>
<td>489</td>
<td>801</td>
<td>1320</td>
<td>1705</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Total pengunjung Perpustakaan (1+2)</td>
<td>1351</td>
<td>1432</td>
<td>2014</td>
<td>4822</td>
<td>6061</td>
<td>1665</td>
<td>1767</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh*  
= tahun 2012 – 2013 tdk ada data
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh


Grafik 2.28
Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak.

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh

Kondisi lahan yang terbatas, menyebabkan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas di Kota Banda Aceh. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh petani di Kota Banda Aceh :

- Rendahnya pengetahuan pelaku usaha di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas produk usaha mereka.
- Sulitnya memperoleh bahan baku untuk kemasan yang berkualitas.

### 2.3.1.24 Pariwisata

#### 2.3.1.24.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (org)

#### Tabel 2.134

Data Arus Kunjungan Wisatawan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kunjungan Wisatawan</th>
<th>Manca Negara</th>
<th>Nusantara</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Tahun 2007</td>
<td>9.940</td>
<td>82.743</td>
<td>92.683</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tahun 2008</td>
<td>6.960</td>
<td>129.657</td>
<td>136.617</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tahun 2009</td>
<td>4.820</td>
<td>157.891</td>
<td>162.711</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tahun 2010</td>
<td>4.065</td>
<td>138.305</td>
<td>142.370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Grafik 2.29
Kunjungan Wisatawan berdasarkan hunian hotel Tahun 2007 - 2013


Data tersebut hanya berdasarkan angka hunian namun banyak wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh yang tidak menginap di...
hotel ada juga menginap di tempat keluarga, seperti pada masa libur anak-anak sekolah. Kemudian juga ada yang tidak menginap, untuk tempat yang akan ke Sabang, mereka memanfaatkan waktu satu hari untuk city tour di Banda Aceh sebelum berangkat ke Sabang, diperkirakan wisatawan yang tidak menginap sekitar 40 persen dari wisatawan yang menginap di hotel.

2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

2.3.1.25.1 Produksi Perikanan

Selain Kota perdagangan, Kota Banda Aceh juga punya potensi perikanan yang cukup besar. Kawasan Ulee Lheue, Alue Naga dan Meuraxa, punya potensi besar untuk lebih dikembangkan dalam memproduksi ikan budidaya. Selain itu Kota Banda Aceh dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan tangkap terbesar di Aceh dengan dukungan pelabuhan perikanan samudera (PPS) yang terdapat di Lampulo, maka potensi pemrosesan dan cold storage ikan menjadi usaha yang paling menarik. Dengan tambahan pemrosesan hasil perikanan tangkap dan tersedianya cold storage yang memadai, menjadi salah satu penunjang bisnis perikanan sehingga berpengaruh terhadap gairah sektor perikanan khususnya perikanan tangkap yang dengan sendirinya meningkatkan produksi.

Produksi perikanan Kota Banda Aceh tahun 2014 mencapai 7321 ton, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 7083,93 ton. Peningkatan produksi perikanan sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, faktor utama peningkatan produksi perikanan disebabkan semakin banyaknya nelayan dan pembudidaya ikan yang memanfaatkan teknologi dalam operasional penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan, selain faktor tersebut pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui SKPD terkait menjadi motor penggerak peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh memiliki trend yang positif naik, artinya bahwa produksi perikanan selalu meningkat setiap tahunnya, sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik...
2... Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 berikut ini.

**Grafik 2.30**

**Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Cakupan Bina Kelompok Perikanan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2012</td>
<td>68%</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>71%</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>73%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian*

2.3.1.25.2 Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Secara geografis letak wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh lautan dan dengan luas wilayah yang kecil hanya sebesar ± 61,36 km², mayoritas peruntukan wilayahnya lebih diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang merupakan ciri wilayah perkotaan.

Kondisi geografis yang kurang mendukung tersebut membuat sektor pertanian dan perkebunan tidak menjadi sektor unggulan. Pengembangan lahan pertanian lebih diarahkan pada pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan disetiap gampong dengan tujuan pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berfungsiya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan menambah pendapatan masyarakat. Luas area yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan ± 106 Ha, yang mayoritas ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan.

Menilik dari kondisi geografis tersebut potensi kelautan menjadi sektor unggulan terutama sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sektor perikanan tersebut merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang cukup besar yang mencapai 1.547 orang yang terdiri dari 960 nelayan dan 587 petani perikanan.
Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah terhadap jumlah kelompok nelayan. Pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan bertujuan untuk memberikan dukungan agro input bagi kelompok pembudidaya ikan sehingga terbina dan berkembangnya usaha budidaya ikan dan meningkatkan produktifitas pembudidaya ikan di Kota Banda Aceh. Selain itu pembinaan yang dilakukan melalui pemberian pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan pemasaran hasil perikanan. Berikut adalah Grafik 2... Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Secara umum permasalahan yang dialami para nelayan di Kota Banda Aceh terdiri dari dua bagian besar, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal berasal dari ruang lingkup perikanan tangkap sendiri, Sedangkan permasalahan eksternal berasal dari kebijakan pemerintah, atau sektor di luar perikanan tangkap yang terkait.

Permasalahan internal yang dihadapi para nelayan di Kota Banda Aceh umumnya adalah:

1. Terjadi ketidakseimbangan dalam pemanfaatan Sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan yang diakibatkan oleh Kegiatan Ofer fishing oleh armada yang berukuran besar
2. Lemahnya usaha perikanan tangkap skala kecil akibat minimnya kemampuan untuk meningkatkan produktifitas. Kemampuan yang rendah disebabkan penguasaan teknologi, keterbatasan akses permodalan dan akses pasar

Terapan teknologi merupakan kendala utama yang dihadapi oleh nelayan Pesisir di kota Banda Aceh, secara umum nelayan kita masih melaksanakan penangkapan ikan dengan cara tradisional belum bermanfaatkan teknologi yang ada, seperti menggunakan alat bantu Fish Finder, Radar, Kompas dan Radio Komunikasi.

Peralatan teknologi ini sangat dibutuhkan oleh nelayan ketika kondisi alam sedang ekstrem (musim Barat), bagi nelayan yang telah memiliki alat bantu teknologi maka mereka dapat melaut walaupun kondisi alam sedang ekstrim, namun bagi nelayan yang belum memanfaatkan teknologi yang ada maka mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian telah memberikan beberapa jenis alat bantu penangkapan ikan kepada nelayan sebagai bahan percontohan, dengan harapan agar seluruh nelayan di Kota Banda Aceh akan menggunakan terapan teknologi dalam usaha penagkapan ikan sehingga mereka dapat beroperasional dalam berbagai musim.

Sedangkan permasalahan eksternal yang umumnya mereka hadapi adalah kenaikan harga BBM, dimana dapat menyebabkan beban biaya operasional penangkapan bagi nelayan kecil bertambah.

<table>
<thead>
<tr>
<th>2.3.1.26</th>
<th>Perdagangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.3.1.26.1</td>
<td>Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pasar Aceh</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pasar Kp, Baru</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pasar Peunuti</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pasar Ikan Peunayong</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pasar Daging</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pasar Bumbu Peunayong</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pasar Nasabe Peunayong</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pasar Sayur dan Buah</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pasar Rex Peunayong</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pasar Batoh</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pasar Unggas Peunayong</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
<td>1</td>
<td>baik</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pasar Ulee Kareng</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pasar Setui</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
<td>1</td>
<td>Krg baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014*

### Grafik 2.32
Persentase Pasar yang sudah berfungsi secara optimal di Kota Banda Aceh (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2012</td>
<td>91.67%</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>91.67%</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>84.62%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_Sumber:_ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh

Dari grafik diatas dapat terlihat perbandingan jumlah pasar yang berfungsi optimal tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 jumlahnya menurun, hal ini karena dilakukan renovasi bangunan pasar, sehingga aktifitas pasar tersebut dipindahkan sementara.

Khusus untuk masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penataan PKL pada 13 pasar yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang. PKL masih bersikap antipati terhadap upaya-upaya penataan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, dan sering kali melakukan perlawanan.

Berbagai solusi penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga belum dapat mencapai keberhasilan dalam menata PKL, untuk itu Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengambil beberapa kebijakan-
kebijakan baik menetukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL dalam kota seperti mempersiapkan lokasi tempat berjualan para PKL sehingga nantinya Pemerintah Kota Banda Aceh akan lebih mudah dalam melakukan pengaturan/penataan PKL ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah.


### Perindustrian

| 2.3.1.27 | Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan perbankan |


Adanya stimulan melalui bantuan pembiayaan ditargetkan UKM dapat mengembangkan produk unggulan yang berdaya saing, sesuai dengan program pemerintah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).

**Grafik 2.34**

*Jumlah UKM Yang Mendapatkan Bantuan Perbankan 2012-2015*

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh*
Melalui kerjasama yang dijalin antara Pemerintah kota Banda Aceh dengan perbankan yaitu Bank Aceh dan Bank Bukopin, tahun 2014 telah diberikan bantuan permodalan kepada pelaku UKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan diberikan kepada 16 UKM, yang bergerak diberbagai bidang usaha produktif. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh disini adalah mendorong pihak perbankan dalam memfasilitasi permodalan kepada UKM.

Melalui bantuan tersebut diharapkan UKM dapat berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### 2.3.1.27.2 Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi

Pemberdayaan IKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat IKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai produk yang dihasilkan, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Kejaksaan Aceh, Polresta Aceh dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) masih banyak menemukan barang/produk yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen namun masih diperjual-belikan oleh pihak penjual. Tim pengawasan telah melakukan teguran/pembinaan langsung terhadap pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi serta melakukan penyitaan terhadap barang/produk kadaluarsa, juga mengingatkan para pedagang/penjual/pelaku usaha baik dalam pasar maupun di toko-toko agar tidak mencampurkan bahan kimia terhadap makanan/minuman yang diperjual belikan terhadap konsumen.

Untuk mengoptimalkan pengawasan makanan dan minuman pada toko/swalayan dalam Kota Banda Aceh perlu dilakukan pengawasan secara rutin bersama-sama dengan tim secara terus-menerus dan berkesinambungan setiap bulannya.

Pembangunan ekonomi kota berbasis kreativitas dan inovasi merupakan program Pemerintah Kota Banda Aceh. Program ini sejalan dengan pencaanangan one village one product sebagai salah satu program mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pada Tahun 2015 Kota Banda Aceh telah memiliki 10 produk unggulan yang telah memiliki standar one village one product, antara lain:

- Pengolahan kopi
- Pengolahan ikan
- Kerajinan border
- Kue tradisional
- Batik
- Tenun
- Anyaman rotan
- Produk sabun cuci
- Produk peci border
- Produk minuman Juice Nozy

Grafik 2.36

**Jumlah Produk yang menunjang Program One Village One Product di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah Produk</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh*
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017


Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap penerapan syariat islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif seperti prilaku dan aliran menyimpang.

Hasil identifikasi Tim Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tahun 2012 terdapat 4 aliran yang terindikasi sesat di Kota Banda Aceh. Aliran yang terindikasi sesat tersebut antara lain:

1. Aliran Millata Abraham
umumnya menyasar para generasi muda yang pengetahuan agamanya masih rendah.

2. Syiah
Syiah salah satu aliran yang terindikasi menyimpang dari islam, hal ini karena terdapat beberapa fakta utama yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti:
- Mengkafirkan para sahabat terutama Abu Bakar, Umar, Ustman dan Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW)
- Menurut pandangan pengikut syiah imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW.


4. Suluk (Lampaseh) Banda Aceh


**Grafik 2.37**
Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan di Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2014

*Sumber: Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh*
Perkembangan kota dan arus informasi yang pesat membuat pola kehidupan warga kota menjadi berubah, seperti cara pergaulan, berpakaian, dan sebagainya. Hal tersebut berimbas pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Syari’at Islam.

Sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus dalam penerapan syariat islam, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, diterbitkan payung hukum yang mengatur terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk Qanun/Perda, yaitu:

1. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
3. Qanun Nomor 14 Tahun 2004 tentang khalwat (mesum)

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Pelanggaran Qanun Syari’at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

**Grafik 2.38**
**Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014**

*Grafik 2.38 Jumlah Pelanggaran Qanun Syarat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014*

*Sumber : Satpol PP & WH Kota Banda Aceh*
Era globalisasi membawa perubahan-perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai masuknya budaya asing membawa dampak yang cukup signifikan mencakup kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya membentengi pengaruh negatif yang berkembang dari efek globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Namun, kebijakan yang diterapkan tidak serta merta menutup diri dari modernisasi, hal ini terlihat dari sasaran Kota Banda Aceh untuk menciptakan masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi. Upaya yang dilakukan lebih diarahkan untuk menyeimbangkan iptek dan imtaq. Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menguatkan nilai imtaq terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi, salah satunya adalah dengan melaksanakan kurikulum yang berbasis islam melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan syariat islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan pendidikan diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran islam yang benar.

Berikut ini adalah Grafik 2...Kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2012-2014.
Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa kemampuan baca Al-Qur’an Siswa Tingkat Sekolah Menengah di Kota Banda Aceh terus meningkat, pencapaian target ini didukung melalui adanya persyaratan masuk sekolah menengah di Kota Banda Aceh yang harus melampirkan sertifikat diniyah bagi siswa dari lingkup sekolah Kota Banda Aceh dan adanya tes baca quran bagi siswa dari luar lingkup sekolah Kota Banda Aceh. Walaupun sudah berjalan berjalan, namun masih ada kendala dalam SDM guru Diniyah, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dilaksanakan program kualitas SDM guru Diniyah.

Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama islam baik formal, non-formal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-quran, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum islam (fikih) serta kemampuan untuk baca tulis arab jawi.

Berikut ini adalah Grafik 2... Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014
Dalam mendukung terwujudnya visi Banda Aceh sebagai model kota madani, Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan pemahaman dan pengamalan syariat islam sebagai prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kerja birokrasi pemerintah dan kehidupan masyarakat dalam bingkai aturan dalam syariat Islam. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah syiar dan dawah dimasyarakat. Usaha dawah dan syiar islam sebagai salah satu upaya sosialisasi Syariat Islam bagi seluruh warga Kota Banda Aceh. Dinamisasi dan globalisasi dunia saat ini menuntut kita agar terus menghidupkan dawah dan syiar dalam berbagai aspek kehidupan.

berbagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan frekwensi kegiatan syiar dan dawah di masyarakat, sebagai berikut :

1. Kajian bagi Pejabat Pemko dan Masyarakat
2. Da’iyyah Ramadhan
3. Dakwah Simpatik
4. Dakwah Umum Jumáatan
5. Dakwah Keliling
6. Dakwah Radio
7. Safari Dakwah
8. Dakwah Gampong
9. Dakwah Publik

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
Berikut ini adalah Grafik 2... Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat Kota Banda Aceh

**Grafik 2.41**
Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

*Grafik di atas menunjukkan peningkatan frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat Kota Banda Aceh dari tahun 2012 hingga 2014.*

**Sumber: Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh**

### 2.3.1.28.6 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban


Kriteria yang menjadi penilaian untuk masjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban, antara lain:

1. **Bidang Imarah (pelaksanaan ibadah), item yang dinilai:**
   - Pelaksanaan shalat fardhu lima waktu berjamaah
   - Tertib pelaksanaan shalat jumát
   - Tertib pelaksanaan ibadah sosial
2. **Bidang Idharah**
   - Tertib administrasi mesjid (diutamakan ketersediaan struktur kepengurusan mesjid)
3. Bidang Riáyah

- Pemeliharaan bangunan mesjid
- Pemeliharaan halaman dan lingkungan mesjid

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

![Grafik 2.42 Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014](image)

_Sumber : Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh_

2.3.1.28.7 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org)


Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga independen yang bertugas mengelola ZIS mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional dan terorganisir. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel, selain terdapat pengurus juga dibentuk dewan pengawas melalui Peraturan


Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

**Grafik 2.43**

Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Menurut hasil survey tersebut maka untuk zona satu atau zona pusat yang tergabung antara Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Sabang potensi zakat mencapai 64 M, dengan rincian sebagai berikut:

1. Banda Aceh 23 Milyar
2. Aceh Besar 21 Milyar
3. Sabang 10 Milyar

Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan dihitung berdasarkan jumlah panjang jalan dibagi dengan jumlah kenderaan. Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan untuk Tahun 2007 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.136**
*Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Panjang Jalan</td>
<td>487,94</td>
<td>707,34</td>
<td>707,34</td>
<td>765,66</td>
<td>765,66</td>
<td>765,66</td>
<td>765,66</td>
<td>765,66</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Kendaraan</td>
<td>88,947</td>
<td>112,05</td>
<td>135,75</td>
<td>161,54</td>
<td>174,85</td>
<td>188,81</td>
<td>200,43</td>
<td>199,99</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rasio</td>
<td>5.49</td>
<td>6.31</td>
<td>5.21</td>
<td>4.74</td>
<td>4.38</td>
<td>4.06</td>
<td>3.82</td>
<td>3.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Dishubkominfo Banda Aceh*

Jumlah panjang jalan di Kota Banda Aceh pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan jumlah kenderaan bermotor, banyak faktor yang mempengaruhinya, beberapa faktor tersebut adalah:

a. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi lebih besar, hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam menjangkau tempat yang ingin di tuju.

b. Ketersediaan angkutan umum belum maksimal, baik dari jumlah, kemudahan dan kenyamanan.

c. Adanya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan distributor untuk membeli kendaraan bermotor, seperti cicilan yang murah hingga uang muka yang relatif rendah.
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode satu tahun, dapat dilihat pada Tabel 2.150.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Satuan</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah orang</td>
<td>Orang</td>
<td>135.251</td>
<td>146.000</td>
<td>394.200</td>
<td>662.721</td>
<td>526.623</td>
<td>941.921</td>
<td>1.007.855</td>
<td>799.785</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Barang</td>
<td>Ton</td>
<td>102.300</td>
<td>108.000</td>
<td>108.720</td>
<td>109.800</td>
<td>111.600</td>
<td>132.700</td>
<td>138.008</td>
<td>133.745</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dishubkominfo Banda Aceh

Dilihat dari perkembangan jumlah orang dan jumlah barang yang diangkut, menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan fasilitas transportasi dari waktu ke waktu, baik dari fasilitas moda transpor maupun terminal barang dan orang.

### Tabel 2.138
Realisasi Izin dan Pendapatan Tahun 2007-2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Perizinan</th>
<th>Perizinan (Lbr)</th>
<th>Jumlah Yang Telah Dicap</th>
<th>Retribusi (Rp.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Izin Gangguan (HO)</td>
<td>420</td>
<td>572</td>
<td>604</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</td>
<td>3694</td>
<td>4976</td>
<td>5843</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</td>
<td>213</td>
<td>269</td>
<td>1132</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Izin Usaha Industri (UI)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td>
<td>1392</td>
<td>1615</td>
<td>1561</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</td>
<td>1607</td>
<td>1446</td>
<td>1493</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Izin Usaha Kesehatan (UKES)</td>
<td>18</td>
<td>72</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Izin Pariwisata</td>
<td>12</td>
<td>61</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Izin Usaha Angkutan / Izin Trayek</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</td>
<td>38</td>
<td>334</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Izin Reklame</td>
<td>136</td>
<td>943</td>
<td>933</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Izin Galian Jalan</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni &amp; Budaya</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Tanda Daftar Industri (TDI)</td>
<td>52</td>
<td>72</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Wajib Lapor Ketenagakerjaan-an (WLK)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Izin Penanaman Modal</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh
Salah satu faktor berjalananya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini yang menjadikan pengelolaan penanaman modal menjadi salah satu bidang penting pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah Perda/Qanun yang mendukung Iklim Usaha di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 berjumlah 17 Qanun.

Penempatan pejabat sesuai disiplin ilmu merupakan salah satu upaya mempercepat proses pelaksanaan kegiatan secara benar dan tepat. Melalui penempatan sesuai latar belakang pendidikan, para pemangku jabatan tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki terhadap bidang tugas yang ditangani. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.


Berikut ini adalah Grafik 2... Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (The Right Man on The Right Place)

**Grafik 2.44**

**Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (The Right Man on The Right Place) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014**

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi pengawas internal untuk membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui pendekatan yang sistematik dan terarah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan proses tata kelola pemerintahan (governance process). APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam mengemban tugas tersebut dibutuhkan personil APIP yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai. Upaya peningkatan SDM APIP salah satunya melalui pendidikan dan latihan yang terukur dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)

Grafik 2.45
Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2014 (org)

Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Grafik 2.46
Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan external di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

*Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh*


Pembinaan, pengawasan dan penganggaran mulai tahun 2007-2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tergantung kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh, sementara jumlah objek/ratio


Tabel 2.139
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Anggaran dan Jumlah Objek Pemeriksaan Serta Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah pembinaan dan pengawasan</td>
<td>191</td>
<td>87</td>
<td>157</td>
<td>160</td>
<td>93</td>
<td>118</td>
<td>245</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah anggaran pembinaan dan pengawasan</td>
<td>461.310 .000</td>
<td>559.825 .000</td>
<td>684.540 .000</td>
<td>604.750 .000</td>
<td>331.610 .000</td>
<td>398.576 .000</td>
<td>779.200 .000</td>
<td>690.375 .000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jumlah objek pemeriksaan</td>
<td>260</td>
<td>260</td>
<td>260</td>
<td>265</td>
<td>265</td>
<td>260</td>
<td>245</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ratio pembinaan/obrik (%)</td>
<td>73,46</td>
<td>33,46</td>
<td>60,38</td>
<td>60,38</td>
<td>35,09</td>
<td>45,38</td>
<td>100</td>
<td>74,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh*

Tabel 2.140
Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah pegawai</td>
<td>45</td>
<td>51</td>
<td>51</td>
<td>47</td>
<td>42</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah auditor dan JFP2UPD</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>12</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ratio per-Tahun (%)</td>
<td>11,11</td>
<td>9,8</td>
<td>9,8</td>
<td>27,66</td>
<td>28,57</td>
<td>46,34</td>
<td>46,34</td>
<td>46,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh*
## Tabel 2.141
Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah rekomendasi BPK</td>
<td>104</td>
<td>29</td>
<td>21</td>
<td>74</td>
<td>51</td>
<td>29</td>
<td>58</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah penyelesaian</td>
<td>90</td>
<td>25</td>
<td>20</td>
<td>65</td>
<td>45</td>
<td>29</td>
<td>46</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ratio penyelesaian (%)</td>
<td>86,54</td>
<td>86,21</td>
<td>95,24</td>
<td>87,84</td>
<td>88,24</td>
<td>100</td>
<td>79,31</td>
<td>40,42</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jumlah rekomendasi BPKP</td>
<td>-</td>
<td>22</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Jumlah penyelesaian</td>
<td>-</td>
<td>22</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ratio penyelesaian (%)</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Jumlah rekomendasi inspektorat Aceh</td>
<td>39</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>26</td>
<td>-</td>
<td>68</td>
<td>-</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jumlah penyelesaian</td>
<td>39</td>
<td>10</td>
<td>7</td>
<td>25</td>
<td>-</td>
<td>68</td>
<td>-</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ratio penyelesaian (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>53,85</td>
<td>96,15</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>82,60</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Jumlah rekomendasi Inspektorat kota</td>
<td>250</td>
<td>400</td>
<td>349</td>
<td>385</td>
<td>307</td>
<td>732</td>
<td>1210</td>
<td>928</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Jumlah penyelesaian</td>
<td>250</td>
<td>400</td>
<td>349</td>
<td>382</td>
<td>288</td>
<td>555</td>
<td>1027</td>
<td>912</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ratio penyelesaian (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>99,22</td>
<td>93,81</td>
<td>75,81</td>
<td>84,87</td>
<td>98,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh*

### 2.4.2.1.5 Jumlah PNS yang indisipliner

Disiplin kerja PNS terwujud dalam bentuk ketaatan, ketertiban, tanggungjawab dan loyalitas terhadap segala tata tertib yang berlaku dalam organisasi. Dengan terwujudnya aparat yang disiplin dan berintegritas maka akan berdampak pada menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner.


Dalam upaya penegakan disiplin, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun aplikasi e-disiplin dimana sistem ini berupa aplikasi absensi online yang bertujuan merekam tingkat kehadiran PNS secara online dan memudahkan pembinaan PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Aplikasi ini dapat menjadi sebuah alat deteksi dini bagi pegawai terhadap disiplin kerja dan bagi atasan langsung. Pimpinan SKPD serta pejabat pembina kepegawaian dapat menggunakan aplikasinya sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam memantau tingkat kehadiran pegawai dan meminimalisir pelanggaran/sanksi yang terjadi. Melalui aplikasi e-disiplin, atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian dapat menerima secara otomatis notifikasi terhadap tahapan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang pegawai.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah PNS yang indisipliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)

**Grafik 2.47**

*Jumlah PNS yang indisipliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)*

![Grafik Jumlah PNS yang indisipliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014](image)

*Sumber : BKPP Kota Banda Aceh*
Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Keberadaan teknologi merupakan jawaban untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.


Selain itu, seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terkoneksi jaringan internet dan memiliki website tersendiri serta terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh : www.bandaacehkota.go.id. Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadopsi teknologi informasi sebagai infrastruktur utama pelayanan
publik, ini dapat terlihat dari pembangunan berbagai aplikasi pelayanan berbasis e-government baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.48

Dari sisi pelayanan umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyediakan pelayanan umum yang dilakukan berupa sms gateway dan proses verifikasi (pendaftaran perusahaan baru untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa) kepada vendor/rekanan.

Gambaran aspek pelayanan umum (sms gateway) tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.142
Jumlah Pengaduan, Perusahaan Terverifikasi, dan Jumlah Personil MIMS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Jumlah Pengaduan</th>
<th>Jumlah Perusahaan (Buah)</th>
<th>Jumlah Personil MIMS (orang)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>2198</td>
<td>181</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1217</td>
<td>563</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>1736</td>
<td>1074</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dishubkominfo Kota Banda Aceh
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Jumlah Pengaduan</th>
<th>Jumlah Perusahaan (Buah)</th>
<th>Jumlah Personil MIMS (orang)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2012</td>
<td>873</td>
<td>1091</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>1436</td>
<td>1061</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>823</td>
<td>457</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh
*Note : Jumlah personil MIMS berkurang karena terjadi proses mutasi pegawai

2.4.2.1.7 Perolehan Opini dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif.


Pengukuran untuk indikator perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Selama 6 tahun berturut-turut sejak Tahun 2009, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil memperoleh predikat WTP dari BPK.
Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Berikut ini adalah Grafik 2.48 PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

**Grafik 2.49**

PAD di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

![Grafik PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014](image)

*Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh*

Peningkatan PAD ini tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, antara lain:

1. Intensifikasi penerimaan pendapatan dengan optimalisasi penagihan pajak dan retribusi.
2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi dengan menjaring wajib pajak baru
3. Intensifikasi PBB dan BPHTB dengan melakukan validasi NJOP PBB.
4. Sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Pendataan dan pemetaan sumber-sumber potensi baru.
6. Optimalisasi kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi.
7. Membentuk sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
8. Mengupayakan peningkatan dana dari pusat diluar DAU dan DAK ke daerah.

**Pemerintan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional**

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, media massa bisa bertindak sebagai pengawas sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat. Dengan demikian, antara program pembangunan yang dicanangkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik.

Persentase pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini disebabkan upaya dalam menjalankan kegiatan media relations yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menjalin hubungan dengan wartawan. Kepercayaan dari wartawan adalah salah satu aset praktisi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh yang paling penting.

Berikut ini adalah Grafik 2... Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014

**Grafik 2.50**

Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014

*Sumber : Bagian Humas Sekretariat Kota Banda Aceh*
Tabel 2.143
Rasio Jumlah Tapal Batas Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kuta Alam</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
<td>18.18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutaraja</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>33.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaya Baru</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Syiah Kuala</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0.00</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Lueng Bata</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulee Kareng</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Banda Raya</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Meuraxa</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Baiturrahman</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Rasio Kota</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>0.00</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>90</strong></td>
<td><strong>0.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banda Aceh.*
Permasalahan utama dalam birokrasi pelayanan adalah berkaitan dengan peningkatan pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek salah satunya adalah bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Proses dan produk pelayanan itu sendiri harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para stakeholder. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.51
Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

![Grafik 2.51 Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014](image)

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh

Dalam rangka memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan pemerintahan, Tim Legislasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada setiap tahun membahas dan menyampaikan rancangan qanun kepada DPRK, yang terus meningkat jumlahnya yaitu tahun 2007 sebanyak 16 rancangan qanun, tahun 2008 sebanyak 21 rancangan qanun, tahun 2009 sebanyak 31 rancangan qanun, tahun 2010 sebanyak 36, tahun


Tabel 2.144
Daftar Qanun Kota Banda Aceh yang Ditetapkan Pada Periode 2007–2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Jumlah Program Legislasi Daerah</th>
<th>Pihak Eksekutif</th>
<th>Usul Inisiatif DPRK</th>
<th>Yang Telah Ditetapkan Menjadi Qanun</th>
<th>Rasio Qanun yang Ditetapkan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Atas Usulan Eksekutif</td>
<td>Yang Disampaikan ke DPRK</td>
<td>Yang Tidak Disampaikan</td>
<td>Usul Inisiatif DPRK</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>21</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>36</td>
<td>30</td>
<td>28</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>39</td>
<td>35</td>
<td>33</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>44</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Bagian Hukum Setdako Banda Aceh

Pemilihan jabatan keuchik dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat gampong untuk masa jabatan 6 tahun, seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Pemilihan Keuchik secara langsung merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, dimana melalui pemilihan keuchik secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan berperan aktif dalam tahapan pemilihan. Hal ini sejalan dengan sasaran terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong.

Berikut ini adalah Grafik 2... Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.52
Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh
Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik lebih disebabkan menurunnya kepedulian warga gampong untuk memenuhi undangan yang disebarkan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) selain karena kegiatan pemilihan umumnya dilakukan pada hari libur dimana masyarakat lebih memilih untuk menghabiskan liburan bersama keluarga.

Untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk membuat tahapan-tahapan pemilihan keuchik melalui penyampaian visi dan misi serta kampanye yang menghadirkan masyarakat secara langsung.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban tersebut mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang danaperimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).


Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mengandung makna bahwa:

1) Arah belanja APBD Kota Banda Aceh digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2.
Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satu terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Banda Aceh, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara...
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu


Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Sehingga setiap pengeluaran pembangunan akan mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

Perkiraan pendapatan daerah yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 akan sangat membantu proses perencanaan secara maksimal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.


3.1.1 **Kinerja Pelaksanaan APBD**

kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran akan semakin besar, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan dapat dipenuhi.

Selama ini sebagian besar pendapatan daerah dipergunakan untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur pemerintah/gaji PNS), dan belanja langsung yang bertujuan untuk mendanai urusan publik. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, maka akan semakin memperbesar ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan belanja publik.


### Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 –2014

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.3</td>
<td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td>
<td>769.657.037</td>
<td>719.261.211</td>
<td>720.441.012</td>
<td>655.113.816</td>
<td>483.671.741</td>
<td>557.943.438</td>
<td>738.714.323</td>
<td>807.146.467</td>
<td>2.20</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.5</td>
<td>Zakat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.002.000.000</td>
<td>11.422.379.110</td>
<td>14.457.083.063</td>
<td>14.735.699.593</td>
<td>22.20</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Dana Perimbangan</td>
<td>391.278.298.463</td>
<td>396.335.582.439</td>
<td>399.485.099.269</td>
<td>405.815.604.335</td>
<td>481.699.960.314</td>
<td>561.416.740.888</td>
<td>631.733.133.105</td>
<td>685.952.795.848</td>
<td>8.58</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1</td>
<td>Dana Bagi Hasil Pajak/Baghi Hasil Bukan Pajak</td>
<td>48.341.298.460</td>
<td>50.691.267.439</td>
<td>45.436.719.269</td>
<td>56.390.722.335</td>
<td>45.583.255.314</td>
<td>42.929.616.888</td>
<td>33.101.195.105</td>
<td>36.564.945.848</td>
<td>-2.69</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2</td>
<td>Dana Alokasi Umum</td>
<td>308.839.000.003</td>
<td>307.002.315.000</td>
<td>313.120.380.000</td>
<td>328.073.282.000</td>
<td>406.480.305.000</td>
<td>491.593.554.000</td>
<td>567.628.828.000</td>
<td>610.554.730.000</td>
<td>10.58</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.3</td>
<td>Dana Alokasi Khusus</td>
<td>34.098.000.000</td>
<td>38.642.000.000</td>
<td>40.928.000.000</td>
<td>21.351.600.000</td>
<td>29.636.400.000</td>
<td>26.893.570.000</td>
<td>31.003.110.000</td>
<td>38.833.120.000</td>
<td>5.93</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.1</td>
<td>Hibah</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.767.168.451</td>
<td>2.079.458.600</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>14.29</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2 Dana Darurat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</td>
<td>11.377.713.930</td>
<td>5.149.638.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>12.725.400.000</td>
<td>97.095.580.000</td>
<td>114.931.514.000</td>
<td>-5.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya</td>
<td>14.882.006.677</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>15.000.000.000</td>
<td>112.821.355.723</td>
<td>93.16</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh 2015*

Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk merevisi beberapa peraturan, memangkas peraturan, dan prosedur perijinan yang dianggap berbelit-belit yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta mengefektifkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya, serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan-penerimaan yang ditetapkan untuk Kota Banda Aceh dan memberikan data konkrit. Namun demikian, beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan telah dialokasikan ke setiap daerah sesuai dengan formulasi terukur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### 3.1.2 Neraca Daerah

danamerupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.


<table>
<thead>
<tr>
<th>URAIAN</th>
<th>RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASET</td>
<td>11.89</td>
</tr>
<tr>
<td>ASET LANCAR</td>
<td>41.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Kas</td>
<td>52.68</td>
</tr>
<tr>
<td>Piutang</td>
<td>50.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Persediaan</td>
<td>23.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Dibayar Dimuka</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</td>
<td>64.94</td>
</tr>
<tr>
<td>ASET TETAP</td>
<td>10.91</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanah</td>
<td>1.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Peralatan dan mesin</td>
<td>16.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Gedung dan Bangunan</td>
<td>11.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Jalan,irigasi, dan jaringan</td>
<td>50.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset tetap lainnya</td>
<td>12.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Konstruksi dalam pengerjaan</td>
<td>80.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Dst...................</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASET LAINNYA</td>
<td>63.78</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagihan penjualan angsuran</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemitraan dengan pihak kedua</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

#### Kemitraan dengan pihak ketiga
- Aset tak berwujud: 25.00
- Aset lain-lain: 43.15

#### JUMLAH ASET DAERAH
- Jumlah: 11.89

#### KEWAJIBAN
- KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
  - Utang Perhitungan pihak ketiga: -
  - Utang muka dari kas Daerah: 25.00
  - Pendapatan diterima dimuka: 19.06
  - Dst.............: -
- KEWAJIBAN JANGKA PANJANG: 39.98

#### EKUITAS DANA
- EKUITAS DANA LANCAR: 40.75
- SILPA: 59.06
- Cadangan piutang: 50.04
- Cadangan persediaan: -6.50
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek: 29.03
- Pendapatan yang ditangguhkan: 158.18
- Cadangan Belanja Dibayar Dimuka: 23.10

#### EKUITAS DANA INVESTASI
- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang: 64.94
- Diinvestasikan dalam asset tetap: 10.91
- Diinvestasikan dalam asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan): 63.78
- Dst.................: -10.02

#### JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
- Jumlah: 11.89

*Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh 2015*

#### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan yang sah lainnya. Untuk mendukung pembelajaran daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah antara lain:

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/retribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2012-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan...
masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:


b. Peningkatan Belanja Langsung ditujukan pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.

c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.

d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan, yang diprioritaskan pada program/kegiatan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2014, rata-rata proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 42 persen. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tahun</th>
<th>Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparat (Rp.)</th>
<th>Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2009</td>
<td>404.271.654.798</td>
<td>556.062.366.232</td>
<td>72,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2010</td>
<td>451.856.268.873</td>
<td>602.909.980.933</td>
<td>74,95%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2011</td>
<td>514.563.918.505</td>
<td>764.013.118.850</td>
<td>67,35%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2012</td>
<td>532.755.565.864</td>
<td>832.734.713.764</td>
<td>63,98%</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2013</td>
<td>616.744.305.772</td>
<td>989.475.685.419</td>
<td>62,33%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2014</td>
<td>677.031.427.834</td>
<td>1.197.981.738.323</td>
<td>56,51%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Dari Tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa belanja aparat masih sangat tinggi, hal ini disebabkan Pemerintah setiap tahunnya menaikkan gaji PNS untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.
Dalam hal APBK diperkirakan surplus, maka diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, maka pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk saving (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu Tahun 2009-2014 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.6 sedangkan untuk menutupi defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.7.

**Tabel 3.6**
Defisit Riil Anggaran
Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Realisasi Pendapatan Daerah</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Belanja Daerah</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>555.362.366.232</td>
<td>601.559.980.933</td>
<td>761.313.118.850</td>
<td>825.234.713.764</td>
<td>985.975.685.419</td>
<td>1.194.481.738.323</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>700.000.000</td>
<td>1.350.000.000</td>
<td>2.700.000.000</td>
<td>7.500.000.000</td>
<td>3.500.000.000</td>
<td>3.500.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Defisit Riil**

| (55.562.185.583) | (25.593.329.623) | (44.398.094.896) | (45.160.365.517) | (61.234.946.452) | (63.877.495.368) |

*Sumber*: DPKAD Kota Banda Aceh 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</td>
<td>5,32</td>
<td>2,27</td>
<td>1,82</td>
<td>2,59</td>
<td>4,11</td>
<td>5,27</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pencairan Dana Cadangan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Penerimaan Pinjaman Daerah</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penerimaan Piutang Daerah</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh 2015
### Tabel 3.8
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**
**Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
<td>(Rp)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jumlah SISA</td>
<td>13.651.721.837</td>
<td>13.826.878.213</td>
<td>21.386.489.168</td>
<td>40.555.782.303</td>
<td>62.987.795.452</td>
<td>155,31%</td>
<td>3.000.000.000</td>
<td>4,76%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelampauan Penerimaan PAD</td>
<td>-894.330.380</td>
<td>-538.882.971</td>
<td>5.318.188.403</td>
<td>-32,78</td>
<td>36,63%</td>
<td>21.392.393.404</td>
<td>52,75%</td>
<td>15.803.241.525</td>
<td>25,09%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya</td>
<td>38.993.537.356</td>
<td>24.418.486.000</td>
<td>46.860.206.983</td>
<td>288,83</td>
<td>59.829.064.921</td>
<td>279,75%</td>
<td>80.166.958.701</td>
<td>197,67%</td>
<td>98.325.170.416</td>
<td>156,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai Akhir Tahun belum terselesaikan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kegiatan Lanjutan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015*

3.3. **Kerangka Pendanaan**

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.3.1 **Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Anggaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pengeluaran wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama adalah belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja honorarium non PNS (tenaga honorer dan
kontrak), Belanja listrik, telepon, dan air. Di dalam pembiayaan daerah juga terdapat pengeluaran yang bersifat wajib, yaitu pembayaran pokok utang, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban membayar utang kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini kepada World Bank untuk pembangunan Pasar Aceh. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel 3.9.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Tahun 2009 (Rp.)</th>
<th>Tahun 2010 (Rp.)</th>
<th>Tahun 2011 (Rp.)</th>
<th>Tahun 2012 (Rp.)</th>
<th>Tahun 2013 (Rp.)</th>
<th>Tahun 2014 (Rp.)</th>
<th>Rata-rata Pertumbuhan (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>Belanja Tidak Langsung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tambahan Penghasilan PNS Belanja</td>
<td>65.239.971.701</td>
<td>104.001.245.310</td>
<td>129.598.577.624</td>
<td>178.214.848.000</td>
<td>215.830.737.728</td>
<td>242.791.405.964</td>
<td>31.03</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pimpinan dan Anggota DPRK serta KDH/WKDH</td>
<td>1.936.784.693</td>
<td>1.912.000.000</td>
<td>1.912.000.000</td>
<td>1.912.000.000</td>
<td>1.943.111.069</td>
<td>2.868.000.000</td>
<td>9.59</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Belanja Bunga</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Belanja Bagi Hasil</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>Belanja Langsung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Honorarium Non PNS</td>
<td>38.121.120.000</td>
<td>35.566.169.500</td>
<td>37.256.608.721</td>
<td>45.910.953.500</td>
<td>53.830.876.426</td>
<td>51.862.219.000</td>
<td>6.97</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Belanja Jasa Kantor (air+listrik+telf)</td>
<td>14.490.845.740</td>
<td>14.763.802.238</td>
<td>17.518.846.926</td>
<td>28.434.765.574</td>
<td>34.911.502.300</td>
<td>43.007.277.136</td>
<td>24.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabel 3.9**
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Banda Aceh 2009-2014
<table>
<thead>
<tr>
<th>Belanja</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>13</th>
<th>14</th>
<th>15</th>
<th>16</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beasiswa</td>
<td>366.500.000</td>
<td>30.000.000</td>
<td>940.000.000</td>
<td>55.000.000</td>
<td>195.000.000</td>
<td>310.000.000</td>
<td>631.48</td>
<td>30.57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pendidikan</td>
<td>30.000.000</td>
<td>940.000.000</td>
<td>55.000.000</td>
<td>195.000.000</td>
<td>310.000.000</td>
<td>631.48</td>
<td>30.57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja</td>
<td>636.500.000</td>
<td>636.500.000</td>
<td>940.000.000</td>
<td>55.000.000</td>
<td>195.000.000</td>
<td>310.000.000</td>
<td>631.48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Penunjang</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>17.804.205.000</td>
<td>8.688.610.000</td>
<td>9.179.010.000</td>
<td>15.404.246.000</td>
<td>30.57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pendidikan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>17.804.205.000</td>
<td>8.688.610.000</td>
<td>9.179.010.000</td>
<td>15.404.246.000</td>
<td>30.57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pembiayaan</td>
<td>700.000.000</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000.000</td>
<td>4.000.000.000</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pengeluaran</td>
<td>700.000.000</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000.000</td>
<td>4.000.000.000</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pembayaran</td>
<td>700.000.000</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000.000</td>
<td>4.000.000.000</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pokok Utang</td>
<td>700.000.000</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000.000</td>
<td>4.000.000.000</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total (A+B+C)</td>
<td>357.309.532.775</td>
<td>400.333.608.784</td>
<td>480.185.722.661</td>
<td>571.146.404.862</td>
<td>636.943.355.241</td>
<td>699.385.527.371</td>
<td>14.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: DPKAD Kota Banda Aceh 2015*
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pencairan Dana Cadangan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kapasitas Riil kemampuan Keuangan</td>
<td>307.431.403.666</td>
<td>458.675.687.269</td>
<td>541.558.194.929</td>
<td>665.295.790.258</td>
<td>731.825.369.284</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) : Angka Realisasi Anggaran  
**) : Pagu Anggaran  
Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian</th>
<th>Tahun 2013</th>
<th>Tahun 2014</th>
<th>Tahun 2015</th>
<th>Tahun 2016</th>
<th>Tahun 2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rencana alokasi pengeluaran prioritas I</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>II.b</td>
<td>Pembentukan Dana Cadangan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dikurangi :</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>II.c</td>
<td>Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama</td>
<td>Rp 81.982.368.786</td>
<td>Rp 86.626.770.451</td>
<td>Rp 89.018.341.485</td>
<td>Rp 70.037.009.346</td>
<td>Rp 77.040.710.281</td>
</tr>
<tr>
<td>II.d</td>
<td>Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)</td>
<td>335.497.392.597</td>
<td>485.421.823.494</td>
<td>551.310.103.971</td>
<td>532.671.533.029</td>
<td>531.440.672.497</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Uraian</td>
<td>Tahun 2013</td>
<td>Tahun 2014</td>
<td>Tahun 2015</td>
<td>Tahun 2016</td>
<td>Tahun 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
<td>(Rp.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>prioritas I (I-II)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rencana alokasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengeluaran prioritas II</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III.a Belanja Tidak langsung</td>
<td>568.495.924.036</td>
<td>622.433.144.378</td>
<td>620.420.671.090</td>
<td>713.144.496.193</td>
<td>784.458.945.812</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dikurangi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III.b Belanja Tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama</td>
<td>538.826.966.515</td>
<td>588.801.785.235</td>
<td>586.989.892.502</td>
<td>582.820.238.964</td>
<td>641.102.262.860</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)</td>
<td>29.668.957.521</td>
<td>33.631.359.143</td>
<td>33.430.778.588</td>
<td>130.324.257.229</td>
<td>143.356.682.952</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)</td>
<td>(57.734.946.452)</td>
<td>(60.377.495.368)</td>
<td>(43.182.687.630)</td>
<td>2.300.000.000</td>
<td>57.028.013.835</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) : Angka Realisasi Anggaran
**) : Pagu Anggaran
Sumber : DPKAD dan Bappeda Kota Banda Aceh 2016
Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicate) kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20 (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.12.
<table>
<thead>
<tr>
<th>N o</th>
<th>Jenis Dana</th>
<th>Tahun 2013</th>
<th>Tahun 2014</th>
<th>Tahun 2015</th>
<th>Tahun 2016</th>
<th>Tahun 2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Prioritas I</td>
<td>34,03%</td>
<td>335.497.392.597</td>
<td>40,64%</td>
<td>485.421.823.494</td>
<td>39,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Prioritas II</td>
<td>3,01%</td>
<td>29.668.957.521</td>
<td>2,82%</td>
<td>33.631.359.143</td>
<td>2,86%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Prioritas III</td>
<td>62,96%</td>
<td>620.809.335.301</td>
<td>56,55%</td>
<td>675.428.555.686</td>
<td>57,83%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total</td>
<td>100%</td>
<td>985.975.685.419</td>
<td>100%</td>
<td>1.194.481.738.323</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prioritas III
- Tambahan penghasilan PNS
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan keuangan
- Belanja Tidak terduga
- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

*) : Angka Realisasi Anggaran
**) : Pagu Anggaran
Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016
Isu strategis dalam RPJM Kota Banda Aceh 2013-2017 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, lalu diikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan pada akhir periode RPJMD.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Semakin membaiknya berbagai indicator pembangunan merupakan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun demikian, sebagai Ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh tetap menyandang banyak permasalahan dan tantangan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

1. Urusan Pendidikan

Secara umum, pendidikan di Kota Banda Aceh telah baik, dimana angka rata-rata lama sekolah adalah 12,07% (Tahun 2013), Angka Melek Huruf pada tahun 2013, 99,64%, dan sejak tahun 2008 tidak ada anak yang putus sekolah (0). Akan tetapi peningkatan pendidikan di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya:

- Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
2. Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat kota Banda Aceh secara umum semakin membaik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya AHH (Angka Harapan Hidup) Kota Banda Aceh, untuk Tahun 2013 adalah 71,72 tahun melebihi AHH Nasional (70,74 tahun). Hasil analisis dari RISKESDAS (riset kesehatan dasar) tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menggambarkan bahwa kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota di Aceh yang tidak termasuk dalam Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), sementara Aceh termasuk dalam 10 propinsi DBK di Indonesia. Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai macam permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah :

- Masih ditemukannya penyakit menular dan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif tertentu di masyarakat
- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih endemis
- Meningkatnya penderita TBC/TB paru di masyarakat
- Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Perwal No.47/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Kurangnya beberapa tenaga ahli kesehatan (dr,drg, apoteker, fisioterapi)

3. Urusan Pekerjaan Umum

Kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu Indikator keberhasilan pembangunan, beberapa Indikator Infrastruktur dasar di Kota Banda Aceh telah menunjukkan peningkatan, seperti panjang jalan dalam kondisi baik 77,81 % (Tahun 2014), drainase dalam kondisi baik 61% (Tahun 2014) dan rumah tangga pengguna air bersih 81,9 % (Tahun 2014), namun demikian masih ada berbagai permasalahan yang dihadapi, yakni:

- Masih rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan
- Masih rendahnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Jalan sering dilewati kendaraan bertonase tinggi melebihi dari kemampuan konstruksi
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan sehingga menyebabkan banyak drainase tersumbat oleh sampah.
- Banyak terjadi penyempitan badan jalan karena belum idealnya manajemen traffic, sehingga ruas jalan banyak dipakai untuk parkir yang mengakibatkan timbulnya kemacetan.
- Banyaknya usulan program pembangunan infrastruktur melalui musrenbang dengan alokasi dana APBK untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas
- Besarnya kebutuhan dana untuk pembebasan tanah.
- Masih adanya kawasan yang rawan genangan dan banjir
- Jalan arteri dan sekunder yang ada mulai mendekati titik puncak dan untuk mengatasinya perlu penambahan jaringan jalan baru dan fly over.
- Ketersediaan lahan yang kurang bagi pengadaan drainase makro
- Masih adanya masalah bidang sanitasi
- Masih banyak septictank penduduk yang tidak kedap air sehingga merusak air tanah. Selain itu dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah dan jumlah bangunan yang padat sistem septictank skala setempat sudah tidak memadai lagi sehingga dibutuhkan septictank skala kawasan/komunal.
- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih
- Masih perlunya normalisasi dan optimalisasi jaringan pipa air bersih pada kawasan tertentu
- Penghuni tidak tertampung di Rusunawa
- Masih adanya penduduk yang menempati rumah tidak layak huni, dan memiliki rumah
- Masih adanya kawasan kumuh yang perlu ditangani

4. Urusan Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan, membangun, dan membentuk perekonomian suatu daerah. Untuk itu sangat diperlukan suatu sistem transportasi yang baik, yang dapat menghubungkan
antarwilayah dan menjadi prasarana pergerakan manusia dan proses pembangunan.

Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah meningkatkan berbagai macam fasilitas transportasi, tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan yang muncul, yakni:

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh terus menurun dari tahun ke tahun, menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) semakin meningkat
- Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai.
- Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan Jalan.
- Keterbatasan ruang parkir dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia dan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam urusan lingkungan hidup adalah peraihan Anugerah Adipura yang ke-7 kalinya pada tahun 2014, yang merupakan penghargaan paling bergengsi pada bidang lingkungan hidup di Indonesia, namun demikian masih ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup, diantaranya adalah:

- Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya.
- Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah relatif belum berhasil dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi dengan pola pelayanan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
- Perilaku warga masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan sehingga munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat, sedangkan pewadahannya masih sangat terbatas.
- Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- Kesadaraan dan partisipasi pedagang kaki lima masih sangat rendah untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka.
- Biaya pengelolaan sampah masih didominasi oleh APBK, sedangkan pembayaran retribusi dari warga masyarakat masih sangat rendah.
6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- Masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran dan kematian
- Belum terkelolanya arsip kependudukan secara baik

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif
- Belum maksimalnya perlindungan anak dan pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- Belum terwujudnya kota layak anak
- Pelaksanaan Kota Ramah Gender belum terlaksana secara optimal
- Belum maksimalnya pelaksanaan program keluarga berkualitas

8. Urusan Sosial

- Masih banyak masyarakat yang menganggur
- Belum sinergisnya penggunaan Data Base kemiskinan kota banda aceh dalam program pengentasan kemiskinan
• Masih adanya gelandangan dan pengemis

9. Urusan Kebudayaan

• Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharan sarana objek wisata wisata yang telah ada.
• Rendahnya partisipasi para pelaku seni dalam kegiatan kebudayaan
• Masih belum adanya sarana gedung kesenian yang memadai
• Kurangnya kesadaran dalam menyelamatakan nilai sejarah budaya, mulai dari kawasan bertipologi sosial budaya seperti Kawasan Gampong Jawa dan Gampong Pande yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar, dan Kawasan Peunayong yang masih memiliki arsitektur bangunan bercirikan arsitektur Cina/Tionghoa serta masih bertahannya sistem dan nilai-nilai budaya masyarakat Cina/Tionghoa.
• Kurangnya fasilitas pendukung pada objek wisata
• Kurangnya pemanfaatan IT bagi sumber daya manusia bidang seni dan pariwisata
• Kurangnya event-event wisata, atraksi seni budaya dan optimalisasi pemasaran.
• Belum adanya dokumen Rencana pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan seni budaya daerah yang didukung dan disinergikan dengan hasil pemetaan kondisi Seni Budaya daerah dan target segmen pasar dan kebutuhan wisatawan hasil analisis pemasaran agar optimalisasi pariwisata seni budaya dapat berkembang.
• Kurangnya Sosialisasi informasi mengenai kegiatan kepariwisataan

10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

• Belum optimalnya transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
• Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM SKPD/Unit Kerja pada bidang tertentu (pengelola barang, petugas pajak daerah dan pengawas)
• Masih rendahnya fungsionalisasi Aset daerah
• Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal
• Kurangnya kompetensi PNS dalam menduduki Jabatan Struktural yang bersifat Teknis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

- Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur belum optimal
- Rendahnya penataan dan pengelolaan kearsipan
- Belum optimalnya disiplin PNS
- Sarana dan prasarana Diklat belum optimal
- Belum responsifnya SKPD menindaklanjuti penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- Belum seluruh SKPD mendapat predikat Wilayah bebas Korupsi (WBK)
- Belum seluruh SKPD mengimplementasikan SPIP secara optimal
- Belum tersedianya aplikasi pengelolaan resume rapat secara elektronik pada SKPD
- Pemanfaatan email dan social media untuk kebutuhan dinas belum optimal
- Masih adanya gampong yang belum terbuka dalam melaporkan rincian penggunaan PAG
- Masih adanya beberapa gampong yang belum menyusun RPJMG
- Masih adanya beberapa gampong yang belum menyusun Qanun Gampong tentang penggunaan PAG

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum berdayanya Ekonomi Industri Kreatif
- Masih lemahnya penguatan kelembagaan gampong
- Masih lemahnya SDM sebagai pelaksana program/kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat gampong
- Masih sederhananya alat produksi usaha

12. Urusan Kelautan

- Masih rendahnya terapan teknologi dalam usaha penangkapan ikan
- Rendahnya kualitas kemasan produk hasil pertanian di Kota Banda Aceh

13. Urusan Perindustrian

- Belum tertatanya Pasar dan Toko Modern
- Belum optimalnya fungsi Pasar dan Penataan PKL
- Belum optimalnya pegawasan produk makanan dan minuman
• Masih banyak usaha yang belum memiliki izin
• Masih banyak pedagang yang berjualan di tempat terlarang
• Masih ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya

14. Penegakan Syariat Islam

Penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh menghadapi berbagai kendala. Selain dari kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam masyarakat, juga gencarnya pengaruh dari luar Islam untuk menodai aqidah masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sejak Tahun 2011 telah diterapkan Program Pendidikan Diniyah yang bertujuan untuk membangun karakter pelajar agar lebih giat mendekatkan diri dengan agama, 9 SD dan 4 SMP telah ditetapkan sebagai pilot project, mendapat sambutan yang positif maka mulai tahun 2013 pendidikan diniyah di terapkan secara bertahap kepada seluruh sekolah umum dan swasta tingkat SD, SMP dan SMA/K. Berikut adalah beberapa kendala dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh:

• Tingginya upaya pendangkalan aqidah dan pemurthadan
• Masih adanya tempat usaha yang melanggar Syariat Islam
• Masih kurangnya SDM guru diniyah/agama di sekolah
• Masih adanya pengolahan makanan yang tidak halal
• Besarnya potensi zakat yang disalurkan keluar Kota Banda Aceh
• Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang Islami
• Belum optimalnya pengembangan pariwisata bernuansa islami

4.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau didekamankan dalam perencanaan pembangunan untuk dijadikan prioritas penanganan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJM Kota Banda Aceh ini ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini,

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

### 4.2.1 Penelaahan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Internasional

Dalam menentukan isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan Kota Banda Aceh, terlebih dahulu dilakukan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional.

#### 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019


Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasisan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Kota Banda Aceh mendapat perhatian khusus dalam Agenda Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

- Termasuk salah satu dari 21 kabupaten/kota di Sumatera sebagai sasaran pengurangan bencana dengan mengurangi indeks risiko bencana (Buku III Agenda Pembangunan Wilayah)
- Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta pusat pemerintahan Provinsi NAD sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, perikanan laut (Buku III Tabel 8.5 Lokasi prioritas kota sedang yang berfokus pada upaya pemerataan di Wilayah Sumatera)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah: “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”

Misi
a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi
b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

Sasaran dari Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJM Aceh menjadi tanggung jawab bersama seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh termasuk Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)


SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Sampai dengan pertengahan tahun 2011 Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh 13 Kementerian/Lembaga, yaitu:
1. SPM Bidang Perumahan Rakyat
2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. SPM Bidang Sosial
4. SPM Bidang Kesehatan
5. SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. SPM Bidang Lingkungan Hidup
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera
8. SPM Bidang Ketenagakerjaan
9. SPM Bidang Pendidikan
10. SPM Bidang Pekerjaan Umum
11. SPM Bidang Ketahanan Pangan
12. SPM Bidang Kesenian
13. SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

4. Millenium Development Goals (MDG’s)

MDG’s merupakan kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang PBB di New York di bulan September tahun 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai tujuan MDG’s di tahun 2015.

Tujuan MDG’S menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Millenium Declaration (Deklarasi Milenium), dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium /Millenium Summit di New York pada bulan September 2000. Deklarasi berisi Suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan

8 tujuan dari MDG’S, yaitu :
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Kota Banda Aceh mendukung terwujudnya tujuan MDGs pada Tahun 2015 dan berbagai program/kegiatan telah dilaksanakan. Pada tahun 2010 Kota Banda Aceh berhasil meraih MDGs Metro TV Award.

5. Post 2015 Development


Berikut adalah limapergeseran transformasibesar yang diusulkan:

1. Tidak meninggalkan siapapun di belakang.
   Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya- yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti
   Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

3. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif
   Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

4. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua
   Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

5. Membina kemitraan global baru
6. Penelaahan RPJMD Kabupaten/Kota lainnya


**Tabel 4.1**

**Identifikasi Isu Strategis Kabupaten/Kota lainnya**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kota Sabang sebagai daerah destinasi pariwisata internasional akan memberi pengaruh terhadap kehidupan budaya local dan nilai-nilai keagamaan.</td>
<td></td>
<td>Nilai-nilai islami belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat, baik karena faktor internal maupun eksternal.</td>
<td>Sebagai daerah syariat Kota Banda Aceh masih menghadapi masalah dalam penegakan syariat, diantaranya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan syariat islam</td>
</tr>
<tr>
<td>Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth&amp;pro-job), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (pro-poor) sehingga belum berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan</td>
<td></td>
<td>Persentase penduduk miskin di Aceh Besar masih relatif tinggi</td>
<td>Tingginya tingkat pengangguran Kota Banda Aceh lebih disebabkan karena tingginya arus migrasi dari daerah lain mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat ekonomi dan pemerintahan Propinsi Aceh.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>dan pengangguran</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UU Nomor 11 Tahun 2006</td>
<td>Letak geografis Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis untuk tumbuh dan berkembang,</td>
<td>Strategi kerjasama daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar). Kerjasama ini dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera, di bidang pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai Hubport (pelabuhan ekspor/impor internasional dan pelabuhan transit sebagai peluang percepatan pembangunan ekonomi</td>
<td>Rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan sehingga banyak siswa/I dari Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh</td>
<td>Tingginya jumlah siswa/i yang datang ke Banda Aceh jika tidak disertai dengan fasilitas yang memadai dapat menurunkan kenyamanan belajar. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sejak 2010 adalah dengan pembatasan penerimaan jumlah siswa dari luar Banda Aceh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan, terutama bahan</td>
<td>Sungai Krueng Aceh yang mengalir dari Aceh Besar (di Hulu) - Banda Aceh (di Hilir)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Letak geografis**

Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis untuk tumbuh dan berkembang.

**Strategi kerjasama daerah**

yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar). Kerjasama ini dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera, di bidang pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi.

**Rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan**

sehingga banyak siswa/I dari Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh.

**Tingginya jumlah siswa/i yang datang ke Banda Aceh**

jika tidak disertai dengan fasilitas yang memadai dapat menurunkan kenyamanan belajar. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sejak 2010 adalah dengan pembatasan penerimaan jumlah siswa dari luar Banda Aceh.

**Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan, terutama bahan**

Sungai Krueng Aceh yang mengalir dari Aceh Besar (di Hulu) - Banda Aceh (di Hilir).
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>pertambangan galian C, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengarah semakin buruknya kualitas air dan kerusakan lingkungan permukiman.</td>
<td>memberikan sumber utama air bersih bagi masyarakat di kedua wilayah, lambat laun akan terkena dampak dari pengrusakan lingkungan, yang akan mempengaruhi kualitas air bersih di Kota Banda Aceh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pemekaran wilayah di Aceh Besar</td>
<td>Terbukanya peluang bagi perluasan Kota Banda Aceh pada wilayah Aceh Besar</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Penelaahan RPJPD Kota Banda Aceh


Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.


4.2.2 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya pendangkalan aqidah.


2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat

Kapasitas aparatur yang belum optimal tercermin dari belum maksimalnya pelayanan yang diberikan, sehingga memberikan kualitas yang rendah bagi masyarakat. Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, masih banyaknya penduduk yang belum dapat melanjutkan pendidikan dan kesehatan bayi yang masih rendah. Rendahnya kapasitas ini dapat mendorong pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

3. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran telah menjadi fenomena umum di negara sedang berkembang. Untuk Kota Banda Aceh, indikasi ini ditunjukkan...
oleh hampir 10 persen penduduk Kota Banda Aceh miskin dan hampir 9 persen penduduk di dalam kelompok pengangguran terbuka.

4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai

Indikasi ini juga ditunjukkan seringnya terjadi kemacetan karena panjang jalan per kendaraan yang semakin pendek. Indikasi lain adalah keluhan masyarakat yang terus menerus terjadi karena kekurangan lokasi parkir.

5. Belum optimalnya kualitas pendidikan

Indikasi ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam melanjutkan pendidikan, serta rendahnya tingkat rata-rata lama bersekolah penduduk. Belum lagi adanya indikasi keluhan masyarakat dengan masih banyaknya lulusan pendidikan menengah atas yang belum dapat diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ternama.

6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat pada masih tingginya AKB bayi, serta masih tingginya rasio penduduk terhadap dokter, dan tingginya rasio posyandu terhadap bayi. Tingginya rasio tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan.

7. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi pasar

Ini merupakan indikasi yang ditunjukkan oleh belum tertibnya pedagang di dalam memanfaatkan pasar sebagai tempat melakukan transaksi dagangannya. Masih banyak penduduk yang lebih suka berjualan di badan jalan pasar atau di emperan-emperan toko.

8. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Kurangnya kesiapan menghadapi bencana dapat diindikasikan oleh banyaknya penduduk yang panik ketika terjadi suatu bencana, seperti adanya gempa. Bahkan, tanpa ada informasi apapun, masyarakat langsung mengambil sikap menurut yang mereka perkirakan, tanpa mempersiapkan apapun yang harus dipenuhi bila bencana itu benar adanya.
9. Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum proporsional

Partisipasi perempuan di dalam lembaga politik, baik eksekutif maupun legislatif masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi perempuan ini hanya bila ditinjau dari keterlibatan mereka secara aktif di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikasi ini dapat terjadi karena para perempuan terikat dengan keluarga atau indikasi-indikasi lain.

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut:

**Tabel 5.1**
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah</th>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits</td>
<td>1 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Menciptakan masyarakat intelektual islami</td>
<td>2 Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan public dan pengawasan</td>
<td>1 Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggungjawab</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik</td>
<td>2 Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 Tersedianya paying hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Membangun Perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat</td>
<td>1 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik</td>
<td>2 Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 Meningkatnya penanggulangan PMKS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017


<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Mewujudkan pelayanan kesehatan prima</td>
<td>1 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)</td>
<td>2 Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami</td>
<td>1 Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak</td>
<td>1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Mewujudkan generasi muda yang kreatif dalam membangun Kota</td>
<td>1 Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Banda Aceh

<table>
<thead>
<tr>
<th>Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah</th>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits</td>
<td>1.1 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat</td>
<td>Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah</td>
<td>Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran Syariat Islam</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Menciptakan masyarakat intelektual Islami</td>
<td>2.1 Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi</td>
<td>Meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau faham terselubung/ sesat</td>
<td>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Meningkatkan Syiar Islam Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam
### Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meningkatkan sarana dan prasarana mesjid</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik |
|--------|---------|----------|---------------|
| Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS |

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meningkatkan SDM aparatur yang profesional Meningkatkan fungsi BAPERJAKAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan public dan pengawasan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik |
|--------|---------|----------|---------------|
| Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab |
| 2 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik |

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik |
|--------|---------|----------|---------------|
| Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab |
### Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal No.38 Tahun 2010</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Menyusun regulasi yang efektif dan efisien</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>Tersedianya paying hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan</td>
<td>Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan</td>
<td>Membuat produk hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat</td>
<td>Meningkatkan petugas dan sarana prasarana Linmas</td>
<td>Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyiapkan sarana dan prasarana Linmas</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong</td>
<td>Meningkatkan pemahaman demokrasi di tingkat gampong</td>
<td>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Membangun Perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat</td>
<td>1.1 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian</td>
<td>Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah ada dan membangun pusat perekonomian baru</td>
<td>Membangun sarana dan prasarana perekonomian</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)</td>
<td>Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Kota dengan Perbankan</td>
<td>Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

VI-3
### Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi</td>
<td>Peningkatan kerjasama dengan investor</td>
<td>Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan</td>
<td>Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perizinan</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian</td>
<td>Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian</td>
<td>Pembinaan terhadap sector perikanan, peternakan dan pertanian</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan komptensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja</td>
<td>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>Meningkatnya penanggulangan an PMKS</td>
<td>Mengurangi permasalahan masalah social dan memberikan pelayanan social kepada PMKS</td>
<td>Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mewujudkan pelayanan kesehatan prima</td>
<td>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka</td>
<td>Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.</td>
<td>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka</td>
<td>Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meningkatkan mutu</td>
<td></td>
<td>pelayanan kesehatan</td>
<td>Memperbarui kualitas kesehatan pelayanan kesehatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)</td>
<td>2.1 Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan</td>
<td>Meningkatkan kualitas standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan Nasional</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami</td>
<td>1.1 Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata</td>
<td>Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas</td>
<td>Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.2 Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa</td>
<td>Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan</td>
<td>Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak</td>
<td>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat</td>
<td>Mendorong terwujudnya Kota LayakAnak</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

<table>
<thead>
<tr>
<th>TUJUAN</th>
<th>SASARAN</th>
<th>STRATEGI</th>
<th>ARAH KEBIJAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan kota</td>
<td>Membina generasi muda yang terampil dan cakap</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh

Kebijakan Umum Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
   - Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan dakwah untuk masyarakat terutama kepada anak-anak dan para remaja.
   - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran orang tua, tokoh-tokoh ulama, pendidik dan masyarakat, terutama kepada para remaja dan generasi muda.
   - Meningkatkan intensifikasi penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran perda/qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat islam.
   - Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi.
Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam
Meningkatkan kegiatan pengajaran Al-Qur’an dalam keluarga dan masyarakat
Meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial
Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat
Membina serta mengarahkan dan mendidik masyarakat untuk menggunakan/ mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban
Meningkatkan manajemen pendidikan Islami dan diniyah

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
   Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan
   Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional
   Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
   Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
   Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah
   Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI

   Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional
serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keacehan

- Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar
- Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan
- Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan
- Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat

- Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya;
- Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar dimanca negara
- Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau;
- Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK
- Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank
- Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan
- Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan
- Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan
- Pengoptimalan fungsi pasar
- Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesuai standar.
   - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata
   - Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi;
   - Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;
   - Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh
   - Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif
   - Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh
   - Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh
   - Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

6. Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang.
   - Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan
   - Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi
   - Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
   - Kaderisasi perempuan potensial di parpol
   - Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

- Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- Peningkatan kapasitas perempuan diperdesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian perdesaan
- Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal
- Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja
- Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai

7.2 Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh 2012 – 2017

Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017, adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam
2. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
4. Pendidikan, pemuda dan olahraga
5. Kesehatan
6. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
7. Pariwisata, seni dan budaya
8. Pengarusutamaan gender (PUG)
### Tabel 7.1
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.</td>
<td>Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama, dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah.</td>
<td>Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran Syariat Islam</td>
<td>Menurunnya Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td>Program Penelitian Aliran Sempalan dan Pembinaan; Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah; Pembinaan Aqidah Ummat</td>
<td>Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU</td>
<td>Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>386</td>
<td>100</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam</td>
<td>Meningkatkan kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td>Program Pendidikan Menengah</td>
<td>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam</td>
<td>Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah</td>
<td>Dinas Syariat Islam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam</td>
<td>Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun</td>
<td>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat Propinsi

- Peringkat 2 Besar

Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah

10% 100%

Peningkatan frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat

- 281
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatkan sarana dan prasarana masjid</td>
<td>Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban</td>
<td>45</td>
<td>93</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel</td>
<td>Menyampaikan informasi dan data pengumpulan ZIS kepada publik</td>
<td>Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS</td>
<td>Meningkatnya penerimaan ZIS</td>
<td>8,8 M</td>
<td>21,3 M</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
<td>Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya Jumlah Muzakki</td>
<td></td>
<td>8.166 org</td>
<td>9.497 org</td>
<td>Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam</td>
</tr>
</tbody>
</table>

VII-8
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab</td>
<td>Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang profesional</td>
<td>Meningkatkan fungsi BAPERJAKAT</td>
<td>Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan(The right man on the right place)</td>
<td>60%</td>
<td>85%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Diklat Penjenjangan</td>
<td>32%</td>
<td>66%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan SKPD</td>
<td>Jumlah APIP yang bersertifikasi</td>
<td>10 org</td>
<td>27 org</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capsaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Menurunnya jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal</td>
<td>2106</td>
<td>600</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government</td>
<td>Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS</td>
<td>Melaksanakan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS</td>
<td>Menurunnya Jumlah PNS yang Indisipliner</td>
<td>57 org</td>
<td>30 org</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inspektorat Inspektorat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tahun 2013-2016
Tahun 2017

Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK
Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK
Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government
23 aplikasi
83 aplikasi
Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi

Dinkominfo & Statistik
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capsian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</td>
<td>Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif</td>
<td>Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif</td>
<td>Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab</td>
<td>Perolehan Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah</td>
<td>WTP</td>
<td>WTP</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatnya persentase target PAD Kota</td>
<td>Meningkatnya persentase target PAD Kota</td>
<td>Meningkatnya persentase target PAD Kota</td>
<td>14%</td>
<td>20%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</td>
<td>Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)</td>
<td>Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)</td>
<td>Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)</td>
<td>7200 berita</td>
<td>14400 berita</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</td>
<td>Bagian Humas</td>
</tr>
</tbody>
</table>

VII-11
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</td>
<td>Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal No.38 Tahun 2010</td>
<td>Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas</td>
<td>20%</td>
<td>100%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah daerah</td>
<td>Bagian Tata Pemerintahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Menurunnya jumlah pelanggaran Qanun No 4 Tahun 2009 Tentang RTRW Kota Banda Aceh</td>
<td>46,43%</td>
<td>42%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Kecamatan; Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan; Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</td>
<td>Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Misi 2:** Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

- Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal No.38 Tahun 2010
- Menurunnya jumlah pelanggaran Qanun No 4 Tahun 2009 Tentang RTRW Kota Banda Aceh

**Capaian Kinerja:**

- Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas: 20% pada awal dan 100% pada akhir.
- Menurunnya jumlah pelanggaran: 46,43% pada awal dan 42% pada akhir.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>66% 73%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang</td>
<td>Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21,11% 39,6%</td>
<td>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>75% 96%</td>
<td>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatnya Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>Membuat produk hukum</td>
<td>Menyusun regulasi yang efektif dan efisien</td>
<td>Jumlah regulasi yang ditetapkan</td>
<td>19</td>
<td>43</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Bagian Hukum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bagian Hukum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun</td>
<td>12,9%</td>
<td>75%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td>Sekretariat DPRK</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sekretariat DPRK</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat</td>
<td>Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana Linmas</td>
<td>Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</td>
<td>1300</td>
<td>1400</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</td>
<td>Badan Kesbangpol</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Badan Kesbangpol</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong</td>
<td>220</td>
<td>250</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</td>
<td>Badan Kesbangpol</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Badan Kesbangpol</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</td>
<td>Terbangunnya kehidupan pemahaman demokrasi di tingkat gampong</td>
<td>Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi</td>
<td>Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)</td>
<td>68.07%</td>
<td>75%</td>
<td>Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</td>
<td>Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian</td>
<td>Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah ada dan membangun pusat perekonomian baru</td>
<td>Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal</td>
<td>91.67%</td>
<td>100%</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)</td>
<td>Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Kota dengan Perbankan</td>
<td>Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan</td>
<td>Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan</td>
<td>14</td>
<td>60</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah; Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Jumlah usaha kecil yang mampu melakukan pemasaran komoditi | 120 | 180 | Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan | Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah; Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</td>
<td>Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi</td>
<td>Peningkatan kerjasama dengan investor</td>
<td>Jumlah produk yang menunjang program one village one product</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Peningkatan peluang dan potensi investasi daerah</td>
<td>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)</td>
<td>-</td>
<td>Rp 25,655 M</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan</td>
<td>Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah jenis pelayanan yang dimplementasikan dalam SPIPISE</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Terwujudnya pengembangan sektornya perikanan, peternakan dan pertanian</td>
<td>Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian</td>
<td>Pembinaan terhadap sektor perikanan, peternakan dan pertanian</td>
<td>Cakupan bina kelompok perikanan</td>
<td>17%</td>
<td>93%</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan komptensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja</td>
<td></td>
<td>Ketersediaan pangan utama</td>
<td>Kondisi Awal: 158,41 kg, Kondisi Akhir: 744,67 kg</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Kesempatan Kerja</td>
<td>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>Dinas Tenaga Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS kesehatan aktif</td>
<td></td>
<td>Tingkat pengangguran terbuka</td>
<td>7.17%, 7.06%</td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</td>
<td>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</td>
<td>Dinas Tenaga Kerja</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24%</td>
<td>45%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan</td>
<td>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Meningkatnya penanggulangan PMKS</td>
<td>Mengurangi permasalahan masalah sosial dan memberikan pelayaan sosial kepada PMKS</td>
<td>Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial</td>
<td>Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24%</td>
<td>45%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24%</td>
<td>45%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.</td>
<td>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</td>
<td>Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah</td>
<td>Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>11</td>
<td>Kesehatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan</td>
<td>Meningkatkan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan Nasional</td>
<td>Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai SNP</td>
<td>Jumlah SNP yang tercapai</td>
<td>25%</td>
<td>62.5%</td>
<td>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td>Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menyiapkan lulusan yg bermutu di Tingkat Nasional</td>
<td>Menyiapkan lulusan Tk. Nasional</td>
<td>Peringkat Kelulusan Tk. Nasional</td>
<td>-</td>
<td>10 besar</td>
<td>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td>Program Pendidikan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatkan prestasi olahraga pelajar</td>
<td>Prestasi di ajang Pekan Olah raga Pelajar Daerah</td>
<td>Juara Umum</td>
<td>Juara Umum</td>
<td>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td>Program Pendidikan Non Formal</td>
<td>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatkan fasilitas perpustakaan yang memadai</td>
<td>Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun</td>
<td>6.061 org</td>
<td>11.500 org</td>
<td>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</td>
<td>Kantor Pustaka dan Arsip</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata</td>
<td>Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas</td>
<td>Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur</td>
<td>Proporsi Panjang jalan dalam Kondisi baik</td>
<td>85.66%</td>
<td>95%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Persentase penduduk berakses air minum</td>
<td>79.9%</td>
<td>86.88%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ketaatan terhadap RTRW</td>
<td>53.57%</td>
<td>57.70%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan</td>
<td>66%</td>
<td>72.52%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami</td>
<td>Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa</td>
<td>Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa</td>
<td>Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi</td>
<td>90.39%</td>
<td>87%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Pengembangan Perumahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai</td>
<td>Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</td>
<td>0.01%</td>
<td>1%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.</td>
<td></td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Prioritas Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan</td>
<td>Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan</td>
<td>Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan</td>
<td>Penegakan hukum lingkungan</td>
<td>10%</td>
<td>100%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

- Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.
  - 100% 100%
- Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
  - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

- Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan
  - 10% 100%
- Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
<table>
<thead>
<tr>
<th>Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>No</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capsian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami</td>
<td>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</td>
<td>12.22%</td>
<td>73.34%</td>
<td>Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup</td>
<td>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</td>
<td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
<td>Pemadam kebakaran dan Penyelamatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatkan promosi pariwisata dan penataan situs kota</td>
<td>Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara</td>
<td>476.230 org</td>
<td>969.776 org</td>
<td>Pariwisata, seni dan budaya</td>
<td>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</td>
<td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</td>
<td>17.6%</td>
<td>23.5%</td>
<td>Pariwisata, seni dan budaya</td>
<td>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</td>
<td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td>
<td>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Sasaran</td>
<td>Strategi</td>
<td>Arah Kebijakan</td>
<td>Indikator Kinerja (Outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>Program Pembangunan Daerah</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Awal</td>
<td>Kondisi Akhir</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat</td>
<td>Meningkatnya program-program pemberdayaan perempuan dan anak</td>
<td>Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak</td>
<td>Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak</td>
<td>29.03%</td>
<td>100%</td>
<td>Pengarusutamaan gender (PUG)</td>
<td>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Strategi</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Indikator Kinerja (Outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja</th>
<th>Prioritas Pembangunan Daerah</th>
<th>Program Pembangunan Daerah</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota</td>
<td>Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan</td>
<td>Membina generasi muda yang terampil dan cakap</td>
<td>Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh</td>
<td>30%</td>
<td>60%</td>
<td>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Dinas Pemuda dan Olahraga</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pada Bab ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Dari program prioritas Kota Banda Aceh diterjemahkan menjadi program dan kegiatan untuk seluruh SKPD yang disertai dengan pagu indikatif.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Karangka Pendanaan</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kontribusi pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>95,62</td>
<td>97.73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>94,08</td>
<td>97.74</td>
</tr>
<tr>
<td>1 01</td>
<td>1.01.01</td>
<td>Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini</td>
<td>Meningkatnya angka partisipasi kearifan TQ</td>
<td>99,79</td>
</tr>
<tr>
<td>1 01</td>
<td>1.01.01</td>
<td>Program Pendidikan Menengah</td>
<td>Lulusan Menengah daya</td>
<td>86,97</td>
</tr>
<tr>
<td>1 01</td>
<td>1.01.01</td>
<td>Program Pendidikan Non Formal</td>
<td>Meningkatnya daya tampung anak berkebutuhan khusus</td>
<td>98,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Kota Banda Aceh
2016*
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
<th>(10)</th>
<th>(11)</th>
<th>(12)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>01</td>
<td>1.01.01</td>
<td>20</td>
<td>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</td>
<td>100% (3359) tenaga pendidik sudah kualifikasi akademik minimal S1 dan sudah diberikan sertifikasi pendidik</td>
<td>62.47</td>
<td>85.50</td>
<td>894,439,700</td>
<td>91.80</td>
<td>192,768,200</td>
<td>91.17</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>01</td>
<td>1.01.01</td>
<td>21</td>
<td>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</td>
<td>3.359 tenaga pendidik mengikuti dikklat kompetensi sesuai bidangnya</td>
<td>75.57</td>
<td>95.83</td>
<td>4,386,426,976</td>
<td>99.99</td>
<td>6,395,024,855</td>
<td>98.92</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>18</td>
<td>1.01.01</td>
<td>16</td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</td>
<td>Jumlah generasi muda yang ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Banda Aceh 75%</td>
<td>86.10</td>
<td>100.00</td>
<td>678,750,000</td>
<td>99.83</td>
<td>958,110,000</td>
<td>93.90</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>18</td>
<td>1.01.01</td>
<td>17</td>
<td>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Keberagamaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</td>
<td>Jumlah generasi muda yang menjadi penerima bantuan hingga 50%</td>
<td>91.39</td>
<td>100.00</td>
<td>56,859,000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>18</td>
<td>1.01.01</td>
<td>20</td>
<td>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</td>
<td>Jumlah klub olahraga binaan meningkat</td>
<td>88.33</td>
<td>1,598,269,000</td>
<td>95.75</td>
<td>965,121,678</td>
<td>78.40</td>
<td>878,508,500</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>21</td>
<td>1.01.01</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga</td>
<td>Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>99.03</td>
<td>131,650,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>26</td>
<td>1.01.01</td>
<td>15</td>
<td>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</td>
<td>Jumlah peserta dalam mengikuti olahraga</td>
<td>99.36</td>
<td>24,085,000</td>
<td>99.71</td>
<td>88,304,000</td>
<td>95.38</td>
<td>67,052,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
<th>(10)</th>
<th>(11)</th>
<th>(12)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>02</td>
<td>KESEHATAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>02</td>
<td>1.02.01</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Kinerja layanan administrasi perkantoran</td>
<td>85.84</td>
<td>98.79</td>
<td>1,806,423,983</td>
<td>91.65</td>
<td>2,136,388,383</td>
<td>89.81</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>02</td>
<td>1.02.01</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Kinerja layanan sarana dan prasarana</td>
<td>93.56</td>
<td>98.68</td>
<td>1,572,130,200</td>
<td>85.12</td>
<td>1,659,362,507</td>
<td>79.84</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>02</td>
<td>1.02.01</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Kinerja layanan sarana dan prasarana</td>
<td>97.96</td>
<td>100</td>
<td>253,200,000</td>
<td>97.07</td>
<td>172,220,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>02 1.02.01 15</td>
<td>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</td>
<td>Terpenuhiinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan</td>
<td>85,14</td>
<td>100</td>
<td>437,347,700</td>
<td>99.91</td>
<td>376,120,900</td>
<td>99,37</td>
<td>210,957,100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 16</td>
<td>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</td>
<td>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</td>
<td>85,93</td>
<td>98.40</td>
<td>1,850,673,808</td>
<td>98.54</td>
<td>11,375,940,203</td>
<td>98.54</td>
<td>177,376,000</td>
<td>98.54</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 19</td>
<td>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</td>
<td>Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam program kesehatan</td>
<td>96,39</td>
<td>100</td>
<td>303,090,000</td>
<td>99.28</td>
<td>309,086,300</td>
<td>99,28</td>
<td>1,838,345,500</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 20</td>
<td>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</td>
<td>Terpenuhiinya standar Rasio Status Gizi buruk Balita</td>
<td>63,09</td>
<td>100</td>
<td>307,790,000</td>
<td>93.81</td>
<td>275,512,500</td>
<td>93.81</td>
<td>152,773,700</td>
<td>93.81</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 21</td>
<td>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</td>
<td>Optimalnya penerapan KTR di Kota Banda Aceh</td>
<td>80,13</td>
<td>100</td>
<td>195,557,940</td>
<td>96.61</td>
<td>192,546,930</td>
<td>96.61</td>
<td>1,838,345,500</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 22</td>
<td>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</td>
<td>Meningkatnya angka kematian/kasus penyakit menular</td>
<td>98,44</td>
<td>95.98</td>
<td>772,886,500</td>
<td>66.74</td>
<td>568,570,400</td>
<td>66.74</td>
<td>410,826,300</td>
<td>66.74</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 23</td>
<td>Program Pelayanan Kesehatan</td>
<td>Memenuhi standar pelayanan kesehatan secara online</td>
<td>99,16</td>
<td>100</td>
<td>247,730,800</td>
<td>96.68</td>
<td>309,086,300</td>
<td>96.68</td>
<td>376,689,850</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 25</td>
<td>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</td>
<td>Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan minimal di Banda Aceh</td>
<td>86,66</td>
<td>100</td>
<td>5,223,411,873</td>
<td>90.16</td>
<td>11,351,392,265</td>
<td>90.16</td>
<td>16,401,736,900</td>
<td>90.16</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 29</td>
<td>Program Pelayanan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</td>
<td>Meningkatnya angka kematian bayi dan balita</td>
<td>98,08</td>
<td>100</td>
<td>49,565,700</td>
<td>99,13</td>
<td>49,565,700</td>
<td>99,13</td>
<td>99,131,400</td>
<td>99,13</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>1.02.01 32</td>
<td>Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita</td>
<td>Meningkatnya angka kematian bayi dan balita</td>
<td>98,17</td>
<td>100</td>
<td>354,648,000</td>
<td>97.26</td>
<td>79,434,150</td>
<td>97.26</td>
<td>784,299,200</td>
<td>97.26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| No | 02 1.02.02 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 81,91 | 100 | 3,138,457,356 | 91.65 | 3,150,000 | 91.65 | 3,141,607,356 | Dinkes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1.02.02 03 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 168,000,000 | 97.07 | 168,000,000 | 97.07 | 168,000,000 | RSU Meuraxa |
|   | 02 | 02.02.26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan | 89,63 | 100 | 4,736,269,437 | 17,187,724,615 | 89,93 | 100 | 11,587,384,345 | 46,821,895,486 | RSU Meuraxa |
|   |   | 02.02.34 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit | Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar | 92,06 | 100 | 26,414,684,097 | 48,866,588,574 | 93,41 | 100 | 84,000,000,000 | 243,845,815,600 | RSU Meuraxa |
|   | 03 | 03.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 92,63 | 100 | 2,800,509,750 | 2,741,655,922 | 91,58 | 100 | 2,791,035,145 | 100 | 11,160,285,089 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kualitas tugas-tugas kantor | 99,25 | 100 | 12,537,033,100 | 10,058,463,099 | 99,29 | 100 | 38,125,241,379 | 100 | 112,836,721,958 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kualitas tugas aparat | 98,47 | 99.56 | 78,600,000 | 78,350,000 | 93,30 | 100 | 82,100,000 | 100 | 314,950,000 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya kualitas konstruk jalan sesuai Spesifikasi | 99,73 | 98.54 | 25,031,523,494 | 17,949,896,869 | 99,19 | 100 | 7,710,750,200 | 100 | 66,694,957,710 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Meningkatnya kualitas saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun/dipelihara | 98,85 | 94.58 | 4,907,760,000 | 9,415,790,356 | 98,29 | 100 | 8,466,560,600 | 100 | 37,886,741,556 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.18 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | Meningkatnya kualitas jalan sesuai Spesifikasi | 96,94 | 95.44 | 10,986,074,091 | 7,101,750,206 | 99,19 | 100 | 30,048,236,550 | 100 | 66,694,957,710 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.24 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Kondisi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 78,71 | 100 | 1,897,880,000 | 1,897,880,000 | 98,29 | 100 | 4,545,320,000 | 100 | 6,443,200,000 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Tersedianya jaringan air bersih | 31,26 | 100 | 8,648,492,000 | 10,120,736,066 | 96,26 | 100 | 18,366,374,950 | 100 | 47,789,110,291 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.01.28 | Program Pengendalian Banjir (OTSUS) | Kondisi jaringan air bersih | 99,80 | 100 | 7,992,198,200 | 11,538,010,000 | 98,81 | 100 | 51,857,052,700 | 100 | 66,694,957,710 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | 97,32 | 100 | 3,866,330,500 | 10,164,336,500 | 96,26 | 100 | 3,866,330,500 | 100 | 19,839,582,850 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Meningkatnya kualitas saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun/dipelihara | 98,85 | 94.58 | 4,907,760,000 | 9,415,790,356 | 98,29 | 100 | 8,466,560,600 | 100 | 37,886,741,556 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.18 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | Meningkatnya kualitas jalan sesuai Spesifikasi | 96,94 | 95.44 | 10,986,074,091 | 7,101,750,206 | 99,19 | 100 | 30,048,236,550 | 100 | 66,694,957,710 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.24 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Kondisi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 78,71 | 100 | 1,897,880,000 | 1,897,880,000 | 98,29 | 100 | 4,545,320,000 | 100 | 6,443,200,000 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Tersedianya jaringan air bersih | 31,26 | 100 | 8,648,492,000 | 10,120,736,066 | 96,26 | 100 | 18,366,374,950 | 100 | 47,789,110,291 | Dinas PU |
|   | 03 | 03.01.03.28 | Program Pengendalian Banjir (OTSUS) | Kondisi jaringan air bersih | 99,80 | 100 | 7,992,198,200 | 11,538,010,000 | 98,81 | 100 | 51,857,052,700 | 100 | 66,694,957,710 | Dinas PU |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kode Program</th>
<th>Deskripsi Program</th>
<th>Realisasi</th>
<th>Target</th>
<th>Realisasi</th>
<th>Target</th>
<th>Realisasi</th>
<th>Target</th>
<th>Realisasi</th>
<th>Target</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 05</td>
<td>1.03.01 17</td>
<td>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td>
<td>98.43</td>
<td>100</td>
<td>341,252,500</td>
<td>99.76</td>
<td>557,460,000</td>
<td>97.56</td>
<td>1,078,155,600</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terbatasnya Ruang yang sesuai RTRW</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 08</td>
<td>1.03.01 24</td>
<td>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</td>
<td>682,900,000</td>
<td>100</td>
<td>682,900,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 06</td>
<td>1.03.01 16</td>
<td>Program Kerjasama Pembangunan</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>63,767,000</td>
<td>96.91</td>
<td>64,767,000</td>
<td>49.66</td>
<td>175,195,400</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terfasilitasinya Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 03</td>
<td>1.03.01 23</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelimatanagaan</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>436,848,750</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Sarana dan Prasarana Kelimantanagaan yang memadai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 06</td>
<td>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</td>
<td></td>
<td>3,331,045,405</td>
<td>100</td>
<td>4,001,344,894</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01</td>
<td>Bappeda</td>
<td>86.85</td>
<td>100</td>
<td>3,331,045,405</td>
<td>95.10</td>
<td>3,830,743,808</td>
<td>100</td>
<td>14,550,978,892</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>93.93</td>
<td>100</td>
<td>733,312,125</td>
<td>91.65</td>
<td>1,010,365,329</td>
<td>98.61</td>
<td>1,104,328,110</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>98.74</td>
<td>100</td>
<td>877,167,700</td>
<td>85.12</td>
<td>1,025,996,200</td>
<td>98.61</td>
<td>856,400,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>95.53</td>
<td>100</td>
<td>30,600,000</td>
<td>97.07</td>
<td>19,200,000</td>
<td>99.67</td>
<td>21,075,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 15</td>
<td>Program Pengembangan Data/Informasi</td>
<td>93.48</td>
<td>100</td>
<td>549,133,650</td>
<td>97.23</td>
<td>482,236,000</td>
<td>98.91</td>
<td>501,788,960</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Perandanya data/informasi Pembangunan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 16</td>
<td>Program Kerjasama Pembangunan</td>
<td>48.45</td>
<td>98.45</td>
<td>293,225,000</td>
<td>96.91</td>
<td>423,882,125</td>
<td>93.90</td>
<td>285,366,972</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terfasilitasinya Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 19</td>
<td>Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar</td>
<td>96.80</td>
<td>100</td>
<td>83,895,400</td>
<td>87.69</td>
<td>82,305,700</td>
<td>97.56</td>
<td>149,630,150</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Perencanaan pembangunan yang sesuai sencana tata ruang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 21</td>
<td>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>90.23</td>
<td>100</td>
<td>653,037,430</td>
<td>92.34</td>
<td>762,170,940</td>
<td>89.19</td>
<td>664,972,391</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya Keluksutaraan dalam Pameran Pelayanan Publik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.06.01 22</td>
<td>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</td>
<td>51.29</td>
<td>100</td>
<td>103,074,100</td>
<td>95.54</td>
<td>195,188,600</td>
<td>96.53</td>
<td>246,942,225</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 02</td>
<td>PERHUBUNGAN</td>
<td></td>
<td>7,841,693,970</td>
<td>100</td>
<td>13,962,595,713</td>
<td></td>
<td>17,010,492,863</td>
<td>100</td>
<td>23,342,242,902</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01.07.01</td>
<td>Dishubkominfo</td>
<td>98.00</td>
<td>100</td>
<td>7,841,693,970</td>
<td>98.82</td>
<td>13,962,595,713</td>
<td>100</td>
<td>23,342,242,902</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>1.07.01</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>97.69</td>
<td>100</td>
<td>1,738,677,200</td>
<td>91.65</td>
<td>2,566,634,200</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>1.07.01</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>95.23</td>
<td>100</td>
<td>537,228,340</td>
<td>85.12</td>
<td>3,089,610,700</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>1.07.01</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>98.19</td>
<td>100</td>
<td>129,100,000</td>
<td>97.07</td>
<td>223,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>1.07.01</td>
<td>15</td>
<td>Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</td>
<td>Peralatan pembangunan transportasi air yang memadai</td>
<td>97.07</td>
<td>100</td>
<td>559,020,460</td>
<td>99.74</td>
<td>382,652,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>16</td>
<td>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</td>
<td>Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</td>
<td>99.64</td>
<td>100</td>
<td>207,000,000</td>
<td>99.93</td>
<td>286,424,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>17</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Angkutan</td>
<td>Peningkatan pelayanan angkutan yang memadai</td>
<td>97.84</td>
<td>100</td>
<td>973,900,000</td>
<td>99.72</td>
<td>3,770,527,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>19</td>
<td>Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</td>
<td>Penerapan berlalu lintas yang efisien</td>
<td>98.77</td>
<td>100</td>
<td>2,478,243,970</td>
<td>99.60</td>
<td>2,384,203,861</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>15</td>
<td>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</td>
<td>Meningkatnya komunikasi dan informasi</td>
<td>99.87</td>
<td>100</td>
<td>791,252,000</td>
<td>99.40</td>
<td>6,209,007,200</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>01</td>
<td>16</td>
<td>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td>90.93</td>
<td>100</td>
<td>22,500,000</td>
<td>98.48</td>
<td>694,469,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>86.29</td>
<td>100</td>
<td>160,625,000</td>
<td>91.63</td>
<td>159,225,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>90.71</td>
<td>100</td>
<td>46,089,600</td>
<td>85.12</td>
<td>71,225,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>22,500,000</td>
<td>97.07</td>
<td>11,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>16</td>
<td>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td>90.93</td>
<td>100</td>
<td>99.85</td>
<td>98.48</td>
<td>694,469,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lingkungan Hidup**

<p>| | | | | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>40,078,387,039</td>
<td>49,199,024,535</td>
<td>100</td>
<td>56,553,877,310</td>
<td>50,428,742,802</td>
<td>100</td>
<td>196,260,031,686</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>01</td>
<td>Kantor Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
<td>66.19</td>
<td>100</td>
<td>2,379,564,918</td>
<td>93.29</td>
<td>2,812,617,364</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>02</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>86.29</td>
<td>100</td>
<td>160,625,000</td>
<td>91.65</td>
<td>159,225,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>90.71</td>
<td>100</td>
<td>46,089,600</td>
<td>85.12</td>
<td>71,225,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>04</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>22,500,000</td>
<td>97.07</td>
<td>11,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>16</td>
<td>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td>90.93</td>
<td>100</td>
<td>99.85</td>
<td>98.48</td>
<td>694,469,000</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>17</td>
<td>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</td>
<td>Keterangan jumlah lahan dan/atau tanah yang ditetapkan status kerusakannya</td>
<td>98.33</td>
<td>99.17</td>
<td>156,550,000</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>19</td>
<td>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</td>
<td>Keterangan serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</td>
<td>100</td>
<td>134,777,000</td>
<td>98.48</td>
<td>382,580,000</td>
<td>88.46</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.01</td>
<td>20</td>
<td>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</td>
<td>Tersedianya kontainer sampah, Alat ukur udara, Wadah penampung sampah, Alat bor biopori, dan konstruksi taman kota.</td>
<td>99.16</td>
<td>1,815,573,318</td>
<td>100.00</td>
<td>1,493,518,364</td>
<td>99.67</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Keterangan pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>95.67</td>
<td>22,919,463,937</td>
<td>91.65</td>
<td>24,977,753,426</td>
<td>99.76</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Keterangan kelancaran tugas atau kerja kantor</td>
<td>94.58</td>
<td>5,918,498,184</td>
<td>85.12</td>
<td>6,975,751,275</td>
<td>98.30</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Keterangan kelancaran tugas aparat</td>
<td>98.76</td>
<td>220,838,000</td>
<td>97.07</td>
<td>206,010,000</td>
<td>96.92</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>15</td>
<td>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</td>
<td>Tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat</td>
<td>51.71</td>
<td>3,608,990,000</td>
<td>86.94</td>
<td>8,354,283,320</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>24</td>
<td>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</td>
<td>Tersedianya kontainer sampah, Alat ukur udara, Wadah penampung sampah, Alat bor biopori, dan konstruksi taman kota.</td>
<td>99.87</td>
<td>1,232,835,000</td>
<td>98.95</td>
<td>6,253,392,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>25</td>
<td>Pengelolaan Areal Pemakaman</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>147,000,000</td>
<td>99.74</td>
<td>482,150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>[1]</td>
<td>08</td>
<td>1.08.02</td>
<td>29</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah</td>
<td>Keterangan Pidato KDH yang harus disusun</td>
<td>99.25</td>
<td>3,851,197,000</td>
<td>98.75</td>
<td>1,697,268,600</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</td>
<td>80,62</td>
<td>2,217,171,320</td>
<td>1,973,077,820</td>
<td>92,33</td>
<td>891,368,600</td>
<td>781,382,600</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.01.01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>70,35</td>
<td>98,89</td>
<td>877,095,970</td>
<td>91,65</td>
<td>381,382,600</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.01.02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Program Penangkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>75,97</td>
<td>98,79</td>
<td>246,940,000</td>
<td>85,12</td>
<td>208,598,000</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.01.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>99,50</td>
<td>45,000,000</td>
<td>97,07</td>
<td>16,800,000</td>
<td>16,000,000</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.01.04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Penataan Administrasi Kependudukan</td>
<td>Meningkatnya keserasian kebijakan</td>
<td>99,07</td>
<td>98,68</td>
<td>29,277,500</td>
<td>98,79</td>
<td>-</td>
<td>29,277,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PEMERDIAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</td>
<td>2,639,420,043</td>
<td>2,477,205,450</td>
<td>94,01</td>
<td>2,879,009,157</td>
<td>1,527,772,612</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</td>
<td>93,79</td>
<td>2,639,420,043</td>
<td>98,22</td>
<td>2,477,205,450</td>
<td>94,01</td>
<td>2,879,009,157</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>90,08</td>
<td>288,013,981</td>
<td>91,65</td>
<td>297,169,405</td>
<td>373,384,081</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>75,97</td>
<td>98,79</td>
<td>246,940,000</td>
<td>85,12</td>
<td>208,598,000</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>99,50</td>
<td>45,000,000</td>
<td>97,07</td>
<td>16,800,000</td>
<td>16,000,000</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan</td>
<td>Meningkatnya keserasian kebijakan</td>
<td>99,07</td>
<td>98,68</td>
<td>29,277,500</td>
<td>98,79</td>
<td>-</td>
<td>29,277,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender Dan Anak</td>
<td>Meningkatnya keserasian gender</td>
<td>99,53</td>
<td>457,856,500</td>
<td>99,85</td>
<td>549,028,915</td>
<td>853,252,800</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan</td>
<td>Meningkatnya kualitas hidup serempanan</td>
<td>99,58</td>
<td>54,835,000</td>
<td>97,89</td>
<td>11,850,500</td>
<td>73,478,631</td>
<td>140,164,131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>Perempuan dan anak memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, perlaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan</td>
<td>99,58</td>
<td>100</td>
<td>204,070,500</td>
<td>183,905,500</td>
<td>77,245,656</td>
<td>61,766,452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Kualitas Hidup Serempanan Gender</td>
<td>Meningkatnya kualitas hidup serempanan</td>
<td>99,58</td>
<td>54,835,000</td>
<td>97,89</td>
<td>11,850,500</td>
<td>73,478,631</td>
<td>140,164,131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>Perempuan dan anak memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, perlaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan</td>
<td>99,58</td>
<td>100</td>
<td>204,070,500</td>
<td>183,905,500</td>
<td>77,245,656</td>
<td>61,766,452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Kualitas Hidup Serempanan Gender</td>
<td>Meningkatnya kualitas hidup serempanan</td>
<td>99,58</td>
<td>54,835,000</td>
<td>97,89</td>
<td>11,850,500</td>
<td>73,478,631</td>
<td>140,164,131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>Perempuan dan anak memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, perlaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan</td>
<td>99,58</td>
<td>100</td>
<td>204,070,500</td>
<td>183,905,500</td>
<td>77,245,656</td>
<td>61,766,452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Kualitas Hidup Serempanan Gender</td>
<td>Meningkatnya kualitas hidup serempanan</td>
<td>99,58</td>
<td>54,835,000</td>
<td>97,89</td>
<td>11,850,500</td>
<td>73,478,631</td>
<td>140,164,131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>Perempuan dan anak memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, perlaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan</td>
<td>99,58</td>
<td>100</td>
<td>204,070,500</td>
<td>183,905,500</td>
<td>77,245,656</td>
<td>61,766,452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Kualitas Hidup Serempanan Gender</td>
<td>Meningkatnya kualitas hidup serempanan</td>
<td>99,58</td>
<td>54,835,000</td>
<td>97,89</td>
<td>11,850,500</td>
<td>73,478,631</td>
<td>140,164,131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11.01.26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</td>
<td>Perempuan dan anak memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, perlaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan</td>
<td>99,58</td>
<td>100</td>
<td>204,070,500</td>
<td>183,905,500</td>
<td>77,245,656</td>
<td>61,766,452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program</td>
<td>Tahun</td>
<td>Prioritas</td>
<td>Target</td>
<td>Hasil</td>
<td>Pelaksana</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan</td>
<td>11.01.19</td>
<td>11.01.01</td>
<td>19 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Kader Dan Anak</td>
<td>Meningkatnya pelayanan gender</td>
<td>99,20</td>
<td>100</td>
<td>18,915,400</td>
<td>Kantor PPKB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Keluarga Berencana</td>
<td>11.01.15</td>
<td>11.01.15</td>
<td>15 Program Keluarga Berencana</td>
<td>Meningkatnya PUS yang menjadi peserta KB aktif</td>
<td>99,37</td>
<td>100</td>
<td>1,242,351,162</td>
<td>Kantor PPKB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pelayanan Kontrasepsi</td>
<td>11.01.17</td>
<td>11.01.17</td>
<td>17 Program Pelayanan Kontrasepsi</td>
<td>Meningkatnya derajat kesesuaian PUS</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>52,160,000</td>
<td>Kantor PPKB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Keluarga Berencana</td>
<td>11.01.11</td>
<td>11.01.11</td>
<td>11 Program Keluarga Berencana</td>
<td>Meningkatnya PUS yang menjadi peserta KB aktif</td>
<td>99,20</td>
<td>100</td>
<td>1,242,351,162</td>
<td>Kantor PPKB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pelayanan Kontrasepsi</td>
<td>11.01.17</td>
<td>11.01.17</td>
<td>17 Program Pelayanan Kontrasepsi</td>
<td>Meningkatnya derajat kesesuaian PUS</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>52,160,000</td>
<td>Kantor PPKB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SOSIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Program</th>
<th>Tahun</th>
<th>Prioritas</th>
<th>Target</th>
<th>Hasil</th>
<th>Pelaksana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>13.01.01</td>
<td>13.01.01</td>
<td>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>86,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>13.01.02</td>
<td>13.01.02</td>
<td>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>96,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Peningkatan Dusun Aparatur</td>
<td>13.01.03</td>
<td>13.01.03</td>
<td>03 Program Peningkatan Dusun Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparat</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>13.01.05</td>
<td>13.01.05</td>
<td>05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kapasitas SDM aparat</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pembinaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS</td>
<td>13.01.15</td>
<td>13.01.15</td>
<td>15 Program Pembinaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS</td>
<td>Memurarnya aneka binaan bagi anak terlantar</td>
<td>88,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial</td>
<td>13.01.16</td>
<td>13.01.16</td>
<td>16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial</td>
<td>Memurarnya aneka binaan bagi anak terlantar</td>
<td>96,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pembinaan Anak Terlantar</td>
<td>13.01.17</td>
<td>13.01.17</td>
<td>17 Program Pembinaan Anak Terlantar</td>
<td>Terlaksananya pembinaan bagi anak terlantar</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma</td>
<td>13.01.18</td>
<td>13.01.18</td>
<td>18 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma</td>
<td>Terlaksananya pembinaan bagi penyandang cacat dan trauma</td>
<td>92,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</td>
<td>13.01.19</td>
<td>13.01.19</td>
<td>19 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</td>
<td>Panti asuhan yang mendapat binaan</td>
<td>98,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Program Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</td>
<td>13.01.21</td>
<td>13.01.21</td>
<td>21 Program Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</td>
<td>Meningkatnya pelayanan Onos dari kebijakan masyarakat</td>
<td>98,49</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 15</td>
<td>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>96,22</td>
<td>100</td>
<td>529,128,600</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 16</td>
<td>Peningkatan Kesempatan Kerja</td>
<td>Meningkatkan umum penawaran kerja yang mengetahui keterampilan kerja yang tersedia</td>
<td>91,20</td>
<td>100</td>
<td>115,880,800</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 17</td>
<td>Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</td>
<td>Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan</td>
<td>90,47</td>
<td>100</td>
<td>70,464,800</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 18</td>
<td>Program Pembinaan Anak Terlantar</td>
<td>Kebutuhan pembiayaan bagi anak terlantar</td>
<td>99,95</td>
<td>100</td>
<td>99,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
<th>(10)</th>
<th>(11)</th>
<th>(12)</th>
<th>(13)</th>
<th>(14)</th>
<th>(15)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>93,69</td>
<td>100</td>
<td>1,575,571,983</td>
<td>91,65</td>
<td>1,300,245,708</td>
<td>98,28</td>
<td>1,391,618,035</td>
<td>100</td>
<td>1,527,137,309</td>
<td>100</td>
<td>5,794,512,035</td>
<td>BPBD</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 02</td>
<td>Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>84,93</td>
<td>100</td>
<td>1,613,547,180</td>
<td>91,65</td>
<td>1,306,115,891</td>
<td>97,71</td>
<td>1,831,724,465</td>
<td>100</td>
<td>781,048,132</td>
<td>100</td>
<td>5,220,492,654</td>
<td>BPBD</td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>98,68</td>
<td>100</td>
<td>63,600,000</td>
<td>99,97</td>
<td>106,400,000</td>
<td>100</td>
<td>138,880,000</td>
<td>100</td>
<td>418,640,000</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 13 1.13.01 19</td>
<td>Program peningkatan keterampilan dan peningkatan keterampilan keterampilan</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>93,80</td>
<td>100</td>
<td>648,615,000</td>
<td>85,48</td>
<td>7,871,688,250</td>
<td>100</td>
<td>363,451,000</td>
<td>100</td>
<td>13,795,051,070</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 22</td>
<td>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>66,33</td>
<td>100</td>
<td>207,224,776</td>
<td>85,48</td>
<td>7,871,688,250</td>
<td>100</td>
<td>363,451,000</td>
<td>100</td>
<td>13,795,051,070</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 23</td>
<td>Rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>95,71</td>
<td>100</td>
<td>176,500,000</td>
<td>99,99</td>
<td>151,000,000</td>
<td>100</td>
<td>326,500,000</td>
<td>100</td>
<td>326,500,000</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 24</td>
<td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>93,26</td>
<td>100</td>
<td>9,795,550,091</td>
<td>93,42</td>
<td>8,694,998,090</td>
<td>100</td>
<td>6,275,893,827</td>
<td>100</td>
<td>34,906,732,749</td>
<td>Disbudpar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 25</td>
<td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>93,26</td>
<td>100</td>
<td>9,795,550,091</td>
<td>93,42</td>
<td>8,694,998,090</td>
<td>100</td>
<td>6,275,893,827</td>
<td>100</td>
<td>34,906,732,749</td>
<td>Disbudpar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
<th>(10)</th>
<th>(11)</th>
<th>(12)</th>
<th>(13)</th>
<th>(14)</th>
<th>(15)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>94,57</td>
<td>100</td>
<td>1,301,604,166</td>
<td>91,65</td>
<td>1,306,115,891</td>
<td>97,71</td>
<td>1,831,724,465</td>
<td>100</td>
<td>781,048,132</td>
<td>100</td>
<td>5,220,492,654</td>
<td>BPBD</td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 02</td>
<td>Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>93,27</td>
<td>100</td>
<td>85,654,625</td>
<td>96,91</td>
<td>260,921,000</td>
<td>100</td>
<td>104,046,750</td>
<td>100</td>
<td>755,317,125</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 17 2.17.01 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>97,19</td>
<td>100</td>
<td>22,800,000</td>
<td>99,97</td>
<td>15,910,000</td>
<td>100</td>
<td>15,200,000</td>
<td>100</td>
<td>68,710,000</td>
<td>BPBD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kode</td>
<td>Program Kegiatan</td>
<td>Keterangan</td>
<td>Kualitas</td>
<td>Kuantitas</td>
<td>Pengadaan</td>
<td>Kualitas Pengadaan</td>
<td>Kuantitas Pengadaan</td>
<td>Kode</td>
<td>Keterangan</td>
<td>Kualitas</td>
<td>Kuantitas</td>
<td>Pengadaan</td>
<td>Kualitas Pengadaan</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>17.01</td>
<td>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</td>
<td>Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah berbasis media desain</td>
<td>98.58</td>
<td>458,100,000</td>
<td>89.25</td>
<td>465,975,000</td>
<td>83.68</td>
<td>335,450,000</td>
<td>100</td>
<td>188,850,000</td>
<td>100</td>
<td>1,448,375,000</td>
<td>Dibdbapar</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>17.01</td>
<td>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</td>
<td>Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan keragaman budaya daerah berbasis media desain dan IPTEK</td>
<td>94.42</td>
<td>100</td>
<td>3,546,000,000</td>
<td>98.59</td>
<td>3,989,609,000</td>
<td>95.82</td>
<td>2,003,005,000</td>
<td>100</td>
<td>2,331,555,000</td>
<td>100</td>
<td>10,770,169,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pariwisata</td>
<td>89.71</td>
<td>100</td>
<td>3,424,131,950</td>
<td>99.52</td>
<td>3,576,042,450</td>
<td>90.05</td>
<td>2,753,275,000</td>
<td>100</td>
<td>1,723,400,000</td>
<td>100</td>
<td>11,476,849,400</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata</td>
<td>97.44</td>
<td>100</td>
<td>1,302,000,000</td>
<td>99.99</td>
<td>1,138,313,000</td>
<td>94.41</td>
<td>1,091,675,000</td>
<td>100</td>
<td>877,693,945</td>
<td>100</td>
<td>4,411,174,570</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pariwisata</td>
<td>69.21</td>
<td>100</td>
<td>235,696,200</td>
<td>91.65</td>
<td>344,570,000</td>
<td>85.14</td>
<td>318,553,756</td>
<td>100</td>
<td>270,021,600</td>
<td>100</td>
<td>1,168,841,556</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata</td>
<td>99.96</td>
<td>100</td>
<td>142,403,200</td>
<td>85.12</td>
<td>105,292,000</td>
<td>97.68</td>
<td>229,893,200</td>
<td>100</td>
<td>67,799,600</td>
<td>100</td>
<td>545,388,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata</td>
<td>99.38</td>
<td>100</td>
<td>22,800,000</td>
<td>98.45</td>
<td>39,538,500</td>
<td>95.19</td>
<td>13,200,000</td>
<td>100</td>
<td>4,411,174,570</td>
<td>Kesbanglimmas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata</td>
<td>96.38</td>
<td>100</td>
<td>134,500,000</td>
<td>96.38</td>
<td>133,780,000</td>
<td>97.22</td>
<td>229,893,200</td>
<td>100</td>
<td>67,799,600</td>
<td>100</td>
<td>545,388,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>04.01</td>
<td>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata</td>
<td>96.83</td>
<td>100</td>
<td>168,155,000</td>
<td>92.11</td>
<td>123,759,800</td>
<td>92.11</td>
<td>113,770,400</td>
<td>100</td>
<td>113,342,000</td>
<td>100</td>
<td>523,231,700</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.01</td>
<td>19</td>
<td>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</td>
<td>-</td>
<td>90,70</td>
<td>25,000,000</td>
<td>100</td>
<td>24,743,000</td>
<td>100</td>
<td>49,743,000</td>
<td>Kesbanglinmas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.01</td>
<td>20</td>
<td>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>162,525,000</td>
<td>104,101,800</td>
<td>98,21</td>
<td>162,437,700</td>
<td>100</td>
<td>174,790,400</td>
<td>Kesbanglinmas</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.01</td>
<td>21</td>
<td>Program Pendidikan Politik Masyarakat</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat dalam berpolitik</td>
<td>93,84</td>
<td>-</td>
<td>93,68</td>
<td>3,213,441,400</td>
<td>97,15</td>
<td>3,213,441,400</td>
<td>Kesbanglinmas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.01</td>
<td>22</td>
<td>Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (harusnya di BPBD)</td>
<td>Meningkatnya kepemimpinan masyarakat dalam penanggulangan korban bencana Alam</td>
<td>90,81</td>
<td>126,487,000</td>
<td>100</td>
<td>92,064,800</td>
<td>100</td>
<td>218,551,800</td>
<td>Kesbanglinmas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.02</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>88,68</td>
<td>100</td>
<td>3,135,477,413</td>
<td>91,65</td>
<td>5,042,072,191</td>
<td>97,60</td>
<td>5,752,022,191</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.02</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja fungsional organisasi aparat</td>
<td>95,03</td>
<td>100</td>
<td>579,661,278</td>
<td>85,12</td>
<td>1,004,590,000</td>
<td>95,53</td>
<td>552,022,400</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.02</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja fungsional organisasi aparat</td>
<td>85,11</td>
<td>100</td>
<td>202,440,000</td>
<td>97,07</td>
<td>232,650,000</td>
<td>96,33</td>
<td>300,650,000</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.02</td>
<td>05</td>
<td>Program Peningkatan Kekesraan dan Kenyamanan Lingkungan</td>
<td>Meningkatnya kinerja kepemimpinan masyarakat</td>
<td>77,36</td>
<td>100</td>
<td>948,685,000</td>
<td>97,36</td>
<td>618,667,000</td>
<td>98,68</td>
<td>761,290,000</td>
<td>Satpol PP &amp; WH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>1.19.02</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Biaya Pelayanan</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan biaya</td>
<td>89,70</td>
<td>100</td>
<td>39,912,341,877</td>
<td>91,10</td>
<td>46,881,055,142</td>
<td>95,10</td>
<td>45,707,188,358</td>
<td>Set. Kota</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.01</td>
<td>19</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>89,57</td>
<td>100</td>
<td>13,020,851,925</td>
<td>91,65</td>
<td>16,399,646,050</td>
<td>97,42</td>
<td>18,548,897,950</td>
<td>Bag. Umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.02</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>89,57</td>
<td>100</td>
<td>13,020,851,935</td>
<td>91,65</td>
<td>16,399,646,050</td>
<td>97,42</td>
<td>18,548,897,950</td>
<td>Bag. Umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.02</td>
<td>02</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>89,57</td>
<td>100</td>
<td>13,020,851,935</td>
<td>91,65</td>
<td>16,399,646,050</td>
<td>97,42</td>
<td>18,548,897,950</td>
<td>Bag. Umum</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2. Satpol PP dan WH

3. KDH & WKDH Kota Banda Aceh

4. Sekretariat Kota

5. Bag. Umum

6. DPMK Kota Banda Aceh

7. DPPD Kota Banda Aceh

8. Set. Kota

<p>|   |   | 1.20.03 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kelancaran bagasi di kantor | 81,60 | 100 | 3,405,012,800 | 85,12 | 5,052,827,000 | 95,08 | 4,140,274,000 | 100 | 2,782,795,000 | 100 | 15,380,908,800 | Bag. Umum |
|   |   | 1.20.03 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kelancaran bagasi di kantor | 97,22 | 100 | 447,500,000 | 97,07 | 425,250,000 | 95,47 | 410,500,000 | 100 | 311,100,000 | 100 | 1,594,350,000 | Bag. Umum |
|   |   | 1.20.03 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya di kantor | 20,52 | 100 | 60,000,000 | 97,50 | 60,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100 | 200,000,000 | Bagian Umum |
|   |   | 1.20.03 16 | Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/KDH | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 89,53 | 100 | 1,026,100,000 | 80,13 | 990,600,000 | 100 | 3,434,450,000 | 100 | 6,468,950,000 | Bag. Umum |
|   |   | 1.20.03 21 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 78,05 | 100 | 494,398,350 | 92,32 | 101,400,000 | 100 | 905,050,000 | 100 | 1,856,321,625 | Bag. Adm. Pembangunan |
|   |   | 1.20.03 30 | Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kelancaran bagasi di kantor | 93,10 | 100 | 106,802,500 | 92.02 | 88,824,625 | 97,50 | 60,421,400 | 100 | 315,007,425 | Bag. Adm. Pembangunan |
|   |   | 1.20.03 31 | Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kelancaran bagasi di kantor | 96,20 | 100 | 387,874,925 | 93,92 | 566,735,400 | 100 | 361,080,620 | 100 | 1,478,310,095 | Bag. Adm. Pembangunan |
|   |   | 1.20.03 18 | Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 91,42 | 100 | 908,163,000 | 97,84 | 4,650,049,500 | 100 | 1,017,005,960 | 100 | 8,019,025,860 | Bag. Adm. Pembangunan |
|   |   | 1.20.03 29 | Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 98,40 | 100 | 14,341,447,296 | 98,54 | 6,482,172,929 | 100 | 3,445,900,629 | 100 | 38,456,569,112 | Bag. Humas |
|   |   | 1.20.03 19 | Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 96,12 | 100 | 1,948,547,300 | 97,84 | 4,006,842,829 | 100 | 2,497,555,829 | 100 | 11,326,180,958 | Bag. Humas |
|   |   | 1.20.03 20 | Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 69,19 | 100 | 566,422,401 | 75,10 | 808,032,300 | 100 | 651,857,300 | 100 | 3,000,941,185 | Bag. Hukum |
|   |   | 1.20.03 21 | Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kantor | 98,78 | 100 | 33,940,100 | 30.67 | 86,940,100 | 23,01 | 748,334,000 | 100 | 1,296,378,200 | Bag. Hukum |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Program / Proyek</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Nilai %</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Nilai %</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Nilai %</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Nilai %</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Nilai %</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>26</td>
<td>Penataan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dibahaskan</td>
<td>88,14</td>
<td>100</td>
<td>373,290,600</td>
<td>93,38</td>
<td>466,973,600</td>
<td>100</td>
<td>289380200</td>
<td>100</td>
<td>1,439,671,350</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>19</td>
<td>Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</td>
<td>Terlaksananya Evaluasi Reuasi Gampong di Seluruh Gampong Zulam Wilayah Kota Banda Aceh</td>
<td>98,86</td>
<td>100</td>
<td>40,000,000</td>
<td>95,99</td>
<td>34,292,800</td>
<td>100</td>
<td>63,278,700</td>
<td>100</td>
<td>137,571,500</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>20 1.16.01</td>
<td>13</td>
<td>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>8,753,100</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>32</td>
<td>Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur Dan Publik</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1,439,671,350</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>33</td>
<td>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kota dalam pelayanan publik</td>
<td>75,00</td>
<td>100</td>
<td>202,061,500</td>
<td>74,87</td>
<td>259,628,810</td>
<td>100</td>
<td>180,836,600</td>
<td>100</td>
<td>844,294,500</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>36</td>
<td>Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1,129,881,900</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>20 1.06.01</td>
<td>15</td>
<td>Program Pengembangan Data/Informasi</td>
<td>Tersedianya data/informasi Pembangunan</td>
<td>96,56</td>
<td>100</td>
<td>24,679,275</td>
<td>97,23</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>24,679,275</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>20 1.06.01</td>
<td>15</td>
<td>Perencanaan Pembangunan Ekonomi</td>
<td>Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat</td>
<td>91,24</td>
<td>100</td>
<td>146,538,405</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>146,538,405</td>
<td>Bag. Ekonomi</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>15</td>
<td>Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Membudayakan dan berkembangnya syariat Islam di kalangan masyarakat serta pemikiran muslim di Kota Banda Aceh</td>
<td>100</td>
<td>400,804,000</td>
<td>79,80</td>
<td>687,544,500</td>
<td>100</td>
<td>407,350,000</td>
<td>100</td>
<td>2,170,732,500</td>
<td>Bag. Keistimewaan</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>17</td>
<td>Pengembangan Mu'amalah</td>
<td>Meningkatnya pola hidup yang sesuai dengan syariat islam</td>
<td>53,48</td>
<td>100</td>
<td>79,000,000</td>
<td>39,66</td>
<td>87,740,000</td>
<td>100</td>
<td>52,494,000</td>
<td>100</td>
<td>320,134,000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>20 1.20.03</td>
<td>19</td>
<td>Program Penyemarakan Syariat Islam</td>
<td>Tersyarnya gema bernafaskan Islam -</td>
<td>100</td>
<td>1,126,590,000</td>
<td>74,41</td>
<td>1,357,938,100</td>
<td>100</td>
<td>769,300,600</td>
<td>100</td>
<td>4,590,794,700</td>
<td>Bag. Keistimewaan</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>09</td>
<td>1.20.03</td>
<td>20</td>
<td>Program Usaha Dakwah Generasi Muda Dan Kader Dakwah</td>
<td>Pembinaan Majelis Talkith</td>
<td>99.5</td>
<td>186,950,000</td>
<td>92.57</td>
<td>-</td>
<td>186,950,000</td>
<td>Bag. Keistimewaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>09</td>
<td>1.20.03</td>
<td>22</td>
<td>Program Pemberdayaan Sarana Ibadah</td>
<td>Terselenggaranya kegiatan ibadah yang nyaman di mushalla pemko dan di Masjid Agung Al-Makmur</td>
<td>100</td>
<td>254,000,000</td>
<td>88.96</td>
<td>377,600,000</td>
<td>88.22</td>
<td>624,100,000</td>
<td>100</td>
<td>414,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.03</td>
<td>05</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</td>
<td>Peningkatan informasi mengenai laporan kinerja yang berusia dengan baik</td>
<td>89.22</td>
<td>47,031,000  #NV</td>
<td>98,228,500</td>
<td>63,278,700</td>
<td>100</td>
<td>68,014,700</td>
<td>276,552,900</td>
<td>Bag. Keistimewaan</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.04</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>93.22</td>
<td>8,912,623,800</td>
<td>91.65</td>
<td>8,134,632,000</td>
<td>96.98</td>
<td>8,246,507,769</td>
<td>100</td>
<td>7,962,086,769</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.04</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>92.82</td>
<td>16,117,450,400</td>
<td>85.12</td>
<td>5,965,913,269</td>
<td>95.36</td>
<td>2,565,974,000</td>
<td>100</td>
<td>24,649,337,669</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.04</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>97.07</td>
<td>299,200,000</td>
<td>96.22</td>
<td>230,035,000</td>
<td>100</td>
<td>252,575,000</td>
<td>100</td>
<td>1,255,910,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.04</td>
<td>04</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</td>
<td>97.07</td>
<td>670,000,000</td>
<td>84.68</td>
<td>973,000,000</td>
<td>100</td>
<td>1,132,400,000</td>
<td>100</td>
<td>3,859,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.04</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td>Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah</td>
<td>69.47</td>
<td>4,545,400,000</td>
<td>82.40</td>
<td>5,465,598,000</td>
<td>100</td>
<td>4,697,020,000</td>
<td>100</td>
<td>20,436,739,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>83.44</td>
<td>1,528,367,900</td>
<td>91.65</td>
<td>2,534,046,400</td>
<td>83.25</td>
<td>2,395,617,907</td>
<td>100</td>
<td>2,043,200,120</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>90.62</td>
<td>3,762,253,300</td>
<td>85.12</td>
<td>2,967,060,000</td>
<td>91.42</td>
<td>6,078,022,000</td>
<td>100</td>
<td>303,278,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>71.90</td>
<td>64,800,000</td>
<td>97.07</td>
<td>47,600,000</td>
<td>95.79</td>
<td>78,360,000</td>
<td>100</td>
<td>49,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
<td>(10)</td>
<td>(11)</td>
<td>(12)</td>
<td>(13)</td>
<td>(14)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</td>
<td>27,18</td>
<td>100</td>
<td>46,200,000</td>
<td>25,000,000</td>
<td>0</td>
<td>15,000,000</td>
<td>100</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>06</td>
<td>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</td>
<td>Tersedianya Dislemen LAKP Kota dan LAKP Pride</td>
<td>55,17</td>
<td>100</td>
<td>80,382,000</td>
<td>95,133,500</td>
<td>94,60</td>
<td>97,603,000</td>
<td>100</td>
<td>128,731,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.05</td>
<td>17</td>
<td>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</td>
<td>Pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, akurat dan sistematis</td>
<td>70,11</td>
<td>100</td>
<td>5,346,813,810</td>
<td>4,603,096,740</td>
<td>85,43</td>
<td>4,822,402,700</td>
<td>100</td>
<td>3,871,226,874</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td></td>
<td>Badan Kepegawaian, Pendidikan &amp; Pelatihan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>90,26</td>
<td>100</td>
<td>3,666,392,172</td>
<td>4,100,160,977</td>
<td>85,43</td>
<td>4,822,402,700</td>
<td>100</td>
<td>3,339,169,669</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>95,29</td>
<td>100</td>
<td>807,006,348</td>
<td>91,65</td>
<td>922,838,840</td>
<td>84,84</td>
<td>1,419,512,394</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>94,43</td>
<td>100</td>
<td>150,105,102</td>
<td>85,12</td>
<td>465,153,102</td>
<td>96,14</td>
<td>517,535,619</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>98,78</td>
<td>100</td>
<td>24,600,000</td>
<td>97,07</td>
<td>22,000,000</td>
<td>97,37</td>
<td>24,350,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</td>
<td>63,11</td>
<td>100</td>
<td>74,335,000</td>
<td>50,000,000</td>
<td>16,20</td>
<td>50,000,000</td>
<td>100</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>34</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</td>
<td>95,85</td>
<td>100</td>
<td>1,563,906,103</td>
<td>1,336,930,080</td>
<td>99,12</td>
<td>674,069,050</td>
<td>100</td>
<td>3,574,905,233</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.06</td>
<td>35</td>
<td>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>83,73</td>
<td>100</td>
<td>1,046,439,619</td>
<td>1,303,238,955</td>
<td>1,436,708,300</td>
<td>1,325,307,500</td>
<td>100</td>
<td>5,111,694,374</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.07</td>
<td>Inspektorat</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>97,17</td>
<td>100</td>
<td>1,462,880,600</td>
<td>92,92</td>
<td>1,406,791,000</td>
<td>96,33</td>
<td>1,549,986,300</td>
<td>100</td>
<td>1,232,839,400</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.07</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>95,98</td>
<td>100</td>
<td>337,709,000</td>
<td>355,532,500</td>
<td>96,08</td>
<td>447,721,000</td>
<td>100</td>
<td>329,821,400</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.07</td>
<td>02</td>
<td>Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>94,50</td>
<td>100</td>
<td>132,150,600</td>
<td>175,724,000</td>
<td>99,12</td>
<td>224,241,800</td>
<td>100</td>
<td>61,974,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.07</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kerja kantor aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>24,600,000</td>
<td>17,200,000</td>
<td>92,12</td>
<td>21,070,000</td>
<td>100</td>
<td>18,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.07</td>
<td>20</td>
<td>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</td>
<td>Pencerdasan kerja kantor kepala daerah</td>
<td>99,64</td>
<td>100</td>
<td>877,941,000</td>
<td>811,636,000</td>
<td>96,16</td>
<td>805,524,000</td>
<td>100</td>
<td>797,644,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.07</td>
<td>1.20.07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</td>
<td>Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
<td>210,000,000</td>
<td>100</td>
<td>30,000,000</td>
<td>100</td>
<td>35,000,000</td>
<td>100</td>
<td>25,000,000</td>
<td>100</td>
<td>140,000,000</td>
<td>Inspektorat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100</td>
<td>50,000,000</td>
<td>100</td>
<td>16,698,500</td>
<td>93</td>
<td>16,429,500</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>73,608,000</td>
<td>Inspektorat</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.20.08</th>
<th>1.20.08</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kecamatan Kuta Alam</th>
<th>Kecamatan Kuta Alam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kec. Kuta Alam</td>
<td>Kec. Kuta Alam</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.08</td>
<td>1.20.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kecamatan Baiturrahman</th>
<th>Kecamatan Baiturrahman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kec. Baiturrahman</td>
<td>Kec. Baiturrahman</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.09</td>
<td>1.20.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kecamatan Meuraxa</th>
<th>Kecamatan Meuraxa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kecamatan Meuraxa</th>
<th>Kecamatan Meuraxa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.20.10</td>
<td>1.20.10</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Tanggal</td>
<td>Angka</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.10 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.10 28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.11 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.11 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.11 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.11 28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.12 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.12 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.12 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.12 28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.13 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.13 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
</tr>
<tr>
<td>1 20 1.20.13 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kecamatan</td>
<td>Program</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Kuta Raja</td>
<td>Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Program</th>
<th>Persentase</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Anggaran</th>
<th>Uraian</th>
<th>Anggaran</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>96,51</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,564,759,225</td>
<td>1,273,965,000</td>
<td>1,551,995,200</td>
<td>420,849,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>96,06</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,273,965,000</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>183,167,700</td>
<td>3,934,662,700</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>95,59</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,210,906,500</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>221,139,802</td>
<td>4,134,010,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>97,35</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,210,906,500</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>288,523,000</td>
<td>4,134,010,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>98,16</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>146,578,400</td>
<td>202,581,500</td>
<td>23,668,000</td>
<td>352,058,900</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>93,10</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>16,200,000</td>
<td>14,190,000</td>
<td>10,800,000</td>
<td>48,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>93,86</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>235,532,000</td>
<td>255,752,500</td>
<td>183,605,600</td>
<td>840,283,600</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>97,68</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>170,556,000</td>
<td>201,605,000</td>
<td>10,800,000</td>
<td>59,990,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Program</th>
<th>Persentase</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Anggaran</th>
<th>Uraian</th>
<th>Anggaran</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>96,51</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,564,759,225</td>
<td>1,273,965,000</td>
<td>1,551,995,200</td>
<td>420,849,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>96,06</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,273,965,000</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>183,167,700</td>
<td>3,934,662,700</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>95,59</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,210,906,500</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>221,139,802</td>
<td>4,134,010,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>97,35</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>1,210,906,500</td>
<td>1,275,926,000</td>
<td>288,523,000</td>
<td>4,134,010,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>98,16</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>146,578,400</td>
<td>202,581,500</td>
<td>23,668,000</td>
<td>352,058,900</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>93,10</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>16,200,000</td>
<td>14,190,000</td>
<td>10,800,000</td>
<td>48,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>93,86</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>235,532,000</td>
<td>255,752,500</td>
<td>183,605,600</td>
<td>840,283,600</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>97,68</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>170,556,000</td>
<td>201,605,000</td>
<td>10,800,000</td>
<td>59,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Bulan</td>
<td>1.20.16 28</td>
<td>Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya layanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>99.63</td>
<td>100</td>
<td>228,595,700</td>
<td>264,455,000</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>1.20.17</td>
<td>Kantor Pelayanan Penerimaan Perpajakan</td>
<td>Terciptanya pelayanan penerimaan perpajakan</td>
<td>96.48</td>
<td>97.87</td>
<td>679,400,600</td>
<td>772,590,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>06</td>
<td>1.20.17 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>97.66</td>
<td>91.65</td>
<td>425,484,700</td>
<td>414,386,000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>08</td>
<td>1.20.17 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>95.86</td>
<td>85.12</td>
<td>56,635,600</td>
<td>73,976,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>09</td>
<td>1.20.17 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas kantor</td>
<td>97.37</td>
<td>97.07</td>
<td>21,000,000</td>
<td>12,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>1.20.17 18</td>
<td>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri</td>
<td>Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</td>
<td>83.96</td>
<td>98.6</td>
<td>91,271,300</td>
<td>221,728,000</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>16</td>
<td>1.20.17 21</td>
<td>Program Penataan Pembangunan Daerah</td>
<td>Meningkatnya kelancaran dalam Pemerintah Pelayanan Publik</td>
<td>-</td>
<td>92.34</td>
<td>50,100,000</td>
<td>60,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>20</td>
<td>1.20.17 23</td>
<td>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri</td>
<td>Meningkatnya kelancaran dalam Pemerintah Pelayanan Publik</td>
<td>54,034,000</td>
<td>90.71</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>22</td>
<td>1.22.01</td>
<td>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>4,831,239,300</td>
<td>4,200,046,880</td>
<td>3,446,000,250</td>
<td>12,477,286,430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>22</td>
<td>2.22.01</td>
<td>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</td>
<td>97.42</td>
<td>4,831,239,300</td>
<td>4,560,621,500</td>
<td>96.88</td>
<td>4,200,046,880</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
</tr>
<tr>
<td>1 22 1.22.01 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>97,25</td>
<td>100</td>
<td>428,505,500</td>
<td>91.65</td>
<td>436,832,100</td>
<td>96,88</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1 22 1.22.01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor | 99,10 | 95.55 | 164,908,200 | 85,12 | 139,223,000 | 97,74 | 194,293,000 | 100 | 398,862,200 | 100 | 897,286,400 |

| 1 22 1.22.01 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 99,16 | 100 | 233,750,000 | 96,23 | 234,217,200 | 96,27 | 247,582,200 | 100 | 203,980,800 | 100 | 919,530,200 |

| 1 22 1.22.01 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 96,32 | 98.57 | 159,205,100 | 97.07 | 16,400,000 | 99,84 | 18,000,000 | 100 |                            | 100 | 74,200,000 |

| 1 22 1.22.01 16 | Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan | Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor | 100 | 99.35 | 431,580,000 | 93,58 | 490,514,850 | 96,27 | 699,572,670 | 100 | 897,286,400 | 100 | 1,149,216,130 |

| 1 22 1.22.01 17 | Program Peningkatan Pemukiman Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan | 97,09 | 100 | 2,928,285,500 | 98,01 | 1,641,913,600 | 99,46 | 263,287,200 | 100 | 2,284,741,290 | 100 | 2,335,760,870 |

| 1 22 1.22.01 18 | Program Peningkatan Pemukiman Desa | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 100 | 100 | 306,945,000 | 100.00 | 297,250,000 | 99,46 | 59,064,000 | 100 | 415,400,000 | 100 | 1,078,659,000 |

| 1 22 1.22.01 19 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemukiman Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan | 99,13 | 100 | 2,825,404,600 | 98,01 | 1,641,913,600 | 99,46 | 263,287,200 | 100 | 2,284,741,290 | 100 | 2,335,760,870 |

| 1 22 1.22.01 20 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 100 | 100 | 306,945,000 | 100.00 | 297,250,000 | 99,46 | 59,064,000 | 100 | 415,400,000 | 100 | 1,078,659,000 |

| 1 22 1.22.01 21 | Program Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan | 97,09 | 100 | 2,928,285,500 | 98,01 | 1,641,913,600 | 99,46 | 263,287,200 | 100 | 2,284,741,290 | 100 | 2,335,760,870 |

| 1 22 1.22.01 22 | Program Sinkronisasi Pengembangan Kelembagaan Mukim dan Aparatur | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 100 | 100 | 306,945,000 | 100.00 | 297,250,000 | 99,46 | 59,064,000 | 100 | 415,400,000 | 100 | 1,078,659,000 |

| 1 22 1.22.01 23 | Program Sinkronisasi Pengembangan Kelembagaan Mukim dan Aparatur | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 100 | 100 | 306,945,000 | 100.00 | 297,250,000 | 99,46 | 59,064,000 | 100 | 415,400,000 | 100 | 1,078,659,000 |

| 1 26 1.26.01 01 | Kantor Perpustakaan dan Arsip | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 89,88 | 100 | 145,954,000 | 91.65 | 166,446,500 | 96,88 | 201,747,300 | 100 | 200,924,900 | 100 | 715,072,700 |

<p>| 1 26 1.26.01 02 | Kantor Perpustakaan dan Arsip | Meningkatnya kemandirian masyarakat desa | 91,75 | 100 | 509,425,700 | 90.01 | 607,955,400 | 90.01 | 607,955,400 | 100 | 447,264,500 | 100 | 2,137,095,000 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>1 2.05.01</th>
<th>2.05.05</th>
<th>2.01.01</th>
<th>2.05.05</th>
<th>2.01.01</th>
<th>2.05.05</th>
<th>2.01.01</th>
<th>2.05.05</th>
<th>2.01.01</th>
<th>2.05.05</th>
<th>2.01.01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>26 1.26.01</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>90,59</td>
<td>100</td>
<td>113,003,600</td>
<td>85.12</td>
<td>157,090,000</td>
<td>100</td>
<td>201,519,400</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>26 01</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>15,000,000</td>
<td>97.07</td>
<td>8,000,000</td>
<td>100</td>
<td>9,030,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>26 1.26.01</td>
<td>05</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>10,000,000</td>
<td>-</td>
<td>10,000,000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>26 1.26.01</td>
<td>13</td>
<td>Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan</td>
<td>94,00</td>
<td>99.8</td>
<td>204,000,000</td>
<td>93,33</td>
<td>192,401,000</td>
<td>100</td>
<td>164,388,800</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>26 1.26.01</td>
<td>16</td>
<td>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</td>
<td>86,99</td>
<td>100</td>
<td>21,468,100</td>
<td>99,09</td>
<td>38,511,900</td>
<td>100</td>
<td>31,269,900</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kantor Pustaka & Arsip**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2</th>
<th>05</th>
<th>BURUAN PILIHAN</th>
<th>54,081,330,025</th>
<th>60,365,706,637</th>
<th>68,746,930,592</th>
<th>56,895,917,181</th>
<th>240,089,884,435</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>02</td>
<td>KELAUTAN DAN PERIKANAN</td>
<td>6,444,885,906</td>
<td>11,338,280,362</td>
<td>17,772,230,012</td>
<td>9,854,145,079</td>
<td>45,409,541,359</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2</th>
<th>05</th>
<th>2.05.01</th>
<th>Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian</th>
<th>77,78</th>
<th>6,444,885,906</th>
<th>92.50</th>
<th>11,338,280,362</th>
<th>100</th>
<th>17,772,230,012</th>
<th>100</th>
<th>9,854,145,079</th>
<th>100</th>
<th>45,409,541,359</th>
<th>DKPP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>2.05.01</td>
<td>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>85,12</td>
<td>100</td>
<td>584,538,679</td>
<td>91.65</td>
<td>578,361,000</td>
<td>89,14</td>
<td>776,919,920</td>
<td>100</td>
<td>699,163,920</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>2.05.01</td>
<td>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>93,33</td>
<td>98.5</td>
<td>264,140,200</td>
<td>85.12</td>
<td>622,347,625</td>
<td>97,18</td>
<td>980,776,900</td>
<td>100</td>
<td>276,867,400</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>2.05.01</td>
<td>03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>99,09</td>
<td>100</td>
<td>58,200,000</td>
<td>97.07</td>
<td>36,400,000</td>
<td>87,49</td>
<td>38,800,000</td>
<td>100</td>
<td>32,400,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>2.05.01</td>
<td>15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</td>
<td>53,35</td>
<td>100</td>
<td>30,000,000</td>
<td>94.89</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>DKPP</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>01</td>
<td>2.01.01</td>
<td>17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan</td>
<td>94.89</td>
<td>-</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>100</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>2,899,485,400</td>
<td>DKPP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>2.05.01</td>
<td>20 Program Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</td>
<td>Memurahnya penjualan Penyakit Ternak/hsan</td>
<td>322,904,099</td>
<td>100</td>
<td>1,689,500,000</td>
<td>173,546,200</td>
<td>496,450,299</td>
<td>2,545,500,000</td>
<td>DKPP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>01</td>
<td>2.05.01</td>
<td>21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produksi hasil peternakan</td>
<td>256,000,000</td>
<td>99.89</td>
<td>600,000,000</td>
<td>1,074,487,500</td>
<td>1,074,487,500</td>
<td>1,074,487,500</td>
<td>DKPP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>01</td>
<td>2.05.01</td>
<td>22 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan di pasar ternak</td>
<td>54,081,330,025</td>
<td>100</td>
<td>2,147,798,620</td>
<td>2,147,798,620</td>
<td>DKPP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>02</td>
<td>2.01.01</td>
<td>20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan</td>
<td>Memeroleh seda ikan</td>
<td>681,125,600</td>
<td>90,13</td>
<td>1,627,880,000</td>
<td>88,36</td>
<td>1,874,846,600</td>
<td>1,874,846,600</td>
<td>1,874,846,600</td>
<td>DKPP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>02</td>
<td>2.05.01</td>
<td>21 Program Pengembangan Budidaya Perikanan</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>71,22</td>
<td>98.85</td>
<td>2,147,798,620</td>
<td>93.46</td>
<td>3,616,694,762</td>
<td>86,86</td>
<td>5,409,408,079</td>
<td>100</td>
<td>805,111,500</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</td>
<td>99,44</td>
<td>100</td>
<td>171,045,000</td>
<td>99,62</td>
<td>157,569,650</td>
<td>91,81</td>
<td>347,782,550</td>
<td>100</td>
<td>313,954,000</td>
<td>100</td>
<td>990,351,200</td>
<td>DKPP</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</td>
<td>99,44</td>
<td>100</td>
<td>171,045,000</td>
<td>99,62</td>
<td>157,569,650</td>
<td>91,81</td>
<td>347,782,550</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>16</td>
<td>Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Pertanian/Perkebunan</td>
<td>Adanya informasi komersial bermanfaat yang baik dan aman</td>
<td>93,32</td>
<td>100</td>
<td>16,812,000</td>
<td>91,56</td>
<td>17,008,000</td>
<td>91,81</td>
<td>34,720,900</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>18</td>
<td>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya penerapan ilmuologi pertanian/perkebunan</td>
<td>100,00</td>
<td>91,14</td>
<td>3,006,540,455</td>
<td>100</td>
<td>2,376,069,250</td>
<td>100</td>
<td>5,182,608,705</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>19</td>
<td>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</td>
<td>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan penyuluh</td>
<td>99,44</td>
<td>100</td>
<td>14,455,000</td>
<td>91,81</td>
<td>36,724,200</td>
<td>100</td>
<td>51,179,200</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>20</td>
<td>Program Pencapaian dan Penanggulangan Penyakit Ternak</td>
<td>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan penyuluh</td>
<td>92,82</td>
<td>100</td>
<td>57,27</td>
<td>98,38</td>
<td>181,615,090</td>
<td>100</td>
<td>99,143,759</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>21</td>
<td>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>01</td>
<td>22</td>
<td>Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>15</td>
<td>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</td>
<td>Terlaksananya pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir</td>
<td>100</td>
<td>362,700,400</td>
<td>98,25</td>
<td>450,297,000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>812,997,400</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>15</td>
<td>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</td>
<td>Terlaksananya pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir</td>
<td>100</td>
<td>362,700,400</td>
<td>98,25</td>
<td>450,297,000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>812,997,400</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>05</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>02</td>
<td>15</td>
<td>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</td>
<td>Terlaksananya pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir</td>
<td>100</td>
<td>362,700,400</td>
<td>98,25</td>
<td>450,297,000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>812,997,400</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>02</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>03</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>03</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>07</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>04</td>
<td>15</td>
<td>Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan</td>
<td>Meningkatnya produktivitas hasil pertanian</td>
<td>99,89</td>
<td>100</td>
<td>94,52</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
<td>2,582,500,000</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| No | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Meningkatnya produktivitas hasil pertanian | 99,89 | 100 | 94,52 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | DKPP |
| 2  | 07  | 01  | 01  | 05  | 15 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Meningkatnya produktivitas hasil pertanian | 99,89 | 100 | 94,52 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | DKPP |
| 2  | 07  | 01  | 01  | 06  | 15 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Meningkatnya produktivitas hasil pertanian | 99,89 | 100 | 94,52 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | 100 | 2,582,500,000 | DKPP |

### Notes
- DKPP: Dinas Kelautan dan Perikanan
- Disperindagkop: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

**Total:**
- DIINSUM: 15,292,152,126
- DISPERINDAGKOP: 66,189,400,000

**Subtotal:**
- 18,130,638,238
- 17,526,517,039
- 17,526,517,039
- 15,440,092,603
- 66,389,400,000
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Program</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Nominal (Pulsa)</th>
<th>Persentase (%)</th>
<th>Nominal (Rupiah)</th>
<th>Persentase (%)</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>206 2.07.01 18</td>
<td>Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri</td>
<td>Terpromosinya UMKM pada pameran dan Factory outlet serta terdistribusinyaahan perek dijang yang stabil</td>
<td>99,92</td>
<td>100</td>
<td>514,925,000</td>
<td>99,48</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>206 2.07.01 19</td>
<td>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan</td>
<td>Terlantarnya pedagang kaki lima dan pedagang asongan</td>
<td>89,56</td>
<td>98,9</td>
<td>1,064,563,300</td>
<td>99,87</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>206 2.07.01 20</td>
<td>Program Peningkatan Pelayanan Pasar</td>
<td>Adanya pelayanan pasar yang optimal</td>
<td>128,49</td>
<td>100</td>
<td>6,895,653,002</td>
<td>99,14</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 15</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</td>
<td>Meningkatnya kualitas ummah IKT kecil menang yang menunngi one view one product</td>
<td>99,51</td>
<td>100</td>
<td>119,632,800</td>
<td>99,51</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 16</td>
<td>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</td>
<td>Meningkatnya pengrajin yang menggunakan teknologi modern dalam kegiatan perindustrian</td>
<td>99,28</td>
<td>100</td>
<td>410,721,050</td>
<td>95,34</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 17</td>
<td>Program Penataan Struktur Industri</td>
<td>Tersedianya profil serta tertatanya industri kecil (Packaging &amp; labeling)</td>
<td>99,18</td>
<td>100</td>
<td>22,875,000</td>
<td>95,06</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 18</td>
<td>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</td>
<td>Tersedianya profil RKM</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>22,875,000</td>
<td>95,06</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 19</td>
<td>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</td>
<td>Berkembangnya usaha kecil menengah yang diaktifkan di bidang perakupan</td>
<td>99,87</td>
<td>98,6</td>
<td>37,164,600</td>
<td>99,54</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>207 2.07.01 16</td>
<td>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif</td>
<td>Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang unggul dan kompetitif</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>51,976,000</td>
<td>99,46</td>
<td>Disperindagkop</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>2.09</td>
<td>2.09.01 Dinas Syariat Islam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2.09.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 83.87 100 431,549,900 91.65 360,119,900 86.02 532,691,875 500,991,675 100 1,825,355,350</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2.09.01 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas tugas kantor 96.44 98.57 507,984,000 85.12 214,013,000 - 100 169,443,000 100 891,440,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2.09.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparat 89.13 100 27,600,000 97.07 18,000,000 100 11,108,000 100 18,400,000 100 75,108,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2.09.01 15 Program Pembinaan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal 99.63 99.40 3,455,049,600 98.36 517,015,900 710,378,450 100 821,527,450 100 2,574,159,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2.09.01 15 Program Pembinaan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal 99.63 99.40 3,455,049,600 90.00 2,528,177,700 100 2,917,036,300 100 8,900,263,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2.09.01 16 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama</td>
<td>Terlaksananya peran Ulama dalam pelaksanaan Syariat Islam - 100 22,012,000 - 100 22,012,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>2.09.01 17 Program Penelitian Dan Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>tersebarunya informasi Syariat Islam kepada masyarakat 98.17 98.36 525,238,000 98.36 517,015,900 710,378,450 100 821,527,450 100 2,574,159,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>2.09.01 18 Program Pemberdayaan Sarana Ibadah</td>
<td>Terselenggaranya kegiatan ibadah yang nyaman di mushalla pemko dan di Mesjid Agung Al-Makmur 74.60 100 75,736,570 88.96 864,790,000 100 1,261,574,000 100 346,595,000 100 2,548,695,570</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>2.09.01 19 Program Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun</td>
<td>Terlaksananya penyuluhan hukum Islam 93.27 100 49,047,600 92.57 129,868,800 1,932,722,700 100 1,100,160,750 100 5,374,588,850</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2.09.01 20 Program Bimbingan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Majelis Taklim - 100 1,043,036,600 100 1,043,036,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2.09.01 23 Program Pembinaan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Ulama secara maksimal 74.60 100 75,736,570 88.96 864,790,000 100 1,261,574,000 100 346,595,000 100 2,548,695,570</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>2.09.01 24 Program Pembinaan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Ulama secara maksimal 74.60 100 75,736,570 88.96 864,790,000 100 1,261,574,000 100 346,595,000 100 2,548,695,570</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2.09.01 25 Program Pembinaan &amp; Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Terlaksananya pembinaan Ulama secara maksimal 74.60 100 75,736,570 88.96 864,790,000 100 1,261,574,000 100 346,595,000 100 2,548,695,570</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09</td>
<td>2.09.01</td>
<td>27</td>
<td>Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam</td>
<td>Terwujudnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan Syariat Islam</td>
<td>99,97</td>
<td>100</td>
<td>22,768,500</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09</td>
<td>2.09.01</td>
<td>28</td>
<td>Program Pembinaan Fardhu Kifayah</td>
<td>Terpenuhinya Pemahaman Tentang Fardhu Kifayah</td>
<td>99,00</td>
<td>100</td>
<td>403,894,800</td>
<td>270,458,800</td>
</tr>
<tr>
<td>1 09</td>
<td>2.09.01</td>
<td>29</td>
<td>Program Penegakan Pemerintah Daerah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 2 09 | 2.09.02 | | Sekretariat MPU | | | | | | | | | | |
| 2 09 | 2.09.02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 93,50 | | 544,912,890 | 571,039,863 | 97,48 | 668,641,008 | 100 | 590,528,416 | 100 | 2,373,122,177 | Set. MPU |
| 2 09 | 2.09.02 | 02 | Program Penegakan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kelancaranugas kantor | 98,67 | | 66,588,010 | 64,467,500 | 98,98 | 65,296,155 | 100 | 27,652,000 | 100 | 224,003,665 | Set. MPU |
| 2 09 | 2.09.02 | 03 | Program Penegakan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kelancaranugas aparatur | 99,33 | | 7,800,000 | 6,700,000 | 92,86 | 6,020,000 | 100 | 5,200,000 | 100 | 25,720,000 | Set. MPU |
| 2 09 | 2.09.02 | 15 | Program Penegakan Sumber Daya dan Peran Ulama | Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam | 98,83 | | 42,012,375 | 184,493,712 | 99,80 | 226,057,512 | 100 | 221,575,459 | 100 | 674,139,058 | Set. MPU |
| 2 09 | 2.09.02 | 18 | Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam | Tersebarnya informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat | - | | 21,141,625 | 99,91 | 46,263,300 | 100 | 39,618,100 | 100 | 107,023,025 | Set. MPU |

<p>| 2 09 | 2.09.03 | | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | | | | | | |
| 2 09 | 2.09.03 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 85,38 | | 421,321,800 | 412,206,000 | 98,23 | 447,066,600 | 100 | 417,099,600 | 100 | 1,697,694,000 | Set. MAA |
| 2 09 | 2.09.03 | 02 | Program Penegakan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kelancaranugas kantor | 99,04 | | 307,215,200 | 277,384,000 | 99,74 | 208,030,000 | 100 | 196,268,500 | 100 | 988,897,700 | Set. MAA |
| 2 09 | 2.09.03 | 03 | Program Penegakan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kelancaranugas aparatur | 99,43 | | 37,800,000 | 8,700,000 | 99,85 | 201,100,000 | 100 | 6,400,000 | 100 | 73,010,000 | Set. MAA |
| 2 09 | 03 | 19 | Program Penyemarakan Syiar Islam | Perkembangan Peningkatan Hari-Hari Besar Islam | 98,81 | | 144,987,237 | 133,236,750 | 98,70 | 119,686,000 | 100 | 119,686,000 | 100 | 517,595,987 | Set. MAA |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Program/Proyek</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>% Pemanfaatan</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 09 03 29</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya peranan Gampang dalam penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat serta penegakan Syari'at Islam</td>
<td>99,68</td>
<td>282,938,505</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 03 30</td>
<td>Program Pelestarian Adat Istiadat Sesuai Syariat Islam</td>
<td>Tercapainya Pelestarian Adat Istiadat yang ada dalam masyarakat sesuai dengan Syari'at Islam</td>
<td>-</td>
<td>70,657,758</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>87,04</td>
<td>262,974,102</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>98,12</td>
<td>137,172,700</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>8,800,000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 04</td>
<td>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</td>
<td>Adanya pemahaman tentang Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan</td>
<td>100</td>
<td>42,934,141</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 17</td>
<td>Program Pendidikan Menengah</td>
<td>Proses peningkatan informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan menengah</td>
<td>99,59</td>
<td>69,203,232</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.04 29</td>
<td>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya peranan Gampang dalam penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat serta penegakan Syari'at Islam</td>
<td>99,98</td>
<td>38,321,330</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2 09 02.09.05</td>
<td>Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah</td>
<td></td>
<td>83,49</td>
<td>539,405,305</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Tanggal</td>
<td>No Program</td>
<td>Deskripsi Program</td>
<td>Meningkatnya</td>
<td>Persentase</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09.05</td>
<td>01</td>
<td>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>99,25</td>
<td>91,65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09.05</td>
<td>02</td>
<td>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>99,46</td>
<td>85,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09.05</td>
<td>03</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>95,09</td>
<td>97,07</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09.05</td>
<td>19</td>
<td>Program Penyemarakan Syiar Islam</td>
<td>86,46</td>
<td>72,19</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09.05</td>
<td>20</td>
<td>Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah - Pembinaan Majelis Taklim</td>
<td>10,260,400</td>
<td>92,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL | 417,477,763,883 | 572,048,593,945 | 640,328,445,456 | 602,708,542,375 | 2,232,563,945,159 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.01</td>
<td>URUSAN WAJIB</td>
<td></td>
<td>573,179,277,916</td>
<td>1.01</td>
<td>PENDIDIKAN</td>
<td></td>
<td>47,582,068,520</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02</td>
<td>KESEHATAN</td>
<td></td>
<td>174,902,974,353</td>
<td>1.02</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
<td>174,902,974,353</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 95,62 | 100 | 2,861,018,300 | 100 | 2,861,018,300 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya ketersediaan fasilitas dan sarana kantor | 94,08 | 100 | 179,182,300 | 100 | 179,182,300 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 3 | Peningkatan Gizi Aparatur | Meningkatnya ketersediaan gizi aparatur | 99,53 | 100 | 684,320,000 | 100 | 684,320,000 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 15 | Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatnya partisipasi anak TK | 88,79 | 100 | 619,675,500 | 100 | 619,675,500 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 16 | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Adanya pemahaman tentang Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan | 86,97 | 100 | 36,084,749,600 | 100 | 36,084,749,600 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 17 | Pengembangan Budaya | Jumlah angka melek huruf usia produktif meningkat | 94,81 | 100 | 73,547,500 | 100 | 73,547,500 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 18 | Pendidikan Non Formal | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan | 93,17 | 100 | 1,275,671,500 | 100 | 1,275,671,500 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 19 | Pendidikan Luar Biasa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan | 98,49 | 100 | 38,150,000 | 100 | 38,150,000 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 20 | Perbaikan Gizi Masyarakat | Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dengan program pendidikan | 85,14 | 100 | 178,132,000 | 100 | 178,132,000 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan | 91,12 | 100 | 3,515,029,643 | 100 | 3,515,029,643 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |
| 22 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular | 90,40 | 100 | 885,854,200 | 100 | 885,854,200 | Dinas Kesehatan dan Kebudayaan |

**Tabel 8.1.a**

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh Tahun 2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<p>| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</td>
<td>Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Target (%)</td>
<td>Target (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Pengadaan, Penugasan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</td>
<td>Terciptanya Standar pelayanan minimal 86,66</td>
<td>100</td>
<td>15,517,361,700</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pengangkatan Konseling Ibu Melahirkan di Rumah Sakit</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>3,500,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02</td>
<td>BLUD Rumah Sakit Umum Murnia</td>
<td>Tercapainya standar pelayanan minimal 86,66</td>
<td>100</td>
<td>21,073,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Pengadaan, Penugasan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>102,289,560,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>3,300,000,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Program Kegiatan Masyarakat di Rumah Sakit</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>20,000,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03</td>
<td>PERBAIAN UMUM</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03</td>
<td>02 Oton Perbaikan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03 .02</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03 .02</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03 .02</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03 .02</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03 .02</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td>
<td>126,257,415,270</td>
<td>126,257,415,270</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Pengendalian Banjir (Otsus)</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>3,660,000,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Program Kegiatan Masyarakat di Rumah Sakit</td>
<td>Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 98,17</td>
<td>100</td>
<td>4,296,898,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04</td>
<td>PERUMAHAN</td>
<td>7,067,387,500</td>
<td>7,067,387,500</td>
<td>7,067,387,500</td>
</tr>
<tr>
<td>1.05</td>
<td>02 Oton Perbaikan Ruang dan Kawasan Nonmasalahan</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.05 .02</td>
<td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.05 .02</td>
<td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.05 .02</td>
<td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.05 .02</td>
<td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.05 .02</td>
<td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</td>
<td>6,068,048,500</td>
<td>6,068,048,500</td>
</tr>
<tr>
<td>Kode</td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Target (%)</td>
<td>Rp</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkenalan Masyarakat Perkotaan</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga pembangunan</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan program keluarga bantuan</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan program operasional</td>
<td>98,58</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>(5)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan program operasional</td>
<td>93,80</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>(6)</td>
<td>Program Keluarga Pembangunan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>90,71</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.04 Penataan Kebijakan dan Pelayanan

1.05 Penerimaan Pendapatan

1.06 Pembiayaan

1.07 Pendanaan

1.08 Pengadaan HUBG

1.09 Dinamika Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebijakan

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkenalan</td>
<td>93,93</td>
<td>100</td>
<td>968,023,170</td>
<td>100</td>
<td>968,023,170</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga pembangunan</td>
<td>98,74</td>
<td>100</td>
<td>481,712,318</td>
<td>100</td>
<td>481,712,318</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga bantuan</td>
<td>95,53</td>
<td>100</td>
<td>21,200,000</td>
<td>100</td>
<td>21,200,000</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program operasional</td>
<td>90,80</td>
<td>100</td>
<td>337,677,162</td>
<td>100</td>
<td>337,677,162</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>90,23</td>
<td>100</td>
<td>1,210,631,430</td>
<td>100</td>
<td>1,210,631,430</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>96,80</td>
<td>100</td>
<td>337,677,162</td>
<td>100</td>
<td>337,677,162</td>
<td>Bappeda</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.04 Penataan Kebijakan dan Pelayanan

1.05 Penerimaan Pendapatan

1.06 Pembiayaan

1.07 Pendanaan

1.08 Pengadaan HUBG

1.09 Dinamika Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebijakan

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkenalan</td>
<td>97,09</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga pembangunan</td>
<td>95,23</td>
<td>100</td>
<td>302,780,950</td>
<td>100</td>
<td>302,780,950</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga bantuan</td>
<td>98,19</td>
<td>100</td>
<td>104,070,000</td>
<td>100</td>
<td>104,070,000</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program operasional</td>
<td>99,64</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>97,84</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>98,77</td>
<td>100</td>
<td>1,482,464,900</td>
<td>100</td>
<td>1,482,464,900</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>97,09</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>99,64</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>97,84</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>Dishub</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.04 Penataan Kebijakan dan Pelayanan

1.05 Penerimaan Pendapatan

1.06 Pembiayaan

1.07 Pendanaan

1.08 Pengadaan HUBG

1.09 Dinamika Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebijakan

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkenalan</td>
<td>97,09</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>100</td>
<td>2,840,535,200</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga pembangunan</td>
<td>95,23</td>
<td>100</td>
<td>302,780,950</td>
<td>100</td>
<td>302,780,950</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga bantuan</td>
<td>98,19</td>
<td>100</td>
<td>104,070,000</td>
<td>100</td>
<td>104,070,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program operasional</td>
<td>99,64</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>100</td>
<td>282,520,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya penanganan bencana</td>
<td>97,84</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>100</td>
<td>4,803,400,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.04 Penataan Kebijakan dan Pelayanan

1.05 Penerimaan Pendapatan

1.06 Pembiayaan

1.07 Pendanaan

1.08 Pengadaan HUBG

1.09 Dinamika Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkenalan</td>
<td>86,29</td>
<td>100</td>
<td>31,245,889,479</td>
<td>100</td>
<td>31,245,889,479</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkotaan</td>
<td>Meningkatnya program keluarga pembangunan</td>
<td>90,71</td>
<td>100</td>
<td>6,215,170,000</td>
<td>100</td>
<td>6,215,170,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kependudukan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kode</td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program</td>
<td>Target Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</td>
<td>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)</td>
<td>2017</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kegiatan Gupi Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>185,410,000</td>
<td>185,410,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Kegiatan Kinerja Pengelolaan Perpustakaan</td>
<td>Meningkatnya penerapan firewall, av, dan perangkat lunak software</td>
<td>100</td>
<td>3,508,695,850</td>
<td>3,508,695,850</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Kegiatan Pengendalian Penanaman dan Pengelolaan Lahan Hutan</td>
<td>Meningkatnya penanaman pohon dan perkebunan di lahan hutan</td>
<td>90,03</td>
<td>348,694,000</td>
<td>348,694,000</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</td>
<td>Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</td>
<td>100</td>
<td>330,569,511</td>
<td>330,569,511</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kegiatan Pengelolaan Harga</td>
<td>Merdeka dari ketergantungan pada material bahan baku dan konsumsi tenaga kerja</td>
<td>90,16</td>
<td>11,769,476,182</td>
<td>11,769,476,182</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Kegiatan Pelayanan Pemerintah Daerah</td>
<td>Meningkatnya pelayanan publik</td>
<td>100</td>
<td>869,915,500</td>
<td>869,915,500</td>
<td>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**1.10 KEPEMILIKAN DAN CATATAN SIPIL**

| 1    | Program Perpajakan | Meningkatnya pelayanan perpajakan | 70,35 | 662,540,700 | 662,540,700 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2    | Kegiatan Penerimaan Sipil | Meningkatnya penerimaan sipil dengan keterpenuhan baku dan pencatatan yang sekaligus | 77,12 | 118,811,300 | 118,811,300 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3    | Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | 99,38 | 17,200,000 | 17,200,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**1.11 PENDIDIKAN DI PEREKORAN DAN PELINDUNGAN ANAK**

| 1    | Program Pendidikan Anak | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 90,08 | 269,472,722 | 269,472,722 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2    | Kegiatan Penanaman Siswa | Meningkatnya kinerja aparatur dengan keterpenuhan baku dan pencatatan yang sekaligus | 75,97 | 171,858,100 | 171,858,100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3    | Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | 99,50 | 22,400,000 | 22,400,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**1.13 SOSIAL**

| 2    | Program Penanganan Bencana Alam | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 90,08 | 1,806,676,895 | 1,806,676,895 | BPBD |
| 3    | Kegiatan Penanaman Siswa | Meningkatnya kinerja aparatur dengan keterpenuhan baku dan pencatatan yang sekaligus | 84,93 | 1,129,607,000 | 1,129,607,000 | BPBD |

**1.13 SOSIAL**

<p>| 2    | Program Pelayanan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 90,08 | 52,700,000 | 52,700,000 | BPBD |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Target (%)</td>
<td>Rp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>Penyediaan Sumber Daya dan Pemangkuan Keran dan Bencana Alam</td>
<td>Mengurangi resiko bencana</td>
<td>66,31</td>
<td>100 150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(7)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(8)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(9)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.13</td>
<td>Dinas Sosial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>86,89</td>
<td>100 468,713,599</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerjakan tugas-tugas kantor</td>
<td>96,81</td>
<td>100 197,622,000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengurangan Daerah Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerjakan tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100 22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pelayanan dan Rehabilisi Kependudukan</td>
<td>Meningkatnya angka luna sosial dan respon cepat</td>
<td>96,40</td>
<td>100 296,919,100</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pembiayaan Anak Terlantar</td>
<td>Terlaksananya pembinaan bagi anak terlantar</td>
<td>98,52</td>
<td>100 1,545,776,200</td>
</tr>
<tr>
<td>1.14</td>
<td>Dinas Tenaga Kerja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>86,89</td>
<td>100 306,096,700</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerjakan tugas-tugas kantor</td>
<td>96,81</td>
<td>100 271,334,000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengurangan Daerah Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerjakan tugas aparatur</td>
<td>100</td>
<td>100 14,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</td>
<td>Meningkatnya kualitas dan keterampilan pencari kerja</td>
<td>96,22</td>
<td>100 166,962,600</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pemberdayaan dan Pengembangan Kemiskinan</td>
<td>Meningkatnya perlindungan dan pengembangan keterampilan</td>
<td>90,47</td>
<td>100 64,979,300</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Peningkatan Efisiensi Perdagangan</td>
<td>Meningkatnya efisiensi penerapan dan pengembangan</td>
<td>99,92</td>
<td>100 239,648,300</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</td>
<td>Peningkatan pelayanan pemerintah</td>
<td>128,49</td>
<td>100 5,375,253,073</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Skil Usaha Kecil Menengah yang Kompetitif</td>
<td>Meningkatnya usaha kecil menengah yang kompetitif</td>
<td>99,87</td>
<td>100 96,227,900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>66,31</td>
<td>100 150,000,000</td>
<td>96,40</td>
<td>100 296,919,100</td>
</tr>
<tr>
<td>86,89</td>
<td>100 468,713,599</td>
<td>98,52</td>
<td>100 1,545,776,200</td>
</tr>
<tr>
<td>96,81</td>
<td>100 197,622,000</td>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>96,40</td>
<td>100 296,919,100</td>
<td>98,52</td>
<td>100 1,545,776,200</td>
</tr>
<tr>
<td>86,89</td>
<td>100 468,713,599</td>
<td>96,81</td>
<td>100 197,622,000</td>
</tr>
<tr>
<td>96,81</td>
<td>100 197,622,000</td>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>86,89</td>
<td>100 468,713,599</td>
<td>96,81</td>
<td>100 197,622,000</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>197,622,000</td>
<td>100</td>
<td>22,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>15</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>15</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>17</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>20</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>15</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>16</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>20</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>15</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>100 22,000,000</td>
<td>16</td>
<td>100 23,600,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![Table Image](image-url)
<table>
<thead>
<tr>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>2017</th>
<th>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2012)</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Ketercapaan Kualitas Kependidikan</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>97,66</td>
<td>100</td>
<td>505,682,102</td>
<td>100</td>
<td>505,682,102</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Keberhasilan dan Kinerja Keuangan</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>95,84</td>
<td>100</td>
<td>96,160,000</td>
<td>100</td>
<td>96,160,000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pendidikan Program Peningkatan Disiplin</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>97,37</td>
<td>100</td>
<td>18,800,000</td>
<td>100</td>
<td>18,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pendidikan Pendidikan Pendidikan</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>80,96</td>
<td>100</td>
<td>50,576,000</td>
<td>100</td>
<td>50,576,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pelayanan Pelayanan Ketercapaan</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>95,62</td>
<td>100</td>
<td>227,170,264</td>
<td>100</td>
<td>227,170,264</td>
</tr>
<tr>
<td>1.16</td>
<td>Penerimaan Penerimaan Modal dan Peralatan Satu</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>79,69</td>
<td>100</td>
<td>593,160,000</td>
<td>100</td>
<td>593,160,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.18</td>
<td>KEPEMUDAAN DENGAN OLAH Toggle RAGA</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>95,50</td>
<td>100</td>
<td>19,600,000</td>
<td>100</td>
<td>19,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>86,10</td>
<td>100</td>
<td>188,148,500</td>
<td>100</td>
<td>188,148,500</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>97,20</td>
<td>100</td>
<td>593,160,000</td>
<td>100</td>
<td>593,160,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>KEPEMUDAAN DENGAN OLAH RAGA</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>91,90</td>
<td>100</td>
<td>54,942,500</td>
<td>100</td>
<td>54,942,500</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>KEPEMUDAAN DENGAN OLAH RAGA</td>
<td>Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi perkantoran</td>
<td>91,90</td>
<td>100</td>
<td>54,942,500</td>
<td>100</td>
<td>54,942,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>2017</th>
<th>Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kode</td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>69,21</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberalan jalan-tangan kantor</td>
<td>99,96</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Gizi/Alat Peralatan</td>
<td>Meningkatnya keberalan jual-aparatur</td>
<td>96,38</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Keamanan dan Kepatuhan</td>
<td>Meningkatnya keamanan masyarakat</td>
<td>97,20</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pengembangan Wawasan Kerangka</td>
<td>Meningkatnya wawasan kerangka</td>
<td>96,38</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</td>
<td>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</td>
<td>Menurunnya tingkat penyakit masyarakat</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Pendidikan Politik Masyarakat</td>
<td>Terbina masyarakat dalam berpolitik</td>
<td>93,84</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</td>
<td>Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan korban Bencana Alam</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</th>
<th>Target (%)</th>
<th>Rp</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>89,57</td>
<td>100</td>
<td>14,417,269,550</td>
<td>Bagian Umum</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberalan jalan-tangan kantor</td>
<td>81,60</td>
<td>100</td>
<td>3,018,256,000</td>
<td>Bagian Umum</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Gizi/Alat Peralatan</td>
<td>Meningkatnya keberalan jual-aparatur</td>
<td>97,22</td>
<td>100</td>
<td>312,700,000</td>
<td>Bagian Umum</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</td>
<td>Meningkatnya kinerja pelayanan kebunakan KDH dan Wakil KDH</td>
<td>89,53</td>
<td>100</td>
<td>1,132,350,000</td>
<td>Bagian Umum</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</td>
<td>Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website Hukum Banda Aceh</td>
<td>78,05</td>
<td>100</td>
<td>339,187,500</td>
<td>Bagian Administrasi Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kompetensi SGM dan keterampilan di lingkungan pemerintah</td>
<td>93,10</td>
<td>100</td>
<td>59,614,600</td>
<td>Bagian Administrasi Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</td>
<td>Meningkatnya kinerja pemanfaatan ICT di kabupaten kota</td>
<td>91,42</td>
<td>100</td>
<td>1,267,006,000</td>
<td>Bagian Administrasi Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bagian Humas</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>89,57</td>
<td>100</td>
<td>164,834,000</td>
<td>Bagian Humas</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pengembangan Infrastruktur dan Media Massa</td>
<td>Meningkatnya pemanfaatan ICT di kabupaten kota</td>
<td>96,12</td>
<td>100</td>
<td>164,834,000</td>
<td>Bagian Humas</td>
</tr>
<tr>
<td>Kode</td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</td>
<td>2017</td>
<td>Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td>Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penangkatan Sistem Pengawasan Internal dan</td>
<td>Terkendalinya pelaksanaan kelolaan keuarga daerah</td>
<td>Bagian Hukum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah</td>
<td>69,19</td>
<td>369,708,000</td>
<td>369,708,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Gelarbaba Pemanfaatan Tingkat 2</td>
<td>Meningkatnya Produksi Hukum Daerah yang</td>
<td>Bagian Hukum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>disirkulasi melalui website Hukum Banda Aceh</td>
<td>89,176,500</td>
<td>89,176,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Keretaan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Meningkatnya Produksi Hukum Daerah yang</td>
<td>Bagian Hukum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dihasilkan</td>
<td>252,356,500</td>
<td>252,356,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bagian Tata Pemerintahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td>38,136,783,504</td>
<td>38,136,783,504</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Program Pembinaan Dan-Fasilitasi Penguatan</td>
<td>Terkeksinya Evaluasi Reuami Gempang di Seluah</td>
<td>Bagian Tata Pemerintahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Desa/kabupaten</td>
<td>Gempang Dalam Wilayah Kota Banda Aceh</td>
<td>100</td>
<td>22,551,400</td>
<td>22,551,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Penangkatan Sistem Pengawasan Internal dan</td>
<td>Terkendalinya pelaksanaan kelolaan keuarga daerah</td>
<td>Bagian Tata Pemerintahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah</td>
<td>69,19</td>
<td>269,834,662</td>
<td>269,834,662</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pelangkatan Pelayanan Pemerintah Isialah</td>
<td>Neraca Pidan KDH yang</td>
<td>Bagian Tata Pemerintahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ditarik</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>37,849,370</td>
<td>37,849,370</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>525,799,500</td>
<td>525,799,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penangkatan Pengembangan Sistem Pelayanan</td>
<td>Perkembangan informasi mengenai laporan kinerja yang</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 19</td>
<td>mengetahui</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>68,014,700</td>
<td>68,014,700</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Keretaan Peraturan Perundang-undangan</td>
<td>Meningkatnya Produksi Hukum Daerah yang</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dihasilkan</td>
<td>100</td>
<td>67,021,700</td>
<td>67,021,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Pendidikan Kedinas</td>
<td>Terusnya menyiapkan</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>terhadap</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>26,398,700</td>
<td>26,398,700</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pembinaan dan Pengembangan Operator</td>
<td>Terusnya</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>dinas dihasilkan</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>183,527,800</td>
<td>183,527,800</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Pengembangan Kapasitas Pernahismita Kota</td>
<td>Meningkatnya kasaipen pernahismita kota dalam</td>
<td>Bagian Organisasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>pelaksanaan publik</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>135,943,600</td>
<td>135,943,600</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,946,566,200</td>
<td>1,946,566,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Pelangkatan Pelayanan Pemerintah Isialah</td>
<td>Meningkatnya pelayan pemerintah daerah</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>683,599,700</td>
<td>683,599,700</td>
<td>683,599,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Meningkatnya pola hidup yang sesuai dengan</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 8</td>
<td>syarat Islam</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>180,836,600</td>
<td>180,836,600</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Program Penyemaran Islam dalam Masyarakat</td>
<td>Terlebih dini kegiatan religi yang sesuai dengan</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 6</td>
<td>peraturan islam</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>728,455,400</td>
<td>728,455,400</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pembinaan dan Pemanfaatan Syariat Islam</td>
<td>Meningkatnya kegiatan religi yang sesuai dengan</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 17</td>
<td>peraturan islam</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>435,200,000</td>
<td>435,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pengembangan Aksi Jihad</td>
<td>Meningkatnya pola hidup yang sesuai dengan</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 12</td>
<td>peraturan islam</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>44,152,500</td>
<td>44,152,500</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bagian Ekonomi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,210,426,070</td>
<td>2,210,426,070</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pelayanan &amp; Pengembangan Perkonsomasi Hiburan</td>
<td>Terlebih dini kegiatan daerah yang mendukung</td>
<td>Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Batasnya terhadap batas 24</td>
<td>pembangunan pembangunan</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>220,426,070</td>
<td>220,426,070</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bagian Bea dan Pajak</td>
<td></td>
<td></td>
<td>666,800,300</td>
<td>666,800,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi/Perkantoran</td>
<td></td>
<td></td>
<td>666,800,300</td>
<td>666,800,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>666,800,300</td>
<td>666,800,300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Sekretariat DPRK</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,971,316,800</td>
<td>18,971,316,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi/Perkantoran</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,130,992,000</td>
<td>10,130,992,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1.20 | Sekretariat DPRK                             |                                                     |                          | 18,971,316,800 | 18,971,316,800 |

| 1    | Pelayanan Administrasi/Perkantoran            |                                                     |                          | 10,130,992,000 | 10,130,992,000 |
|      |                                              |                                                     |                          | 666,800,300 | 666,800,300 |
| 1.20 | Sekretariat DPRK                             |                                                     |                          | 18,971,316,800 | 18,971,316,800 |

<p>| 1    | Pelayanan Administrasi/Perkantoran            |                                                     |                          | 10,130,992,000 | 10,130,992,000 |
|      |                                              |                                                     |                          | 666,800,300 | 666,800,300 |
| 1.20 | Sekretariat DPRK                             |                                                     |                          | 18,971,316,800 | 18,971,316,800 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>92,82 100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengadaan Glikop Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>97,07 100</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pengadaan Kepala Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kualitas kerja</td>
<td>40,44 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lembar Pengadaan, Penyaluran & Penerimaan**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.10</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>3,462,752,960</th>
<th>3,462,752,960</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>95,39 100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>94,43 100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengadaan Glikop Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>98,78 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Program Penataan Sumber Daya Aparatur**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2.10</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>1,208,552,960</th>
<th>1,208,552,960</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>95,38 100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>94,90 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2.20</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>100 100</th>
<th>18,000,000 100</th>
<th>Kec. Kuta Alam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</td>
<td>Sediaan APIP yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi</td>
<td>98,90 100</td>
<td>12,584,000 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan**

| 2.30 | SKPD Penanggung Jawab | 99,78 100 | 165,415,750 100 | Kec. Baiturrahman |

**Pengadaan, Penyaluran & Penerimaan**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.10</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
<th>490,000,000</th>
<th>490,000,000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>96,14 100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>99,00 100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengadaan Glikop Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja kerja tugas kantor</td>
<td>98,90 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 28   | Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan | Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan | 98,90 100 | 12,584,000 100 | Kec. Baiturrahman |

| 30   | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 96,14 100 | 264,226,925 100 | Kec. Baiturrahman |

**Penerimaan Masyarakat**

| 1.10 | SKPD Penanggung Jawab | 421,294,526 | 421,294,526 |

**Penerimaan Masyarakat**

| 1.10 | SKPD Penanggung Jawab | 421,294,526 | 421,294,526 |

**Penerimaan Masyarakat**

<p>| 1.10 | SKPD Penanggung Jawab | 421,294,526 | 421,294,526 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Target (%) Rp</td>
<td>Target (%) Rp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)</td>
<td>(10) (11) (12)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>96.05 100 241,920,993 100 241,920,993</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>97.64 100 38,521,400 100 38,521,400</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>100 100 11,200,000 100 11,200,000</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>100 100 120,652,133 100 120,652,133</td>
<td>Kec. Meuraxa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.40</td>
<td>Kecamatan Meuraxa</td>
<td></td>
<td>122,532,993 122,532,993</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>96.21 100 306,108,000 100 306,108,000</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>97.59 100 55,319,900 100 55,319,900</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>99.50 100 11,600,000 100 11,600,000</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>98.46 100 186,485,000 100 186,485,000</td>
<td>Kec. Syiah Kuala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.40</td>
<td>Kecamatan Banda Raya</td>
<td></td>
<td>126,288,776 126,288,776</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>99.12 100 205,228,274 100 205,228,274</td>
<td>Kec. Banda Raya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>97.71 100 88,727,500 100 88,727,500</td>
<td>Kec. Banda Raya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>100 100 10,000,000 100 10,000,000</td>
<td>Kec. Banda Raya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>96.28 100 148,305,000 100 148,305,000</td>
<td>Kec. Banda Raya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.40</td>
<td>Kecamatan Kuta Raja</td>
<td></td>
<td>186,485,000 186,485,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>98.16 100 191,743,600 100 191,743,600</td>
<td>Kec. Kuta Raja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>97.13 100 33,098,000 100 33,098,000</td>
<td>Kec. Kuta Raja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>99.88 100 11,200,000 100 11,200,000</td>
<td>Kec. Kuta Raja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>99.96 100 159,379,100 100 159,379,100</td>
<td>Kec. Kuta Raja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.40</td>
<td>Kecamatan Jaya Baru</td>
<td></td>
<td>159,379,100 159,379,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>96.05 100 199,009,450 100 199,009,450</td>
<td>Kec. Jaya Baru</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>98.38 100 51,039,750 100 51,039,750</td>
<td>Kec. Jaya Baru</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>100 100 10,000,000 100 10,000,000</td>
<td>Kec. Jaya Baru</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>100 100 166,285,400 100 166,285,400</td>
<td>Kec. Jaya Baru</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.40</td>
<td>Kecamatan Lueng Bata</td>
<td></td>
<td>166,285,400 166,285,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>95.95 100 237,819,250 100 237,819,250</td>
<td>Kec. Lueng Bata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas-tugas kantor</td>
<td>98.16 100 35,775,400 100 35,775,400</td>
<td>Kec. Lueng Bata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kinerja tugas aparatur</td>
<td>93.10 100 9,200,000 100 9,200,000</td>
<td>Kec. Lueng Bata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan</td>
<td>Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan</td>
<td>93.86 100 135,943,200 100 135,943,200</td>
<td>Kec. Lueng Bata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kode</td>
<td>Program/Kegiatan</td>
<td>Indikator Kinerja Program (outcome)</td>
<td>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</td>
<td>SKPD Penanggung Jawab</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>Kesamaan Ulee Kareng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>97,35 100 326,425,000 100 326,425,000</td>
<td>Kes. Ulee Kareng</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas-tugas kantor</td>
<td>92,03 100 33,388,000 100 33,388,000</td>
<td>Kes. Ulee Kareng</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Dinasi Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas aparatur</td>
<td>100 100 13,600,000 100 13,600,000</td>
<td>Kes. Ulee Kareng</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.21</td>
<td>SKPD PENGELOLAN KEUANG</td>
<td></td>
<td>109,462,082,700 109,462,082,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>83,44 100 2,220,767,700 100 2,220,767,700</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas-tugas kantor</td>
<td>90,62 100 2,654,124,000 100 2,654,124,000</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Dinasi Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas aparatur</td>
<td>72,90 100 47,700,000 100 47,700,000</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Peningkatan Kepala Sumber Daya Aparatur</td>
<td>Meningkatnya Kepala Sumber Daya aparatur</td>
<td>27,18 100 10,000,000 100 10,000,000</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Peningkatan Pengembangan Sistem PelayananAdministrasi dan Akuntansi</td>
<td>Terdiednya Dokumen LAKIP Kota dan LAKIP Setda</td>
<td>55,17 100 165,088,500 100 165,088,500</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pengembangan PengelolaanSewa di Daerah</td>
<td>Pengembangan keuangan daerah yang lebih terlibat, akurat dan sistematis</td>
<td>70,11 100 4,764,402,500 100 4,764,402,500</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.21</td>
<td>SELUARAN DAN PERIKANAN</td>
<td></td>
<td>1,655,169,709 1,655,169,709</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan danPerikanan</td>
<td></td>
<td>1,655,169,709 1,655,169,709</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>85,12 100 690,605,478 100 690,605,478</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas-tugas kantor</td>
<td>90,13 100 315,795,467 100 315,795,467</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Dinasi Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas aparatur</td>
<td>99,09 100 31,600,000 100 31,600,000</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Peningkatan dan Penanganan PenyakitTertak</td>
<td>Menerapkan penanganan Penyakit Tertak/Neuwan</td>
<td>92,83 100 97,094,650 100 97,094,650</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Kebijakan BudidayaPerikanan</td>
<td></td>
<td>90,13 100 31,040,800 100 31,040,800</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Pengembangan Budidaya Perikanan</td>
<td></td>
<td>90,13 100 31,040,800 100 31,040,800</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Peningkatan Perawatan HasilProduktnHasilPeternakan</td>
<td>Menurunnya penularan penularan produk Hasil Peternakan</td>
<td>95,67 100 64,862,500 100 64,862,500</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Peningkatan Perawatan HasilProduktnPerkebunan</td>
<td></td>
<td>90,44 100 176,092,400 100 176,092,400</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan</td>
<td>100 45,475,200 100 45,475,200</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan</td>
<td>Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan</td>
<td>100 175,533,400 100 175,533,400</td>
<td>DPPKP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.22</td>
<td>PERKEBELANAN MASYARAKAT</td>
<td></td>
<td>1,972,519,803 1,972,519,803</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat danGampong</td>
<td></td>
<td>1,972,519,803 1,972,519,803</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>97,25 100 546,755,600 100 546,755,600</td>
<td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberadaan tugas-tugas kantor</td>
<td>90,10 100 67,481,700 100 67,481,700</td>
<td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Target (Rp)</td>
<td>Target (%)</td>
<td>Rp Target (%)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>11,200,000</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Program/Kegiatan**

1. **Kinerja Skopis Aparatur**
   - Meningkatnya kinerja keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

2. **Kinerja Keterampilan Masyarakat Pedesaan**
   - Meningkatnya keterampilan masyarakat desa
   - Target: 100
   - Capai: 100

3. **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

4. **Peningkatan Disiplin Aparatur**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

5. **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

6. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

7. **Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

8. **Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

9. **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
   - Meningkatnya keterampilan keterampilan aparatur
   - Target: 100
   - Capai: 100

**Indikator Kinerja Program**

- **Target (%)**
- **Rp Target (%)**

**SKPD Penanggung Jawab**

- **Disy Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**
- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- **Diskominfo & Statistik**
- **Dinas Pariwisata**

**Referensi**

- Target (Rp)
- Target (%) Rp Target (%)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program/outcome</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kode</td>
<td>Target (%)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.09</td>
<td>28,429,467,490</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>83,87</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penghindaran Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>96,44</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>89,13</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penekanan dan Pengembangan Syariat Islam</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>90,63</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Buku &amp; Bahan Bacaat Islam</td>
<td>Pembinaan Kajian Islam</td>
<td>96,17</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pembinaan dan Peningkatan Fazeqah</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>89,71</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>94,42</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>97,44</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>94,42</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pengembangan Destinasi Pariwisata</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>97,44</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitasi Pengembangan Keragaman Budaya</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>89,71</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah</td>
<td>100</td>
<td>1,320,865,700</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pembinaan dan Peningkatan Fazeqah</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Pembinaan dan Peningkatan Fazeqah</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh</td>
<td>Meningkatnya keberhasilan tujuan kantor</td>
<td>99,33</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*SKPD Penanggung Jawab: Dinas Syariat Islam, Sekretariat MPU, Dinas Pariwisata, Sekretariat MAA.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kode</th>
<th>Program/Kegiatan</th>
<th>Indikator Kinerja Program (outcome)</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)</th>
<th>Capaian Kinerja Program dan Kerangka</th>
<th>SKPD Penanggung Jawab</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pelayanan Administrasi Perkantoran</td>
<td>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</td>
<td>Rp 366,177,545</td>
<td>100</td>
<td>366,177,545</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor</td>
<td>Rp 32,569,650</td>
<td>100</td>
<td>32,569,650</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan Disiplin Aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 8,400,000</td>
<td>100</td>
<td>8,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 42,162,740</td>
<td>100</td>
<td>42,162,740</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 32,377,764</td>
<td>100</td>
<td>32,377,764</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 12,400,000</td>
<td>100</td>
<td>12,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Terlaksananya Peningkatan Hari-hari Besar Islam</td>
<td>Terlaksananya Peningkatan Hari-hari Besar Islam</td>
<td>Rp 18,862,825,000</td>
<td>100</td>
<td>18,862,825,000</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 139,008,100</td>
<td>100</td>
<td>139,008,100</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Meningkatnya kelancaran tugas aparatur</td>
<td>Rp 110,991,900</td>
<td>100</td>
<td>110,991,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rp 608,491,382,778</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH


Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja daerah secara riil. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
### Tabel 9.1
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012 2013* 2014* 2015 2016 2017</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laju Pertumbuhan Ekonomi</td>
<td>6.17</td>
<td>6.12</td>
<td>5.10*</td>
<td>5.15</td>
<td>5.17</td>
<td>5.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.2. Laju inflasi (%) y-o-y

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laju inflasi (%) y-o-y</td>
<td>0.06</td>
<td>6.39</td>
<td>7.83*</td>
<td>7.5</td>
<td>6.9</td>
<td>6.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3. PDRB ADHK per kapita (Juta Rp)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PDRB ADHK per kapita (Juta Rp)</td>
<td>47.22*</td>
<td>48.66*</td>
<td>49.07*</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
<td>52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.4. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan</td>
<td>8.65</td>
<td>8.03</td>
<td>-</td>
<td>7.9</td>
<td>7.6</td>
<td>7.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.5. Indeks Pembangunan Manusia

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Indeks Pembangunan Manusia</td>
<td>78.5</td>
<td>79</td>
<td>82.47*</td>
<td>83</td>
<td>83.5</td>
<td>84</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.6. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)</td>
<td>1.297</td>
<td>1.443</td>
<td>-</td>
<td>1.555</td>
<td>1.6</td>
<td>1.65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tingkat Pengangguran Terbuka</td>
<td>7.17</td>
<td>-</td>
<td>7.10</td>
<td>7.08</td>
<td>7.07</td>
<td>7.06</td>
</tr>
</tbody>
</table>


#### Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Angka melek huruf (%)</td>
<td>99.06</td>
<td>99.20</td>
<td>99.30</td>
<td>99.40</td>
<td>99.60</td>
<td>99.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.2. Angka rata-rata lama sekolah (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Angka rata-rata lama sekolah (%)</td>
<td>6.14</td>
<td>6.10</td>
<td>6.08</td>
<td>6.06</td>
<td>6.04</td>
<td>6.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3. Angka partisipasi kasar :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)</td>
<td>136.48</td>
<td>136.48</td>
<td>136.48</td>
<td>136.48</td>
<td>136.48</td>
<td>136.48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2</td>
<td>Angka Partisipasi KAsar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.3</td>
<td>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C(%)</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.</td>
<td>Angka pendidikan yang ditamatkan :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.1</td>
<td>Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.2</td>
<td>Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)</td>
<td>99,40</td>
<td>99,60</td>
<td>99,70</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.3</td>
<td>Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)</td>
<td>99.63</td>
<td>99.70</td>
<td>99.75</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.</td>
<td>Angka Partisipasi Murni :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.1</td>
<td>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)</td>
<td>114,99</td>
<td>114,99</td>
<td>114,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.2</td>
<td>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)</td>
<td>84,29</td>
<td>84,35</td>
<td>84,40</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.3</td>
<td>Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)</td>
<td>72,17</td>
<td>74,30</td>
<td>76,80</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kesehatan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.</td>
<td>Angka Kematian Bayi</td>
<td>4 /1000</td>
<td>3 /1000</td>
<td>3 /1000</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.</td>
<td>Rasio Status Gizi buruk Balita</td>
<td>0.02</td>
<td>0.011</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.</td>
<td>Rasio Jumlah Tenaga Medis per penduduk</td>
<td>01:03. 3</td>
<td>01:03. 2</td>
<td>01:03. 0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.</td>
<td>Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)</td>
<td>0.10%</td>
<td>0.10%</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5.</td>
<td>Rasio pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang sudah terkoneksi melalui internet.</td>
<td>0</td>
<td>14%</td>
<td>47%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

1. **Kebudayaan**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.</td>
<td>Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
<td>50</td>
<td>52</td>
<td>54</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.</td>
<td>Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. **Pemuda dan Olahraga**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.1.</td>
<td>Jumlah klub olahraga</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.</td>
<td>Jumlah gedung olahraga</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ASPEK PELAYANAN UMUM**

**Fokus Layanan Urusan Wajib**

1. **Pendidikan**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013*</th>
<th>2014*</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.</td>
<td>Pendidikan dasar dan Menengah :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1.</td>
<td>Angka partisipasi sekolah :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1.1</td>
<td>Angka partisipasi sekolah SD/MI(%)</td>
<td>136,48</td>
<td>136,48</td>
<td>136,48</td>
<td>136,48</td>
<td>136,48</td>
<td>136,48</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1.2</td>
<td>Angka partisipasi sekolah SMP/MTs(%)</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
<td>117,77</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1.3</td>
<td>Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA(%)</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
<td>107,65</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2.</td>
<td>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2.1</td>
<td>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI(%)</td>
<td>52.17</td>
<td>48.47</td>
<td>38.68</td>
<td>50.91</td>
<td>56.56</td>
<td>56.56</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2.2</td>
<td>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs(%)</td>
<td>40.83</td>
<td>38.71</td>
<td>34.35</td>
<td>36.13</td>
<td>40.14</td>
<td>40.14</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2.3</td>
<td>Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMA/SMK</td>
<td>35.11</td>
<td>33.93</td>
<td>32.34</td>
<td>32.74</td>
<td>36.37</td>
<td>36.37</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.3.1</td>
<td>Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SD/MI)</td>
<td>16</td>
<td>15</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.3.1</td>
<td>Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs)</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.3.2</td>
<td>Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.4</td>
<td>Jumlah SNP yang tercapai</td>
<td>25%</td>
<td>37,50%</td>
<td>37,50%</td>
<td>50,00%</td>
<td>50,00%</td>
<td>62,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.5</td>
<td>Peringkat Kelulusan Tk. Nasional</td>
<td>-</td>
<td>Pering kat 8</td>
<td>Pering kat 13</td>
<td>10 besar</td>
<td>10 besar</td>
<td>10 besar</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.7</td>
<td>Prestasi di ajang Pekan Olah raga Pelajar Daerah</td>
<td>Juara Umum</td>
<td>Tidak dilakukan</td>
<td>Peringkat 2</td>
<td>Tidak dilakukan</td>
<td>Juara Umum</td>
<td>Tidak dilakukan</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Rasio posyandu per satuan balita (%)</td>
<td>0.187</td>
<td>0.18</td>
<td>0.167</td>
<td>0.152</td>
<td>0.138</td>
<td>0.125</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>Rasio Puskesmas persatuan penduduk</td>
<td>1:21.7</td>
<td>1:22.6</td>
<td>1:22.2</td>
<td>1:22.2</td>
<td>1:22.2</td>
<td>1:22.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>Rasio tenaga medis per satuan penduduk</td>
<td>01:03.3</td>
<td>01:03.2</td>
<td>01:03.0</td>
<td>01:02.8</td>
<td>01:02.6</td>
<td>1.77778</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health</td>
<td>0 perintisan jaringan</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/akreditasi</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>Jumlah model gampong sehat</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per satuan balita (%)
2.2. Rasio Puskesmas persatuan penduduk
2.3. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
2.4. Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health
2.5. Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/akreditasi
2.6. Jumlah model gampong sehat
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Pekerjaan Umum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)</td>
<td>85.66</td>
<td>82.05</td>
<td>77.81</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)</td>
<td>31.15</td>
<td>31.18</td>
<td>31.18</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)</td>
<td>1.90</td>
<td>1.78</td>
<td>1.74</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4</td>
<td>Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)</td>
<td>0.006</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td>Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)</td>
<td>1.91</td>
<td>0.05</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>3.6</td>
<td>Lingkungan Pemukiman (%)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.7</td>
<td>Persentase penduduk berakses air minum (%)</td>
<td>79.90</td>
<td>83.37</td>
<td>83.39</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8</td>
<td>Ketaatan terhadap RTRW (%)</td>
<td>53.57</td>
<td>54.76</td>
<td>55.84</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Perumahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.1</td>
<td>Rumah tangga pengguna air bersih (%)</td>
<td>-</td>
<td>54.29</td>
<td>63.29</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi</td>
<td>90.39</td>
<td>84.59</td>
<td>84.69</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3</td>
<td>Rumah layak huni (%)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>84.89</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Penataan Ruang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.</td>
<td>Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)</td>
<td>66</td>
<td>70,75</td>
<td>72,03</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Perencanaan Pembangunan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.4</td>
<td>Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD(%)</td>
<td>75</td>
<td>78</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Perhubungan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.1.</td>
<td>Jumlah arus penumpang angkutan umum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.</td>
<td>Rasio ijin trayek (%)</td>
<td>0.14</td>
<td>0.13</td>
<td>0.12</td>
</tr>
<tr>
<td>7.3.</td>
<td>Jumlah uji kir Mobil penumpang umum (%)</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.</td>
<td>Jumlah uji kir Mobil Bus (%)</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>7.5.</td>
<td>Jumlah uji kir Mobil Barang (%)</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>7.6.</td>
<td>Jumlah Pelabuhan Laut</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7.7.</td>
<td>Jumlah Terminal Bis</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7.8.</td>
<td>Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>7.9</td>
<td>wilayah yang memiliki alur pelayaran (%)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.10</td>
<td>Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.11</td>
<td>Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.12</td>
<td>Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota (%)</td>
<td>91</td>
<td>92</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>7.13</td>
<td>Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.14</td>
<td>Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal (%)</td>
<td>78</td>
<td>80</td>
<td>85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Data untuk tahun 2014 dan 2015.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>80</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.14.</td>
<td>Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.15.</td>
<td>Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.16.</td>
<td>Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.17.</td>
<td>Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>7.18.</td>
<td>Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
</tr>
<tr>
<td>7.19.</td>
<td>Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.20.</td>
<td>Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7.21.</td>
<td>Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota (%)</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Lingkungan Hidup</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.1.</td>
<td>Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)</td>
<td>82</td>
<td>84</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>8.2.</td>
<td>Pencemaran status mutu air (%)</td>
<td>0</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8.3.</td>
<td>Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)</td>
<td>3</td>
<td>18</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>8.4.</td>
<td>Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk</td>
<td>46.88</td>
<td>46.89</td>
<td>46.90</td>
</tr>
<tr>
<td>8.6.</td>
<td>Penegakan hukum lingkungan (%)</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8.7.</td>
<td>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran (%)</td>
<td>20</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8.8.</td>
<td>Penentuan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah (%)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8.9.</td>
<td>Pencegahan Pencemaran udara sumber tidak bergerak (%)</td>
<td>50</td>
<td>8.33</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8.10.</td>
<td>Pencegahan Tingkat Kebisingan (%)</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>8.11.</td>
<td>Meraih Adipura</td>
<td>Berhasil</td>
<td>Berhasil</td>
<td>Berhasil</td>
</tr>
<tr>
<td>8.12.</td>
<td>Persentase Tempat Pemakaman Umum yang terpelihara</td>
<td>6.67</td>
<td>8.00</td>
<td>11.33</td>
</tr>
<tr>
<td>8.13.</td>
<td>Persentase penerangan jalan umum</td>
<td>60.43</td>
<td>61.74</td>
<td>63.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Pertanahan**

| 9.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 35,789,541 | 36,284,880 | 38,099,124 | 40,004,080 | 42,004,284 | 44,104,498 | 46,309,723 |
| 9.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 |
| 9.3. | Persentase penyelesaian tapal batas (pilar) | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |

**Kependudukan dan Catatan Sipil**

| 10.1. | Rasio Cakupan Kepemilikan KTP (%) | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100 | 100 | 100 |

IX-11
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>10.2.</td>
<td>Rasio Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)</td>
<td>80.00</td>
<td>82.00</td>
<td>84.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.1.</td>
<td>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)</td>
<td>4064</td>
<td>4029</td>
<td>3936</td>
</tr>
<tr>
<td>11.2.</td>
<td>Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)</td>
<td>29</td>
<td>29.86</td>
<td>29.86</td>
</tr>
<tr>
<td>11.3.</td>
<td>Rasio KDRT (%)</td>
<td>9</td>
<td>9.15</td>
<td>12.14</td>
</tr>
<tr>
<td>11.4.</td>
<td>Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)</td>
<td>0.48</td>
<td>0.45</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>11.5.</td>
<td>Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)</td>
<td>11.63</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>11.6.</td>
<td>Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak (%)</td>
<td>29.03</td>
<td>19.35</td>
<td>48.39</td>
</tr>
<tr>
<td>11.7.</td>
<td>Persentase penanganan kasus KDRT (%)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.8.</td>
<td>rata-rata jumlah jiwa per keluarga (%)</td>
<td>3.91</td>
<td>3.81</td>
<td>3.83</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.1.</td>
<td>Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak/kel)</td>
<td>3.1</td>
<td>3.1</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>12.2.</td>
<td>Rasio akseptor KB (%)</td>
<td>65.57</td>
<td>67.74</td>
<td>68.37</td>
</tr>
<tr>
<td>12.3.</td>
<td>Cakupan peserta KB aktif (%)</td>
<td>70.41</td>
<td>70.41</td>
<td>72.31</td>
</tr>
<tr>
<td>12.4.</td>
<td>Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)</td>
<td>16.65</td>
<td>12.3</td>
<td>16.34</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Sosial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.1.</td>
<td>PMKS yg memperoleh bantuan social (%)</td>
<td>0.83</td>
<td>1.33</td>
<td>1.91</td>
</tr>
<tr>
<td>13.2.</td>
<td>Penanganan penyandang masalah</td>
<td>24</td>
<td>27</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.3</td>
<td>Meningkatnya gampong siaga bencana</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13.4</td>
<td>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</td>
<td>12,22</td>
<td>24,45</td>
<td>48,89</td>
</tr>
<tr>
<td>20.6</td>
<td>Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</td>
<td>89.47</td>
<td>93.02</td>
<td>78.65</td>
</tr>
<tr>
<td>20.7</td>
<td>Persentase Ketersediaan Infrastruktur Mitigasi Bencana</td>
<td>0</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**14. Ketenagakerjaan**

|    |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14.1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)                      | 90     | 95     | 95     | 95    | 95    | 95    | 95     |        |        |        |        |        |
| 14.2 | Pencari kerja yang ditempatkan (%)                         | 22     | 25     | 30     | 35    | 40    | 40    | 40     |        |        |        |        |        |
| 14.3 | Keselamatan dan perlindungan (kasus)                        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      |        |        |        |        |        |
| 14.4 | Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha (%) | 100    | 100    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    |        |        |        |        |        |
| 14.5 | Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) (%) | 82     | 83     | 86     | 88    | 89    | 90    | 90     |        |        |        |        |        |

**15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

|    |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15.1 | Persentase koperasi aktif (%)                              | 56.27  | 56.39  | 54.52  | 57.46 | 61.12 | 61.12 | 61.12  |        |        |        |        |        |
| 15.2 | Jumlah BPR/LKM                                             | 27     | 30     | 33     | 36    | 39    | 42    | 42     |        |        |        |        |        |
| 15.3 | Usaha Mikro dan Kecil                                      | 5801   | 250    | 300    | 400   | 450   | 500   | 500    |        |        |        |        |        |
| 15.4 | Jumlah KSP/USP                                             | 430    | 435    | 456    | 460   | 462   | 462   | 462    |        |        |        |        |        |
| 15.5 | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM                      | 70     | 70     | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    |        |        |        |        |        |

**16. Penanaman Modal**
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
</tr>
<tr>
<td>16.1.</td>
<td>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>16.4.</td>
<td>Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif (%)</td>
<td>51</td>
<td>57</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>16.5.</td>
<td>Rasio daya serap tenaga kerja</td>
<td>-</td>
<td>4:01</td>
<td>29:01:00</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Kebudayaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17.1.</td>
<td>Penyelenggaraan festival seni dan budaya</td>
<td>10</td>
<td>26</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>17.2.</td>
<td>Sarana penyelenggaraan seni dan budaya</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>17.3.</td>
<td>Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (situs)</td>
<td>56</td>
<td>56</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Kepemudaan dan Olahraga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18.1.</td>
<td>Jumlah organisasi pemuda</td>
<td>81</td>
<td>13</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>18.2.</td>
<td>Jumlah kegiatan kepemudaan</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>18.3.</td>
<td>Jumlah kegiatan olahraga</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>18.4.</td>
<td>Lapangan olahraga</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>18.5.</td>
<td>Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan kota</td>
<td>30%</td>
<td>35%</td>
<td>48%</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Umum/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>18.6.</td>
<td>Pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19.1.</td>
<td>LSM, Ormas dan OKP terdaftar</td>
<td>95</td>
<td>174</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>19.2.</td>
<td>Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial</td>
<td>220</td>
<td>440</td>
<td>660</td>
</tr>
<tr>
<td>19.3.</td>
<td>Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan narkoba</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>19.4.</td>
<td>Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</td>
<td>1300</td>
<td>1320</td>
<td>1360</td>
</tr>
<tr>
<td>19.5.</td>
<td>Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong</td>
<td>220</td>
<td>220</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20.1.</td>
<td>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</td>
<td>6.06</td>
<td>6.06</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>20.2.</td>
<td>Penegakan PERDA (%)</td>
<td>71.77</td>
<td>75</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>20.3.</td>
<td>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kota</td>
<td>953</td>
<td>1,057</td>
<td>1,212</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>20.4.</td>
<td>Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)</td>
<td>68.07</td>
<td>59.03</td>
<td>57.55</td>
</tr>
<tr>
<td>20.5.</td>
<td>Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</td>
<td>23</td>
<td>30</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Ketahanan Pangan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21.1</td>
<td>Ketersediaan pangan utama (kg)</td>
<td>158.41</td>
<td>274,50</td>
<td>392,04</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Statistik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23.1</td>
<td>Buku &quot;BANDA ACEH DALAM ANGKA&quot;</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
</tr>
<tr>
<td>23.2</td>
<td>Buku &quot;PDRB KOTA&quot;</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kearsipan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24.1</td>
<td>Pengelolaan arsip secara baku</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>24.2</td>
<td>Peningkatan SDM pengelola kearsipan</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Komunikasi dan Informatika</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25.1</td>
<td>Web site milik pemerintah daerah</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
<td>ada</td>
</tr>
<tr>
<td>25.2</td>
<td>Pameran/expo</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>25.3</td>
<td>Pelaksanaan disemniasi dan pendistribusi informasi nasional :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25.3.1</td>
<td>Media massa</td>
<td>39 kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
</tr>
<tr>
<td>25.3.2</td>
<td>Media online (Website)</td>
<td>80 hari/th</td>
<td>setiap hari</td>
<td>setiap hari</td>
</tr>
<tr>
<td>25.3.3</td>
<td>Media tradisional pertunjukan rakyat</td>
<td>1 kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
</tr>
<tr>
<td>25.3.4</td>
<td>Media interpersonal</td>
<td>2 kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
</tr>
<tr>
<td>25.3.5</td>
<td>Media luar ruang</td>
<td>12 kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
<td>12kali/th</td>
</tr>
<tr>
<td>25.4</td>
<td>Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat kecamatan (%)</td>
<td>33</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>25.5.</td>
<td>Layanan koneksi jaringan Internet dan Intranet di lingkungan Pemerintah Kota</td>
<td>365</td>
<td>365</td>
<td>365</td>
</tr>
<tr>
<td>25.6.</td>
<td>Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan TIK</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Perpustakaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26.1.</td>
<td>Jumlah perpustakaan</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>26.4.</td>
<td>Mengotimalkan Fungsi Perpustakaan Gamong dan Daerah</td>
<td>37</td>
<td>40</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. **Pertanian**

1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5

1.2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) | 2,02 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,87 | 1,85 | 1,85

1.3. Cakupan bina kelompok petani/ternak | 15 | 34 | 62 | 68 | 72 | 97 | 97

2. **Pariwisata**

2.1. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (org) | 476.23 | 631.70 | 837.72 | 879.61 | 923.59 | 969.77 | 969.776

3. **Kelautan dan Perikanan**
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Produksi perikanan (%)</td>
<td>68</td>
<td>71</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Cakupan bina kelompok perikanan</td>
<td>17%</td>
<td>25</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td><strong>Perdagangan</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.1</td>
<td>Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)</td>
<td>22.73</td>
<td>23.41</td>
<td>24.35</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal (%)</td>
<td>91.67</td>
<td>91.67</td>
<td>84.62</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3</td>
<td>Jumlah Pasar yang dibangun</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td><strong>Perindustrian</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.1</td>
<td>Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)</td>
<td>1.95</td>
<td>2.01</td>
<td>2.09</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3</td>
<td>Pertumbuhan Industri (%)</td>
<td>2.2</td>
<td>9.3</td>
<td>6.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5.4</td>
<td>Cakupan bina kelompok pengrajin (%)</td>
<td>1.1</td>
<td>1.28</td>
<td>1.54</td>
</tr>
<tr>
<td>5.5</td>
<td>Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5.6</td>
<td>Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi</td>
<td>120</td>
<td>125</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>5.7</td>
<td>Jumlah produk yang menunjang program one village one product</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Syariat Islam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.1.</td>
<td>Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan (Kelompok)</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.</td>
<td>Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam</td>
<td>386</td>
<td>393</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.</td>
<td>Kemampuan baca Al-Quran siswa tingkat sekolah menengah (%)</td>
<td>31,20</td>
<td>69,92</td>
<td>82,99</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4.</td>
<td>Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.</td>
<td>Kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah (%)</td>
<td>10,00</td>
<td>62,99</td>
<td>75,99</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.</td>
<td>Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat</td>
<td>-</td>
<td>270</td>
<td>386</td>
</tr>
<tr>
<td>6.7.</td>
<td>Jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban</td>
<td>45</td>
<td>54</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>6.8.</td>
<td>Penerimaan ZIS (M)</td>
<td>8,8</td>
<td>14,5</td>
<td>14,6</td>
</tr>
<tr>
<td>6.9.</td>
<td>Jumlah Muzzakki (org)</td>
<td>8.166</td>
<td>8705</td>
<td>8851</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ASPEK DAYA SAING DAERAH**

**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.</th>
<th>Perhubungan</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.</td>
<td>Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)</td>
<td>4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.</td>
<td>Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1</td>
<td>Orang (%)</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2</td>
<td>Barang (ton) (%)</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.</td>
<td>Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.1</td>
<td>Orang (%)</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2</td>
<td>Barang (%)</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.1 Jenis, kelas, dan jumlah restoran

| 2.1.1 | Restoran (%) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2.1.2 | Rumah Makan (%) | 38 | 37 | 29 | 29 | 31 | 31 |
| 2.1.3 | Cafe (%) | 57 | 51 | 65 | 65 | 64 | 63 |

2.2 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

| 2.2.1 | Bintang 4 (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.2 | Bintang 3 (%) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2.3 | Bintang 2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Bintang 1 (%) | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 2.2.5 | Melati 3 (%) | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 2.2.6 | Melati 2 (%) | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 2.2.7 | Melati 1 (%) | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| 2.2.8 | Penginapan (%) | 36 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 |

Fokus Iklim Berinvestasi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Lama proses perijinan (hari kerja) | 1 s/d 14 | 1 s/d 10 | 1 s/d 10 | 1 s/d 10 | 1 s/d 10 | 1 s/d 10 |

1.2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

| 1.2.1 | Pajak | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2.2 | Retribusi | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

1.3 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</th>
<th>Target Capaian Setiap Tahun</th>
<th>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>Jumlah pelayanan perizinan</td>
<td>52</td>
<td>52</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>Jumlah jenis pelayanan yang diimplementasikan dalam SPIPSE</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>Persentase gampong yang memiliki pendapatan asli gampong</td>
<td>71.2</td>
<td>79.1</td>
<td>83.6</td>
</tr>
<tr>
<td>1.7</td>
<td>Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan(The right man on the right place)</td>
<td>60%</td>
<td>60</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>1.8</td>
<td>Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Diklat Penjenjangan</td>
<td>32%</td>
<td>38</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>1.9</td>
<td>Jumlah APIP yang bersertifikasi (org)</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10</td>
<td>Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal</td>
<td>2106</td>
<td>1268</td>
<td>948</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11</td>
<td>Jumlah PNS yang Indisipliner (org)</td>
<td>57</td>
<td>59</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12</td>
<td>Jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government (aplikasi)</td>
<td>23</td>
<td>29</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>1.13</td>
<td>Perolehan Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah</td>
<td>WTP</td>
<td>WTP</td>
<td>WTP</td>
</tr>
<tr>
<td>1.14</td>
<td>Persentase target PAD Kota</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Awal RPJM</td>
<td>Target Capaian Setiap Tahun</td>
<td>Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2012</td>
<td>2013*</td>
<td>2014*</td>
</tr>
<tr>
<td>1.15.</td>
<td>Pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) (berita)</td>
<td>7200</td>
<td>8640</td>
<td>10800</td>
</tr>
<tr>
<td>1.16.</td>
<td>Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>1.17.</td>
<td>Prestasi gampong ditingkat Propinsi (%)</td>
<td>21,11</td>
<td>18,27</td>
<td>16,25</td>
</tr>
<tr>
<td>1.18.</td>
<td>Jumlah regulasi yang ditetapkan</td>
<td>19</td>
<td>26</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19.</td>
<td>Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun (%)</td>
<td>12,9</td>
<td>21,43</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20.</td>
<td>Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)</td>
<td>68,07</td>
<td>59,03</td>
<td>57,55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Angka Capaian
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


Pada dasarnya, RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini menjabarkan rencana strategis yang berkaitan erat dengan penetapan arah perkembangan kota lima tahun mendatang sebagai landasan untuk menentukan apa yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan tercapai sesuai dengan visi dan misi walikota terpilih.

10.1 Pedoman Transisi

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program walikota merupakan acuan bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kota Banda Aceh setiap tahunnya yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Banda Aceh;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kota, Walikota Banda Aceh dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh;
3. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Banda Aceh serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban dan diharapkan berperan serta dalam melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017 dengan sebaik-baiknya;
6. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta
pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta di sahkan oleh walikota;
7. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
9. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
   • Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Bappeda, yang diikuti secara bersamaan dengan penyusunan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD;
   • Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Gampong (desa), Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan;
   • Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Kota dengan mengacu kepada hasil forum SKPD;
   • Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPK Banda Aceh merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK), utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
   • Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) harus berpedoman kepada Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja;
10. Untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh;

11. Penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2012-2017 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggung jawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi;

PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang RPJMD sebagai perwujudan visi dan misi walikota sangat ditentukan oleh adanya dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, komitmen dan dukungan DPRK Banda Aceh, kemitraan dengan pihak swasta, serta terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi, serta dukungan seluruh masyarakat.